C 486,830

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARIES

This volume is bound without nos. 32, 34, 41,

43-44, 47-50

which is / are unavailable.

No. 31 11 September

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

PARTISIPASI RAKYAT DALAM POLITIK

UNIV. OF MICH.
JAN 10 1990
Current Serials

- Profesionalisme Politik dan Peningkatan Peranan DPR

Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Tanpa penjiwaan akan seni mungkinkah ia membuat suatu adi karya?

Bahwa kecepatan dan ketepatan merupakan unsur pokok dalam suatu keahlian, rasanya tak dapat dipungkiri. Namun bagi kami, itu saja tidak cukup. Masih dibutuhkan lagi penghayatan yang dalam atau penjiwaan atas profesi, sebagaimana seorang seniman terhadap karya seninya. Dan itu adalah filosofi usaha kami.

Oleh sebab itu perkembangan usaha kami tidak sepesat yang lain, namun senantiasa merambat keatas dan pasti. Lagi pula kualitasnya senantiasa setara dengan standar tertinggi yang diinginkan konsumen.

Memang, kepuasan kami adalah menciptakan segalanya yang tergolong sebagai adikarya.

Bakrie & Brothers

Berkarya nyata dalam pembangunan.

04/94 02-013-01 JIC 74

INDEKS

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Assegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly.
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur.
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO . 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi.

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

MEMO REDAKSI

Demokrasi dan Partisipasi.

FOKUS

Wawancara dengan Kepala BP7 Sarwo Edhie Wibowo

LAPORAN UTAMA

Partisipasi Rakyat dalam Politik.
Partisipasi tak hanya sekali dalam 5 tahun
Wawancara dengan Martono, R. Sukardi, Fachry Ali, T. Mulya Lubis, Slamet Effendy Yusuf, Asep Djadja Saefullah MA.

LAPORAN KHUSUS

Masalah pariwisata bersama Yoop Ave dan sejumlah tokoh dan pelaku sektor non migas penghasil devisa tersebut.

NASIONAL

Soal devaluasi dan sejumlah peristiwa nasional lainnya.

ORGANISASI

Kunjungan Ketua Umum ke Indonesia Timur, soal pencalonan dan masalah organisasi lainnya.

SPEKTRUM

Tulisan dari tiga tokoh : Prof Bintoro Tjokroamidjojo, Nurcholis Madjid, Sutjipto Wirosardjono.

KISAH SELINGAN

Dian dan Tomtam

SENI BUDAYA

Tentang mummi.

— Disain cover FINIKA/HY Sudarsono —
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

Ir. Akbar Tanjung

Demokrasi Dan Partisipasi

Pada hakekatnya, demokrasi adalah suatu gagasan ketatanegaraan dimana berlaku prinsip-prinsip tentang kedaulatan rakyat. Prinsip utama dalam gagasan demokrasi itu menyebutkan bahwa wewenang tertinggi dari segala wewenang yang ada dipegang oleh rakyat.

Gagasan tentang negara demokrasi ini begitu besar pengaruhnya. Hampir tidak ada suatu negara, yang tidak menyebut dirinya demokratis. Sekalipun yang menyebut dirinya demokratis itu sadar bahwa untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi itu tidaklah mudah di negaranya masing-masing.

Di negara kita, kedudukan gagasan negara demokrasi ini mempunyai posisi yang sangat penting dan esensial. Ia masuk ke dalam Penjelasan, Batang Tubuh dan Penjelasan konstitusi kita UUD 1945. Dan gagasan demokrasi ini masuk, kedalam sila keempat dasar negara Indonesia, Pancasila, dimana tersurat bahwa ujud dan penerapan gagasan demokrasi itu haruslah dilakukan dengan semangat mufakat, melalui lembaga musyawarah dan perwakilan rakyat.

Adanya dialog-dialog yang kritis di tengah masyarakat kita selama ini, yang menyangkut berbagai hal tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan pencerminan dari perwujudan dan penerapan prinsip-prinsip dari gagasan demokrasi yang telah tersurat di dalam konstitusi kita dan dasar negara kita, UUD 1945 dan Pancasila.

Bahkan lebih dari itu. Adanya dialog-dialog di tengah masyarakat tentang Pancasila sebagai satu-satunya azas, tentang sistem Pemilu, tentang lembaga tinggi negara lainnya seperti lembaga kepresidenan dan kedudukan DPR, merupakan petunjuk kuat dan bukti, bahwa proses demokrasi itu sudah ada dan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Tumbuhnya sikap untuk turut merasa bertanggung jawab, berfikir, bertindak dalam rangka kontribusi warga negara didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebenarnya tak lain daripada suatu refleksi telah terwujudnya cita-cita dan prinsip-prinsip demokrasi. Mengapa? Karena pada hakekatnya ajaran demokrasi adalah menciptakan iklim yang sehat bagi dimungkinkannya keikutsertaan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa.

Keikutsertaan warga negara untuk melakukan tugas-tugas pembangunan lewat bidang tugas dan profesinya masing-masing, melakukan pengawasan melalui lembaga kemasyarakatan yang ada lembaga perwakilan rakyat, hak menikmati serta kewajiban untuk melakukan pemerataan hasil-hasil pembangunan – seringkali dikatakan sebagai substansi dari partisipasi.

Dan dilihat dari kacamata pembangunan politik yang demokratis, maka partisipasi tak lain daripada wujud nyata hasil dari pembangunan itu sendiri.

Dengan uraian singkat tentang substansi demokrasi dan partisipasi, dimana faktor warganegara merupakan subjek dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tampak pula bahwa antara kedua konsep tersebut saling mempunyai keterkaitan. Antara pelaksanaan gagasan demokrasi dengan tumbuhnya partisipasi, tampak dengan jelas merupakan suatu rangkaian yang logis dan sulit dipisahkan.

Wujud dan penerapan gagasan demokrasi, yang kemudian menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara dalam kenyataan sehari-hari memang kita jumpai. Bahkan sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita.

Oleh karena itu, tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa demokrasi dan partisipasi sudah merupakan dua hal yang sudah menyatu dalam diri kita masing-masing melalui sikap dan tindak sehari-hari.

Terciptanya suasana dan iklim yang demokratis dan partisipatif tak lain dari pada hasil perwujudan cita-cita Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Dan iklim yang demokratis dan partisipatif ini, sebenarnya merupakan modal besar kita untuk menuju tahap tinggal landas guna mewujudkan masyarakat adil makmur.

Tumbuh dan berkembangnya iklim yang demikian, tak lain dari hasil pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Orde Baru yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini.

Oleh karena itu, bagi segenap pejuang dan pendukung utama cita-cita Orde Baru, terutama bagi Golkar, berkewajiban pula untuk tetap setia dan mendukung sepenuh hati untuk mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita Orde Baru.

Bagi Golkar, sebagai suatu kekuatan dan pendukung utama Orde Baru yang telah mempercayakannya melalui kepemimpinan nasional dibawah Presiden Soeharto, tidak ada pilihan lain kecuali daripada keharusan untuk tetap mempertahankannya dalam bentuk kemenangan Golkar pada Pemilu 1987 mendatang.

Wawancara Dengan Kepala BP-7 Pusat Sarwo Edhie Wibowo:

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Bertujuan Menjaga Dan Meningkatkan Kewaspadaan

Tanggal 1 Oktober mempunyai arti tersendiri dalam sejarah kehidupan Orde Baru. Kini, setiap tahunnya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di tingkat pusat Kesaktian Pancasila diperingati dengan upacara secara nasional di Lubang Buaya, suatu tempat yang mengingatkan kita kembali kepada tragedi tahun 1965 di mana sejumlah prajurit TNI putra-putra terbaik tanah air dibunuh secara keji oleh G30S/ PKI. Monumen Pancasila Sakti telah didirikan oleh Pemerintah Orde Baru di tempat ini.

Sudah semenjak 2 periode berturut-turut, yakni pada tahun 1977 dan tahun 1982 pelantikan dan pengambilan sumpah para anggota DPR dan MPR pun dilakukan pada tanggal 1 Oktober. Dan rupanya hal ini akan tetap ditradisikan di masa mendatang. Mengapa pengambilan sumpah putra-putra terbaik tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tentunya dikandung motivasi dan makna tersendiri pula.

Menyongsong peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tahun ini, Media Karya melakukan wawancara khusus dengan Sarwo Edhie Wibowo, yang selain Ketua BP-7 juga merupakan seorang tokoh pelaku sejarah dalam perjuangan penumpasan pemberontakan G30S/ PKI di tahun 1965. Tulisan berikut ini merupakan pendapat dan pandangan-pandangannya sekitar Pancasila, baik mengenai ideologi nasional di masa-masa mendatang, yang diturunkan dari hasil wawancara tersebut.

"Perlu Tetap Waspada"

Disebutnya dengan istilah sakti mengandung arti bahwa Pancasila telah terbukti untuk kesekian kalinya mampu menggagalkan usaha-usaha merubah dasar negara RI dengan dasar atau falsafah lain. Masih terlintas dalam ingatan kita akan kejadian pada tanggal 1 Oktober 1965. Kala itu PKI berusaha mengadakan perebutan kekuasaan negara yang diawalinya dengan melakukan pembunuhan terhadap para jenderal pucuk pimpinan Angkatan Darat. Pembunuhan ini juga dimaksud untuk menyelubungi keterlibatan mereka dalam perebutan kekuasaan dan memberikan kesan seolah-olah peristiwa itu adalah masalah intern Angkatan Darat. Namun bukti-bukti menunjukkan bahwa PKI jelas-jelas ada di belakang usaha kudeta tersebut. Hasil-hasil interogasi terhadap para tahanan maupun hasil persidangan mahmillub memperkuat pembuktian keterlibatan PKI itu.

Setiap kali Hari Kesaktian Pancasila diperingati kita akan teringat kekejaman komunis di negeri ini, tidak hanya dalam peristiwa di tahun 1965 saja, tetapi juga kekejaman dan usaha mereka merebut kekuasaan di tahun 1948 dengan tujuan mengganti dasar serta falsafah negara dan mengkomuniskan rakyat Indonesia. Walaupun selalu gagal, namun kita sadari bahwa usaha kaum komunis serupa itu tidak akan berhenti karenanya. Mereka akan terus mencoba dan berusaha merebut kekuasaan. Untuk itu kita tetap perlu waspada. Kewaspadaan tidak hanya ditujukan kepada bahaya komunis saja, tetapi juga terhadap bahaya lain yang merupakan rongrongan terhadap Pancasila serta berusaha meruntuhkan negara kita dari dalam. Bahaya itu dapat berwujud faham-faham atau ideologi-ideologi tertentu, yang juga berupa tindakan-tindakan dan usaha-usaha lainnya. Kita lihat misalnya di masa lalu rongrongan berupa pemberontakan DI/TII, Kartosuwiryo dengan Negara Islam Indonesia-nya; juga pemberontakan yang bersifat kedaerahan seperti PRRI dan Permesta, RMS dan lain sebagainya.

Syukurlah bahwa gerakan-gerakan rongrongan itu setiap kali dapat dihancurkan. Ini kan namanya sakti. Mudah-mudahan kejadian pada 1 Oktober 1965 merupakan peristiwa terakhir kalinya. Dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila terutama dimaksudkan agar kita tetap menjaga serta meningkatkan kewaspadaan kita untuk menghadapi segala bahaya rongrongan terhadap Pancasila tadi. Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober hendaknya tetap menjadi peringatan bagi kita serta anak cucu kita.

"Kita Yakini Kebenarannya"

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya sudah terjadi sejak 18 Agustus 1945, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Pancasila itu merupakan perjanjian luhur bangsa, merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa dalam bertekad memproklamasikan negara dan kemerdekaan Indonesia serta mempertahankan negara yang berdasar Pancasila.

Sekarang, dalam perjalanan bangsa kita ini kita terus menerus menghayati dan mengamalkan Pancasila. Di dalam pengamalan itu hendaknya kita tetap dinamis kreatif. Dinamis agar kepentingan bangsa yang semakin maju dapat tetap tertampung; dinamis dengan mempraktekkan demokrasi Pancasila. Dinamis dan kreatif tidak berarti mau menampung segala ideologi yang ada di dunia; tidak berarti menampung segala falsafah atau pandangan hidup bangsa-bangsa lain. Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai ciri-cirinya tersendiri yang membedakannya dari ideologi-ideologi lain. Ciri-ciri itulah yang paling cocok untuk bangsa kita karena memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Ciri-ciri ini kita yakini kebenarannya. Bila ada pihak yang mau merubahnya pasti akan dihadapkan dengan kekuatan Pancasila.

Kita jangan mengartikan demokrasi Pancasila sebagai demokrasi ala Barat atau liberalisme. Ini perlu disadari oleh generasi muda yang dalam melakukan kewajiban belajarnya sering memperoleh pengetahuan dan literatur yang bersumber dari Barat. Sejarah juga telah membuktikan bahwa demokrasi ala Barat atau liberal tidak cocok dilaksanakan di negeri kita. Dari sejarah kita melihat jatuh bangunnya kabinet di jaman demokrasi liberal kala itu; kabinet kadangkala hanya berumur beberapa bulan saja sehingga tidak memungkinkannya untuk melaksanakan pembangunan; partai-partai politik ribut cakar-cakaran berebut kedudukan sendiri. Demokrasi ala Barat dan pandangan hidup liberalisme seperti itu terbukti tidak klop untuk dipraktekkan di Indonesia. Oleh sebab itu demokrasi Barat kita tolak.

Pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bangsa selama ini membuat kita semakin yakin akan kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa serta ideologi negara. Ideologi Pancasila perlu terus menerus dimantapkan.

Dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, Pancasila tidak bercirikan ekspansionistik. Negara kita tidak berkehendak menjajah dunia. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 sudah jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu segala macam bentuk penjajahan harus dilenyapkan dari muka bumi. Jadi, kita tidak mungkin menjajah bangsa lain, dan bila ada negara lain yang ekspansionistik serta imperialistik pasti akan kita tentang.

Tetapi kita tidak akan melarang apabila ada bangsa lain menilai bahwa pandangan dan falsafah hidup Pancasila itu cocok buat mereka laksanakan. Itu terserah kepada mereka. Yang jelas, kita tidak berpretensi untuk mem-Pancasilakan dunia. Kita mem-Pancasilakan bangsa kita sendiri!

"Satu Azas Sudah Sewajarnya"

Bangsa kita pada hakikatnya sudah mempunyai dasar negara Pancasila sejak Republik Indonesia diproklamirkan. Undang-undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila yang merupakan perjanjian luhur bangsa harus dilaksanakan. Dalam hubungan ini sudah sewajarnyalah bila Pancasila juga menjadi azas dalam pelaksanaan kehidupan bangsa, termasuk dalam kehidupan politik dan kepartaian. Hal ini berarti bahwa merupakan hal yang wajar dan normal bila partai politik serta organisasi kemasyarakatan mendasarkan diri pada Pancasila sebagai satunya azas. Dan sebaliknya adalah tidak wajar manakala partai-partai politik di Indonesia mendasarkan diri pada ideologinya sendiri-sendiri di luar Pancasila seperti yang terjadi di masa Orde Lama tempo hari. Waktu itu ada ideologi komunisme, ada ideologi berdasarkan agama, dan lain-lain, sehingga kita disibukkan dengan ribut berselisihfaham soal ideologi.

Jikalau kita kini tidak ramai lagi soal ideologi karena ideologinya sudah sama, pandangan hidupnya juga sama yakni Pancasila, hendaknya partai-partai politik mengajukan konsep mengenai bagaimana mengisi kemerdekaan. Ini yang disebut berkompetisi secara sehat guna mengisi kemerdekaan. Siapa yang mempunyai program terbaik dengan sendirinya akan lebih mendapat tempat di hati rakyat. Program-program partai adalah untuk mengisi kemerdekaan. Sebab, manfaat merdeka adalah untuk dapat bekerja mengisi kemerdekaan sehingga cita-cita kemerdekaan dapat tercapai. Mengisi kemerdekaan berarti melaksanakan pembangunan yang berdasar Pancasila, pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

"Perbedaan Pendapat Diakui"

Akibat pengaruh dari pengetahuan dan literatur dari luar seperti disebutkan tadi, sering terjadi adanya sementara orang melancarkan kritik yang mendasarkan diri kepada pemikiran di luar Pancasila. Kebenaran-kebenaran yang mereka pegang pun merupakan kebenaran yang tidak berlandaskan Pancasila. Mereka menghendaki berlakunya sistem politik yang tidak sesuai dengan keadaan di sini.

Dalam alam demokrasi Pancasila tetap diakui adanya perbedaan pendapat. Namun dalam menyelesaikan perbedaan pendapat selalu digunakan cara musyawarah untuk mufakat, tidak secara konfrontatif. Anggapan seseorang bahwa dirinya atau partainya sendiri yang paling benar dan pihak atau partai lain adalah salah dan dengan demikian lantas berusaha mau meang sendiri, adalah tidak cocok bagi bangsa kita. Cara-cara semacam ini akan mengakibatkan konfrontasi terus menerus dan tidak menyelesaikan masalah. Bangsa kita menganut kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Konfrontasi seperti yang terdapat pada sistem politik di 'sana', yaitu yang terjadi antara mereka yang duduk dalam kekuasaan dan mereka yang duduk sebagai pihak oposisi, adalah tidak cocok bagi kita. Ini tidak sesuai dengan alam kita yang menghendaki prinsip integralistik, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Manusia Indonesia adalah monodualistik yang mempunyai kewajiban sosial dan tidak mementingkan diri sendiri. Kepentingan nasional didahulukan daripada kepentingan pribadi. Berbeda dengan sistem lain dalam alam liberal. Pada sistem ini orang mendambakan kebebasan manusia yang sebebas-bebasnya. Mengejar kesejahteraan dilakukan dengan mengejar materi karena ukuran kesejahteraan adalah materi, dan mengejar materi tidak ada batasnya. Yang mampu nantinya akan semakin mampu, dan akhirnya akan terjadi penghisapan terhadap rakyat kecil. Ini jelas tidak cocok dengan pandangan hidup kita.

"Budaya Bangsa"

Sejak jaman Majapahit dan Sriwijaya

kita sudah merasa satu bangsa, satu tanah air. Berarti nenek moyang kita pun sudah sejak dulu menghendaki kesatuan bangsa ini. Kemudian di jaman modern kehendak ini diungkapkan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Hal itu merupakan faktor budaya yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa kita lebih lanjut.

Kini kita berpikir secara nusantara. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan budaya, serta kesatuan pertahanan keamanan bangsa secara menyeluruh.

Tradisi-tradisi yang baik dalam budaya bangsa kita pertahankan. Misalnya tradisi menghormati orang tua, tradisi gotong-royong, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi baik yang semula lingkupnya lokal saja misalnya gotong royong di kampung atau di desa, kita tingkatkan pula ke dalam kehidupan di kota-kota. Umpamanya gotong royong mengumpulkan iuran dalam membangun sesuatu, dimana yang lebih mampu memberikan iuran lebih banyak daripada yang kurang mampu, dan sebagainya. Tradisi musyawarah mufakat bahkan diangkat ke tingkat nasional dengan bentuk yang lebih modern.

Hal yang menggembirakan sekarang ini ialah bahwa kita sudah memiliki tradisi mekanisme kepemimpinan lima tahun yang sudah kita praktekkan dalam jaman Orde Baru ini. Dengan mekanisme seperti itu segala kekeliruan bisa kita koreksi, pemerintah stabil dan tidak mudah jatuh bangun, perbedaan pendapat yang ada disalurkan sesuai demokrasi Pancasila, dan pembangunan dapat berjalan dengan teratur terencana. Mudah-mudahan tradisi ini dapat terus membudaya.

Tentu kita juga dapat mencontoh hal-hal yang baik dari kebudayaan bangsa lain, seperti misalnya tradisi kerja keras dari bangsa Korea. Kita ubah sikap cepat puas diri, untuk berusaha mencapai hasil yang lebih meningkat lagi.

Dalam bidang teknologi, tak ada jalan lain sekarang ini kecuali memanfaatkan yang sudah ada walaupun berasal dari luar. Istilahnya pinjam dulu begitu, sambil mengejar ketinggalan. Kita pakai teknologi yang cocok guna mengakselerasi pembangunan ini. Sebenarnya bisa juga kita mencari dan mengembangkan teknologi sendiri, tetapi mungkin kita akan semakin ketinggalan berpuluh-puluh tahun, sementara orang lain semakin melaju ke depan. Contoh misalnya Satelit Palapa. Kalau kita harus membikin sendiri dari mula, berapa tahun lagi kita baru dapat menggunakannya?

Oleh sebab itu kerja sama dengan dunia luar juga diperlukan. Dalam kaitan ini perlu ditata hubungan antar bangsa. Ditata sedemikian rupa agar bangsa-bangsa di dunia dapat hidup bersama-sama secara lebih adil, tidak saling menghisap, tertib damai tidak ada perang, tidak saling menjajah. Diatur pula suatu tata perekonomian dunia baru antara lain melalui dialog utara-selatan, dan sebagainya.

Dalam hubungan dengan dunia luar kita tidak bersikap super nasionalistik yang menganggap bangsa kita adalah yang terbaik dan bangsa lain adalah bangsa yang rendah seperti halnya yang dianut Hitler tempo dulu. Kepribadian Pancasila kita memang mendorong agar kita berusaha dengan kemampuan sendiri. Namun ini tidak berarti menutup kemungkinan bantuan dari luar demi kemajuan kita. Dengan catatan kita tetap waspada agar kita tetap tegak pada kepribadian sendiri. Jangan sampai membeli teknologi atau mempelajari ilmu dari luar itu menjadikan kita sebagai antek bangsa lain dan kemudian dipermainkannya. Jangan sampai pula kita dijajah secara ekonomi. Oleh sebab itu kita perlu belajar dan bekerja keras mengejar ketinggalan kita dengan bangsa-bangsa yang telah maju.

Dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, tentu kita tidak dapat lepas dari masuknya kebudayaan atau pengaruh dari luar. Terhadap hal ini kita sudah mempunyai filter, yang menyaring dan membendung hal-hal negatif dari luar agar tidak meracuni bangsa kita. Filter ini adalah Falsafah Pancasila yang sudah kita yakini kebenarannya itu! ☐

Badrul Mustofa/ TA Purnomo

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI TINGKAT I
TIMOR TIMUR
mengucapkan:
DIRGAHAYU
PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. KE - 41
17 - 8 - 1945 — 17 - 8 - 1986
Dengan Semangat Persatuan dan Kesatuan
Kita Tingkatkan Pembangunan disegala bidang

Partisipasi Rakyat Dalam Politik

Dalam kehidupan politik, rakyat merupakan hulu sekaligus muara alur berpolitik

KETIKA tampil dalam sebuah diskusi politik di DPP Golkar pekan pertama bulan September ini Dr Midian Sirait menyampaikan secara menarik suatu rumusan pengertian berpolitik. Bunyinya begini: ''Dalam suasana kemasyarakatan dalam infra struktur politik, kegiatan politik itu adalah penyaluran perasaan, keinginan dan kepentingan masyarakat sebagai input dalam satu sistem''. Dan ''dalam kehidupan berpolitik itu rakyat selalu merupakan hulu dan sekaligus muara dari alur berpolitik''. Apa yang diutarakan oleh tokoh pembaharuan struktur politik itu, merupakan rumusan yang menjadi cita-cita dari suatu tindakan berpolitik. Tentu masih merupakan satu soal tersendiri untuk mendekatkan kenyataan dengan cita-cita. Suatu dilema manusia yang sebenarnya klasik yang meresahkan Iskandar Agung — dan coba dilawannya dengan kesungguhan dan kemampuan improvisasinya yang spontan untuk menyesuaikan cita-cita dengan kenyataan.

Bila rakyat memang adalah hulu dan sekaligus muara dalam alur berpolitik, maka di dalamnya tercakup keikutsertaan yang aktif maupun secara pasif. Inilah partisipasi. Dan partisipasi politik untuk konteks Indonesia, menurut Slamet Effendy Yusuf, — seorang tokoh organisasi kemasyarakatan — bagaimanapun harus mengacu kepada prinsip ''kedaulatan itu ada di tangan rakyat''. Lalu bila dilakukan penilaian tentang partisipasi politik di kalangan rakyat Indonesia selama 20 tahun terakhir, seperti dinyatakan oleh T. Mulya Lubis SH LLM — Pimpinan LBH — ''harus diakui ada dua kenyataan yang satu dengan lainnya seperti berbenturan''. Perbenturan apa ?

Dr. Midian Sirait.

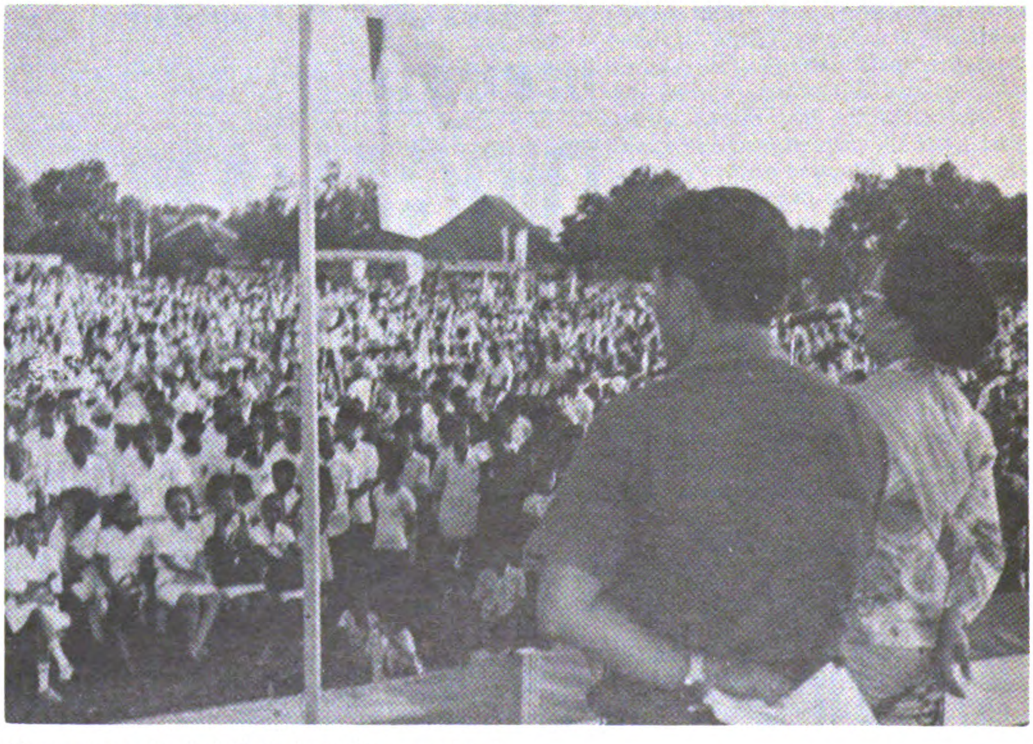

Mengacu kepada prinsip 'kedaulatan di tangan rakyat'.

''Di satu pihak pembangunan ekonomi yang telah membawa kemajuan dalam taraf hidup, tidak dibarengi dengan perilaku partisipatif yang diinginkan pada pihak lain''. Partisipasi rakyat, kata Mulya Lubis, hanya terasa hangat dan aktual sekali dalam lima tahun yaitu pada saat pemilihan umum.

Betulkah partisipasi politik rakyat kita hanya terpantul 5 tahun sekali ? ''Saya menjawab ya'', kata Mulya Lubis. Lebih tajam dari itu adalah anggapan pengamat politik Fachry Ali. Ia berpendapat tidak ada partisipasi politik yang meluas diluar jangka-jangka waktu selama lima tahun. ''Partisipasi politik itu agak merata ketika pemilihan umum saja. Tapi setelah itu tidak ada perkembangan yang menarik dari partisipasi poli-

Asep Djadja Saefullah MA

tik".

"Sebenarnya, kita sayangkan bila orang berkata partisipasi politik ini lima tahun sekali", berkata Slamet Effendi. "Kendati kita sayangkan, bila betul demikian, toh hal ini bukan berarti jelek sekali". Tentang anggapan partisipasi lima tahunan ini, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Asep Djadja Saefullah MA, menyatakan "perlu kita robah". Sebab kalau kesan itu tidak dirobah, "seolah-olah partisipasi politik itu hanya dilakukan dalam lima tahun sekali". Padahal, "partisipasi politik bukan hanya sampai disitu". Partisipasi politik itu tidak ada batasnya. Artinya, selama pemerintah itu ada, partisipasi itu mesti ada. Dekan Sospol dari perguruan tinggi terkemuka di Bandung itu mengambil contoh dari masa pra pemilihan umum. Paling tidak sebelumnya sudah ada UU politik, dan pada hakekatnya ini merupakan partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi itu bukan hanya menjelang pemilihan umum. "Tapi bagaimana rakyat itu ikut menghayati suatu produk politik, apakah itu berupa undang-undang atau kebijaksanaan. Setiap kebijaksanaan itu harus dipahami oleh masyarakat. Dan masyarakat harus kelihatan responsnya. Disini akan tampil partisipasi".

Tapi adalah Mulya Lubis pula yang mensepakati bahwa keadaan seperti itu tentu tak bisa dibiarkan berlangsung terlalu lama. "Rakyat kita, sebagai akibat pembangunan, telah semakin pintar dan kritis. Karena itu, dalam bidang politik pun mereka lebih menginginkan hal-hal yang rasional".

Setelah Fase Stabilitas, Fase keterbukaan

Mulya Lubis mencatat bahwa trauma politik pada masa awal kemerdekaan dan kemudian menjelang tahun 1960-an, membuat Orde Baru berkeyakinan bahwa kebebasan ala Barat tidak mesti diterapkan dalam kehidupan di negeri kita. Atau paling tidak ada pemikiran lain bahwa rakyat kita sebenarnya belum siap untuk menikmati kebebasan ala Barat sampai dengan saat sekarang ini. Karena itu, pembangunan politik yang menjadi tekanan utama dalam periode Orde Baru ialah stabilitas. "Itulah sebabnya, salah satu gejala yang paling menarik selama era Orde Baru adalah apa yang saya namakan sebagai proses depolitisasi. Dalam kondisi seperti ini, yang namanya partisipasi politik, memang kurang dipentingkan". Padahal untuk menunjang pembangunan, memang sangat diharapkan perilaku partisipatif dari semua warga negara. "Untuk menjamin ini, saya merasa sudah saatnya pemerintah meninjau kembali kebijaksanaan depolitisasi yang selama ini dianut". Mulya Lubis melihat pula bahwa dengan 5 UU bidang politik yang dihasilkan tahun lalu pun belum terbuka peluang lebih banyak bagi partisipasi dibanding masa sebelumnya. Sementara itu Fachry Ali melihat masih terbatasnya penampilan partisipasi oleh rakyat, berkaitan dengan tidak adanya pendidikan politik yang secara sungguh-sungguh dan sengaja untuk mengembangkan partisipasi politik. Sebenarnya, Golkar telah melakukan pendidikan politik yang intensif melalui gerakan kaderisasinya. Tapi Fachry Ali menganggapnya belum merupakan pendidikan politik secara luas kepada masyarakat.

Seharusnya, kata Mulya Lubis, untuk menarik partisipasi rakyat, partai politik dan Golongan Karya bisa berfungsi banyak. Tapi sayangnya partai politik di Indonesia sekarang lebih condong sebagai partai pengurus daripada partai massa. "Kita mengakui bahwa partai tidak memiliki organisasi sebagai onderbouw, tapi anggota perorangan aktif. Tapi dalam kenyataan, partai menjadi suatu badan yang sangat elitis dibanding dengan ormas. Karena itu untuk bisa mendorong partisipasi rakyat, partai-partai harus mengembangkan demokratisasi dalam dirinya sendiri". Apakah karena memang betul elitis seperti itu, atau karena hal lainnya, tapi menurut Fachry Ali andaikata masyarakat itu punya pikiran partisipasi dalam politik, mereka tak tahu lagi apa yang dapat menampung hasrat berpolitik mereka. Kecuali di dalam wadah-wadah formal yang sudah ada, ataupun juga di dalam wadah-wadah informal yang ada. "Namun hampir kesemuanya berkaitan dengan kekuasaan terpusat", ujar Fachry, "Sehingga akhirnya partisipasi ini berubah menjadi mobilisasi, karena tak ada lembaga-lembaga yang mengakomodir secara murni".

Bila Fachry menganggap yang ada saat ini hanyalah mobilisasi, maka ia berbeda dengan Slamet Effendi. Partisipasi politik itu ada. Perkembangan ekonomi yang berhasil, menurut tokoh Ansor ini, telah juga merobah tingkat pendidikan dan kecerdasan masyarakat. "Kalau kita melihat masyarakat atau rakyat sebagai bagian dari politik, maka masyarakat politik yang sekarang ada di Indonesia jelas lebih terdidik daripada masa-masa yang lalu". Yang menjadi pertanyaan bagi Slamet Effendy hanyalah bagaimana kemampuan organisasi politik yang ada dalam mengkanalisir partisipasi politik rakyat - yang ada dalam arus "kecenderungan modernisasi di semua bidang". Atau dalam pertanyaan Asep Djadja Saefullah MA, "apakah organisasi politik yang ada itu cukup trampil ?". Pertumbuhan yang ada juga meliputi sektor politik. Menurut Effendy, ini mencakup pertumbuhan tingkat dan bentuk partisipasi politik (termasuk juga wawasan didalamnya) serta struktur politiknya sendiri. ("Dan setiap saat selalu ada produk politik", kata Asep Djadja Saefullah). "Saya kira organisasi politik tak boleh mengabaikan pertumbuhan seperti itu, termasuk juga dalam kanalisasi aspirasi dan keinginan rakyat". Bila kanalisasi diabaikan akan terjadi kecenderungan kearah partisipasi politik yang pasif. "Saya tidak ingin karena ketidakcermatan organisasi politik menanggapi pertumbuhan politik, lalu akan terjadi kecenderungan kepada partisipasi politik yang pasif tersebut". Organisasi politik harus peka. Slamet Effendy kuatir bila orang-orang dalam organisasi politik tidak peka menanggapi, akan terjadi cara-cara penyaluran yang tak dikehendaki.

Secara formal, saat ini ada tiga organisasi politik, yakni Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Asep Saefullah MA menilai diantara ketiganya, Golkarlah yang paling tinggi tingkat partisipasinya. "Saya tidak melihat adanya apatisme di lingkungan Golkar". Ini berbeda dengan dua partai politik, karena adanya sejumlah problematik dalam tubuhnya masing-masing. "Saya kira, mereka terganggu dengan konflik intern mereka sehingga tak mampu menunjukkan ketrampilan politiknya''.

Todung Mulya Lubis kurang lebih sependapat. ''Terlepas dari segala kekurangannya, Golkar saya anggap paling mampu menyerap aspirasi masyarakat, karena dia memiliki keanggotaan terbanyak hingga sekarang. Kendati hal ini lebih banyak disebabkan oleh kenyataan lain, bahwa Golkar adalah organisasi politik yang paling lengkap dari segi kelembagaannya''. Sedangkan ormas yang mempunyai massa, legalitas dalam berpolitik ''dibatasi oleh undang-undang yang baru di bidang politik''. Dalam kenyataan sekarang, ujar Mulya Lubis, harus diakui suasana demokratis lebih dirasakan mesra di kalangan ormas dengan anggotanya dibanding antara partai dengan massa. ''Sebabnya, partai di Indonesia telah berkembang menjadi lembaga yang elitis''. Untuk menggalangkan partisipasi, ormas akhirnya lebih potensial dibanding partai. ''Hal ini tidak jelek, asal ada komunikasi yang erat antara ormas dengan partai politik. Jangan sampai ormas dicurigai menjadi saingan parpol'', ujar Mulya. ''Gejala seperti ini akhirnya menyebabkan saya berkesimpulan bahwa ormas lebih berperanan dalam menumbuhkan swadaya politik masyarakat ketimbang partai''. Kesimpulan Slamet Effendy hampir sama. ''Ormas memang bukan partai politik, tapi bisa terjadi ia merupakan penggerak partisipasi masyarakat''.

Kekurangan partisipasi selama ini, kata Mulya Lubis lagi, apalagi dengan disahkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas, menumbuhkan suatu kebutuhan lain bahwa massa membutuhkan daya ikat yang lain untuk katakanlah berpartisipasi lewat organisasi politik, karena jaraknya yang terlalu jauh. Dulu ketika partai-partai mengikat anggotanya lewat sentimen keagamaan, ''terlepas dari kesalahan bahwa agama akhirnya dijualbelikan sebagai komoditi politik, partisipasi terasa ramai''. Sekarang partisipasi semacam itu terasa sepi. Orang yang pesimis mengatakan kondisi semacam itu timbul karena kebijaksanaan depolitisasi yang represif. ''Tetapi saya lebih melihat pada kenyataan bahwa daya pikat partai semakin kabur. Program-program yang menjadi landasan perjuangan partai belum mendapat bentuk aktualisasi di kalangan pengikutnya. Itulah sebabnya mengapa PPP harus berperang setengah mati diantara mereka untuk menerima bentuk partai terbuka dan mengandalkan pada persaingan program untuk merebut massa''.

Partisipasi Politik Yang Rasional

Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas memang membawa konsekuensi menjadikan organisasi politik sebagai organisasi yang terbuka. ''Ini tidak bisa tidak'', ujar Slamet Effendy. ''Ini merupakan tuntutan yang inheren''. Sehingga dengan demikian tak mungkin terjadi disatu pihak menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, tapi dilain pihak kita mempertahankan organisasi politik dengan keanggotaan yang tertutup. Dengan makin terbukanya partai-partai politik, pertanyaannya adalah apakah makin mungkin kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai golongan dengan berbagai latar belakang suku, agama yang berbeda dan sebagainya ikut melakukan partisipasi politik dengan sangat terbuka ? Mestinya demikian. Sehingga, nantinya takkan pernah lagi ada organisasi politik yang mengandalkan partisipasi politik berdasarkan kepentingan yang bersifat tradisional. Melainkan partisipasi politik yang bersifat rasional. Partisipasi politik yang cerdas. Dalam praktek nyata dalam pemi-

---

Kuncinya :Keterbukaan

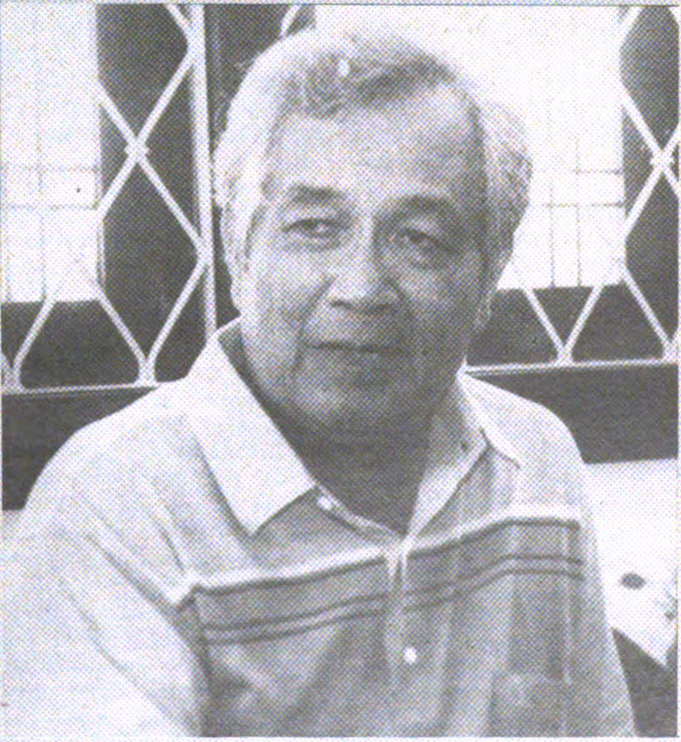
R. Soekardi.

Ketua FKP R. Soekardi berpendapat, dengan adanya penataran P4 yang dilakukan BP7, masyarakat saat ini sudah cukup tinggi kesadaran politiknya, dalam arti makin tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, yang pada hakekatnya merupakan pengamalan Pancasila.

Dalam wawancara dengan Media Karya di kediamannya di Jakarta, Ketua FKP selanjutnya mengatakan, dalam Pemilu '87 mendatang, dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas, rakyat semakin maju dalam berpikir dan menentukan pilihannya, program kontestan mana yang paling cocok bagi dirinya.

Karena prinsip Pemilu adalah LUBER (langsung, bebas dan rahasia), maka setiap warga negara yang punya hak pilih tidak perlu takut menentukan pilihannya.

Oleh sebab itu, tergantung ketiga kekuatan sospol dalam menyajikan program-program mereka, supaya bisa menarik sebanyak-banyaknya pemilih bagi masing-masing kontestan tsb.

Oleh sebab itu, yang penting bagi kekuatan sospol, bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat, programnyalah yang terbaik bagi seluruh masyarakat, dalam arti bagi pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila.

Bahkan Soekardi mencontohkan, seandainya dirinya nanti berkampanye di depan *Pepabri*, ia harus benar-benar bisa meyakinkan, program Golkar-lah yang paling cocok bagi Pepabri. Ia bahkan mengatakan, seandainya ada sekelompok *Korpri* dalam Pemilu nanti tidak memilih golkar, jangan disalahkan kelompok yang tidak memilih Golkar itu. Tapi yang salah adalah pimpinan dari kelompok Korpri tsb yang tidak bisa meyakinkan kelompoknya, program Golkar-lah yang paling baik bagi kelompok itu.

Namun sebaliknya, jika rakyat nantinya mayoritas memilih Golkar, juga jangan disalahkan Golkar-nya. Karena berarti PDI maupun PPP, tidak bisa meyakinkan sebagian besar rakyat untuk memilih kedua kontestan itu.

Masa mengambang

Dalam hal ini, Soekardi mengatakan, Golkar akan tetap berpegang teguh pada prinsip masa mengambang, yang berarti pula rakyat semakin sadar politik Pancasila, dan mereka tidak harus dilibatkan pada politik praktis dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam masa Pemilu, rakyat bisa menentukan lihan umum nanti, pilihan-pilihan seyogyanya didasarkan kepada alasan-alasan yang rasional. Dan alasan-alasan rasional itu hendaknya dilihat pada program-programnya maupun pada calon-calonnya. ''Tapi jangan kita lupakan melihat apakah program itu memang mungkin dilaksanakan. Kalau sekedar memamerkan program, gampang saya, tidak susah untuk menyusunnya''.

Kedalaman persoalan setelah era satu asas, disinggung oleh Mulya Lubis. Setelah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas, menurut Mulya, persoalannya - mungkin agak ekstrim - adalah bagaimana kalangan partai dapat menjadikan Pancasila mempunyai daya pikat seperti daya pikat 'agama'. Soalnya, rakyat kita belum mempunyai budaya untuk setia kepada sesuatu yang programatis, apalagi terhadap partai. ''Disinilah tantangan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Jadi persoalan yang lebih mendesak adalah bagaimana membuat Pancasila menjadi nilai aktual yang dimengerti dan menarik hati''.

Fachry Ali

Keseluruhan sistim yang dibangun dan dipertahankan selama 20 tahun terakhir, dinilai oleh Mulya Lubis dalam banyak hal belum cukup mengundang partisipasi. Proses perizinan yang berbelit-belit, merupakan contoh yang menjauhkan partisipasi rakyat. ''Ini hanya sekedar contoh dari sekian banyak kenyataan lain yang amat panjang bila mau diperinci satu persatu. Karena itu saya berkesimpulan untuk mendorong partisipasi memang sudah waktunya pemerintah meninjau kembali kebijaksanaan depolitisasi''.

Tentunya pengutaraan Mulya Lubis ini masih dapat didiskusikan. Dapat misalnya diperhadapkan dengan konsep massa mengambang yang dikehendaki oleh para pembaharu kehidupan politik sejak masa awal Orde Baru (Lihat pula wawancara dengan Ketua DPP Golkar R. Sukardi). Masalahnya juga bukan hanya menyangkut pemerintah, karena pengaturan kehidupan politik sebenarnya

---

pilihannya di antara ketiga kekuatan sospol tersebut. Jika Golkar ternyata yang terbaik programnya, maka rakyat akan memilihnya, namun jika di lain waktu PDI yang terbaik programnya, bukan mustahil rakyat akan memilih PDI.

Keterbukaan

Dalam lebih meningkatkan partisipasi politik rakyat, menurut Soekardi, perlu adanya keterbukaan. Dan ia menilai sistim keterbukaan saat ini perlu lebih ditingkatkan di semua sektor.

Ia selanjutnya menjelaskan, setelah rakyat tahu persis semua program ketiga kekuatan Sospol dan ABRI. Maka, tidak ada salahnya jika ada sementara rakyat yang langsung datang mengadu ke masing-masing empat fraksi di DPR-RI, yang dianggapnya paling bisa menampung aspirasi mereka. Dan kewajiban fraksi untuk menyalurkan laporan rakyat itu ke pimpinan kekuatan sospol masing-masing.

Masalah keterbukaan ini sangat penting, karena dengan keterbukaan, masyarakat akan tahu segala duduk perkara dan masalah yang terjadi dilingkungannya. Ia mencontohkan, rakyat akan ikhlas menyerahkan tanahnya yang digusur untuk pembangunan, jika mereka diberi penjelasan dan pengertian yang gamblang. Disamping, menurut Soekardi, penggantian tanah yang digusur, harus sesuai dan sepadan. Jangan sampai ganti ruginya justru membuat kecewa masyarakat.

Pada dasarnya, kata Soekardi, segala masalah bisa dicapai dengan musyawarah mufakat dan keterbukaan. Bahkan misalnya akan ada pembangunan jalan baru atau jalan arteri, hal ini harus diumumkan secara luas kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu secara dini apa yang akan terjadi di lingkungannya.

Memang resikonya, jika diumumkan secara luas, kemungkinan besar harga tanah di sekitar itu akan melonjak. Namun, jika hal itu disembunyikan, yang untung hanya segelintir orang. Karena bisa saja segelintir orang itu membeli tanah disekitar jalan yang akan dibuka, sehingga di waktu jalan dibuka segelintir spekulan tanah itu akan memperoleh keuntungan yang besar.

Abdi masyarakat

Untuk mengundang partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, perlu pula ditingkatkan kesadaran seluruh aparat pemerintahan, baik dari gubernur, bupati, camat, lurah beserta staf-stafnya, mereka adalah abdi dan pengayom masyarakat.

Dikatakan, perlu sekali ditimbulkan sebanyak-banyaknya alternatif-alternatif di dalam masyarakat, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah supaya dalam mengambil keputusan suatu masalah, pemerintah bisa ''tune in'' dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini, Soekardi menunjuk suatu contoh positip yang dilakukan Menaker Soedomo, untuk mengatur dan memberi ruang lingkup yang luas kepada sektor informal.

Menurutnya, sektor informal punya posisi penting di masyarakat, karena dari sektor itulah muncul bibit-bibit wiraswasta yang gigih dan ulet, di samping juga merupakan penciptaan lapangan kerja yang sangat luas.

Dijabarkan dalam bentuk operasional

Sementara itu, berbicara mengenai penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya azas, ia mengatakan, saat ini secara formal, Pancasila sebagai satu-satunya azas sudah bukan masalah lagi. Kita telah membuat lima UU bidang politik, dua diantaranya mengatur ketiga kekuatan sospol dan organisasi kemasyarakatan harus berlandaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.

Dengan kata lain, azas bagi kekuatan sospol maupun ormas, tidak boleh lain kecuali Pancasila dan operasionalnya lewat UUD'45.

Disamping itu yang tidak boleh dilupakan lagi, negara Kesatuan RI adalah negara hukum. Kesemuanya, kata Soekardi, harus dilakukan sesuai dengan mekanisme struktural serta konstitusi hukum negara RI.

Dalam kaitan ini, setiap kekuatan sospol maupun ormas, sesuai dengan GBHN, harus melakukan pendidikan politik Pancasila yang berlandaskan UUD'45.

Apa yang harus dilakukan kekuatan sospol dan Ormas? Menurut Soekardi, dalam melaksanakan pendidikan politik, kekuatan sospol dan ormas kecuali memberikan pendidikan pokok seperti yang diajarkan oleh BP7, juga perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa kegiatan operasional dari materi-materi yang ada dalam penataran P4 yang dilaksanakan BP7 lewat berbagai tipe pendidikannya, demikian Ketua FKP R. Soekardi.

Mahmudi R/ Subandrio

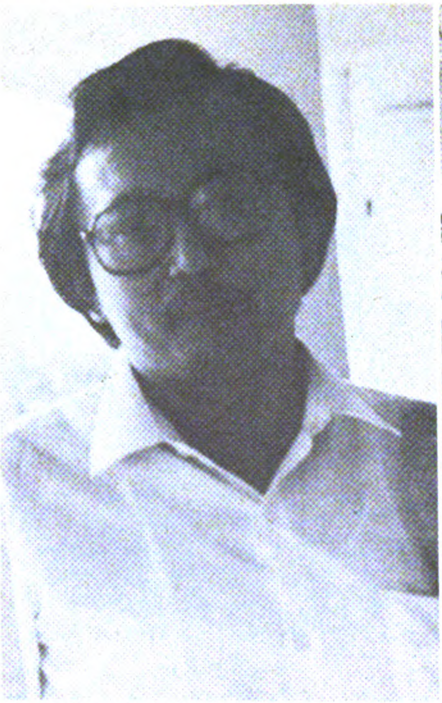

Slamet Effendy Yusuf.

Lebih nasional daripada masa yang lalu.

telah dituangkan dalam seperangkat UU bidang politik yang penyusunannya melibatkan unsur-unsur eksekutif maupun legislatif. Tapi jelas undang-undang bukan sesuatu dengan harga mati. Meminjam apa yang pernah diutarakan oleh Ketua Umum DPP Golkar yang menyebutkan Demokrasi Pancasila kita adalah demokrasi yang konstitusional, sesungguhnya senantiasa terbuka kesempatan untuk menyempurnakan apa-apa saja yang dianggap perlu disempurnakan, melalui mekanisme politik yang ada. Caranya dengan perubahan-perubahan pada perundang-undangan yang bersangkutan (Media Karya, Agustus 1986).

Tapi menurut Fachry masih terdapat beberapa soal. Salah satu persoalannya ialah bahwa suara-suara dari luar tidak mempunyai keinginan untuk merubah apapun. ''karena orang diluar pemerintah sudah pasif'' Fachry mengkonstatir. ''Mereka mengetahui betul, apa yang mereka kemukakan tidak akan mendapat tanggapan serius dan positif. Jadi daripada membuang enersi, masyarakat merasa lebih baik diam saja dan menerima apa saja yang dikatakan pemerintah''. Kalau ada suara-suara, kata Fachry itu hanya merupakan perdebatan eksklusif oleh kaum intelektual - seperti Arief Budiman, Juwono Sudarsono dan sebagainya - tentang soal apa saja. ''Tetapi itu juga tidak akan ada pengaruh''. Betulkah demikian ?

Menggunakan term yang dipakai Fachry, yang dimaksud dengan partisipasi ialah keikutsertaan. Bila yang menjadi subjek adalah organisasi atau partai politik, maka keikutsertaan itu terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan pada tingkat nasional. Misalnya apakah harga minyak naik atau turun, apakah kita harus menetapkan sistim politik baru dan sebagainya. ''Kalau ikut, namanya partisipasi. Tapi setahu saya, partai politik tidak ikut''. Dalam hubungan pelaksanaan pemerintahan, Fachry betul. Sebab seperti dikatakannya sendiri secara struktural partai-partai terhalang untuk melaksanakan partisipasi, karena tak ada menteri dari kalangan mereka - PPP dan PDI. Tapi pada institusi lainnya, semestinya partisipasi dapat dilakukan. Melalui wakil-wakilnya di DPR maupun MPR misalnya - terlepas dari perimbangan kekuatan sebagai akibat dan hasil pemilihan umum. Menurut Dr. Midian Sirait pada dasarnya DPR itu adalah cerminan dari kelompok-kelompok yang hidup di masyarakat. Peranan di dalam atau melalui DPR dapat diukur dari posisi dalam kerangka sistim output input dalam budaya politik dan peranan dalam menterjemahkan perasaan, keinginan dan kepentingan masing-masing kelompok serta memadukannya dengan ideologi negara. Peningkatan peranan DPR dengan demikian berarti juga para anggota dari setiap fraksi - akan terkait dengan kemampuan para anggota tersebut untuk menyampaikan perasaan, keinginan dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat.

Adalah menarik bahwa beberapa waktu yang lalu, tatkala harga minyak bumi menurun, sejumlah anggota DPR - diantaranya anggota FKP Djoko Sudyatmiko - dan sejumlah anggota masyarakat melalui media massa menyarankan penurunan harga BBM, pemerintah betul-betul menurunkan harga beberapa jenis BBM.

Sejalan dengan hambatan struktural itu Fachry menganggap adanya trend yang semakin mengarah kepada tradisi kebapakan, dimana orang hanya berlomba untuk menunjukkan loyalitas. Termasuk di kalangan kaum muda, ''padahal mereka seharusnya muncul sebagai kekuatan korektif yang konstruktif''. Asep Djaja Saefullah menganggap perlu dipelajari apabila ada yang menganggap bahwa sekarang ini generasi muda kurang tampil perannya. Kalau betul demikian, perlu segera ada rangsangan-rangsangan secara positif.

''Apabila generasi muda tak punya keinginan, bagaimana dengan Indonesia yang akan datang ?''. Mengenai kaum muda ini, Mulya Lubis mengatakan, mungkin orang merasa bahwa sekarang ini mereka miskin dengan gagasan besar. ''Kalau hura-hura yang menjadi ukuran, harus kita akui kebenaran sinyalemen itu. Tapi bila dilihat pada sifat tantangan dan kecenderungan pemuda sekarang yang ingin lebih menyentuh esensi daripada bentuk, saya menilai justru disisi ini pemuda kita lebih dewasa''. Kini orang takkan terlalu mudah diajak berdemonstrasi, karena mereka ingin paham lebih dahulu apa tujuan dan alasannya. ''Jadi pemuda sekarang lebih rasional dibanding pemuda masa lalu''.

Kalau demikian soalnya, tidak dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa kelangkaan partisipasi - kalau memang dianggap demikian - yang terjadi (suatu hal yang juga dikeluhkan oleh para tokoh dalam struktur kekuasaan politik dan pemerintahan) adalah semata-mata faktor ekstern anggota masyarakat. Melainkan juga karena faktor intern dari orang perorang sebagai pribadi akibat sikap rasional yang dikatakan Mulya Lubis, yang mungkin saja tak hanya dikalangan generasi muda. Masyarakat memang mengalami modernisasi seperti kata Slamet Effendy Yusuf, sehingga meningkat dalam berbagai hal. Namun terlepas dari itu, bagaimanapun partisipasi sesungguhnya adalah kebutuhan yang terus menerus dalam sistim kehidupan politik. Maka ia perlu pula terus menerus dalam sistim kehidupan politik. Maka ia perlu pula terus menerus dirangsang. Bagaimana ?

Jawabannya, dalam kasus Indonesia, terletak pada perlakuan bangsa ini sendiri terhadap Pancasila dalam kehidupan nyata di masa-masa mendatang. Rumusan pendapat Mulya Lubis dalam hal ini dapat disepakati. Bahwa terlepas dari kekurangan Pancasila sebagai daya pikat yang menyatukan partisipasi, kesepakatan bangsa menerimanya sebagai satu-satunya asas tidak bisa lain menjadi tanggungjawab bangsa ini untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma bersama. ''Kedewasaan berpolitik rakyat dimasa mendatang, akan sangat ditentukan oleh sampai berapa jauh Pancasila mampu menjawab persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat, baik dalam perspektif politik maupun sosial budaya''.☐

Wawancara: Badrul M. Subandrio, Mahmudi R. T. Gani
Pemadu : Rum Aly

Partisipasi Sebenarnya Akibat Dari Komunikasi

"Kosgoro Sih Manut Saja"

Partisipasi politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, idealnya harus tampak dan bergairah setiap hari. Wujud partisipasi itu sendiri sebenarnya terungkap pada sikap, tanggapan dan pemikiran positif maupun negatif terhadap segala gejala dalam kehidupan suatu bangsa yang bernegara.

Yang menjadi persoalan bagi kita sekarang adalah bagaimana menghidupkan partisipasi positif bagi pembangunan itu sendiri. Rakyat tanpa merasa terpaksa dan dipaksa menjadi pendorong sekaligus pelaksana dari keputusan-keputusan serta kebijaksanaan pemerintah, sementara pemerintah menyalurkan aspirasi rakyat dalam wujud pembangunan.

Jadi partisipasi sebenarnya suatu akibat dari komunikasi timbal balik yang positif, demikian Martono, Ketua Umum KOSGORO. "Saya sendiri berpendapat, partisipasi itu ada setiap hari." Bila ada yang mengatakan partisipasi politik rakyat kita hanya tersalur 5 tahun sekali dalam wujud pemilihan umum, bukan berarti sebelum pemilu rakyat apatis. Lebih tepat sebenarnya dikatakan, puncak partisipasi rakyat adalah pada pemilihan umum yang tidak lain merupakan pesta demokrasi.

Pada puncak partisipasinya, rakyat akan menentukan vonis, kepada siapa atau kepada kekuatan organisasi politik mana dia mempercayakan aspirasi politiknya.

Di Indonesia, mungkin saja timbul berbagai pendapat tentang partisipasi politik rakyat ini. Bagi mereka yang merindukan partisipasi dalam bentuk hura-hura, akan secara gamblang menuding partisipasi rakyat tidak ada, atau hanya sekali dalam 5 tahun.

Tapi kita ini hidup dalam masyarakat dengan organisasi yang namanya negara. Partisipasi rakyat diupayakan tersalur melalui institusi demokrasi, sehingga terwujud aturan main. Kan ada partai politik dan golongan karya. Lembaga-lembaga demokrasi pun relatif lengkap.

Martono

Jadi kalau mau menilai atau mau bertanya partisipasi politik yang bagaimana yang kita inginkan dan diinginkan oleh negara dan bangsa, "saya kira jawabannya adalah partisipasi yang berpijak pada sistem dan mekanisme yang kita sepakati bersama". Rakyat Indonesia adalah anggota atau simpatisan salah satu organisasi demokrasi, yaitu Golkar, PPP atau PDI.

Aspirasi rakyat disalurkan melalui ketiga organisasi politik ini, yang kemudian disalurkan lagi ke para anggotanya yang duduk di parlemen, dan parlemen meneruskannya kepada pemerintah. Jadi bila dilihat dari prosedur seperti ini, "maka saya lebih cendrung mengatakan bahwa partisipasi politik yang ingin kita lembagakan adalah partisipasi berjenjang sesuai dengan sistem dan mekanisme yang sudah dan sedang kita tegakkan."

Dalam konteks ini, "saya lebih cendrung untuk menilai partisipasi politik rakyat dengan menggunakan parpol dan DPR sebagai ukuran". Dengan demikian, terlepas dari segala macam kekurangan yang masih menggejala, partisipasi politik kita sebenarnya sudah mulai terarah menurut aturan main. DPR misalnya selama ini mempunyai kegiatan teratur dalam rangka penyaluran aspirasi rakyat yang diwakilinya, misalnya mengadakan reses dengan mengunjungi daerah-daerah, serta rapat kerja dengan pemerintah. Sementara itu banyak kasus dimana para warga masyarakat menghadap DPR menyampaikan uneg-uneg, merupakan contoh partisipasi itu.

Kosgoro

Jadi untuk menilai partisipasi rakyat dalam politik, persoalannya jangan dibalik. Artinya pertanyaan yang kita ajukan, bukannya partisipasi rakyat tapi, sampai sejauh mana parpol dan DPR telah berpartisipasi penuh dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Selain mengukur partisipasi para perangkat demokrasi yang namanya parpol dan DPR, juga ada perangkat lain dalam undang-undang kita, yaitu organisasi profesi dan ormas. Wujudnya mungkin berita di koran-koran dan majalah yang akhirnya sampai kepada DPR dan pemerintah serta rakyat itu sendiri.

Lantas Kosgoro bagaimana?

Kosgoro kan organisasi masyarakat yang bersumber atau mengikuti ketentuan undang-undang nomor 8/1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Kemudian ada kejelasan lagi bagi ormas yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas. Strukturnya bisa macam-macam, tergantung pada kepentingan yang mau diemban.

Tapi kalau kita melihat sifat demokrasi itu sendiri, sebenarnya ormas tidak perlu ditetapkan dengan peraturan macam-macam, "harus begini atau harus begitu". Karena bila ormas terlalu diatur, maka sifat demokrasinya mulai berkurang. Bahwa sekarang ormas itu sudah ditetapkan dengan UU, karena hal itu merupakan kesepakatan rakyat lewat wakilnya di DPR," Kosgoro sih manut saja."

Kosgoro menyadari bahwa demokrasi dan partisipasi, memang membutuhkan

Bukan hanya sekali lima tahun.

aturan main. Yang penting bagi Kosgoro, semua peraturan jangan sampai mengurangi pengabdiannya kepada kepentingan perjuangan bangsa dan negara.

Burung dan ikan

Tentang semangat partisipasi politik di kalangan generasi muda, Martono tetap menggunakan jalan analisa sistem dan mekanisme. Orang sering terbuai pada impian kebebasan burung dan ikan.

Tapi kita harus tahu bahwa burung yang ''bebas'' terbang di udara ''bisa kemana saja dia mau'' sebenarnya juga terikat pada determinasi alam. Seekor burung yang ''bebas'' sebenarnya terikat pada langit di atasnya, dan bumi di bawahnya. Demikian ikan. Dia bebas dalam konteks permainan dan aturan alam dimana dia berada.

Bila ikan dan burung ditangkap dan dimasukkan dalam aquarium dan kandang, kebebasan tetap ada, tapi dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu lingkup sangkar dan aquarium.

Demikian juga dengan kaum muda. Seperti burung yang tetap bebas baik di alam luas maupun dalam sangkar, maka pemuda sekarang tetap menikmati kebebasan. Kita sekarang hidup dimana kelembagaan dan aturan main ingin ditegakkan.

Kebebasan dan partisipasi kaum muda harus dilihat pada tantangan dan kondisi yang kini hidup. Bila pemuda sekarang mendambakan kebebasan yang mengacu pada masa permulaan kemerdekaan, maka mungkin saja mereka menilai kebebasan dan partisipasi mereka berkurang. Tapi bila mereka menghayati bahwa tantangan sekarang adalah pembangunan, maka kebebasan yang didambakan itu ada.

Bahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik serta kebebasan sekarang jauh lebih baik dibanding pada jaman awal kemerdekaan. Pemuda mungkin mencap kebebasan mereka dipasung karena kesempatan demonstrasi dan turun ke jalan sudah berkurang dewasa ini dibanding dulu.

''Saya kira hal ini selain karena aturan main yang kita sepakati bersama semakin baik, juga karena pemuda sebenarnya semakin menghayati kebebasan itu sendiri.'' Kebebasan yang kita nikmati sekarang adalah kebebasan dalam kerangka Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila itu merupakan aturan main yang bakal menjadi komando perilaku kita dalam kebebasan dan demokrasi, asal dihayati benar.

Dalam Pancasila dikenal hubungan antara manusia yang adil dan beradab. Ini adalah contoh bagaimana kebebasan dan demokrasi itu dilaksanakan dalam apresiasi jitu atasnya. Dalam pengertian ini maka bila anak muda tidak setuju dengan seseorang, tidak lantas orang itu ditempeleng. Anak muda juga dilarang pegang kepala orang tua kecuali bila potong rambut. ''Perbuatan yang kita lakukan tetap bebas, asal jangan menimbulkan konflik dan perpecahan.''

Dalam konteks demokrasi Pancasila kebebasan sekarang sudah baik. Kalau dilandasi oleh rasa saling mengerti, ''saya kira persoalan akan mudah terselesaikan.'' Artinya rakyat tidak lagi melihat pemerintah sebagai pihak yang selalu memaksakan kehendak, sementara pemerintah pun tidak lagi menganggap rakyat sebagai pihak yang suka mengacau.

Kaum muda sekarang telah diberi pengarahan dan pendidikan yang jauh lebih baik dibanding generasi lalu. Dan pemerintah mempunyai political goodwill yang tidak perlu diragukan untuk membina generasi muda itu menjadi generasi andalan. ''Hanya yang saya lihat pembinaan dan pewarisan nilai-nilai sekarang ini masih terlalu banyak disalurkan lewat pidato dan penataran. Contoh masih kurang.''

Tentang baju

Menanggapi ketentuan tentang organisasi kemasyarakatan yang tidak diperbolehkan menggunakan atribut organisasinya dalam kampanye pemilu nanti, Martono mengungkapkan, bahwa hal itu bisa saja kalau memang peraturan demikian. ''Tapi kalau baju saja sudah berpengaruh itu sudah hebat namanya.'' Yang menjadi persoalan tentunya jangan sampai baju menjadi faktor intimidasi. Dan seandainya ini yang terjadi, yang namanya prinsip luber, tidak berlaku.

Namun dalam mempengaruhi massa, psikologi itu perlu. Orang yang melihat baju AMPI, atau KOSGORO, akan otomatis tahu bahwa mereka itu adalah orang Golkar.

Dalam prinsip luber, bisa saja orang yang memakai baju KOSGORO atau AMPI secara otomatis mencerminkan bahwa mereka orang Golkar. Tapi dalam prinsip yang sama, orang juga bisa tidak tahu apa yang ditusuk, kendati seseorang mengenakan jaket AMPI. Jadi masalah baju ini harus dipisahkan antara kepentingan organisasi dan pribadi. ☐

☐ **Badrul/ Suwito.**

Pariwisata, Primadona Yang Perlu Didandan

Pariwisata kini muncul sebagai andalan baru yang diharapkan. Namun sayang, dia masih diperlakukan sebagai sumber rejeki alternatif. Artinya sang primadona sekarang baru menjadi palingan, setelah minyak gagal mempertahankan predikat pangeran.

Keindahan dan keunikan adalah gejala yang melekat erat pada keberadaan alam dan bangsa Indonesia. Laut biru yang luas membentang, air terjun, jurang terjal, hijau pepohonan dan hamparan dataran rendah, adalah sebagian dari pesona itu. Subyektivitas kita, menyimpulkan ini semua dalam ungkapan "mutu manikam," logam mulia yang mempunyai nilai tiada tara.

Pengagungan dan puja puji akan fenomena artistik ini, hanya akan menjadi pemujaan hampa tanpa makna, bila berhenti sebatas itu saja. Pariwisata ingin melangkah keluar lebih jauh dari sekedar pemujaan terhadap keindahan karunia alam, agar dalam konstelasi kebutuhan masyarakat modern, semua kehebatan itu jadi bermakna.

"Esensi pariwisata, berpangkal dari kesadaran ini," ujar Dirjen Pariwiata, Yoop Ave. Atau mengoperasionalkan keindahan itu dalam konsep bisnis seperti yang diungkapkan Direktur Lembaga Studi Pariwisata Indonesia (LSPI), H Kodyat. Atau lebih gamblang lagi, apa yang dikatakan Wim N. Tambayong, Presiden Direktur Natour Ltd, menyulap keindahan jadi duit."

Problem pariwisata akhirnya berputar pada proses ini. Namun seperti kata Yoop Ave, menjual pariwisata berarti mengembangkannya menjadi industri. Pada tahap ini, timbul kerumitan, bukan saja karena pariwisata termasuk jenis industri jasa yang tergantung pada selera manusia, tapi justru manusia lah yang menjadi titik sentral bisnis wisata.

Selain itu Indonesia termasuk negara yang baru menyadari wisata sebagai sumber rejeki, setelah minyak tidak mampu bertahan sebagai pangeran devisa. "Sehingga industri pariwisata kita baru dilihat sebagai sektor alternatif, bukan bidang yang terintegrasi dengan aktivitas bisnis lain yang perlu ditangani komprehensif dan simultan," ujar Kodyat. "Paling tidak ini gejala awal yang mudah ditangkap saat ini."

YOOP AVE. Agar bermakna.

Tapi Yoop Ave tidak sependapat dengan anggapan pariwisata sebagai rejeki alternatif, karena dalam penanganannya ke masa depan sektor ini akan mempunyai interpendensi secara sektoral, horizontal maupun vertikal. Memang itu yang diharapkan!

Bisnis bepergian

Manusia dalam hidupnya pasti pernah bepergian, entah untuk berlibur, entah untuk tujuan dinas, rekreasi atau tujuan lainnya. Secara sederhana, itulah hakekat pariwisata. Dan tujuan pariwisata sebagai industri adalah bagaimana memikat orang/pengunjung mendatangi satu negara atau obyek wisata sebanyak-banyaknya, dan tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, dan membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya.

Sejalan dengan tujuan ini, maka Kodyat menyadari betapa pariwisata menuntut kompleksitas dalam penyelenggaraannya sebagai bisnis atau industri. "Orang yang bepergian perlu makan, perlu kenikmatan, perlu kebebasan, perlu penginapan, butuh keamanan dan menuntut fasilitas untuk berpindah-pindah secara mudah dan cepat."

Kompleksitas dalam penyelenggaraannya, menuntut Pariwisata tidak boleh sebagai unit industri yang jalan sendiri, seperti yang pernah dikeluhkan Yoop Ave. Namun dengan dibentuknya Direktorat Pariwisata, menurut Kodyat, jangan sampai pemerintah akhirnya yang terjun langsung dalam perdagangan pariwisata. "Pemerintah cukup menciptakan iklim yang memikat, sementara pelaksanaannya diserahkan kepada sektor swasta," Kodyat menganjurkan.

Sejak ditargetkan pemasukan sejuta wisata tahun 1983, angka itu belum pernah tercapai. Tapi Yoop Ave menunjuk kemajuan menggembirakan, karena dalam semester pertama tahun ini, ada lonjakan sebesar 9,6 persen dalam jumlah arus wisata ke Indonesia dibanding periode yang sama tahun lalu. Dan menurut Tambayong, tahun ini angka wisatawan yang mengunjungi Indonesia, bisa mencapai 700 ribu orang.

Trend ini menggembirakan Yoop Ave, karena dengan demikian di tengah suara minor sektor lain akibat resesi, "hanya pariwisata yang mampu bersuara major, kendati dalam pariwisata kita harus bersaing dengan 145 negara. Berlainan dengan minyak yang hanya berputar pada masalah persaingan antara beberapa negara OPEC dan non-OPEC.

Mendandan kulit

Konsekuensi industri pariwisata yang masih baru, bisa terlihat dalam pendadanan obyek-obyek wisata yang menurut Kodyat baru pada tahap membedaki kulit luarnya saja. Atau ibarat ibu rumah tangga, "kita baru mementingkan pendandanan pintu masuk, sementara bagaimana wajah isi rumah belum sepenuhnya tertata rapi.

Obyek wisata di Indonesia memang banyak, tapi menurut Yoop Ave, baru beberapa saja yang dirias memadai untuk memberi kenyamanan lengkap bagi wisatawan, seperti Danau Toba, Borobudur dan tentu saja Bali. Untuk obyek-obyek wisata lain, apa boleh buat, belum tertangani.

Kesiapan Indonesia menerima arus wisata, nampaknya baru tertangani apik di pintu masuk seperti Cengkareng, Polonia, dan Denpasar. Di sini, para turis benar-benar merasakan, mereka adalah raja. Seturun dari pesawat disambut kalungan bunga dan tari-tarian serta berbagai kelemahlembutan. Tapi persoalan bagi wisatawan muncul, setelah mereka beranjak menjauhi pintu masuk.

Yoop Ave mengakui keadaan ini. Memang belum mungkin menyediakan semua fasilitas yang maksimal untuk semua obyek wisata di Indonesia. Masalahnya, tentu saja dana.

Tapi terlepas dari itu, suatu industri pariwisata yang sophisticated, membutuhkan proses panjang, kendati di tengah kekurangan itu Indonesia kini boleh bangga, seperti yang diungkapkan Yoop Ave, bahwa di negara Asean, industri pariwisata Indonesia telah tumbuh semacam metamorfosa baru. "Suatu perubahan total telah terjadi." Tentu saja yang dimaksud dengan perubahan total disini adalah penanganan yang terpadu, bukan lagi sekedar alternatif.

Namun berbeda dengan kemjuan arus pengunjung yang diungkapkan Yoop Ave, Tambayong dari Natour melihat ada semacam stagnasi kepariwisataan kita. Tingkat penghunian kamar-kamar hotel pada bulan Juni-Juli tahun ini, merosot ke titik terendah. Kendati yakin bahwa kemerosotan lebih jauh lagi tidak mungkin dialami, namun dia juga cemas pada kenyataan lain bahwa dalam dua tahun terakhir di kota-kota besar di Indonesia, pembangunan fasilitas pariwisata, seperti hotel dan tempat-tempat rekreasi, hampir tidak ada.

Sementara itu biaya perjalanan di Indonesia termasuk mahal. Hampir 86,7 persen dari dana seorang wisatawan, dihabiskan untuk membayar tiket pesawat terbang, bila mereka memilih masuk dan bepergian di Indonesia lewat udara. Sementara fasilitas angkutan darat maupun udara belum memadai untuk menjangkau semua obyek wisata di seluruh tanah air yang ribuan jumlahnya.

Promosi

Ketiga orang yang menekuni dunia pariwisata ini mengakui bahwa selain kekurangan dalam sarana kepariwisataan, kendala lain dalam menunjang kemajuan selama ini adalah promosi. Alasannya, tentu dana lagi.

Contoh yang cukup gamblang, adalah bagaimana sulitnya nama Indonesia terkenal di luar negeri. Padahal, seperti yang diungkapkan Yoop Ave, untuk promosi ini dia bekerjasama dengan kedutaan dan perwakilan kita di negara lain. Indonesia untuk segelintir masyarakat Barat berkantong tebal yang menjadi sasaran promosi kita, identik dengan Bali.

Padahal Amerika misalnya, telah menjadi nama yang terkenal bagi orang Indonesia bahkan sejak Taman Kanak-kanak. Sedangkan Indonesia di luar negeri, lebih terkenal dalam konteks politik dan ekonomi. Karena itu menurut Kodyat, promosi di masa mendatang harus disasarkan pada pengenalan Indonesia sebagai obyek wisata, bukan hanya Bali.

Dia menyebut pengenalan Indonesia seperti yang dilakukan Garuda belum efektif karena booklet yang disiapkan tidak praktis, selain juga mutu cetaknya yang terlalu luks, sehingga ada resiko biaya bila diproduksi secara massal. Dari melihat cara promosi pemerintah Belanda lewat perusahaan penerbangannya, KLM, adalah contoh yang efektif. Mutu cetaknya sederhana, tapi presentasinya kena dan menggugah.

Dan dari data-data dihimpun oleh LSPI, pengenalan Indonesia di luar negeri lebih banyak disebabkan informasi dari mulut ke mulut. Sedangkan yang mengetahui dari promosi terencana pihak Indonesia, hanya 2 persen dari total wisatawan asing yang masuk kesini.

Wim N. Tambayong

Bagi masyarakat Barat beberapa tahun lalu, buku Bill Dalton cukup membantu menyebar luas obyek wisata. Tapi buku yang agak nakal, karena menyinggung soal korupsi segala ini, akhirnya dilarang masuk Indonesia.

Untuk memperkenalkan Indonesia di luar negeri, Natour pernah melakukan kerjasama dengan pihak biro perjalanan asing. Tapi masalahnya terbentur pada kesiapan kita untuk kerjasama seperti itu, karena kurangnya promosi. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjaring minat wisata yang tidak hanya mengunjungi satu negara saja di musim pelancongannya. "Tapi pengorganisasian kerjasama dengan pihak luar ternyata cukup sulit," ujar Tambayong.

Untuk memberi penerangan yang tepat dan benar, pemerintah kata Kodyat perlu memberi dukungan. "Bila kurang mampu dalam penggarapannya serahkan saja sama swasta yang bisa," katanya.

Bintang non-bintang

Salah satu kelemahan dalam kesiapan Indonesia menarik minat wisatawan asing, adalah antisipasi pada penyediaan fasilitas di hotel-hotel mewah berbintang yang umumnya ada di kota-kota besar. Padahal dalam benak para turis yang masuk ke Indonesia, kota besar hanyalah tempat singgahan belaka. "Mereka ingin pergi jauh dari kota, menghindari kebisingan yang menjadi penyakit lama di Barat," katanya.

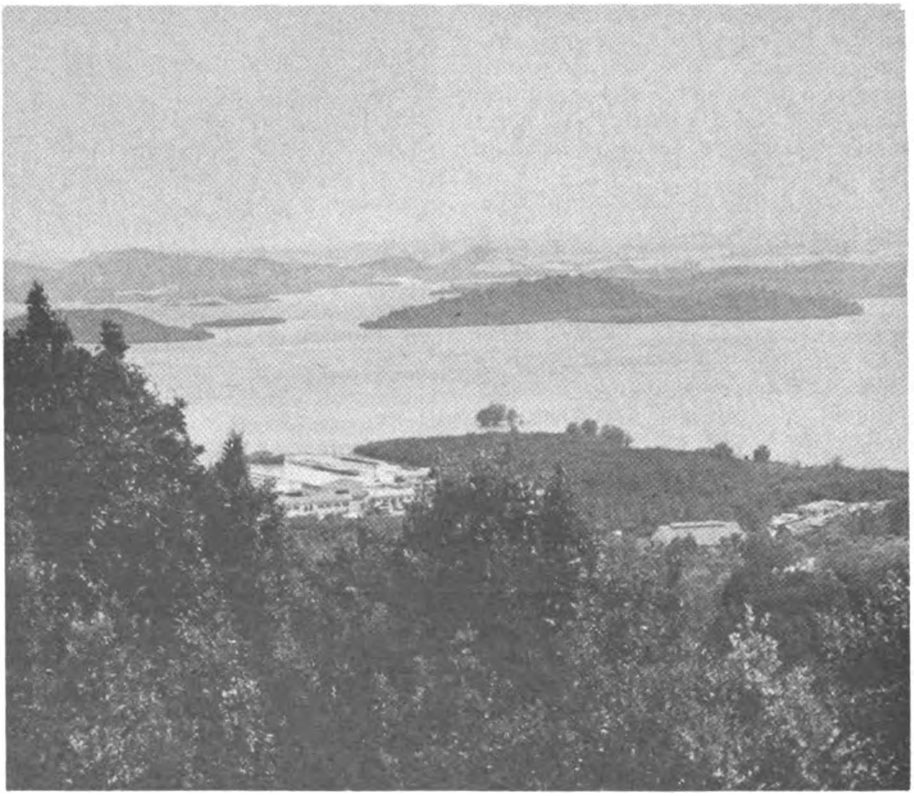

Ada kendala dalam promosi.

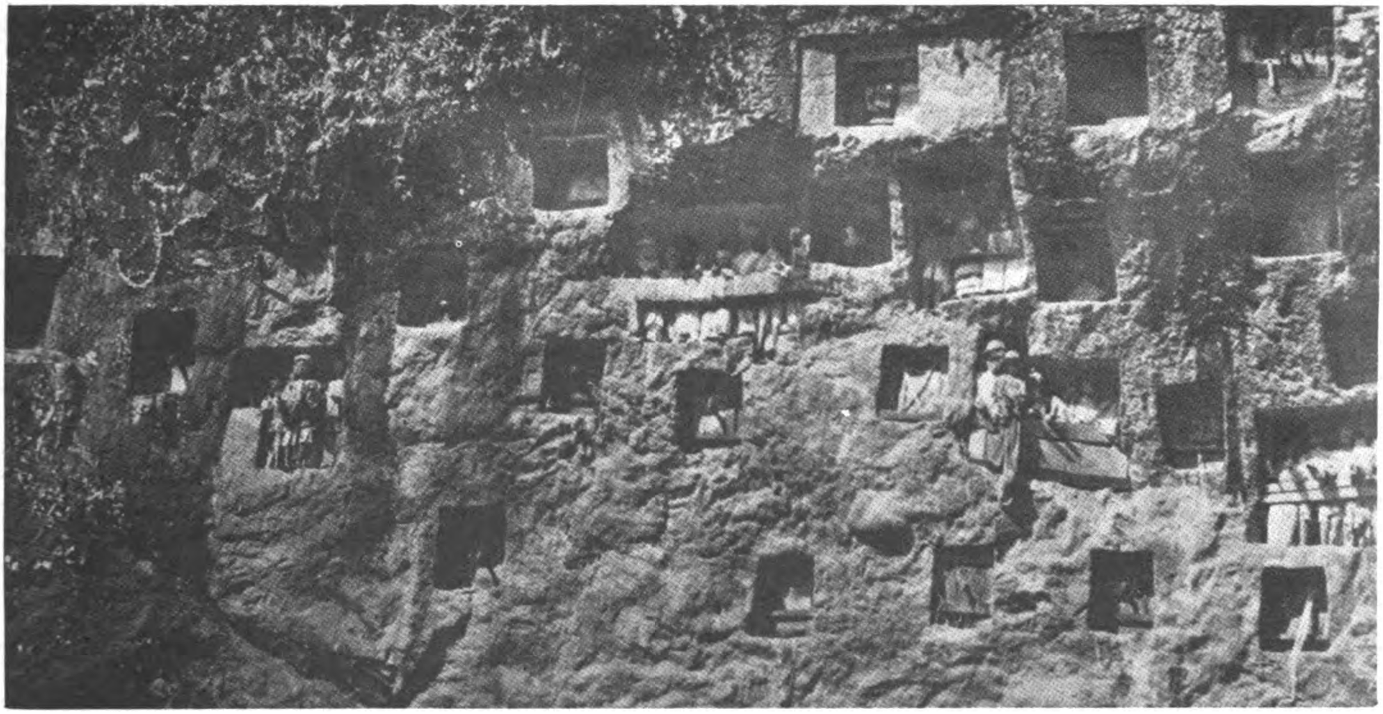

Yang ingin digalakkan adalah pariwisata budaya.

Dan tragisnya lagi, peningkatan fasilitas di hotel-hotel berbintang umumnya menyangkut hotel yang merupakan jaring dari hotel-hotel internasional, yang setelah devisa masuk, devisa itu akan kembali lagi ke luar negeri.

Dan tragisnya lagi, peningkatan fasilitas di hotel-hotel internasional, yang setelah devisa masuk, devisa itu akan kembali lagi ke luar negeri.

Karena itu bekas wartawan yang sejak dulu menekuni dunia pariwisata ini, menganggap penting perbaikan fasilitas dan kenyamanan di hotel-hotel tanpa bintang dan losmen yang berlokasi dekat dengan obyek wisata. Karena dengan cara itu, pemasukan devisa langsung terasa bagi kegiatan ekonomi dan pendapatan dalam negeri. "Yang paling penting adalah bagaimana menciptakan fasilitas yang sama antara hotel-hotel berbintang dan fasilitas non bintang lainnya," kata Kodyat.

Orientasi akomodasi pada hotel-hotel berbintang, mencerminkan sasaran turisme kita terlalu diarahkan pada mereka yang kaya raya. Padahal pelancong dari barat yang masuk kesini, tidak semuanya orang kaya. Mereka umumnya kelompok kelas menengah, yang tidak kaya, tapi miskin juga tidak. Mereka berwisata ke luar negeri setelah menabung cukup lama.

Jadi turis untuk kelas 15 sampai 20 dolar, juga harus menjadi sasaran yang mesti dijaring dalam kebijakan kepariwisataan. Sebab menurutnya, mereka inilah yang umumnya mau makan di warung Tegal, belanja di kakilima dan tidur di losmen sederhana.

Potensi domestik

Yoop Ave tidak sependapat kalau dikatakan sasaran pariwisata kita dititik beratkan pada upaya menjaring turis asing. "Turis asing memang penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah turis domestik, ujarnya.

Dari segi potensi, turis domestik menyumbang 30 persen dari penerimaan di sektor pariwisata. Dan musim panen di Indonesia adalah pada saat Idul Fitri, liburan sekolah dan akhir tahun. Di saat Idul Fitri saja, jumlah uang yang beredar di Indonesia seiring dengan arus mudik, mencapai 3 trilyun, menurut perhitungan kasar.

Dan dikemudian hari, jumlah penduduk Indonesia yang 167 juta saat ini akan memainkan peranan besar dalam industri pariwisata, sejalan dengan kemajuan pendapatan yang meningkat dari tahun ke tahun. "Sebab semangat melancong, akhirnya sangat tergantung pada kemampuan kantong,"kata Yoop Ave. "Untuk menumbuhkan pariwisata di dalam negeri kita memang membutuhkan teknokrat pariwisata."

Sama seperti minyak. Dulu menurut pengamatannya, industri minyak Indonesia ditangani oleh kelompok profesional asing. Tapi sekarang, setelah melalui proses panjang, lahirlah generasi minyak pertama Indonesia. "Pariwisata pun membutuhkan proses demikian," katanya.

Wisata budaya

Kendati industri pariwisata dalam konsep dasarnya adalah upaya menjual keindahan, keunikan dan hal-hal khusus, namun bagi Indonesia seperti diungkapkan ketiga tokoh ini, pariwisata yang ingin digalakkan adalah pariwisata budaya.

Karena itu Borobudur dan Bali serta Jogyakarta yang menjadi gudang kekayaan budaya Indonesia, menjadi obyek utama. Ini berarti Indonesia tidak mengembangkan pariwisata judi, seperti Amerika dengan Las Vegas-nya dan Macao di Asia. Indonesia juga tidak mengembangkan minat pariwisata dengan menawarkan prostitusi, seperti beberapa kota di Asia.

Tapi terlepas dari sektor mana yang mau ditonjolkan sebagai komoditi wisata, apa yang disebut Yoop Ave sebagai "salesmanship" tetap penting. "Kelemahan kita terutama dalam bidang dan kemampuan yang satu ini." Dia menunjuk kurangnya promosi, selain disebabkan dana yang menciut, juga disebabkan faktor kelemahan salesmanship.

Hanya kelemahan bagi bobot wisata yang mengandalkan budaya sebagai komoditi, memerlukan apresiasi tinggi. "Berarti kita tergantung pada wisatawan intelektual yang memiliki apresiasi budaya tinggi," ujar Kodyat.

Kunjungan puteri almarhum John Kennedy, Caroline Kennedy ke Jogjakarta dalam rangka bulan madu baru-baru ini, tentu saja merupakan promosi tersendiri. Sementara kehadiran perahu layar tradisional Phinisi Nusantara dalam Expo 86 di Vencouver, Kanada, juga diharap bisa menjadi pendorong mendunianya pariwisata di Indonesia.

Dan apakah pariwisata mampu menjadi andalan devisa, baik Tambayong, Kodyat dan Yoop Ave menjawab "pasti." Tapi masalahnya terpulang pada penanganan sektor itu di dalam negeri sehingga memikat. Jangan menjadikan pariwisata sebagai sumber rejeki alternatif, seperti yang dikhawatirkan Kodyat dan Yoop Ave.

Potensi pariwisata di dalam negeri, baik obyeknya maupun pengunjungnya sangat banyak. Tapi ibarat primadona, dia harus didandani agar lebih menggairahkan lewat berbagai daya pikat yang melekat padanya.☐

Soegiyanto/Badrul

KOMENTAR

Mahasiswa & Kodok

Tak sedikit reaksi yang muncul tatkala sebuah suratkabar terbitan Semarang — lalu dikutip secara luas oleh sejumlah suratkabar ibukota — menampilkan foto dan berita 'mahasiswi gigit kodok'. Menurut berita tersebut, seorang mahasiswi yang mengikuti masa perkenalan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro disuruh oleh seniornya untuk menggigit kodok (mentah). Foto close up yang menyertai berita tersebut dengan jelas mempertontonkan adegan tersebut.

Sejumlah anggota masyarakat menyampaikan reaksi cukup keras. Sedang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengisyaratkan perlunya rektor mengambil tindakan keras. Dan pihak kepolisian menyatakan siap bertindak bila ada pengaduan korban yang bersangkutan — karena ini memang merupakan delik aduan.

Akan tetapi diluar dugaan, mahasiswi yang bersangkutan — dan begitu pula orangtuanya — justru menyatakan rela dan tak merasa dirugikan dalam peristiwa tersebut. Bahkan sebaliknya lebih menonjolkan rasa syukur karena dapat diterima di fakultas kedokteran. Pers juga mengutip beberapa mahasiswa yang membeberkan bahwa di lingkungan fakultas kedokteran tersebut gigit kodok adalah hal biasa sebagai bagian dari uji mental. Bahkan terasa ada tudingan dari para mahasiswa itu bahwa masyarakat dan pers yang tak memahami 'dunia dan lingkungan mahasiswa kedokteran' telah memojokkan mereka.

Bilamana pernyataan seperti itu mewakili opini dan jalan pikiran kampus kedokteran universitas tersebut, kiranya jelaslah bahwa sudah tak terdapat lagi sambung rasa dengan masyarakat. Putuslah sudah jembatan komunikasi dan sambung rasa. Apa yang ternyata tak disukai dan dianggap tak pantas oleh masyarakat, justru dianggap hal yang biasa dan wajar saja di kampus tersebut. Dan apakah ini juga akan berlanjut nantinya dalam menjalankan profesi sesudah menamatkan pendidikan? Apakah ini yang memang dipilih? Pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh keluarga kampus itu sendiri ....

Kamtibmas

Awal September ini Kapolri Letjen Pol M. Sanoesi mencoba menjelaskan kenapa sekarang ini pejabat-pejabat keamanan masih mengatakan bahwa kamtibmas — keamanan dan ketertiban masyarakat — tetap terkendali. Kapolri kurang lebih menyatakan bahwa kesimpulan itu diambil setelah memperbandingkan angka jumlah kejahatan beberapa tahun lalu dengan sekarang. Jumlahnya relatif sama. Sementara itu jumlah penduduk bertambah. Artinya kejahatan tidak meningkat. Dan lebih jauh ini diartikan bahwa situasi baik, aman dan terkendali.

Demikianlah bahasa dan cara para penanggung jawab pelaksana kamtibmas menyimpulkan keadaan. Tak diragukan, kesimpulan matematisnya memang demikian. Akan tetapi tentang kamtibmas ini, masyarakat cenderung tak memahami bahasa dan kesimpulan yang matematis seperti ini. Bahasa dan cara masyarakat menyimpulkan adalah bahasa rasa dan pengalaman nyata sehari-hari.

Dan apa yang aktual dalam masalah kamtibmas hari-hari belakangan ini? Copet massal di bus kota terjadi hampir setiap hari di ibukota. Dan begitu pula tak ada hari tanpa berita penjambretan, perampokan, penganiayaan, pencurian, perkosaan dan segala macam peristiwa kriminal lainnya. Santapan pagi ini terhidang setiap hari di koran-koran. Begitu pula berita-berita tentang aneka penjarahan dan perampokan di desa-desa di berbagai penjuru tanah air. Beruntunglah mereka yang hanya membaca dan tak sampai mengalaminya secara nyata. Tapi pada alam bawah sadarnya, setiap orang sama-sama menyimpan kecemasan, "jangan-jangan besok ..."

Nah, bagaimana menghilangkan rasa cemas seperti ini? Bagaimana menjaga rasa terjamin dan menjamin rasa aman? Pembeberan kesimpulan berdasarkan angka yang matematis sifatnya adalah baik, tapi tidak memadai. Adalah lebih efektif bila masyarakat melihat sikap cepat tanggap dan kemampuan gerak cepat aparat kepolisian dan aparat keamanan lainnya setiap kali muncul tindak kriminal. Begitu terjadi copet massal lebih dari satu kali di atas bus kota, begitu harus nampak tampilnya polisi. Meminjam istilah yang pernah diucapkan seorang perwira Polri "muncul, babat". Untuk segala gangguan kamtibmas. Memang bukan hal mudah segera menangkap pelaku kriminal, tetapi bila masyarakat melihat sikap tanggap dan gerak cepat polisi, rasa percaya diri dan keberanian masyarakat untuk berpartisipasi menghadapi kriminalitas juga akan bangkit. Lambat atau cepat!

Porkas

'Totalisator' yang dikaitkan dengan sepakbola — tapi dikombinasi dengan tebakan abjad A sampai N — dan diberi nama Porkas telah berlangsung beberapa waktu lamanya. Dengan cepat ia merambat ke seluruh penjuru Nusantara dan menjadi kegemaran amat banyak orang. Terutama dari kalangan masyarakat berpenghasilan sedang dan kecil.

Hasilnya? Sepanjang yang telah disampaikan pemerintah cq Departemen Sosial, berhasil dihimpun dana yang cukup besar. Sebagian telah disalurkan untuk pembinaan olahraga. Pernah juga dimanfaatkan untuk membiayai beberapa kali siaran langsung sepakbola Piala Dunia. Tapi cerita burung bahwa ada dana eks Porkas yang secara tetap disisihkan untuk Golkar, adalah tidak benar dan telah dibantah.

Porkas yang pelaksanaan sehari-harinya dikelola oleh swasta pada pokoknya memang haruslah diakui telah membawa manfaat tertentu. Namun iapun tak sepenuhnya luput dari kritik. Dan harus diakui bahwa beberapa dari kritik itu juga mengandung kebenaran. Salah satu kritik adalah percikan-percikan penampilannya yang mengarah kepada bentuk permainan judi. Dan kritik lainnya adalah kepada beberapa ekses yang ditimbulkannya. Terakhir seorang tokoh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari Jawa Timur sempat mengutarakan pengaruh negatif Porkas kepada pekerja-pekerja berpenghasilan rendah. Ia mengutarakan betapa sejumlah besar pekerja yang hanya berpenghasilan ratusan rupiah per hari telah kecanduan Porkas — harga kupon termurah Rp. 300 per lembar — dan jelas merupakan suatu keadaan yang tidak menguntungkan. Makin banyak anggota masyarakat berpenghasilan pas-pasan yang kecanduan menegak Porkas, makin besar dampak sosialnya secara negatif. Dari sudut moral maupun ekonomis.

Seperti yang dijanjikan oleh pejabat pemerintah, mungkin suatu review atau kaji ulang perlu dilakukan terhadap penyelenggaraan Porkas. Harus diperiksa kembali plus minusnya. Bila minusnya lebih besar ia perlu dihapuskan atau setidak-tidaknya bila ingin diteruskan hendaknya dicarikan jalan untuk membatasi eksesnya yang membahayakan masyarakat.

Kebijaksanaan 12 September

"Kalau sekarang dilakukan devaluasi, bukan maksud pemerintah menipu rakyat"

Hingga detik-detik terakhir sebelum wajah Drs Radius Prawiro — Menteri Keuangan RI — muncul dilayar TV Jumat malam 12 September, masyarakat banyak tetap percaya bahwa pemerintah takkan mengambil kebijaksanaan devaluasi rupiah. Apalagi sebelum ini berkali-kali sejumlah tokoh pemerintahan seakan-akan menjamin bahwa tindakan seperti itu takkan diambil. Dan tingkat kepercayaan rakyat selama ini terhadap pemerintah memang cukup tinggi. "Meskipun sebelumnya pemerintah menyatakan takkan melakukan devaluasi, tapi langkah tersebut terpaksa harus diambil sebagai obat mujarab. Bukanlah maksud pemerintah untuk menipu rakyat," ujar Sudharmono SH pada dua hari pertama setelah berlakunya kebijaksanaan 12 September, di Jayapura, Ternate dan Menado. Berkunjung ke tiga propinsi selaku Ketua Umum Golkar, agaknya Sudharmono SH merasa perlu memberikan penjelasan-penjelasan langsung kepada masyarakat pada setiap kesempatan.

Secara jujur, Sudharmono mengakui bahwa kebijaksanaan ini mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan anjloknya harga minyak bumi ke tingkat harga yang diluar perhitungan pemerintah. Pada bulan Januari, ketika pemerintah mengajukan anggaran belanja negara 1986/1987 pemerintah sudah menyadari bahwa harga minyak turun. Maka pemerintah memang memproyeksikan angka dibawah harga yang ditetapkan OPEC sebesar US$ 29 per barrel, yaitu sebesar US$ 25. "Tapi kemudian dalam 10 bulan terakhir harga minyak kita merosot bahkan anjlok". Pendapatan devisa menurun, maka terpaksa dilakukan tindakan devaluasi sebagai salah satu langkah penyelamatan. Menyelamatkan cadangan devisa, sekaligus mencoba kembali ekspor non migas dan sebaliknya menekan impor barang yang sebenarnya sudah diproduksi di dalam negeri.

Penjelasan yang terperinci juga diberikan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro. Baik melalui TV maupun kepada pers. "Sasaran utama keputusan ini adalah untuk menjamin kelanjutan pembangunan yang diamanatkan rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat", ujar Radius. Dan Radius memberi penjelasan selengkapnya sebagai berikut ini.

Minyak Bumi dan Devisa

"Seperti yang telah seringkali diingatkan bapak Presiden dalam berbagai kesempatan selama tiga terakhir, terutama dalam Pidato Kenegaraan 15 Agustus yang lalu, maka dewasa ini ekonomi kita sedang menghadapi ujian dan tantangan berat". Tantangan berat itu bersumber kepada merosotnya harga minyak bumi dengan sangat tajam dalam waktu sangat singkat. Disamping itu, harga-harga kebanyakan komoditi pertanian dan pertambangan di pasaran dunia juga masih tetap rendah. "Menurunnya harga minyak bumi di pasaran dunia telah kita perkirakan sebelumnya. Namun penurunan harga yang sangat tajam dalam waktu singkat adalah diluar dugaan dan tak ada satu pihak pun di dunia yang memperkirakan sebelumnya".

Drs. Radius Prawiro

Pada waktu persiapan APBN 1986/-1987 diperkirakan bahwa harga minyak bumi akan turun dari US$ 28 menjadi US$ 25 setiap barrel, dan kalaupun lebih menurun lagi maka akan bergerak sekitar US$ 20 setiap barrel. Pada bulan Januari 1986 harga minyak bumi masih berada di atas US$ 25 setiap barrel. Akan tetapi dalam enam bulan terakhir ini harga minyak bumi di pasaran dunia telah merosot dengan sangat tajam, sampai pernah di bawah US$ 10 setiap barrelnya. Akhir-akhir ini harga minyak bumi kita berkisar sekitar US$ 12 setiap barrel.

Kemerosotan harga minyak bumi yang sangat tajam dalam waktu sangat singkat di pasaran dunia adalah akibat langsung daripada banjir minyak bumi yang bersumber kepada peningkatan produksi secara tajam oleh sejumlah negara-negara produsen minyak bumi yang tidak mampu mengendalikan diri. Banjir minyak bumi tersebut langsung menarik harga minyak bumi ke bawah.

Meskipun ada tanda-tanda awal bahwa harga minyak bumi akan mengalami kenaikan menuju pada tingkat harga baru yang lebih mantap dan meskipun sudah ada kesepakatan di antara negara-negara anggota OPEC untuk membatasi produksi selama bulan-bulan September dan Oktober, namun pasaran minyak bumi tetap mengandung banyak ketidakpastian. Pasaran minyak bumi dunia telah menjadi pasaran yang rapuh, sehingga harga minyak bumi sangat sulit diperkirakan perkembangannya.

Dalam pada itu walaupun penerimaan dalam negeri dapat kita tingkatkan berkat adanya undang-undang perpajakan yang baru, namun penerimaan negara dari minyak bumi masih merupakan sumber yang terbesar. Demikian pula, walaupun ekspor non migas dapat kita tingkatkan berkat berbagai kebijaksanaan yang telah diambil dalam tahun-tahun terakhir ini dan berkat peningkatan produksi barang-barang ekspor non migas, namun bagian terbesar penerimaan devisa kita masih berasal dari ekspor minyak dan gas bumi.

"Karena itu merosotnya harga minyak bumi mengakibatkan berkurangnya penerimaan devisa dan berkurangnya penerimaan negara dalam jumlah yang besar pula."

Ada perkiraan bahwa harga minyak bumi dalam tahun sembilan puluhan akan menguat kembali, namun perkembangan yang acapkali tidak terduga-duga selama ini mengakibatkan perkiraan kuatnya kembali harga minyak bumi tadi belum dapat diandalkan. Andaikata pun harga minyak bumi dalam dasawarsa sembilan puluhan nanti benar-benar menguat, maka saat ini kita tetap menghadap dua masalah yang sangat mendesak; yaitu: (1) bagaimana mengatasi akibat yang sangat parah dari merosotnya harga minyak bumi dewasa ini; dan (2) bagaimana membawa perekonomian kita selamat melewati rapuhnya pasaran minyak bumi antara sekarang hingga tahun-tahun sembilan puluhan nanti.

Seperti tadi dikemukakan harga minyak bumi membawa akibat langsung terhadap neraca pembayaran maupun APBN. Tanpa langkah-langkah untuk segera mengatasinya sejak dini, maka kemerosotan harga minyak bumi tadi akan mempunyai pengaruh yang luas pada tingkat pendapatan masyarakat, la-

Untuk memacu ekspor non migas.

pangan kerja dan kegiatan ekonomi kita pada umumnya. Jika dewasa ini akibat langsung dari kemerosotan harga itu seolah-olah belum terasa meluas, maka hal itu disebabkan oleh tiga hal utama: (1) ketahanan ekonomi Indonesia yang telah sangat meningkat selama 20 tahun terakhir; (2) usaha Pemerintah secara terus-menerus untuk melindungi masyarakat terhadap akibat gejolak tajam pasaran minyak bumi di pasaran dunia; dan (3) keseluruhan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu, antara lain peningkatan penerimaan negara di luar minyak dan gas bumi, pengerahan tabungan masyarakat, pemupukan cadangan devisa, penjadwalan kembali proyek-proyek besar dan berbagai langkah lainnya.

Devaluasi 45%

Berdasarkan perkembangan-perkembangan tadi, Pemerintah menyimpulkan bahwa langkah terpokok yang harus diambil sekarang adalah menjaga agar neraca pembayaran kita dalam keadaan yang cukup sehat untuk memelihara jalannya pembangunan.

"Untuk itu Pemerintah telah mengambil keputusan mengadakan devaluasi nilai mata uang Rupiah kita. Besarnya tingkat devaluasi itu adalah 45% dari nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang berlaku saat ini. Adapun nilai tukar setelah langkah devaluasi tersebut akan berlaku mulai tanggal 12 September 1986 pukul 20.00 WIB. Jika kurs tengah hari ini sebesar Rp 1.134 untuk satu dollar Amerika Serikat, maka pada saat mulai berlakunya devaluasi ini kurs tengah itu menjadi Rp 1.644 untuk satu dollar Amerika Serikat."

Dengan devaluasi ini neraca pembayaran kita akan dapat dipertahankan pada tingkat yang sehat, karena cadangan devisa kita akan dapat dipertahankan pada jumlah yang cukup untuk mengamankan jalannya pembangunan dan kelancaran perekonomian masyarakat. Di satu fihak, barang-barang ekspor non migas kita akan lebih mempunyai daya saing di pasaran internasional, sedangkan di lain fihak, impor barang-barang jadi akan berkurang karena harganya akan lebih mahal. Dengan demikian diharapkan kegiatan industri dalam negeri akan makin bergairah, karena kapasitas produksi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk memenuhi pasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor. Hal itu merupakan langkah yang penting untuk memberi perlindungan yang lebih efisien terhadap produksi dalam negeri dan sekaligus mendorong ekspor non migas. Pada gilirannya semuanya itu berarti akan memperluas kesempatan kerja dan memberi rangsangan terhadap kegiatan ekonomi pada umumnya; sehingga dapat dijamin kelangsungan pembangunan dalam tahun-tahun berikutnya.

Agar langkah devaluasi ini dapat mencapai tujuan dalam arti yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya, maka Pemerintah akan terus mendorong kegairahan dunia usaha dan kegairahan kegiatan ekonomi masyarakat luas. Untuk itu Pemerintah tidak berniat menaikkan tarif listrik, telekomunikasi, kereta api dan bis kota yang disediakan oleh badan-badan usaha milik negara.

"Pemerintah menyadari bahwa dapat terjadi kenaikan harga karena devaluasi ini, namun mengingat cukup tersedianya bahan-bahan kebutuhan pokok, barang-barang keperluan masyarakat dan jasa-jasa lainnya maka kenaikan itu akan berada pada tingkat yang wajar, tidak melonjak-lonjak."

Dalam hubungan ini Pemerintah akan tetap melaksanakan APBN 1986/1987 dengan penuh kewaspadaan serta dengan tetap mengusahakan penghematan-penghematan pengeluaran negara dengan mengutamakan hal-hal yang benar-benar mendesak. Demikian pula akan terus-menerus diusahakan penggalian sumber-sumber penerimaan negara di luar minyak dan gas bumi. Dalam hubungan ini kebijaksanaan perbankan juga akan tetap dilaksanakan dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi tanpa membahayakan stabilitas moneter yang tetap kita perlukan.

Keseluruhan perkembangan dan langkah-langkah ini menunjukkan betapa mendesaknya terobosan-terobosan yang harus kita lakukan untuk sungguh-sungguh meningkatkan ekspor non migas guna memperbesar penerimaan devisa dan memperluas lapangan kerja.

Dengan demikian kita mempertebal tekad untuk mengalihkan andalan penerimaan devisa dan penerimaan negara pada bidang non migas.

"Saya ingin mengingatkan kembali ajakan Bapak Presiden dalam Pidato Kenegaraan 15 Agustus yang lalu, agar kita semua seluruh bangsa, baik Pemerintah dan badan-badan penyelenggara negara lainnya, dan seluruh lapisan masyarakat: para usahawan, industriawan, badan-badan usaha milik negara dan sektor ekonomi lainnya turut berusaha untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi, bahkan kalau perlu disertai pengorbanan sementara untuk menciptakan kemajuan di waktu kemudian dalam jangka panjang." ☐

Gerakan Non Blok, Forum Negara-negara Dunia Ketiga

Sekitar KTT VIII Gerakan Non Blok

INDONESIA
INDIA

Delegasi RI di antara delegasi negara lain dalam KTT Non Blok VIII.

Diselenggarakannya KTT Gerakan Non Blok mengingatkan kita kembali kepada Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang mencetuskan ide didirikannya Gerakan Non Blok. Indonesia sebagai sponsor Konperensi Bandung sangat berperan ikut melahirkan Gerakan Non Blok, bahkan merupakan arsitek dan salah satu pendirinya. Pertemuan Presiden Tito dengan tokoh-tokoh Konperensi AA yakni Ir. Soekarno (Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Mesir), dan Jawaharlal Nehru (India), telah memungkinkan diselenggarakannya KTT Gerakan Non Blok yang pertama di Beograd Yugoslavia bulan September 25 tahun yang silam, yang kala itu diikuti oleh 25 kepala pemerintahan.

Sesuai dengan namanya, Gerakan Non Blok bermaksud menghimpun negara-negara di dunia ini yang tidak termasuk dalam blok Barat yang didominasi kekuatan adi kuasa Amerika ataupun blok Timur yang didominasi kekuasaan Uni Soviet. Motif politiklah yang terutama mendorong berdirinya gerakan ini, dengan tujuan menciptakan kehidupan dunia atas dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.

Kini, baru saja berlangsung KTT VIII Gerakan Non Blok di Harare, Zimbabwe. Konperensi yang dibuka pada 1 September yang lalu diikuti oleh wakil-wakil dari 101 negara anggota, yang konon dihadiri oleh sejumlah 27 presiden, 3 raja, 4 wakil presiden serta 6 perdana menteri, yang kesemuanya mewakili sekitar duapertiga penduduk dunia. Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Presiden Oemar Wirahadikusumah.

Tulisan ini merupakan gambaran tentang berlangsungnya KTT VIII Gerakan Non Blok di Harare, yang disajikan oleh Media Karya berdasarkan laporan dari berbagai sumber.

Indonesia

Wakil Presiden Oemar Wirahadikusumah dalam pidato pemandangan umum pada Sidang KTT tersebut mengemukakan pendapat dan pandangan RI menyangkut berbagai masalah baik yang menyangkut hubungan antar negara-negara non blok sendiri, maupun dalam kaitannya dengan kehidupan global dewasa ini.

Terhadap gerakan pembebasan Namibia di Afrika Barat Daya yang dipimpin oleh organisasi SWAPO, Indonesia menawarkan bantuan berupa latihan ketrampilan, bea siswa, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya guna mempersiapkan kader-kader dalam tugas pemerintahan serta pembangunan negara Namibia merdeka nantinya. RI tegas-tegas mengecam rezim rasis yang melakukan penindasan di Namibia dan Afrika Selatan, serta mendukung perjuangan rakyat setempat dalam membebaskan negerinya dari rezim penjajah Pretoria. Diungkapkan oleh Ketua delegasi RI bahwa cara untuk mengatasi situasi menggawat di Afrika Selatan adalah dikenakannya

HARARE CONFERENCE CENTRE
NON-ALIGNED

Wapres Oemar Wirahadikusumah, menegaskan dukungan.

sanksi internasional terhadap rezim rasisme tersebut. Diharapkan agar negara-negara yang menjadi pelindung dan mitra dagang rezim ini ikut melakukan tindakan berupa sanksi ekonomi terhadap rezim tersebut. Isolasi total terhadap Afrika Selatan harus diwujudkan sehingga sistem yang tidak berperikemanusiaan yang berlangsung di Afrika Selatan itu dapat benar-benar dihapuskan.

Dalam masalah Timur Tengah Wakil Presiden Oemar Wirahadikusumah menegaskan kembali dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia serta solidaritas terhadap perjuangan negara-negara Arab dalam memperoleh kembali hak-haknya yang dirampas serta wilayahnya yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Dikemukakannya akan perlunya suatu konperensi perdamaian internasional mengenai Timur Tengah, dengan catatan bahwa konperensi ini harus didukung oleh negara-negara kekuatan besar.

Pada bagian lain dari pemandangan umumnya, diungkapkan harapan Indonesia agar konflik dan ketegangan di kawasan Amerika Tengah segera dapat berakhir. Indonesia menentang campur tangan asing baik dengan cara destabilisasi ekonomi, politik, maupun intervensi militer terhadap negara-negara berkembang yang sedang mengkonsolidasikan kemerdekaan nasionalnya untuk menegakkan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya sendiri. "Sebab itu dengan taat azas kita mendukung Nicaragua dalam mempertahankan hak, kedaulatan dan keutuhan wilayahnya," tegas Wapres.

Sidang KTT Non Blok VIII di Harare 1986.

Sedang mengenai situasi Asia Tenggara khususnya kemelut di Kamboja, Indonesia mengingatkan kembali akan penegasan para anggota Gerakan Non Blok yang mendukung hak-hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk mencapai ini diperlukan upaya-upaya melalui proses perundingan dan saling pengertian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Wapres mengemukakan bahwa Pemerintah Koalisi Kamboja telah menunjukkan kesediaan untuk mengadakan penyelesaian secara damai.

Dalam menghadapi keadaan ekonomi global dewasa ini, Oemar Wirahadikusumah dalam pidatonya mengajak negara-negara non blok yang sedang membangun untuk bersama-sama mempersiapkan diri baik secara politis maupun kelembagaan guna menyesuaikan diri dengan keadaan serta tantangan-tantangan baru. Dikatakannya bahwa kesulitan yang dialami oleh negara-negara berkembang adalah akibat dari tiadanya keseimbangan serta pemerataan dalam sistem ekonomi global. Disebutkannya contoh-contoh seperti merosotnya harga komodity terutama minyak bumi, membengkaknya pinjaman luar negeri, menurunnya pendapatan per kapita negara-negara yang berkembang, dan sebagainya. Dalam hubungan ini Indonesia menegaskan dukungannya atas dibentuknya Komisi tingkat Menteri negara-negara non blok untuk menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Perundingan dinilai sebagai alat yang baik guna mencapai tata ekonomi internasional baru menuju kepada terwujudnya keharmonisan kehidupan ekonomi global. Demikian Wapres Oemar Wirahadikusmah.

Soal Timor Timur

Walaupun terdapat usaha sementara pihak untuk mengutik-utik masalah Timor Timur, namun kita patut merasa lega bahwa masalah ini tidak berhasil diangkat menjadi bahan pembahasan dalam KTT VIII Gerakan Non Blok. Dalam sidang-sidang di Harare kali ini tidak terdapat kelompok Fretilin baik sebagai peninjau, tamu ataupun undangan. Menurut Menlu Mochtar Kusumaatmadja ketidakhadiran Fretilin dalam KTT itu menunjukkan bahwa perjuangan mereka sudah merosot. Kekuatan mereka di lapangan sudah jauh berkurang, di samping itu juga karena laporan-laporan pemberitaan yang berkumandang di Lisabon sendiri mengenai pembangunan di Timor Timur adalah sangat menguntungkan Indonesia. Menlu Mochtar juga mengemukakan dampak positif dari kunjungan para anggota Parlemen Portugal dari Partai Kristen Demokrat yang telah menyaksikan sendiri keadaan di propinsi RI yang termuda itu.

Terhadap kecaman yang dilancarkan oleh Menteri Luar Negeri Mozambik Joaqin Chissano yang menuduh Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip non blok dengan mengambilalih bekas koloni Portugal Timor Timur, Dr. Mochtar Kusumaatmadja membantah dengan mengatakan tidak benar bahwa Indonesia telah memaksa Timor Timur untuk berintegrasi, seraya mempersilahkan Menlu Mozambik untuk datang berkunjung menyaksikan sendiri keadaan di Timor Timur.

Memang benar pula bahwa organisasi SWAPO yang perjuangannya mendapat dukungan dari Indonesia itu dalam KTT melalui juru bicaranya mengecam Indonesia dalam masalah Timor Timur. Tetapi seperti dikatakan oleh Wapres, kecaman itu dilontarkan oleh delegasi pejuang Namibia karena mereka tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Terbukti mereka segera menyampaikan permintaan maafnya kepada Indonesia setelah mendengarkan pidato Wakil Presiden Oemar Wirahadikusumah.

Arena Kecaman

Mengecam, mendebat dan perang mulut agaknya sudah merupakan acara tetap dalam KTT yang berlangsung maraton enam hari berturut-turut sejak 1 September lalu. Tokoh dan pemimpin Libya Muammar Qadhafi tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan penampilan yang cukup menyolok, sang Kolonel ini ikut manggung dalam KTT. Dikecamnya Dunia Ketiga yang dianggapnya tidak kompak menyokong Libya tatkala negeri ini digempur Amerika Serikat bulan April berselang. Dilontarkannya pula tuduhan bahwa Gerakan Non Blok penuh dengan mata-mata dan kaki tangan imperialis.

Gerakan Non Blok dinilainya tidak relevan dan tidak efektif lagi. Oleh sebab itu menurut Qadhafi gerakan ini tidak punya hak untuk hidup lagi, seraya menambahkan bahwa Libya akan membentuk pasukan internasional untuk melawan AS.

Cukup mengesankan tanggapan pimpinan KTT VIII Robert Mugabe dari Zimbabwe yang mengatakan bahwa tidak semua anggota Gerakan Non Blok menyetujui pendapat Qadhafi itu. Namun dapat difahami apa yang dirasakan oleh Qadhafi yang negerinya menjadi sasaran bombardemen AS. Dalam hubungan ini Mugabe mengingatkan bahwa Qadhafi dapat menyalurkan kecaman-kecamannya melalui Gerakan Non Blok.

Sementara itu Perdana Menteri India Rajiv Gandhi mengungkapkan penyesalannya karena selama periode kepemimpinannya Gerakan Non Blok tidak berhasil menyelesaikan pertikaian Iran-Irak yang sudah berlangsung selama 6 tahun itu. Juga dianjurkannya kepada para negara sahabat untuk mendesak Pakistan menghentikan proyek senjata nuklirnya. Bekas pimpinan Gerakan Non Blok ini sepakat pula untuk bersama-sama mengambil tindakan sanksi ekonomi terhadap rezim rasis di Afrika Selatan, serta mengusahakan kemerdekaan rakyat Namibia selekasnya. Perdana Menteri yang berusia 41 tahun itu menyesalkan bahwa Lautan Hindia yang merupakan zone damai telah menjadi kancah pameran kekuatan kapal-kapal perang, kapal-kapal selam bertenaga nuklir serta pembangunan pangkalan-pangkalan angkatan laut.

Sehubungan dengan perang Teluk Parsi, tak kurang pimpinan PLO Yasser Arafat mendesak negara-negara non blok untuk ikut menghentikannya. Dianjurkannya agar semua senjata diarahkan saja kepada Afrika Selatan dan Israel.

Pada kesempatan lain Menteri Luar Negeri Pakistan Sahabzada Yakub Khan menanggapi positif rencana penarikan mundur 120.000 pasukan Soviet dari Afganistan. "Janji ini harus diikuti dengan tindakan nyata," ujarnya.

Menlu Malaysia Rais Yatim dalam sidang pertama menyatakan bahwa negara dunia ketiga hendaknya lebih menggantungkan dirinya kepada sumber-sumber serta teknologi sendiri. Dituduhnya bahwa negara-negara maju sedang berusaha menurunkan harga komoditi terutama minyak bumi yang justru merupakan penghasilan utama Dunia Ketiga, serta menggunakannya sebagai strategi untuk tetap menekan Dunia Ketiga.

Hasil-Hasil KTT

Pada akhir persidangannya, KTT ke VIII Gerakan Non-Blok mengeluarkan keputusan berupa Deklarasi Politik yang intinya menyerukan penghentian Perang Teluk, mengkhawatirkan meluasnya konflik Kamboja, kesepakatan membentuk dana khusus untuk negara-negara hitam di kawasan selatan Afrika, tentang tak terbayarnya hutang dari sementara negara anggota, mengecam intervensi AS di Nicaragua sebagai melawan hukum dan tak bermoral.

Mugabe dalam pidato penutupan Sidang antara lain mengatakan bahwa apapun perbedaan yang ada pada negara-negara anggota, baik sistem ekonomi ataupun politik masing-masing, tidak menjadi penghalang bagi KTT untuk mengambil konsensus mengenai beberapa masalah. Namun diakuinya pula adanya perbedaan-perbedaan pandangan dalam masalah-masalah tertentu. Ditegaskannya bahwa Gerakan Non Blok telah menyanggupi memberikan dukungan kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional lebih besar lagi, baik di bidang diplomatik, moral maupun material, serta mengucilkan dan menghadapi dengan tegas setiap forum kekuatan opressif, pendudukan dan dominasi. Penggunaan kekuatan dalam hubungan-hubungan antar negara dikecamnya. Dikutuknya intervensi negara-negara besar kedalam urusan dalam negeri negara lain, apalagi menggunakan negara-negara berkembang sebagai medan laga kepentingan negara-negara besar Timur-Barat. Dikecamnya pula perlombaan senjata yang dananya sebenarnya dapat digunakan bagi kepentingan-kepentingan kemanusiaan seperti mengatasi kelaparan, penyakit, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Diserukannya kembali pentingnya diciptakan suatu tata ekonomi internasional baru dan pentingnya dialog dalam rangka itu melalui perundingan global Utara-Selatan. Diungkapkannya kegembiraan tentang akan dibentuknya sebuah Komisi independen guna meningkatkan kerja sama negara-negara Selatan. Direncanakan Komisi ini dipimpin oleh bekas Presiden Tanzania Yulius Nyerere.

Dalam konperensi pers yang diadakan seusai sidang, PM Robert Mugabe menyatakan bahwa KTT sudah mencatat sukses besar. Ke 101 anggota Gerakan Non Blok sepakat dalam dua hal yakni pertama mengecam AS atas tindakannya terhadap Libya, serta yang kedua mendesak diberlakukannya sanksi internasional terhadap Afrika Selatan.

Siapa Pimpinan KTT IX?

Terlepas dari hasil-hasil positif yang dicapai, patut disayangkan bahwa KTT VIII di Harare tidak berhasil mencapai konsensus tentang siapa yang diserahi memimpin Gerakan dan menyelenggarakan KTT ke IX tahun 1989 yang akan datang. Indonesia dan Nicaragua sama-sama mengusulkan diri menjadi calon. Kedua-duanya sama-sama bertahan ngotot tidak bersedia mengalah ataupun mengundurkan diri dari pencalonan.

Dalam kaitan ini Menlu Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa Jakarta mendasarkan tawarannya pada kenyataan bahwa Indonesia tetap memegang teguh prinsip-prinsip Gerakan Non Blok yang benar-benar memainkan peranan penting. Dikatakannya bahwa Indonesia telah mengajukan tawarannya sebagai Pimpinan Gerakan dan penyelenggara KTT IX itu pada pertemuan para Menlu Non Blok di Luanda September tahun lalu. Dan menurut Menlu Mochtar, pencalonan ini lebih dulu diajukan daripada usul Nicaragua.

Karena kesepakatan itu tidak tercapai dalam KTT, maka diputuskan untuk dirembug lagi pada konperensi tingkat Menlu negara-negara Non Blok yang akan diselenggarakan tahun 1988 di Siprus. Prosedur serupa juga ditempuh pada penentuan pimpinan Gerakan dan penyelenggara KTT ke VIII, yang seperti kita ketahui pilihan jatuh kepada Zimbabwe, sebuah negeri berumur 6 tahun dengan jumlah penduduk tidak melebihi penduduk Jakarta. Walaupun demikian, Zimbabwe pantas mendapat pujian akan prestasinya dalam penyelenggaraan KTT ke VIII di Harare baru-baru ini. Dan jelas hal itu tidak terlepas dari faktor kepemimpinan dan pribadi PM Robert Mugabe yang cukup mengesankan.

Kini kita berharap, agar Indonesia berkesempatan pula memimpin Gerakan Non Blok dan menyelenggarakan KTT yang berikut. Keinginan ini adalah wajar dan bukan hal yang dibuat-buat, mengingat Indonesia adalah salah satu pendiri dari gerakan tersebut yang sudah dirintisnya sejak Konperensi Asia Afrika di Bandung.☐

TA Purnomo.

Profesionalisme Politik Dan Peningkatan Peranan DPR

Masalah profesionalisme politik dan peningkatan peranan DPR merupakan topik yang baru-baru ini disoroti dan dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh DPP Golkar, di Jakarta. Empat tokoh pemikir, Dr. Midian Sirait, Drs. Soetjipto Wirosardjono MSc, Dr. Nurcholis Madjid dan Dr. AMW Pranarka tampil sebagai pembicara utama dalam diskusi panel yang dihadiri sejumlah anggota DPP Golkar, anggota FKP di samping para pemikir dari kalangan Golkar.

Diskusi panel yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPP Golkar AE Manihuruk, yang mewakili Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH itu dipimpin oleh Drs. H. Bomer Pasaribu SH, selaku moderator.

Dr. Nurcholis Madjid sebagai pembicara pertama menyampaikan makalah berjudul ''Profesionalisasi Politik Untuk Pembangunan Demokrasi Pancasila'' mengemukakan, langkah pertama menuju profesionalisasi politik ialah pemantapan pendidikan politik yang penuh tanggungjawab. Dengan itu kita akan menciptakan masyarakat yang terbuka, dan bebas, khususnya menyangkut informasi dan komunikasi politik. Kebebasan dan keterbukaan justru merupakan bagian integral demokrasi, termasuk Demokrasi Pancasila.

Profesionalisasi politik mengandung pengertian bahwa politik perlu ditangani secara profesional. Profesional tidak dalam pengertian bayaran, tetapi dalam pengertian keahlian dan kesungguhan. Mereka yang terjun ke dunia politik sadar bahwa politik adalah panggilan pengabdian, dan medan dedikasi, bukan semata-mata pekerjaan untuk mencari kedudukan, uang atau rejeki. Dunia politik adalah perjuangan yang mampu menjangkau masa depan, bukan dalam dimensi kekinian. Bahkan buah perjuangan politik bisa tercapai setelah ratusan tahun, setelah lama pencetus perjuangannya meninggal dunia. ''Perjuangan politik mengesampingkan kepentingan pribadi, mempunyai jangkauan jauh ke depan, dan hasil perjuangan tidak dinikmati sendiri,'' kata Nurcholis .

Dalam proses perkembangan politik di Indonesia, ia melihat perkembangan ke arah profesionalisme. Pembudayaan orientasi program pada kekuatan sosial politik dan peniadaan orientasi ideologi, merupakan langkah menuju profesionalisasi. Orientasi ideologi akan lebih berkecenderungan memanipulasi emosi massa melalui demagog-demagog yang ahli dalam menghasut massa melalui rapat-rapat umum. Melalui para demagog itu tergambar suatu kesan bahwa suatu cita-cita mudah tercapai seperti mendengar pidato.

''Politik perlu ditangani secara professional.''

Kunci kepemimpinan yang profesional tidak terletak pada demagogi, tetapi lebih pragmatis, yaitu memecahkan problem yang dihadapi selaras dengan realitas yang ada.

Dr Midian Sirait, selaku pembicara kedua mengetengahkan bahwa pengertian berpolitik adalah kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum yang perwujudannya adalah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kehidupan berpolitik, rakyat selalu merupakan hulu dan sekaligus muara dari alur berpolitik.

Dalam makalahnya yang berjudul ''Profesionalisasi Politik dan Peningkatan Peranan DPR'' ia mengemukakan bahwa berpolitik harus mempunyai suatu dasar budaya politik yang mencakup logika politik, etika politik dan estetika politik. Bagi Indonesia, semua itu dijiwai oleh Pancasila.

Pada hakekatnya kegiatan berpolitik dapat terjadi pada semua unsur masyarakat, apalagi bila dilihat dari sistem input dan output. Namun kegiatan itu menuntut suatu kemampuan untuk menghayati pertama, kesepakatan bangsa; kedua, logika politik yang mengandung kebenaran dan kenyataan; dan ketiga, etika politik yang mengandung perbuatan baik terhadap sejarah manusia, tujuan bangsa maupun masyarakat itu sendiri. Etika politik menyangkut tatakrama dalam pergaulan agar dapat terwujud hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dalam bagian lain, Midian Sirait menyoroti peranan DPR. Dikatakannya, peranan DPR akan terkait dengan kemampuan para anggotanya untuk menyampaikan perasaan, keinginan dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,. serta kemampuannya mengalokasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, anggaran maupun kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada dasarnya DPR adalah cerminan dari kelompok-kelompok yang hidup dalam masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Dr Midian Sirait, pembicara berikut, AMW Pranarka mengetengahkan bahwa profesionalisasi politik tidak pertama-tama berada atau semata-mata menjadi tanggungjawab anggota DPR, tetapi harus menjadi bagian dari perkembangan organisasi-organisasi sosial politik.

Dalam makalahnya yang berjudul ''Profesionalisme, Demokrasi dan Kualitas DPR Kita'', Dr Pranarka menyatakan, DPR di manapun juga selalu berada dalam suatu konteks politik, hukum dan sosio budaya. Karenanya, dalam menjawab pertanyaan mengenai kualitas

Tidak boleh terlalu marginal.

DPR, kita harus memulai dengan melihat apakah DPR telah melaksanakan fungsi sesuai dengan yang dimaksud oleh konstitusi, baik ditinjau secara mikro maupun secara makro (berkenaan dengan seluruh konstitusi berikut pelaksanaannya).

Peningkatan kualitatif pertumbuhan demokrasi, termasuk peranan institusi dan fungsi perwakilan ditentukan oleh evoluasi kultural masyarakat. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua hal yang menjadi faktor amat penting: kecerdasan dan kesejahteraan. Suasana dan tingkat kecerdasan berikut kesejahteraan masyarakat akan memberi warna dan corak kualitas demokrasi. Dengan perkataan lain, peningkatan kualitas fungsi dan institusi dalam perkembangan demokrasi ditentukan pula oleh berhasil atau tidaknya proses pembangunan.

Ia juga mencatat bahwa orientasi fungsional merupakan masalah pokok dalam perkembangan profesionalisme. Di dalam sejarah politik Indonesia modern terjadinya kelompok-kelompok profesi mempunyai kaitan dengan tumbuhnya orientasi fungsional yang mempunyai kaitan erat dengan sejarah Golongan Karya. Namun perkembangan saat ini nampaknya mengundang beberapa permasalahan, sejauh mana gagasan mengenai golongan fungsional masih merupakan bagian yang esensial di dalam eksistensi Golongan Karya.

Dalam kaitan ini Nurcholis sempat mempertanyakan seberapa jauh perbedaan partai politik dan Golongan Karya. Menurut hematnya perlu dicarikan pemecahan masalah ini sehingga kesamaan derajat Parpol atau kekuatan sosial politik bisa dilaksanakan sebaik mungkin.

Seperti halnya Nurcholis pula, Pranarka berpendapat bahwa pelaksanaan *program oriented* akan memacu peranan organisasi profesi di dalam dinamika demokrasi Pancasila.

Pembicara terakhir, Soetjipto Wirosardjono dalam makalahnya yang berjudul "Utopia, Das Sollen dan Akal Sehat" berpendapat, jaminan atas tegaknya demokrasi Pancasila sebagaimana dikehendaki oleh sistem kenegaraan kita ialah terpenuhinya syarat moral, etika dan norma Pancasila di antara para penyelenggara negara. Integritas pribadi, kepekaan nurani dan moralitas pemegang kekuasaan negara jauh lebih penting daripada rekayasa hukum serta penjabaran konstitusi yang bisa "bengkak-bengkok", karena tidak didasarkan pada norma, etika dan moralitas Pancasila.

Dengan kata lain, pembentukan elit Indonesia dalam arti luas haruslah mengutamakan kriteria integritas pribadi, bukan kriteria loyalitas pada organisasi politik, pengabdian, pasrah nasib pada golongan, dan menagih balas jasa atau andil perjuangan.

Dalam diskusi itu tersimpul suatu kesamaan pendapat bahwa kualitas DPR tidak ditentukan oleh gelar kesarjanaan anggota, tetapi lebih ditentukan oleh integritas pribadi para anggota, khususnya integritas terhadap hati nurani yang berkaitan dengan panggilan pengabdian.

Anggota DPR harus benar-benar sadar bahwa dirinya mewakili rakyat, mewakili pemilihnya, bukan mewakili pemerintah. Apabila anggota DPR tidak mewakili pemilihnya, ia kehilangan keabsahannya sebagai wakil rakyat.

Sutjipto Wirosardjono mempunyai kesan bahwa anggota DPR terbelenggu oleh tata tertib yang dibuatnya sendiri sehingga kehilangan keluwesan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Ia menyebutkan beberapa contoh, betapa DPR tidak peka atau tidak mampu mengungkap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat misalnya kasus ketidak adilan dalam penggusuran tanah, PHK dan berbagai kasus hukum. Ia juga melihat DPR terlalu minim dalam memberikan sumbangan terhadap berbagai keputusan nasional. "DPR tidak boleh terlalu marginal dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan GBHN maupun Repelita," katanya.

Nurcholis mengkhawatirkan terjadinya proses alienasi dalam politik. Masalah ini perlu menjadi perhatian segenap kekuatan sospol. Ia memberi gambaran, bahwa saat ini pasti tidak ada institusi formal yang menginginkan lahirnya partai politik baru. Tetapi apabila aspirasi masyarakat tidak tertampung oleh ketiga kekuatan sospol pasti dorongan adanya partai lain makin besar. Sebagai gambaran pula ia mengungkapkan, apabila golput diijinkan, pasti saat ini pengikutnya akan cukup besar.

Tetapi nada optimis dilontarkan oleh Pranarka bahwa politik merupakan proses yang terus berlangsung. Midian Sirait menyebutkan, selama masyarakat hidup dalam politik, maka politik pun akan hidup dan berkembang terus.

Sejumlah hadirian memberikan tanggapan dalam diskusi itu antara lain Dr Baramuli SH, Rusli Desa, Abdul Salam, Widyapranata, Sariyati Prawoso SH, semuanya dari DPR (FKP) dan Bintan Saragih SH, dosen UI. □

Sugyanto

Tugas ABRI Tidak Makin Ringan

Mewujudkan disiplin nasional agar menjadi bangsa yang produktif.

ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik tetap mempunyai misi untuk mengobarkan semangat kejuangan bangsa. Tugas ABRI pada saat ini maupun pada saat mendatang tidak lebih ringan daripada tugas-tugas generasi pendahulunya, ABRI yang termasuk dalam generasi pembebas. Semangat kejuangan yang telah ditunjukkan dan diwariskan oleh ABRI dari generasi pembebas diharapkan tetap dikobarkan oleh generasi penerus ABRI.

Hal itu merupakan bagian pesan Presiden Soeharto yang disampaikan kepada jajaran pucuk pimpinan ABRI peserta Rapim ABRI 1986 dalam suatu pertemuan di Istana Negara, akhir Agustus.

Kepada segenap warga ABRI, Presiden juga mengingatkan bahwa perkembangan dewasa ini kurang menguntungkan bangsa, khususnya perkembangan perekonomian dunia. Namun, dengan bekal semangat baja sebagai bangsa pejuang, kita akan mampu membuat terobosan untuk mengatasi segala ujian, dan apabila perlu menempuh pengorbanan sementara demi keberhasilan di kemudian hari. "Sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan, ABRI hendaknya mampu menggerakkan seluruh bangsa dalam mewujudkan disiplin nasional agar kita menjadi bangsa yang produktif," demikian harapan Presiden yang disampaikan kepada ABRI.

Rapim ABRI 1986 yang berlangsung di Jakarta selama tiga hari, 27–29 Agustus. Dalam laporannya di depan Kepala Negara, Panglima ABRI Jendral TNI LB Moerdani mengemukakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari perwujudan pemahaman ABRI terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dalam tahun-tahun mendatang.

Dikatakannya, meski dari aspek keamanan tidak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya situasi internasional yang dapat memberikan dampak negatif bagi bangsa, namun TNI ABRI senantiasa bersikap waspada dan siaga.

Rapim juga menyimpulkan, stabilitas nasional, khususnya stabilitas keamanan di dalam negeri mantap dan terkendali.

Pemilihan Umum 1987 mendatang juga mendapat perhatian penuh dari segenap jajaran ABRI. Rapim telah mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai upaya memantapkan stabilitas keamanan demi keberhasilan Pemilu.

Masih dalam rangkaian kegiatan Rapim, beberapa hari sebelumnya berlangsung seminar ABRI 1986 di Bandung, tepatnya 20–21 Agustus.

Pokok-pokok pikiran hasil seminar dituangkan dalam dua dokumen. Pertama, pokok-pokok pikiran TNI ABRI dalam mendukung sukses pembangunan nasional, dan kedua, saran-saran bagi penyusunan rancangan GBHN menghadapi Sidang Umum MPR 1988.

Dalam suatu kesempatan di Istana Merdeka, seusai pertemuan resmi dengan Presiden Soeharto bersama peserta Rapim, Panglima mengemukakan bahwa seminar itu merupakan perwujudan rasa keterlibatan ABRI terhadap apa yang terjadi di sekitarnya dan rasa keterlibatan itu dilaksanakan oleh para perwira ABRI.

Kegiatan itu sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ABRI selalu 'concern' terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Ini berkat pelaksanaan Dwi Fungsi. Mungkin cara penanganan suatu permasalahan mengalami perkembangan, misalnya menempuh cara-cara yang lebih canggih, dan prosedurnya le-

bih ringkas.

Ditegaskannya, seperti halnya anggota ABRI yang aktif mengikuti perjuangan fisik 1945–1949, anggota ABRI Generasi Penerus yang saat itu masih kanak-kanak, tetap mempunyai sikap-sikap yang sama terhadap dwi fungsi ABRI.

Hasil Seminar merupakan pemikiran dan saran untuk pembangunan yang akan datang, termasuk sumbangan pemikiran bagi penyusunan GBHN.

Bagi ABRI berlaku kebiasaan bahwa menyaran sesuatu tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan mengoreksi secara berkelebihan. Apa yang diinginkan ABRI selalu berpegang pada suatu kenyataan bahwa ABRI adalah bagian dari pemerintah. "Kalau mengadakan koreksi atau kritik suaranya tidak usah berteriak-teriak, tetapi yakin bahwa apa yang disarankan itu betul. Kalau diterima kita bilang syukur, kalau tidak kita tidak akan menulis surat kepada wartawan atau universitas di luar negeri," katanya.

Mengenai Rapim Pangab mengatakan, tiap tahun ABRI mengadakan evaluasi, khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan tahun anggaran. Berdasarkan evaluasi itu pimpinan ABRI mengadakan proyeksi atau perencanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Diakuinya, Rapim kali ini lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai kebiasaan, Rapim ABRI dilaksanakan bulan Juni atau Juli. Tetapi kali ini berlangsung pada akhir bulan Agustus.

Atas pertanyaan, Panglima mengatakan bahwa masalah alih generasi tidak dibicarakan secara khusus dalam Rapim. Secara tidak langsung Panglima menegaskan bahwa dalam tubuh ABRI alih generasi bukan suatu masalah dan telah berlangsung secara alamiah.

Dikatakannya, tiap perwira ABRI tahu, suatu saat ia akan pensiun dan mati. Jadi di ABRI tidak pernah dimasalahkan alih generasi sebagai suatu program khusus. Semua perwira disiapkan untuk tugas-tugas yang diharapkan darinya pada jabatan Danton sampai Pangab. Siapa yang ditunjuk untuk jabatan itu, tidak pernah dipermasalahkan di lingkungan ABRI.

Panglima juga mengakui bahwa masalah keamanan bukan semata-mata menjadi tanggungjawab ABRI, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Ia minta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut menciptakan suasana yang aman di lingkungan. Sebagai contoh dikemukakan, upaya pengamanan dari tindak kejahatan tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada aparat keamanan, Polri misalnya. "Jumlah Polri terlalu sedikit, hanya sekian ratus ribu," katanya. Mereka itu bertugas di tengah masyarakat penduduk Indonesia yang jumlahnya 160 juta jiwa. Diharapkan, masyarakat ikut bertindak bila terjadi tindak kejahatan, tidak usah menunggu polisi. "Hendaknya diri kita dan sekeliling kita bersih dengan kewaspadaan dan kepekaan serta keberanian bertindak," demikian pesan Panglima ABRI. ☐

(Sugyanto).

PERUM PENGERUKAN
Jl. Seram No. 1, Tg. Priok - Jakarta 14210

ARMADA KAPAL KERUK

Armada kapal keruk yang dimiliki oleh PERUM PENGERUKAN berjumlah 27 buah kapal yang terdiri dari :

- 13 buah kapal keruk penghisap lumpur
- 3 buah kapal keruk bor penghisap lumpur
- 3 buah kapal keruk timba.
- 8 buah kapal keruk cangkram.

JASA PERUM PENGERUKAN

PERUM PENGERUKAN dalam kegiatan usahanya, melayani :

- Pengerukan untuk pemeliharaan atau pembuatan baru Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan
- Reklamasi atau pengurugan
- Jasa Penelitian dan Jasa Pengawasan di bidang pengerukan dan reklamasi
- Usaha-usaha lain yang sejalan dengan progam perusahaan.

Kantor Pusat
Head Office
Jl. Seram No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia
Telp. (021) 490430, 490447, 491041, 491152, 490448
Telex : 49496 KERUK IA

Kantor Cabang
Branch Office
TANJUNG PRIOK, Jakarta
Jl. Seram No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia
Telp. (021) 491080, 491164, 494704
Telex : 49496 KERUK IA

TANJUNG PERAK, Surabaya
Jl. Prapat Kurung Utara No. 58, Surabaya, Jawa Timur Indonesia
Telp. (031) 291452, 291453, 291637, 293959

Gubernur Baru Aceh, Prof. Dr Ibrahim Hasan MBA

Seorang tokoh dengan berbagai reputasi dan predikat baru-baru ini dilantik sebagai Gubernur Kepala Daerah di Daerah Istimewa Aceh. Tokoh itu tidak lain Prof Dr Ibrahim Hasan MBA.

Dalam sidang paripurna DPRD I Aceh 24 Juli 1986 lalu, nama Prof Ibrahim Hasan menduduki ranking tertinggi dalam nominasi pencalonan Gubernur. Dari 38 anggota DPRD yang hadir, 35 diantaranya memberikan dukungan suara kepadanya, sedangkan calon lainnya A Djalil Harun SH dan Drs Zakaria masing-masing memperoleh dukungan 2 suara dan 1 suara.

Dukungan masyarakat daerah itu pada akhirnya disetujui oleh Presiden Soeharto. Kemudian seperti kita saksikan, 27 Agustus lalu ia dilantik oleh Menteri Dalam Negeri ad interim Sudharmono SH dalam suatu upacara yang khidmat di gedung DPRD Tk I Banda Aceh.

Dalam ucapan-ucapannya menjelang pelantikan, Prof Ibrahim Hasan selalu berusaha menunjukkan tekadnya untuk memacukan daerah Aceh, yang kebetulan daerah kelahirannya. "Saya akan berusaha membuat Aceh ibarat lampu yang menjadi terang dengan pembangunan, sehingga tidak ketinggalan," katanya pada suatu kesempatan.

Tokoh yang juga dikenal sebagai konseptor ini akan berusaha memobilisasikan kaum cendekiawan dan intelektual dalam pembangunan daerah. Para cendekiawan daerah diharapkan memberikan sumbangan secara maksimal bagi usaha mengejar ketinggalan Aceh terhadap daerah lain di bidang pembangunan.

Tentang resepnya untuk memajukan pembangunan daerah, ia mengatakan akan melaksanakan tugas kepemimpinan di daerah dengan keterbukaan. "Saya menghargai dialog dan akan membuka dialog terbuka dengan siapa saja," katanya dalam suatu wawancara dengan wartawan.

Harapan 3 juta warga masyarakat Aceh yang ditumpukan kepadanya sangat besar. Menurut pengamat, harapan kepadanya memang pada tempatnya. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengerti dan memahami persoalan Aceh, di samping sebagai konseptor arah pembangunan Aceh sebagaimana ditunjukkan ketika menjadi Ketua Bappeda. "Aceh mempunyai masa depan yang cerah di tangan Ibrahim Hasan," kata seorang tokoh universitas di Aceh.

Betapapun hebat dan tinggi reputasi Ibrahim Hasan, ia tidak dapat berhasil bila sendirian. Karenanya tepat apa yang

diamanatkan Menteri Dalam Negeri ad interim Sudharmono SH pada upacara pelantikan. Menteri menegaskan, untuk menegakkan pemerintahan daerah yang kuat, sehat, berwibawa dan efektif diperlukan dukungan kreatif dari seluruh lapisan masyarakat dan wakil-wakil rakyat.

Dukungan kreatif perlu dikembangkan sehingga tumbuh menjadi budaya politik dan budaya demokrasi. Untuk itu perlu ditingkatkan komunikasi sosial timbal balik di antara masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga perwakilan dan dengan pemerintah. Jika komunikasi sosial timbal balik berkembang secara terbuka dan jujur, masyarakat akan memahami apa yang dihadapi oleh pemerintah dan tidak menduga-duga yang akhirnya menjadi sumber keresahan. "Komunikasi sosial timbal balik hendaknya selalu mendapat perhatian yang besar dari tiap pimpinan daerah," kata Mendagri.

Bagaimanapun, untuk membangun daerah Aceh diperlukan keuletan yang tinggi. Daerah Istimewa Aceh ini tidak saja istimewa dalam pengertian banyak kelebihan, tetapi juga istimewa dalam berbagai hambatan. Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak pernah bisa ditundukkan oleh kolonial Belanda. Artinya apa. Daerah itu selalu gigih berjuang menentang Belanda, dan tentu saja pembangunan sarana fisik ekonomi sekedarnya menjadi terbengkalai, dan tidak terpikirkan. Tentu berbeda dengan daerah lain.

Setelah kemerdekaan, dalam dasawarsa pertama setelah kemerdekaan dipulihkan, daerah itu menderita gangguan akibat pemberontakan DI/TII.

Barulah setelah Orde Baru, Aceh seperti halnya daerah lain mengalami era pembangunan yang sesungguhnya, yaitu pembangunan yang benar-benar mengarah kepada kemajuan.

Karena mulainya lebih lambat dibandingkan dengan daerah lain, kiranya masuk akal pula bila pembangunan di daerah itu juga masih terlambat dibanding sebagian besar daerah lain. Inilah tantangan Gubernur baru.

Ibrahim Hasan lahir di desa Lampoh Weng, Kabupaten Pidie, 16 Maret 1935. Ia lulusan Fakultas Ekonomi UI tahun 1961. Semenjak lulus, ia memulai karier pengabdian kepada negara melalui jenjang pengajar sebagai dosen pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ia berkesempatan belajar di New York pada tahun 1965 dan berhasil meraih gelar MBA (Master of Business Administration dari universitas Syracuse. Gelar doktor bidang ekonomi pemasaran diperolehnya di Universitas Indonesia, pada tahun 1976.

Karena reputasi kecendekiawanannya, ia dipercaya pemerintah untuk menjabat Rektor Universitas Syiah Kuala hingga dua periode. Di samping itu ia pernah pula menjabat Ketua Bappeda.

Sebagai ilmuwan di bidang ekonomi, terakhir sebelum terpilih sebagai Gubernur, ia menduduki jabatan sebagai Deputi Kabulog.

Reputasi di bidang politik juga sudah lama dimulainya. Pada awal Orde Baru, ia pernah menjadi anggota MPRS. Tepatnya dalam periode 1967/1972. Kedudukan sebagai anggota MPR berlanjut pada periode 1972—1978.

Kiprahnya di bidang politik itu menjadi makin mantap ketika tahun 1983, pada Munas III Golkar, ia terpilih sebagai anggota DPP Golkar memimpin Departemen Cendekiawan.

Kehadirannya sebagai Gubernur didampingi oleh istrinya Dra Siti Maryam, kelahiran Jakarta. Ia dikaruniai lima anak, di antaranya telah berhasil meraih gelar insinyur dan kini menjadi dosen di Unsyiah.

Sebagai kader Golkar, tugas memimpin Aceh tentu tidak ringan, bila semata-mata menilik hasil Pemilu yang sudah-sudah. Selama ini Golkar belum berhasil meraih sukses terbesar di Aceh. Tetapi bagaimanapun ia telah memperoleh dukungan kepercayaan dari masyarakat Aceh. Semoga dukungan kepercayaan itu mengantarkannya menuju sukses dalam memimpin masyarakat Aceh. ☐

Donasi Organ Tubuh Manusia Didiskusikan

Diakhir diskusi, ternyata banyak yang mencatatkan diri sebagai donor

Transplantasi organ tubuh manusia kepada manusia lainnya menjadi pokok pembicaraan dalam panel diskusi yang diselenggarakan secara bersama-sama antara Departemen Kehakiman RI, Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 5-6 Agustus lalu. Panel diskusi yang berthemakan; Meningkatkan peran serta Masyarakat Sebagai Donor Organ Tubuh Demi Kemanusiaan" itu menghadirkan sejumlah pembicara dan panelis, dan dihadiri sekitar 450 orang peserta. Diskusi itu menjadi sangat menarik di saat penutupan, karena para panelis, penyanggah, moderator dan peserta banyak yang menyatakan kesediaan menjadi donor organ tubuh.

Selama dua hari penuh, diskusi yang berlangsung di kantor Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Jalan Veteran Jakarta itu, para panelis dan penyanggah mengupas masalah ini dari sisi tugas dan profesinya, masing-masing. Gagasan yang melatarbelakangi thema ini, agaknya berawal dari pemikiran Menteri Kehakiman RI, Ismail Saleh SH, belum lama berselang tentang "donor organ tubuh manusia (narapidana) yang dikaitkan dengan pemberian remisi". Gagasan itu sendiri sempat mengundang reaksi pro dan kontra dari beberapa pihak.

Idealis

Dra. Suprapti S. Markam — Staf Senior bagian Psikologi Klinik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang mengetengahkan topik "Donor Organ Tubuh Manusia Ditinjau Dari Aspek Psikologi" berpendapat bahwa apabila terdapat seseorang yang secara sukarela menyerahkan bagian dari tubuhnya kepada orang lain, kemungkinan ia seorang idealis, yang mempunyai kebutuhan altruistis dan ingin menyumbangkan apa yang ia dapat sumbangkan demi kehidupan orang lain. Kesediaan menjadi donor karena anjuran, himbauan dan permintaan, ketulusannya akan berbeda dengan yang pertama.

Membicarakan aspek psikologis berarti berbicara tentang hal yang menyertai, mendahului dan akibat-akibat yang mungkin terjadi dari hal tersebut dalam pikiran, perasaan dan perilaku manusia. Dikatakannya sulit untuk memisahkan aspek psikologis dengan aspek sosial, atau aspek kedokteran. Karena membahas manusia berarti membahas secara utuh kesatuan jiwa dan raga. Kesediaan menjadi donor setelah seseorang mati, mungkin tidak ada masalah. Namun kesediaan menjadi donor di waktu yang bersangkutan masih hidup, dengan menjalani operasi misalnya, menimbulkan masalah.

Organ tubuh yang nampak, mempunyai arti yang sangat penting bagi pemiliknya. Kaki, tangan, mata dan lain-lain, adalah bagian luar dari penampilan seseorang yang mempertinggi atau memperendah citra diri dan pandangan orang lain terhadap dirinya. Apa yang dinamakan "body image" ini menurut *Suprapti S. Markam* sangat mempengaruhi bagaimana seseorang akan bertingkah laku dan berprestasi dalam masyarakat. Mengkaitkan "donor organ tubuh narapidana" untuk kebutuhan orang lain, dia melihat narapidana sebagai orang yang tergolong "psikopat" memang membutuhkan imbalan untuk merubah tingkah lakunya. Namun dia berpendapat hal itu sulit, kendati pemberian organ tubuh itu dilaksanakan segera setelah ia meninggal dunia, karena yang menjadi persoalan juga adalah bagaimana pandangan dan pendapat keluarga yang ditinggalkan.

Sementara itu, *Dra. Dewi S. Matindas* yang hadir sebagai penyanggah bagi panelis *Dra. Suprapti S. Markam* berpendapat sangat sulit untuk mengandalkan pemikiran dan pertimbangan dari narapidana sebagai individu yang terbelenggu, sebab kebutuhan mereka masih lebih banyak pada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar yakni fisik dan rasa aman. Dia beranggapan perlu untuk menekankan masalah transplantasi organ tubuh kepada pihak pemberi dan penerima. Seseorang dapat menjadi tidak tenteram karena ginjalnya umpama takkan dapat diperoleh kembali seumur hidupnya. Berbeda dengan transplantasi darah, yang akan membuahkan kesegaran dan kesehatan bagi sang donor.

Tidak saling Kenal

Lain lagi dengan *Azhar Achmad SH,* dia berpendapat, demi kesehatan dapat saja transplantasi dilakukan antara narapidana sebagai donor dengan penerima yang tidak saling mengenal, sepanjang ketentuan yang ada tidak melarangnya. Tetapi dia hanya melihat pengorbanan narapidana dengan menjadi donor itu sebagai wujud kelakuan baik. Tidak berarti dia mendapat remisi karena menjadi donor, katanya. Masalahnya, remisi sudah diatur dengan ketentuan tersendiri.

Sedangkan *Drs. Djafar H. Assegaff* — Ketua PWI Bidang Luar Negeri, menunjukkan masyarakat Kita yang belum siap untuk membicarakan masalah donor organ tubuh bagi kemanusiaan. Menurut pendapatnya yang diperlukan kini adalah arus informasi yang luas terhadap kemajuan-kemajuan di bidang medis dan ilmu kedokteran, yang kemudian didukung dengan penyuluhan-penyuluhan untuk membangun sikap untuk menyelamatkan jiwa orang lain.

Sedangkan *dr. Abdul Mu'in Idries* yang meninjau masalah itu dari aspek kedokteran mengungkapkan bahwa masalah donor organ tubuh dan jaringan tubuh manusia sudah merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang tidak dapat dipisahkan, bagi penderita yang mengidap penyakit. Jutaan unit darah, yang setiap tahunnya disediakan oleh para donor dengan berbagai motif, sementara itu masih sangat banyak penderita yang memerlukan uluran tangan para donor. Demikian pula dengan donor organ tubuh lainnya, tetap menjadi masalah, baik yang ditimbulkan oleh transplantasi itu sendiri maupun upaya pengadaan dan penyediaan donor. Dia berkesimpulan bahwa peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1961 dapat menjadi hambatan donor hidup apabila dikaitkan dengan adanya imbalan bagi donor yang bersangkutan. Menurut pendapatnya perlu memasyarakatkan donor mati dan pemanfaatan organ tubuhnya terutama bagi korban kecelakaan untuk dapat dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkan.

Sementara itu, *Dr. Handoko Tjondroputranto* yang menyanggah panelis *Dr. Abdul Mu'in Idries,* berpendapat bahwa transplantasi lebih mudah dilakukan terhadap donor mati daripada donor hidup. Alasannya, pada donor mati hanya berhadapan dengan satu pasien yakni penerima donor organ. Sedangkan pada donor hidup, terdapat dua pasien, yakni pemberi dan penerima. Resiko donor hidup terlalu besar dan para dokter enggan untuk merusak tubuh yang masih utuh.

Saksi Akhirat

Sedangkan *Dr. Nurcholis Madjid* — Intelektual Muda Islam —, mengatakan "Organ tubuh kita bersikap netral dalam dosa. Ia menjadi saksi di akherat". Yang berdosa itu kalbu dan bukan badan. Pengertiannya, apabila organ tubuh dari orang yang berdosa diberikan kepada orang lain, maka dosa itu tidak akan turut berpindah. Diungkapkan oleh *Dr. Nurcholis Madjid,* bahwa di akhir zaman, hari kiamat, Tuhan mengunci mulut manusia dan yang menyampaikan pengakuan adalah organ-organ tubuh kita.

Fitrah manusia menyebutkan bahwa manusia pada dasarnya baik, suci, dan mengharuskan orang menghormati jenazah. Walaupun titik berat konsep fitrah itu tertuju kepada segi rohani, namun sering pula dibawa ke segi jasmaniah. Dengan demikian, konsep fitrah melarang intervensi terhadap keaslian jasmani manusia. Namun dalam kenyataannya praktek intervensi ini dikenal dalam Islam dengan khitan dan melubangi telinga (untuk anting-anting).

Untuk memperoleh kepastian mengenai donasi organ tubuh yang kemungkinannya tidak bertentangan dengan konsep fitrah dan kewajiban menghormati jenazah, harus digabung dengan prinsip mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia. Dikatakannya, menghidupkan seorang manusia memiliki nilai kebaikan, sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Kerelaan mendonasikan organ tubuh bagi yang memerlukan, merupakan amal kebajikan.

Menyanggah pendapat *Dr. Nurcholis Madjid, Jurnalis Uddin* menyebutkan pendapat Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Depkes RI bahwa pada dasarnya mentransplantasi organ tubuh manusia haram hukumnya. Namun dalam keadaan darurat, dimana tindakan itu dapat menyelamatkan hidup seseorang, dapat dibenarkan. Dirjen PPG Deppen RI, Soekarno SH, secara pribadi berpendapat remisi untuk narapidana donor dapat diterima, asalkan kesediaannya tidak dipaksa dan tidak sekedar untuk mendapat remisi. Sedangkan Dra. Titie Said dari Majalah Famili melihat perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang donasi organ tubuh, melalui sarana penerangan yang ada.

Prof. Dr. S. Budhisantoso yang mengupas masalah ini dari segi sosial budaya juga melihat masalah itu dari segi masyarakat umum. Ada masyarakat yang menyimpan bagian-bagian tubuh yang dianggap memiliki kekuatan magis. Bahkan sering kita mendengar orang memburu mayat bayi untuk memperoleh kekuatan setelah diramu sebagai obat atau menyimpan bagian-bagiannya sebagai jimat.

Mengupas donor organ tubuh narapidana, dari sistim pemasyarakatan Dirjen Pemasyarakatan Depkeh RI *Drs. Hudioro* mengatakan secara prinsipil donor organ tubuh yang dikaitkan dengan remisi tidak menjadi permasalahan. Masalahnya, berkaitan dengan etika, moral, Kejiwaan, kemanusiaan dan komersial. Tetapi penyanggah makalah itu *Bahruddin Suryobroto* menegaskan bahwa ia tidak setuju kalau masalah donor organ tubuh manusia dianggap sebagai bagian dari pembinaan terpidana berdasarkan sistim pemasyarakatan, lebih-lebih kalau dilatarbelakangi dengan upaya pemberian remisi.

Disimpulkan di akhir panel diskusi bahwa donor organ tubuh tidak hanya menyangkut sang donor semata tetapi menyangkut penerima, keluarga, dokter yang menangani, agama, lingkungan sosial, hukum, dan nilai-nilai kehidupan yang dianut masyarakat. Pelaksanaannya pun tidak sederhana. Meski peranan dokter dominan, namun bukan faktor penentu. Keberhasilan proses transplantasi tergantung juga dari kadar persepsi agama donor, ketentuan hukum, faktor psikologis donor dan resipien, pengetahuan tentang kemajuan teknologi bidang kedokteran dan kepercayaan terhadap kemampuan para dokter. ☐

Djonharro

HARI DEPAN BATUBARA UNTUK KEMAJUAN BANGSA

BATUBARA

PERUM TAMBANG BATUBARA

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10
Kotak Pos 405 Kby.
Telex : BRAJAK IA
Facsimile : (021) 827642
Telepon : 825608

JAKARTA SELATAN

Mengabdi kepada Rakyat

Poliklinik Kosgoro 'praktek dokter 24 jam' dengan biaya murah

Gerakan pengabdian masyarakat sesuai dengan petunjuk doktrin perjuangan Kosgoro yakni: Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas yang berwujud karya-karya nyata yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, agaknya telah menjadi keharusan bagi organisasi kemasyarakatan itu. Pengabdian masyarakat menjadi salah satu sasaran kegiatan Kosgoro sebagaimana telah digariskan oleh Musyawarah Besar V Kosgoro akhir tahun lalu.

Sebagai langkah awal bagi peningkatan program pengabdian masyarakat itu, Minggu 3 Agustus yang lalu telah diresmikan penggunaan poliklinik Kosgoro di Jalan Cipinang Baru Bunder Jakarta Timur yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 'praktek dokter 24 jam'. Peresmian yang dilakukan Drs. Imam Soedarwo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro, merupakan awal dari rangkaian gerakan pengabdian masyarakat tersebut.

Dikatakannya, kehadiran poliklinik merupakan realisasi pengabdian dalam rangka meringankan beban masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan, dan diharap dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak. Pelayanan dokter selama 24 jam, dengan tarif yang relatif murah, memang diperlukan saat ini. Sebagai salah satu kegiatan dari rangkaian program dalam rangka menyongsong peringatan dari Proklamasi 17 Agustus yang ke-41, program pengabdian masyarakat Kosgoro itu, tak terlepas dari semangat dan jiwa perjuangan.

Keluhan Masyarakat

Drs. Arismunandar selaku pengelola Poliklinik Kosgoro mengutarakan bahwa kehadiran poliklinik itu selain dalam rangka melebarkan sayap pengabdian Kosgoro, juga dalam rangka menjawab keluhan masyarakat. Pelayanan yang kelak akan menumbuhkan kesehatan bagi masyarakat dengan sistim khusus ini, merupakan kebutuhan bagi banyak tempat di Jakarta.

Diungkapkannya, untuk memenuhi keluhan masyarakat itu, Kosgoro membina kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pimpinan Kelurahan dan Kecamatan setempat. Hal ini dibenarkan oleh Camat Pulogadung Drs. H. Hasanuddin Marzuki, bahwa di kelurahan Cipinang yang berada dalam Kecamatan Pulogadung, di mana poliklinik Kosgoro itu berdiri, mayoritas penduduknya berada dalam tingkat ekonomi di bawah rata-rata. Dengan demikian, dibutuhkan pelayanan kesehatan masyarakat yang murah biayanya.

Sesuai doktrin perjuangan Kosgoro.

Poliklinik itu diharapkan dapat menjadi penggerak keluarga berencana, karena di kecamatan Pulogadung gerakan nasional itu masih harus dipacu. Dia menunjuk penduduk Pulogadung yang tergolong masyarakat semi kota, tertinggal dalam hal keluarga berencana dengan masyarakat di kecamatan Cakung, tetangganya, yang lebih tradisional. Dengan kehadiran poliklinik tersebut, berarti program itu dapat lebih ditingkatkan.

Di sekitar tempat poliklinik itu berdiri, selain perkampungan umum, juga beberapa asrama Polri dan jauh dari fasilitas kesehatan yang ada. Drs. Muin Sugianto yang mempersiapkan berbagai fasilitas dari poliklinik itu mengatakan kehadiran lembaga kesehatan itu sebagai bagian dari peran serta Kosgoro dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. "Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

Sekolah Kosgoro

Sementara itu, Dr. Merphin Panjaitan yang memotori program pengabdian Kosgoro khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pengabdian di bidang kesehatan dan pendidikan, membenarkan kedua bidang itu menjadi sasaran program Kosgoro masa sekarang. Dalam pelaksanaan program itu, potensi intern Kosgoro akan merupakan modal awal bagi program pengabdian itu, ujar tokoh muda Kosgoro yang selain Manggala BP7 Pusat, juga Staf Pengajar di FK-UKI.

Sebagai awal program tersebut, Rabu 5 Agustus yang lalu bertempat di Wisma Bayangkari Kebayoran Baru berlangsung acara peresmian pembukaan pendaftaran murid baru bagi sekolah-sekolah Kosgoro seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu hadir para pengasuh dan para guru sekolah dari sekitar 150 sekolah Kosgoro seluruh Indonesia. Upacara yang dihadiri oleh sekitar 3000 murid sekolah Kosgoro di Jakarta dan sekitarnya, juga dimeriahkan dengan atraksi-atraksi kesenian serta pemberian beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Imam Soedarwo, menegaskan, kegiatan pendidikan Kosgoro yang telah dimulai sejak tahun 1964, "untuk masa-masa mendatang akan lebih diperhatikan." Untuk itu, ujarnya, kini tengah dipersiapkan semacam Dewan Pendidikan Kosgoro yang kelak akan memberi warna bagi sekolah-sekolah Kosgoro, dimana doktrin perjuangan Kosgoro yakni: Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas Kosgoro lebih merakyat.

Program pengabdian.

Berlangsungnya upacara peresmian penerimaan murid baru bagi sekolah-sekolah Kosgoro seluruh Indonesia ini, menurut Dr. Merphin Panjaitan dimaksudkan sebagai wujud kesungguhan Kosgoro dalam bidang ini. selain sekolah-sekolah umum untuk menampung ledakan anak didik usia sekolah, terutama untuk pendidikan menengah, juga diupayakan pendidikan kejuruan yang akan menghasilkan anak didik siap pakai.

Sekitar 150 sekolah Kosgoro baik SD, SMP, SMA maupun sekolah-sekolah kejuruan seperti Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Tehnik Menengah (STM) dan Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMTP) kini telah didirikan. Walaupun secara mayoritas sekolah-sekolah ini terdapat di Jawa, namun secara menyeluruh tersebar di berbagai tempat terutama di kota-kota besar seluruh Indonesia. Tercatat kota Banyuwangi sebagai pemegang rekor dengan lebih 50 buah sekolah, Indramayu 10 sekolah, dan Kendari, Ngawi, Kuningan, Cirebon dan kota-kota lainnya pun telah ada.

Selain sekolah menengah, terdapat juga perguruan tinggi yang dikelola oleh Kosgoro. Imam Soedarwo mengatakan "kita sangat berhati-hati dalam penanganan perguruan tinggi. Karena Kosgoro pernah punya pengalaman yang cukup soal perguruan tinggi." Sementara Dr. Merphin Panjaitan menunjukkan pembangunan Kampus Kosgoro di Jalan Margasatwa — Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai langkah peningkatan program pendidikan Kosgoro baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.☐

Djonharro

MAJU TERUS
MENINGKATKAN PARTISIPASI
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

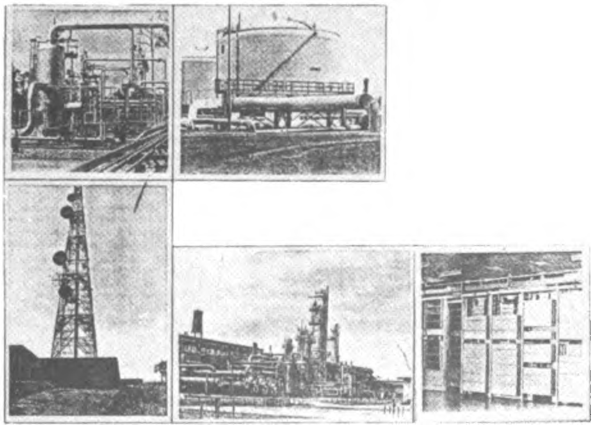

Bersama
REKAN
TERPERCAYA ANDA
DALAM
BIDANG KONSTRUKSI
• Civil
• Mechanical
• Electrical
• Instrumentation

• BANDA ACEH • ARUN • LHOK SEUMAWE • MEDAN • DUMAI • PALEMBANG
• PRABUMULIH • BETUNG • BOGOR • SEMARANG • BUNYU

p.t. catur yasa
INDUSTRI- PERDAGANGAN - KONSTRUKSI
Jl. Krekot jaya Blok H No. 5 Telp. 366113, 366032 Telex 45643 CATUR IA - Jakarta - Indonesia
Jl. MANGKUBUMI NO. 1 H-I Telp. 321222 Telex 51636 CATUR MDN - Medan - Indonesia

Agent : Asahi Asbestos
MES

Bank : Bank Bumi Daya
Bank Dagang Negara
BNI-1946
Bank Agung Asia

Pemberantasan Hama Tikus dan Wereng

Di Daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah

Soal "Karya Bakti" dan aksi sosial serahkan saja pada AMPI ungkap beberapa Ketua-Ketua AMPI tingkat II di daerah-daerah Jateng dan Jabar dalam dialog terbukanya dengan masyarakat setiap mengawali kegiatan aksi sosial gerakan pemberantasan hama wereng dan tikus bersama dengan Team pemberantasan hama tikus dan wereng dari Panitia HUT VIII tingkat Nasional AMPI, dimana selaku panitia kegiatan ini bertindak sebagai ketuanya adalah Gunariah Muchdie, dan koordinatornya adalah Berni Tamara, selaku koordinator lapangan adalah Drs. Mangisara Lubis dibantu antara lain oleh Dedy Triyono, Yudison S, Dudy Remi, Djemi Moninca serta tidak ketinggalan pengurus DPP AMPI Nona Farida Chadaria SH, yang tidak sungkan-sungkan terjun kelapangan.

Siang kerja, malamnya dihibur oleh artis-artis Safari dibawah koordinator Edy Sud, hiburan segar merakyat dan memang dipersembahkan kepada rakyat di daerah-daerah yang pagi sampai dengan petang harinya menjadi lokasi kegiatan — pemberantasan hama wereng dan tikus, Jabar dan Jateng. Dalam kegiatan ini selain juga Pengurus DPP AMPI yang tidak pernah absen sang Ketua Umumnya Bung Agung Laksono serta ketua Panitia Tingkat Nasional Drs. Theo Sambuaga, beberapa fungsionaris Golkar Pusat juga turun kelapangan pemberantasan, antara lain; Sukarton Marmo Sujono SH selaku sekretaris Dewan Pembina AMPI, Ir. Wardoyo, Ir. Achmad Afandi keduanya adalah fungsionaris Golkar Pusat yang bersama-sama AMPI terjun ke daerah-daerah dalam rangka kegiatan safari pemberantasan hama wereng dan tikus.

Di Tegal, Batang dan Boyolali misalnya — lapangan banjir dengan masa AMPI tak kurang dari puluhan ribu warga AMPI siap menerima komando dari para fungsionaris Golkar. Di Tegal di beberapa daerah kecamatan misalnya di daerah kecamatan Dukuh Waru dan Kecamatan Adiwerna yang lokasinya di

Aksi sosial memberantas tikus dan wereng.

Desa Ujungrusi, Sekretaris Dewan Pembina AMPI Sukarton Marmo Sujono SH memberikan komando gerakan pemberantasan hama tikus dan wereng dihadapan warga AMPI yang jumlahnya tak kurang masing-masing lima ribu orang.

Dalam kata sambutannya Sukarton menegaskan, AMPI hendaknya semakin mampu menunjukkan prestasinya dimana-mana, dan gerakan semacam ini jangan hanya musiman karena sedang berulang tahun, tapi gerakan-gerakan semacam inilah yang akan mampu mengundang simpati generasi muda Indonesia terhadap AMPI, oleh karena itu tegas Sekretaris Dewan Pembina AMPI di dua lokasi di Tegal, AMPI harus betul-betul berorientasi kepada rakyat dimana setiap program-programnya harus betul-betul menyerap aspirasi rakyat, dimana dan kapan saja. Setelah komando diberikan Sukarton Marmo Sujono, Agung Laksono Theo Sambuaga, serta Panitia HUT VIII AMPI baik Tingkat Nasional dan daerah segera turun kelapangan pemberantasan hama wereng dan tikus, tidak mau ketinggalan artis-artis safari kita terjun dan bersama-sama AMPI setempat ikut serta melakukan kegiatan pemberantasan walaupun malam harinya para artis ini harus menghibur masyarakat di panggung terbuka. Artis Safari yang terdiri dari Group Lawak Dian Group serta beberapa penyanyi antara lain, Fifie Efendi, Gita Marwan, Anita Carolina, Yulia Yasmin, Nuke Efendi, Yunita, terus berkeliling bersama-sama team pemberantasan hama wereng dan tikus, dari Jawa Tengah, Tegal - Batang - Boyolali, Jawa Barat, Karawang - Subang dan Majalengka.

Di Boyolali, bertindak sebagai fungsionaris Golkar adalah Direktur Jendral Tanaman Pangan Ir. Soehaedi, dalam kata sambutan komandonya dihadapan lima ribu warga AMPI Batang, mengetengahkan, dua ribu hektar tanaman pangan di Jawa Tengah terserang hama tikus dan wereng meskipun usaha pengendalian terus dilaksanakan, namun secara terus-menerus partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar usaha swa sembada pangan tidak mengalami hambatan. Di saat-saat seperti inilah AMPI tampil, sebagai suatu tindakan yang sangat terpuji dan merupakan momentum yang sangat tepat, untuk itu laksanakanlah kegiatan-kegiatan semacam secara terus-menerus dan Dirjen berharap agar AMPI selalu tampil paling depan dalam kegiatan kerja nyata semacam ini, yang kemudian disambut secara bersama-sama dan serentak; hidup AMPI!

Ampi harus jadi pelopor.

Di Boyolali komando diberikan Menmud Ir. Wardoyo dihadapan dua puluh ribu masa AMPI memenuhi lapangan desa Padas Mural Kecamatan Wanasegoro. Dalam sambutan komandonya Menmud Wardoyo mengatakan; Tikus dan kutu loncat serta hama wereng adalah musuh kaum tani, bila kaum tani mengalami kesulitan berarti kita semua akan merasakan akibatnya, kesulitan kaum tani adalah kesulitan nasional, kesulitan Bangsa, AMPI sebagai generasi muda Bangsa, AMPI sebagai benteng-benteng Pancasila dan Ujung tombaknya kaum tani Indonesia harus selalu tampil paling depan dalam ikut serta menyelesaikan segala permasalahan dan kesulitan, seperti kesulitan kaum Tani kita sekarang sekarang ini.

Sehingga tampilnya AMPI sekarang ini adalah suatu bukti kejelian warga AMPI terhadap segala gejala yang sedang dirasakan sebagai suatu kesulitan masyarakat. Hendaknya hal-hal yang semacam ini dilakukan secara terus-menerus dimana-mana dan AMPI lah yang selalu

Wardoyo, memberi komando.

Ampi selalu tampil paling depan dalam kerja nyata.

Gerakan memberantas tikus dan wereng jangan musiman.

harus jadi pelopor dalam setiap kegiatan yang menyangkut kebutuhan rakyat terlebih rakyat petani.

Selesai memberikan komando Ir. Wardoyo yang disaksikan oleh Theo Sambuaga, Ketua DPD Golkar Jateng, H. Kardiman, Bupati Boyolali, Maskhan Sadjarwo SH, Ketua AMPI Jateng, Menmud memberikan bantuan alat-alat pemberantasan dan sejumlah obat-obatan anti hama kepada DPD. AMPI Tingkat II Boyolali, dan sesudah itu langsung ke lokasi pemberantasan dimana dalam waktu yang sangat cepat warga AMPI Boyolali mampu menangkap sembilan ribu ekor tikus yang disaksikan langsung oleh Menmud dan rombongan. Sama seperti di daerah-daerah lain setelah siangnya dipanggang matahari memberantas hama malamnya di daerah terdekat dengan lokasi pemberantasan, diselenggarakan hiburan rakyat oleh artis-artis safari yang tentunya di masing-masing daerah tak kurang masa rakyat berduyun-duyun dari berbagai ujung desa menikmati hiburan yang disediakan oleh Panitia HUT. VIII AMPI Tingkat Nasional dan setempat, semua berjalan baik sukses murah dan meriah.

Safari ini berakhir di daerah Karawang, Subang dan Majalengka, sebagai Fungsionaris DPP Golkar Ir. Achmad Afandi terjun ke tengah-tengah lapangan bersama warga AMPI memberikan komando pemberantasan hama wereng tikus dan kutu loncat dimana di tiap-tiap mengawali komandonya selalu menegaskan, AMPI harus benar-benar menjadi cermin generasi muda, dan yang sekarang dikerjakan oleh AMPI adalah suatu tindakan yang baik dan tepat karena di saat-saat seperti inilah rakyat membutuhkan pemuda-pemuda yang kreatif trampil dan sanggup bekerja keras untuk melaksanakan program-program pemerintah didalam rangka membangun masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Bila kutu loncat, tikus dan hama wereng dibiarkan sudah jelas akan sangat menghambat apa yang kita cita-citakan bersama, untuk itulah program AMPI yang seperti ini saya harapkan dan saya pesankan melalui Saudara Agung Laksono untuk terus dilanjutkan jangan berhenti karena ulang tahun AMPI telah berakhir misalnya. Kerja terus, kerja keras Insya Allah masyarakat yang kita dambakan akan terwujud dan segala bentuk godaan serta tantangan akan bisa teratasi, AMPI harus jadi pelopor dalam segala gerakan untuk membangun kesejahteraan rakyat.''

Selain juga alat-alat pemberantas hama tikus, wereng dan kutu loncat, yang disampaikan oleh Fungsionaris DPP Golkar di beberapa daerah, Panitia HUT. VIII. Tingkat Nasional juga memberikan kenang-kenangan antara lain berupa: Sarana-sarana olah raga, seperti Bola Volley, Bola Kaki, serta mendapat titipan Ketua Umum DPP Golkar berupa bibit buah-buahan dan kaset-kaset Golkar serta Pulpen Golkar. Ulang tahun telah berakhir tapi perjuangan tak pernah selesai sebagai sambutan Theo Sambuaga dihadapan warga AMPI Kodya Tegal dan Boyolali. ☐

Rendy MS

Butuh pemuda kreatif.

Partisipasi rakyat sangat diperlukan.

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

IBU NEGARA DAN SAMPAH

Ibu Negara, Ny. Tien Soeharto, prihatin melihat sampah di ibukota. Di mana-mana di pelosok Jakarta, sampah membentur mata. Keprihatinannya ini menyebabkan Ibu Tien turun ke lapangan "ngeduk sampah" dalam aksi Gerakan Kebersihan Terpadu di lima wilayah ibukota, Rabu 10 September 1986.

Dengan mengenakan sepatu karet, topi dan pakaian kerja, Ibu Tien menandai gerakan itu dengan mengeduk sampah di Muara Kali Gunung Sahari. Tauladan simpatik ini diikuti oleh Pangab LB. Moerdani, KASAD Letjen Try Sutrisno, Gubernur DKI Soeprapto, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Abdul Gafur, Pangdam Jaya Mayjen Sugito, serta pemuda yang tergabung dalam AMPI.

Dan untuk lebih menggairahkan lagi kebersihan sampah di ibukota. Dari Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, keluar sumbangan Rp. 200 juta.☐

KEPRES SEKTOR INFORMAL

Sektor informal, katup pengaman perekonomian nasional, tapi yang terasa masih kurang mendapat perhatian dan perlindungan, akan diatur dengan Keputusan Presiden. Ini janji Menteri Tenaga Kerja Sudomo.

Dengan Kepres, demikian Sudomo, perlindungan dan ruang gerak serta peranan dan fungsinya semakin jelas. Perlindungan sektor yang dulu sering dinilai mengganggu ini, terasa semakin penting setelah resesi memberi pengalaman pahit.

Sektor informal ternyata "orang kecil" yang "kebal" resesi. Penyerapan tenaga kerjanya pun lebih banyak dibanding sektor formal. Dan biaya investasi juga tidak besar.

Untuk semakin mengamankan aktivitas mereka, maka dibentuk proyek percontohan di Mangga Besar dan satu lagi di belakang Kantor Depnaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selain itu juga akan dibentuk Kontak Kaki Lima, seperti Kontak Tani di lingkungan Departemen Pertanian.☐

PT JASA MARGA (PERSERO)
(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)

PENGELOLA JALAN/JEMBATAN TOL
DI INDONESIA

Toll Plaza Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur • P.O. Box 67 Kby, Jakarta Selatan
Cable : JASA MARGA Jakarta – Indonesia • Telex : 48345 JASAMAR IA
Telephone : 800294 - 800301 - 849182 - 802519 - 802521 - 802524 - 802529 - 802530

Jalan Tol sarana tepat untuk menerapkan disiplin berlalulintas.

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

TAMU DARI PERANCIS

Presiden Perancis, Francois Mitterrand dan Nyonya Daniele Gouse Mitterrand selama 4 hari sejak 16 September lalu mengunjungi Indonesia dan menjadi tamu negara Presiden Soeharto. Kedua Kepala Negara terlibat dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah internasional, regional maupun bilateral.

Selama di Indonesia tamu negara ini mengunjungi Bandung, melihat Industri Pesawat Terbang Nusantara, ke Jogyakarta melihat Candi Borobudur dan kembali ke negerinya dari Denpasar Bali.

Tapi tamu negara ini rupanya tidak bisa menikmati ketenangan kunjungannya di Indonesia, karena selama dia berada disini, serangkaian ledakan bom mengguncang Paris, sehingga beberapa obyek wisata di Bali dan Jogyakarta, urung dikunjunginya.□

HAORNAS III

Hari Olahraga Nasional III, Selasa 9 September diperingati secara sederhana di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Hari nasional yang ditandai dengan pidato dari Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah ini diikuti sekitar 50 ribu anggota masyarakat dari unsur, ABRI, Pegawai Negeri dan pelajar, dan anggota masyarakat lainnya.

Hari Olahraga Nasional yang untuk pertama kali dicanangkan Presiden Soeharto di Solo 9 September 1983, menurut Menpora Abdul Gafur telah mendatangkan pengaruh positif, karena olahraga, salah satu faktor yang ikut mensukseskan pembangunan bangsa seperti kata Wapres Umar Wirahadikusumah dalam pidatonya yang dibacakan Menko Kesra Alamsyah Ratuperwiranegara, telah menjadi kegiatan yang semakin populer di tengah masyarakat Indonesia.

"Keinginan berprestasi dan semangat persaingan sportif dalam olahraga merupakan watak yang dibutuhkan bagi suksesnya pembangunan," kata Wapres.□

Safari Di Utara Indonesia Timur

"Tugas terasa lebih ringan, bila rakyat berpartisipasi"

KALI ini perjalanan kerja Ketua Umum Golkar dan pimpinan Golkar lainnya, betul-betul lebih panjang dan lebih lama waktunya dari masa-masa sebelumnya. Irian Jaya, Maluku Utara dan Sulawesi Utara ditempuh dalam 3 hari perjalanan, 12 hingga 14 September. Untuk sebagian besar dengan pesawat Transall yang biasa dipakai untuk angkutan transmigran, sisanya melalui darat maupun laut.

Sabtu pagi 13 September Ketua Umum meresmikan gedung baru kantor DPD I Golkar Irian Jaya di Jayapura, dilanjutkan perjalanan ke Nabire di pantai selatan Teluk Cenderawasih untuk meresmikan depot baru BBM Pertamina di sana. Sebelumnya, Jumat petang, Sudharmono SH meresmikan listrik masuk desa di Desa Maribu Kecamatan Sentani. Dengan peresmian di Maribu ini, bertambah lagi tiga desa dari 2 kecamatan di propinsi ujung Timur Indonesia ini yang menikmati listrik. Ketiga desa itu ialah desa Maribu sendiri serta Besum dan Nimbokrang.

Bagian usaha pemerintah membangun Irian Jaya.

Desa Semakin Hidup

Bagi Irian Jaya, sebagaimana halnya bagi banyak daerah lainnya, listrik adalah salah satu dambaan. Ada 901 desa di Irian Jaya. 78 diantaranya telah mendapat aliran listrik dan 12 lainnya segera akan memperolehnya. "Prosentase ini memang masih kecil," ujar Izaac Hindom Gubernur Irian Jaya Jumat petang itu. Meskipun demikian aliran listrik PLN telah cukup banyak memberikan dampak positip. "Desa semakin hidup dan terang benderang di malam hari. Anak-anak belajar malam mendapat penerangan listrik. Televisi dan radio yang merupakan sarana penerangan dan hiburan sehat dapat dinyalakan dengan aliran listrik dan lain sebagainya."

Namun Izaac Hindom membentangkan pula terdapatnya tantangan-tantangan harus dihadapi dan dipecahkan dalam pelaksanaan kelistrikan desa di Irian Jaya. Setidak-tidaknya ada tiga soal. Pertama, adalah letak desa-desa yang terpencil jauh di pedalaman, sehingga untuk mencapai desa tersebut dengan jaringan PLN yang sudah ada membutuhkan biaya yang besar. Kedua, faktor sarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai. Dan yang ketiga jumlah penduduk desa yang relatif kecil, pendapatan penduduk belum mencukupi, sehingga masih harus menunggu giliran untuk mendapat aliran listrik PLN.

Maka, setiap upaya menerobos kesulitan dalam masalah listrik disambut hangat oleh masyarakat Irian Jaya. Kepada PLN, Izaac mewakili rakyatnya mengucapkan terima kasih. Pernyataan terima kasih juga disampaikan oleh Mensesneg yang juga Ketua Umum Golkar, atas nama warga Golkar di ketiga desa tersebut dan di seluruh Irian Jaya.

Rasa bahagia yang kedua dinyatakan pula keesokan harinya oleh Gubernur di Nabire. Peresmian depot BBM Nabire yang hanya bisa dicapai melalui udara dan laut itu, akan besar artinya. Sebab depot Nabire akan menjamin kelancaran supply bukan hanya BBM kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bensin dan minyak tanah, tetapi juga menyediakan avtur yang vital bagi transportasi udara. Sedang jaring transportasi udara bagi Nabire adalah ibarat urat nadi kehidupan. "Pembangunan depot BBM di Nabire ini harus dilihat sebagai bagian usaha pemerintah untuk membangun Irian Jaya yang mempunyai kekayaan alam yang potensial," ujar Dirut Pertamina A. Rachman Ramly dalam laporannya. Depot ini dibangun di areal tanah tepi pantai seluas 16.450 meter persegi dan diperlengkapi 4 tangki penimbunan BBM yang masing-masing berkapasitas 100 kiloliter. Mempunyai dermaga yang dapat disandari oleh tanker ukuran 100 dwt.

"Saya atas nama warga Golkar khususnya dan masyarakat pada umumnya, menyampaikan terima kasih kepada Pertamina dan Pemerintah yang telah membangun depot di Nabire yang besar artinya dalam pembangunan," sambut Mensesneg yang juga Ketua Umum Golkar. Pembangunan depot BBM di Kabupaten Paniai ini oleh Pertamina, merupakan bagian usaha pemerintah untuk memeratakan pembangunan. Tugas pembangunan dan memeratakannya, merupakan tugas berat. "Tapi tugas itu akan terasa lebih ringan apabila seluruh rakyat turut berpartisipasi", ujar Sudharmono SH, "dan disinilah tugas Golkar untuk mengajak rakyat turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Menggerakkan rakyat untuk bersama-sama mempercepat pembangunan itu".

Pagi hari sebelumnya, sebelum ke Nabire, Ketua Umum meresmikan penggunaan gedung baru kantor DPD I Golkar Irian Jaya. Pengguntingan pita dilakukan Ny. EN Sudharmono. "Bila dengan

Kesinambungan lewat Golkar.

gedungnya yang lama saja Golkar Irian Jaya telah cukup berprestasi'', ujar Ketua Umum, ''maka tentunya akan lebih-lebih lagi nanti setelah sarana perkantorannya lebih lengkap dan megah seperti sekarang''. Di Irian Jaya, dalam beberapa kali pemilihan umum, Golkar senantiasa menang mutlak.

Depot di Nabire, besar artinya.

Adalah juga pada kesempatan tersebut Ketua Umum memberikan penjelasan langsung mengenai kebijaksanaan moneter yang baru diambil pemerintah pada tanggal 12 September. Kebijaksanaan itu menurut Sudharmono SH tak terlepas daripada upaya menyelamatkan dan menjaga kesinambungan pembangunan. Sudharmono yang mengungkap latar belakang pengambilan keputusan tersebut (Baca 'Kebijaksanaan 12 September' pada rubrik Nasional) lalu mengharapkan agar kader-kader Golkar membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa ''setiap langkah yang diambil pemerintah, yang didukung oleh Golkar, tak lain adalah untuk kesinambungan pembangunan''. Dan pembangunan itu juga adalah untuk kita sendiri untuk mensejahterakan masyarakat.

Latar belakang, maksud serta tujuan tindakan moneter 12 September tersebut, kembali dijelaskan oleh Ketua Umum Golkar kepada warga Golkar di Ternate Sabtu malam dan warga Golkar Sulawesi Utara di Gedung Koni Manado pada Minggu sore.

Untuk Anak Cucu

Sabtu malam di Ternate, di gedung pertemuan kabupaten Maluku Utara, Ketua Umum Golkar mengadakan tatap muka dengan keluarga besar Golkar yang melimpah ruah. Keluarga besar Golkar telah menunjukkan sambutan hangat dan meriah sejak sore hari kedatangan rombongan di Bandar Udara Baboelah.

Kedatangan para pimpinan Golkar secara bersama-sama ke Maluku Utara seperti kali ini, agaknya merupakan yang pertama kali. Maka Ketua Umum memperkenalkan anggota rombongannya kepada keluarga besar Golkar Maluku Utara ini. Dalam rombongan selain Ny. EN Sudharmono, turut serta dua fungsionaris Golkar yang kebetulan duduk di kabinet, yakni dr Abdul Gafur dan Prof. Dr JH Hutasoit. Pimpinan Golkar yang lain adalah Drs Gatot Soewagio, Oetojo Oesman SH, Sukarton Marmosudjono SH, Zarlons Zaghlul SH, Ir Akbar Tandjung, Andi Mochtar SH. Ditambah anggota DPP lainnya seperti Daryono SH, Drs Freddy Latumahina, Ny. E. Busyiri, Ir. Tati Sumiarno, Ir Usman Hasan, Drs Waskito, Kh Qodratullah, Hatta Mustafa SH. Serta sejumlah kader Golkar seperti Yanti B. Sudharmono MBA, dr Yenny R. Sudharmono, Prof. Dr. H. Zakiah Daradjat, Gunariyah K. Muchdie, HZ Abidin, Sudarsono SH, R. Subono, John Tetelepta, John Pieris, Robert P. Sunur. Juga anggota FKP seperti Isaac Saujay dan J. Wowor SH. Bersama rombongan turut serta sejumlah artis Golkar — Eddy Sud, Benyamin, Bagio, Darto Helm, Diran, Broery Pesolima, Melky Goeslaw — yang pada beberapa kesempatan di Irian Jaya dan Maluku Utara tampil dalam panggung hiburan rakyat.

Kepada warga Golkar Maluku Utara, Ketua Umum Golkar mengingatkan bahwa bila Golkar benar dalam membangun untuk menciptakan kesejahteraan rakyat lahir dan bathin, pastilah Golkar selalu mendapat dukungan rakyat. ''Dalam rangka inilah kita ingin terus melanjutkan perjuangan Golkar, tidak hanya sampai pada suksesnya pemilihan umum 1987. Melainkan melanjutkannya terus menerus. Pembangunan bukan hanya untuk diri kita sendiri pada masa sekarang ini, tetapi lebih banyak untuk kepentingan anak cucu kita guna menyambut hari depan yang lebih baik''.

Menyeberang lewat laut ke pulau Tidore Minggu pagi, Sudharmono SH melakukan tiga mata kegiatan yang kesemuanya berkaitan dengan masalah pembangunan lahir bathin. Yang pertama, meresmikan penggunaan Mesjid di Tomalouw. Dan Ketua Umum menyampaikan partisipasi Golkar berupa sumbangan Rp. 5 juta. Lalu menuju lokasi Pasar Inpres Soa Siu dan meresmikannya. Pasar Inpres ini nampaknya cukup

Pasar Inpres Soa-Siu. Dengan uang rakyat juga.

hidup. Terdiri dari sejumlah kios mengelilingi lapangan terbuka dan dua los besar yang dipakai oleh para pedagang kecil untuk menjual ikan tongkol asap, gula merah, sayur mayur, sagu dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Para pedagang kecil ini menggelarkan dagangannya ditikar. Sedang para pedagang yang menempati kios, dikenakan sewa Rp. 500,- sampai Rp 1000,- per hari.

Manfaatkanlah pasar ini baik-baik, pesan Sudharmono SH. Pasar Inpres dibangun oleh Pemda yang memperoleh pinjaman tanpa bunga dari bank pemerintah. Bunganya dibayar oleh pemerintah pusat. ''Jadi dengan uang milik rakyat sendiri.''

Kegiatan ketiga di Halmahera Tengah ini adalah peresmian gedung kantor DPD II Daerah Administratif Halmahera dan merupakan kegiatan terakhir sebelum ke Sulawesi Utara.

Selama di Maluku Utara, Sudharmono SH menyerahkan sejumlah SK Bantuan Presiden antara lain untuk pembangunan Gedung Madrasah Tsanawiyah Muhamadiyah di Sepa, Amahai, Maluku Tengah; Pembangunan mesjid desa Rohua dan pembangunan Gereja Baru Jemaat GPM Hatu di Maluku Tengah.

90 Persen Atau 92,5 persen?

Di Sulawesi Utara, acaranya tunggal. Tatap muka dengan Keluarga Besar Golkar di Gedung Koni Manado. Singkat namun meriah oleh jubelan massa hingga ke halaman Gedung Koni.

Ketua DPD I Golkar Sulawesi Utara Frits Sumampouw melaporkan adanya tekad warga Golkar untuk memenangkan Golongan Karya dalam pemilihan umum. Selain itu ada kebulatan tekad untuk mencalonkan kembali Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI. Ketua Dewan Pertimbangan CJ Rantung — Gubernur Sulawesi Utara — memperkuat tentang adanya tekad tersebut. CJ Rantung mengungkapkan tekad mencapai target 90% suara untuk Golkar di Sulawesi Utara. Berarti harus meraih 1.219.000 orang dari 1.348.093 pemilih yang ada.

Secara berseloroh, Ketua Umum Golkar menanggapi bahwa target itu agak tanggung. Karena dengan 90% suara, Golkar tetap hanya akan meraih 5 dari 6 kursi DPR-RI untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara. Karena 90% suara berarti hanya untuk 5,4 kursi atau tetap 5 kursi. Kalau katakanlah 92,5% ya barulah akan memperoleh 5,55 kursi atau berarti 6 kursi. ''Tapi ini, saya, iseng-iseng saja'', ujar Ketua Umum. Namun Ketua Umum menyatakan tak mengurangi penghargaannya kepada tekad yang dinyatakan warga Golkar Sulawesi Utara. Khusus mengenai tekad pencalonan kembali pak Harto, Ketua Umum mengisyaratkan bahwa sebelum sampai kesana, Golkar harus lebih dulu memenangkan pemilu. Dan juga lebih dulu mempersiapkan konsep dan program yang dapat diterima rakyat dan juga dapat diterima oleh tokoh yang kita minta kesediaannya untuk menjadi Mandataris MPR. □

— Rum Aly

KOPERASI SUPIR TAKSI JAKARTA RAYA
(KOSTI JAYA)
BADAN HUKUM NO. 1684/B.H./I

Pengurus, Badan Pemeriksa, Dewan Penasehat, Karyawan dan Segenap Anggota Koperasi Supir Taksi Jakarta Raya (KOSTI JAYA).

Dengan ini mengucapkan,

''Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia'' yang ke 41

17 Agustus 1945. – 17 Agustus 1986.

Rampung, Daftar Calon Golkar

MELALUI proses yang cukup panjang, namun relatif sesuai dengan sistim dan mekanisme yang disepakati sejak mula, akhirnya Golkar telah merampungkan daftar calonnya untuk Pemilihan-Umum 1987. Untuk DPR tingkat pusat, Golkar mengajukan calon dua kali lipat dari 400 kursi DPR yang diperebutkan. Dan seperti pada pemilihan umum sebelumnya, kali ini Golkar tetap menampilkann sejumlah vote getter. Sementara itu, generasi muda dan wanita mendapat porsi yang cukup besar.

Para calon yang berdomisili diibukota telah selesai melakukan pengisian formulir di Sekretariat Jenderal DPP Golkar. Sedang untuk mereka yang berdomisili di daerah, DPP mengirim utusan ke 27 propinsi guna mengumpulkann formulir pencalonan dan persyaratan administratif lainnya menjelang pertengahan September ini.

Memang tak semua kader yang berminat menjadi anggota legislatif dapat tertampung. Namun melalui sistim dan mekanisme yang ditetapkan, Golkar telah berusaha sebisa mungkin melakukan seleksi sebaik-baiknya dan sedekat mungkin kepada kriteria PDLT — prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Demikian pula dengan per syaratan lainnya, seperti masa aktif kader di Golkar yang ditetapkan sekurang-kurangnya 5 tahun masa pengabdian terus menerus. Meskipun agaknya disana-sini terpaksa pula ditempuh kebijaksanaan dan dispensasi, bila hal itu dianggap baik bagi organisasi. Misalnya, dalam merekrut perorangan yang dianggap dibutuhkan karena kualitasnya, syarat masa pengabdian yang 5 tahun tak diberlakukan ketat.

Aspek kesinambungan, baik di tingkat DPR-RI maupun DPRD, nampak diusahakan dengan cukup bersungguh-sungguh. Rata-rata 60 persen dari anggota FKP dari periode lalu dipertahankan. Hanya di beberapa daerah dengan situasi tertentu, hal itu tak terjadi. Kasus yang insidental seperti ini memang sempat menjadi isyu politik. Namun para pimpinan Golkar telah memberi penjelasan-penjelasan apa dan mengapanya. Sebagaimana juga telah diberikan pengarahan untuk mengerti, bahwa tak semua kader dapat ikut dalam kesinambungan dan atau ikut ditampilkan sebagai calon. Lapangan tugas kader tak terbatas hanya di lembaga-lembaga legislatif. Dan para pimpinan Golkar dalam beberapa kesempatan juga menandaskan bahwa mereka yang tak ikut dicalonkan atau dicalonkan kembali, tak dengan sendirinya dianggap lebih jelek dibanding dengan mereka yang dicalonkan.

Pengikutsertaan yang vertikal maupun horizontal.

Salah satu hal lain yang sempat menjadi isyu politik — setidak-tidaknya seperti yang tercermin dalam pemberitaan pers — adalah tuduhan bahwa dalam proses seleksi, 'sanak keluarga' tokoh keluarga besar Golkar yang kebetulan adalah pejabat pemerintahan (menteri, gubernur dan sebagainya) lebih menikmati 'kemudahan'. Tak kurang dari Ketua Umum Golkar sendiri membantah hal ini. Beberapa nama yang terkait dengan 'nama besar' memang sempat muncul pada tahap-tahap inventarisasi kader dan tercantum diantara kurang lebih 4000 nama. Namun dalam kenyataannya, banyak diantaranya ikut gugur dalam tahap-tahap berikut. Putera Ketua Umum Golkar sendiri misalnya, ternyata tak dipanggil untuk mengisi formulir pencalonan. Begitu pula dengan beberapa nama lainnya. Sebaliknya beberapa nama — dalam kategori ini — terpilih sebagai calon dengan penjelasan "memenuhi kriteria PDLT"

Adalah menarik pula bahwa dalam peta distribusi pencalonan di 27 propinsi, tampak usaha yang kuat untuk menampilkan warna wawasan Nusantara. Maka dalam rangka ini di Jawa Barat misalnya akan tampil calon-calon yang kebetulan dari daerah kelahiran luar Jawa Barat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan terdapat calon yang menyandang nama dengan marga Tapanuli. Lalu beberapa nama kelahiran pulau Jawa akan muncul di beberapa propinsi Indonesia Timur dan Sumatera serta Kalimantan. Meskipun pula di sana-sini hal ini terabaikan dan belum terlalu diperhatikan oleh propinsi tertentu. Tapi agaknya ini bisa dimaklumi bila melihat jumlah kursi perwakilan yang memang agak terbatas bagi beberapa daerah.

Dikaitkan dengan sistim seleksi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh DPP (Lihat Media Karya, Juli 1986), banyak hal telah dilakukan sebagaimana mestinya. Aspek demokratis, yaitu pengikutsertaan yang luas secara vertikal dan horizontal, sangat menonjol kali ini dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Tapi untuk ke depan agaknya masih diperlukan peningkatan apresiasi para peserta pengambil keputusan untuk lebih mengutamakan objektivitas berdasarkan kriteria diatas subjektivitas. Kesempatan untuk ikut dalam proses ini hendaknya jangan lebih dipandang sebagai peluang menyalurkan subjektivitas, melainkan sebagai peluang menyumbangkan apa yang terbaik bagi kepentingan organisasi. Sebab, akar-akar rumput yang mengalas pijakan organisasi pada hakekatnya hanya akan puas dengan hal-hal adil dan ketaatan kepada sistim dan kriteria.

Bahwa ada anggapan secara insidental masih tampil percikan subjektivitas, agaknya tak perlu disangkal. Dalam kehidupan politik memang sering dan terasa berat untuk serta merta menghilangkan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan subjektivitas klik. Tetapi dalam kasus pencalonan ini sepanjang sistim yang diterapkan Golkar, hal-hal seperti itu sudah jauh lebih banyak terhindarkan. Ini terutama karena telah lebih meluasnya pengikutsertaan dalam pengambilan keputusan. Diharapkan di masa mendatang, akan jauh lebih baik lagi.

Dengan relatif rampungnya proses persiapan pencalonan dan daftar pencalonan Golkar, maka Golkar kini telah selesai dengan salah satu tugas penting dalam rangka pemilihan umum. Maka fokus perhatian kini hendaknya sudah dialihkan dari masalah pencalonan tersebut. Sejumlah tugas penting lainnya menanti curahan perhatian dan penanganan.

Rum Aly

Wonogiri-Solo-Surabaya, Siap

Pemilihan Umum semakin dekat menjelang. Kesibukan dan persiapan terasa kian mendesak. Bagi Golkar keyakinan tetap teguh, bahwa siapa yang paling siap, dialah yang bakal keluar sebagai pemenang pesta demokrasi tahun depan.

Keyakinan itu tergambar jelas dari program dan kegiatan Golkar selama ini. Konsolidasi organisasi sudah lama dilakukan Golkar. Sudah semua propinsi di Indonesia, dikunjungi Ketua Umum Sudharmono SH dalam rangka ini. Bahkan untuk sejumlah propinsi, lebih dari sekali didatanginya.

Dan akhir Agustus lalu, dalam tempo dua hari, Sudharmono dan rombongan meninjau Wonogiri-Solo-Surabaya, melihat dari dekat kesiapan warga Golkar menyongsong pemilu.

Di Kabupaten Wonogiri, Sudharmono puas. Bukan saja karena antusiasme sekitar 11 ribu warga Golkar yang memadati Gedung Olah Raga Giri Mandala sambil meneriakkan yel-yel yang membesarkan hati, tapi juga karena laporan Ketua DPD II Wonogiri, Widjoyo, yang memberi jaminan bahwa di kabupaten ini kesiapan menyambut pemilu mendatang lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. Pada pemilu 1982, Golkar merenggut 91,6 persen suara pemilih di daerah ini, tertinggi dibanding dengan semua Dati II se-Jawa Tengah.

Persiapan yang semakin padu warga Golkar di Wonogiri, menyebabkan saksi dari parpol sulit didapat. Namun Sudharmono mengingatkan, prestasi masa lampau jangan sampai membuat lupa diri dan takabur. "Masih banyak tugas di masa depan yang jauh lebih berat, termasuk mempertahankan kemenangan itu sendiri," ujarnya mengingatkan.

Wonogiri memang pantas bangga. Buah dari penyaluran aspirasi politik mereka kepada Golkar selama ini, terwujud. Impian akan peningkatan kualitas hidup perlahan-lahan diperoleh lewat pembangunan yang secara konsisten diperjuangkan Golkar selama Orde Baru.

Wonogiri wilayah di kaki Gunung Kidul yang dulu kering dan miskin, kini banyak berubah. Bila di jaman Belanda dulu mereka terkenal karena makanan khasnya gogik (nasi dicampur singkong kering), kini semuanya beras. Daerah tandus yang dulu memusuhi setiap bentuk tanaman palawija, kini berhasil dirubah menjadi daerah subur karena sukses reboisasi. Salah satu kepala desa dari Kabupaten Wonogiri, pernah memenangkan Lurah Teladan Tingkat Nasional, karena prestasinya itu.

Bahkan daerah yang selalu terancam rawan pangan ini berhasil menyumbang pangan senilai Rp 106 juta untuk penduduk Afrika yang dilanda musibah kelaparan tahun lalu.

Air bersih

Dalam tatap muka dengan warga Golkar disini, Sudharmono selain memberi pengarahan bagaimana menghadapi pemilu sebaik-baiknya, juga menyerahkan bantuan senilai Rp 590 juta untuk pembangunan proyek air bersih di Desa Pracimantoro dan Giritontro, untuk mengatasi kebutuhan air minum di kedua desa tersebut.

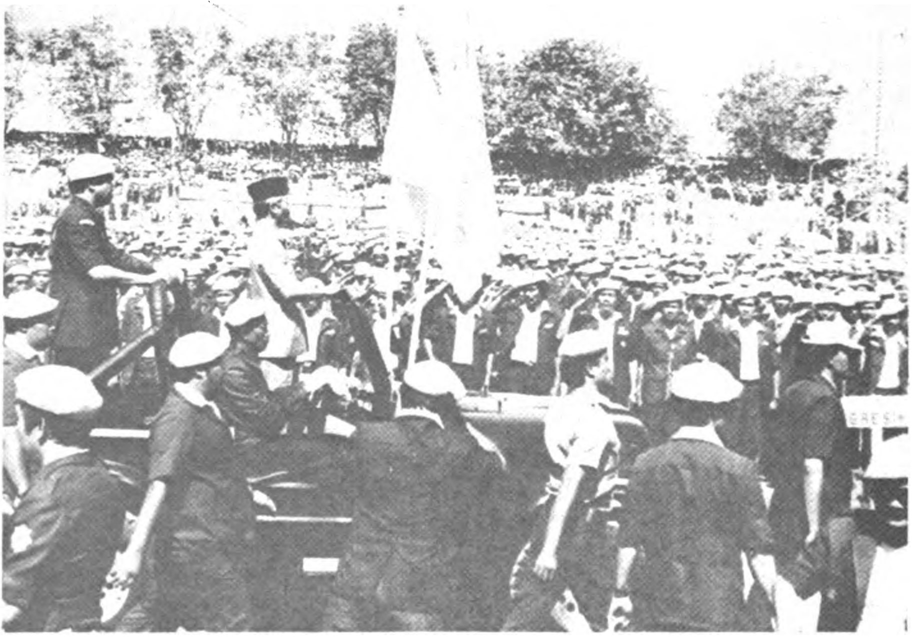

Jangan sampai lupa diri dan takabur.

Bantuan itu diterimakan langsung kepada Bupati Wonogiri, Drs Oemarsono.

Selain menyerahkan bantuan bagi pengadaan air bersih, di Wonogiri juga Sudharmono meresmikan listrik masuk desa yang menambah jumlah desa di kabupaten tersebut yang terjangkau listrik menjadi 61 dari 293, dengan total biaya Rp 6,37 milyar. Bila proyek yang juga dibantu oleh United States Aid for International Development ini rampung, maka total desa di Wonogiri yang menikmati listrik menjadi 95, dengan jumlah pelanggan 14.458 rumah, memanfaatkan PLTA Gajah Mungkur, yang juga terletak di kabupaten ini.

''Pelopor perjuangan dan pionir ketertiban nasional.''

Di Jawa Tengah pada umumnya, dari 8866 desa, sudah 3000 lebih yang telah terjangkau proyek listrik masuk desa, sejak 1981.

Solo yang berkesan

Usai dari Wonogiri, rombongan Sudharmono menuju Solo. Disana diadakan acara tatap muka dengan kader di Pendopo Agung Mangkunegaran, yang juga dihadiri oleh Mensos Nani Soedarsono, Gubernur Jawa Tengah, Ismail, Ketua DPD I Jawa Tengah H Kardiman dan semua pimpinan DPD II se-Kodya Surakarta.

Walaupun mengaku untuk pertama kali bertatap muka dengan kadernya di Solo namun Sudharmono mengungkapkan, kota ini mempunyai kenangan tersendiri baginya, terutama sejak merdeka. Tidak dirinci kenangan khas itu, tapi yang jelas tidak sekedar karena pesona lagu Puteri Solo dan Bengawan Solo yang konon terkenal di luar negeri, sampai-sampai kepala negara Kamboja dulu, Pangeran Norodom Sihanouk menyukai Bengawan Solo yang juga digemari di Jepang itu.

Pembangunan politik dalam meletakkan kerangka landasan untuk tinggal landas pada Pelita VI, merupakan topik yang dibahas secara panjang lebar di depan para kader. Untuk mewujudkan semua cita-cita dan perjuangan Golkar, dibutuhkan kader-kader yang tangguh dan tanggap. ''Tapi hal ini mudah diucapkan, sulit untuk dilaksanakan,'' katanya mengingatkan.

Sementara Ketua DPD I Jawa Tengah H Kardiman melapor kesiapan daerahnya menjelang pemilu mendatang yang digambarkan cukup memuaskan. Untuk Kodya Surakarta yang pada pemilu 1982 berhasil meraih 56 persen suara pemilih untuk 1987 diperkirakan bisa 63 persen.

Walaupun pengkaderan yang dilakukan Golkar selama ini, demikian Sudharmono, tidak hanya semata-mata demi pemilihan umum, tapi untuk kepentingan nasional jangka panjang, namun semua perjuangan Golkar di masa depan akan lebih terjamin kelestariannya, bila para kadernya berhasil memenangkan pemilu. ''Karena pemilu adalah landasan untuk perjuangan lebih lanjut,'' katanya.

Pada akhir tatap muka itu, Ketua Asosiasi Penyalur Gula Jawa Tengah, Poerwata, menyerahkan bantuan 1 unit mobil untuk menunjang mobilitas kampanye pemilu berupa Colt L-300 dan 35 sepeda motor Suzuki A-100. Bantuan itu langsung diserahkan Sudharmono kepada DPD I Jawa Tengah. Bantuan itu, menurut Poerwoto, merupakan partisipasi APEGTI Jawa Tengah untuk mensukseskan Golkar dalam pemilu 1987.

Buang jauh khayalan

Usai dari Solo, Sudharmono menuju Surabaya untuk menghadiri Apel Nasional Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) keesokan harinya di Gelora 10 Nopember, menandai hari jadi ke VIII organisasi pemuda yang beraspirasi erat kepada Golkar ini.

Apel yang dihadiri sekitar 80 ribu warga AMPI seluruh Indonesia itu, juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Pembangunan IV, seperti Menteri Negara urusan Pemuda dan Olah Raga Abdul Gafur, Menteri Pertambangan dan Energi, Soebroto, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Hasjrul Harahap, dan Menteri Sosial Nani Soedarsono. Juga hadir Gubernur Jawa Tengah Wahono, Ketua FKP Soekardi, dan Sekjen Golkar Ir Sarwono Kusumaatmadja.

Di hadapan warga AMPI Sudharmono mengingatkan, agar membuang jauh-jauh semua khayalan yang bukan-bukan. Keanggotaan dalam AMPI harus tidak disertai janji dan iming-iming yang muluk dan enak-enak. ''Masuk organisasi bukan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan,'' katanya.

Sebaliknya, keanggotaan orang muda dalam AMPI harus dilandasi oleh motivasi perjuangan demi masa depan bangsa dan negara. ''Kaum muda harus menjadi pelopor perjuangan, dan khususnya bagi anggota AMPI harus menjaga nama baik organisasi serta pioner ketertiban nasional,'' pinta Sudharmono.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD AMPI Jawa Timur membacakan Kebulatan Tekad yang isinya mencalonkan kembali Presiden Soeharto menjadi Mandataris dalam Sidang Umum MPR 1988 mendatang.

Dan menanggapi pernyataan itu Sudharmono mengingatkan, sebagai konsekuensi, AMPI harus berjuang keras memenangkan Golkar dalam pemilu mendatang, sebab pernyataan AMPI tersebut sejalan dengan sikap Golkar juga. Hanya diingatkan agar pernyataan serupa itu hendaknya keluar dari pikiran yang jernih, jujur dan tulus. Tidak ikut-ikutan atau latah. ☐ **Subandrio**

Sejenak di Bekasi

Jaminan Seribu Dari Vanadium

Minggu pertama September, Ketua Umum Golkar Sudharmono SH beserta rombongan meninjau kesiapan warga Golkar Kabupaten Bekasi, wilayah Jawa Barat yang menjadi kota satelit Jakarta, bersama Depok dan Tangerang.

Konsolidasi organisasi yang menjadi salah satu program Tri Sukses Golkar, memang semakin menarik dan urgen pada saat pemilu di ambang pintu. Kunjungan Sudharmono awal September itu adalah untuk yang kedua kalinya selama ini di wilayah yang letaknya 24 km timur Jakarta tersebut.

Pengkaderan dilingkungan karyawan profesi.

Tatap muka dengan para kader sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar dalam setiap kesempatan kunjungan. Kemampuan kader menangkap dan menalar persoalan-persoalan bangsa diuji. Materi diskusi pun didengar dengan penuh perhatian. "Kader yang selalu mengikuti perkembangan memungkinkan Golkar tidak ketinggalan jaman sehingga tahu persis sikap apa yang diambil," kata Sudharmono ketika mengikuti diskusi karakterdes di PT Vanadium.

Jangan dibalik

Tahun lalu ketika mengunjungi kabupaten ini, tepatnya tatkala meninjau diskusi karakterdes di Desa Duren Jaya, Sudharmono bangga akan ketajaman seorang kader yang mengajukan pertanyaan, "pak, apakah membuka kembali hubungan dagang langsung dengan Cina tidak membahayakan Indonesia secara politis?" "Tentu saja tidak, karena hal itu hanya urusan dagang semata yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik," jawabnya.

Dan pada kunjungan baru lalu, ada seorang kader dari PT Vanadium, pembuat balpoin bergambar Golkar yang sekarang laris itu, bertanya kepada Sudharmono, "bagaimana sikap pak Dharmono terhadap tekad sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan agar Presiden Soeharto dicalonkan kembali menjadi presiden pada periode berikutnya?"

"Kalau itu aspirasi rakyat yang tulus dan spontan, Golkar pasti menampungnya, karena sesuai dengan keinginan Golkar sendiri," jawabnya.

Namun diingatkan, pernyataan dan kebulatan tekad saja belum cukup. Kepada kader-kader PT Vanadium dia menekankan, tekad dan pernyataan itu baru bisa direalisir apabila Golkar berhasil memenangkan Pemilihan Umum tahun depan.

Kepada pimpinan Vanadium, Sukotjo Kartawidjaja, yang telah menjamin seribu anggota karyawannya masuk Golkar, Sudharmono menyatakan terimakasih, karena dengan demikian PT yang juga menghasilkan antene televisi dan radio itu telah ikut mensukseskan salah satu Tri Sukses Golkar.

Golkar memang sangat menghargai usaha-usaha pengkaderan yang dilakukan di lingkungan kekaryaan profesi. Tapi kepada pimpinan Vanadium, Sudharmono mengatakan Golkar tidak menjanjikan apa-apa. Hanya satu hal patut disadari, bahwa jika Golkar menang, maka pembangunan ekonomi akan terus dijalankan, sehingga usaha Vanadium di bidangnya ada harapan kontinusitasnya.

Masuk Golkar harus dilandasi oleh semangat dan tujuan perjuangan. "Karena itu persoalannya jangan dibalik. Jangan masuk Golkar hanya untuk mencari nafkah," ujarnya mengingatkan. Organisasi akan rusak, bila keanggotaannya dilandasi oleh motivasi cari untung dan nafkah.

Tapi kader Golkar di PT Vanadium mungkin hanya sedikit dari sekian juta kader yang mendapat kehormatan khusus, karena Kartu Anggota Golkar

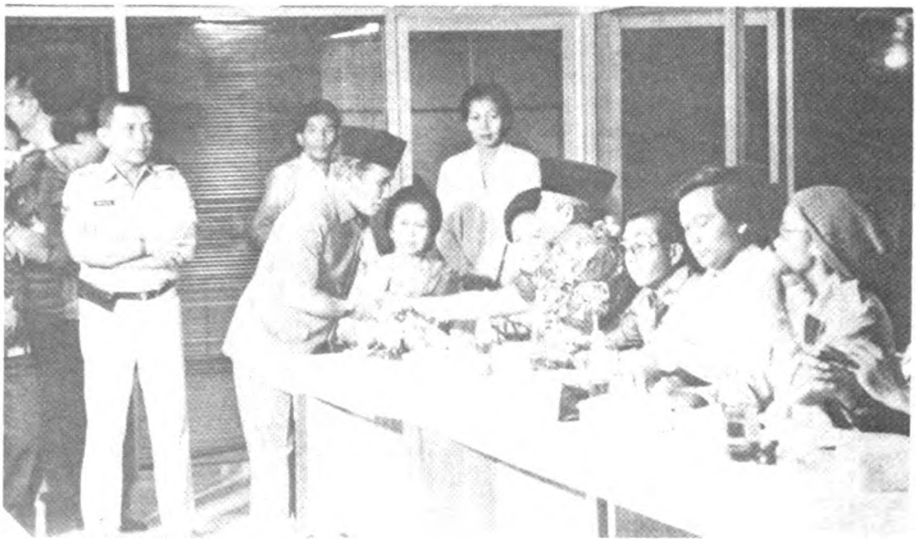

Jangan dilandasi motivasi cari untung.

(KAG) diserahkan langsung oleh Ketua Umum Sudharmono. Seribu karyawan yang masuk Golkar, yang menurut Sukotjo Kartawidjaja berarti "Vanadium 100 persen Golkar" membesarkan hati Sudharmono. "Itu baru karyawannya saja. Bila setiap karyawan disini juga membina keanggotaan di lingkungannya, berarti Vanadium turut berpartisipasi dalam memperkuat Golkar di Jawa Barat umumnya dan Bekasi khususnya," kata Sudharmono.

Golkar pasti menampung aspirasi yang tulus.

Listrik masuk desa

Dalam kunjungan setengah hari di Bekasi itu, selain menyerahkan KAG untuk karyawan Vanadium, Sudharmono juga meresmikan listrik masuk desa, yang pada malam itu menerangi 55 desa di Kabupaten tersebut. Namun dengan peresmian itu, baru 30 persen desa di Jawa Barat yang menikmati listrik. "Kita akan terus berupaya agar nanti 100 persen desa di kabupaten ini menikmati listrik," ujarnya.

Menurut Ir Hendrik Kullit, pimpinan Perusahaan Listrik Negara jaringan distribusi Jawa Barat, pembangunan listrik masuk desa yang diresmikan hari itu menelan biaya Rp. 4,37 milyar, menjangkau 7703 pelanggan dengan panjang jaringan 307 km. Dengan peresmian itu, maka jumlah desa di Jawa Barat yang terjangkau listrik bertambah menjadi 1861 dari 1014 pada akhir Pelita III. Dan jumlah rumah yang menikmati listrik naik menjadi 681.170 dari 348.143.

Dan yang menggembirakan bahwa pembangunan listrik masuk desa di Bekasi ini, melibatkan juga KUD dalam hal perawatan dan penyelenggaraannya, serta kredit untuk memperolehnya. Untuk lebih menjamin kelestarian era pasca listrik masuk desa, maka sejumlah KUD menyelenggarakan kursus instalasi. Suatu partisipasi yang menggembirakan.

Dalam kunjungan ke Bekasi, yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Yogie S Memed, Sudharmono dan Nyonya membawa sejumlah fungsionaris DPP antara lain, Sekjen Sarwono Kusumaatmadja, Zarlon Zaghlul SH, Aulia Rachman, Tatto Pradjamanggala, Ir Tati Sumiarno, drs Moerdopo dan drs Waskito. □ (WT)

Konsolidasi makin urgen.

HWK Siap Menangkan Pemilu Untuk Golkar

Untuk kesekian kalinya.

Menjelang akhir Agustus bulan lalu, tepatnya 21 Agustus, ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Himpunan Wanita Karya (HWK) menyelenggarakan diklat kader fungsional. Diklat yang berlangsung selama 3 hari ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Golkar, Sudharmono.

Pembukaan diklat kader fungsional yang dilakukan oleh Ketua Umum ini bukan untuk yang pertama kali. Tapi pembukaan seperti ini sudah untuk yang kesekian kalinya. Pembukaan diklat kader fungsional baik dilakukan di Jakarta, maupun di beberapa daerah sewaktu ketua umum mengadakan kunjungan kerja untuk berkonsolidasi dengan warga Golkar.

Tetapi pembukaan diklat kader fungsional Wanita, dari beberapa cacatan, ketua umum baru membuka sebanyak 3 kali. Pertama untuk Dharma Wanita, ke dua Dharma Pertiwi dan Himpunan Wanita Karya (HWK) ini untuk yang ke tiga kalinya.

Dihadapan lebih kurang 170 ibu-ibu yang bakal mengikuti diklat kader fungsional, Ketua Umum Golkar Sudharmono, yang mengenakan kopiah hitam serta stelan jas safari warna abu-abu muda itu mengharapkan agar dengan waktu yang relatif singkat ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pasalnya, ikutnya ibu-ibu dalam diklat kader fungsional ini telah meninggalkan rumah, anak dan suami.

Untuk itu lanjut Ketua Umum, agar ibu-ibu setelah selesainya mengikuti diklat ini dapat menceritakan pengalamannya kepada bapak, suami serta anak-anaknya. Dengan demikian Ibu-ibu yang telah mengikuti kader fungsional ini dapat menyebarluaskan kekaderan ini kepada keluarganya, lingkungannya, bahkan kalau bisa dengan lebih luas lagi.

Ditegaskan oleh Ketua Umum, secara

"Agar Ibu-ibu menyebarluaskan kekaderan ini."

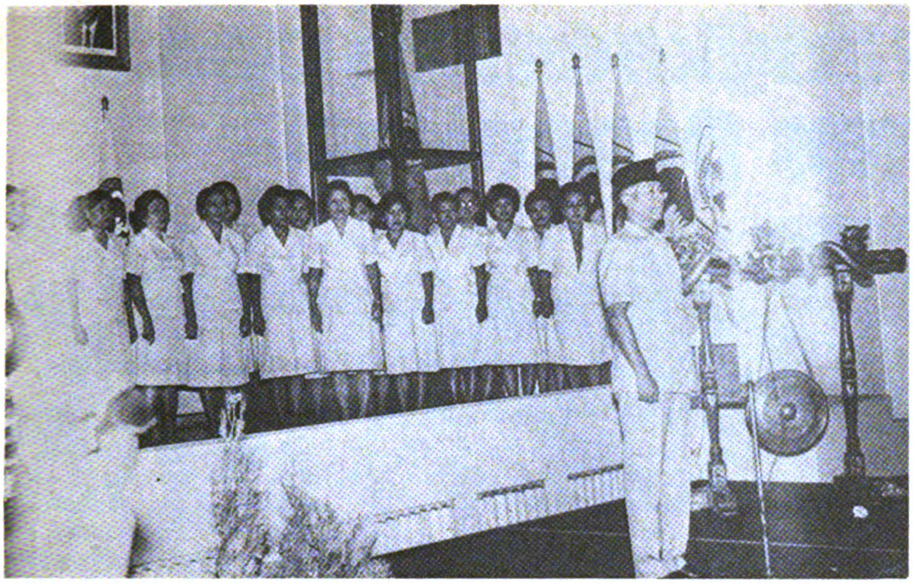

Membuktikannya di tahun 1987.

khusus tugas kader adalah untuk memperjuangkan pesta demokrasi — mensukseskan pemilu tahun 1987. "Jangan berharap kekaderan itu sukses apabila dalam pemilihan umum tahun 1987 tidak berhasil. Kekaderan itu dikatakan sukses bila dalam tahun 1987 nanti kita (Golkar) telah membuktikan keberhasilannya.

Dan lebih tegas lagi ketua umum mengatakan, tujuan dan latar belakang dari kaderisasi ini bukan saja untuk mensukseskan pemilu tahun 1987. Dan kaderisasi ini lebih luas lagi dari pada sekedar santiaji untuk pemilu tahun 1987. Tapi lanjut Ketua Umum, program kaderisasi tidak terlepaskan, bahkan sangat penting dari pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Penggerak Pembangunan

Diklat kader fungsional yang dilakukan ini merupakan kebijaksanaan yang diambil oleh DPP Golkar. Dan kebijaksanaan ini merupakan keputusan bersama — Munas (Musyawarah Nasional) yang diselenggarakan tahun 1983.

Untuk itu, kata Ketua Umum, agar para peserta diklat kader fungsional, dapat menghayati lebih dalam lagi, apa sebenarnya Golkar itu, dan apa pula yang diperjuangkan.

Dalam uraiannya dihadapan ibu-ibu, lebih kurang 1 jam itu Ketua Umum menjelaskan bahwa sebagai kader harus memperhatikan beberapa hal diantaranya kader harus memperdalam mengenai hubungan antara warga negara dengan negaranya. Hubungan antara warga dengan masyarakat — hubungan ke-Pancasilaan, sebagai dasar negara. Selain itu sebagai warga Golkar harus pula mendalami apa itu Golkar, bagaimana disusunnya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana menyelenggarakan organisasi serta yang lainnya.

Untuk itu Ketua Umum berkeinginan, agar dengan adanya kaderisasi ini, setiap anggota Golkar menjadi penggerak dari pembangunan, menjadi penggerak masyarakat, menjadi penggerak bangsa. Dengan demikian diharapkan pula anggota Golkar ini menjadi pemimpin baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas.

Menghayati lebih dalam lagi.

Kemudian dalam uraian sebelumnya, Ibu Nani Soedarsono, ketua umum Himpunan Wanita Karya, yang juga sebagai Menteri Sosial, mengatakan dengan diadakannya diklat kader fungsional ini merupakan suatu penghormatan. Dan sekaligus diklat ini merupakan peluang bagi Himpunan Wanita Karya untuk dapat meningkatkan kualitas kader fungsional wanita Golkar yang berkeandalan dalam mengemban misi dan kekaryaan.

Untuk itu, ujar Ibu Nani, peningkatan jumlah kualitas kader, pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kader memang merupakan titik berat dari Himpunan Wanita Karya, dalam kiprahnya untuk ikut memperkuat Golkar dalam peningkatan potensi dan peran wanita sebagai salah satu sumber daya pembangunan.

Kemudian oleh Ibu Nani juga dilaporkan bahwa dalam pemilu tahun 1987, Himpunan Wanita Karya (HWK), yang merupakan salah satu ujung tombak sudah "combat ready" untuk mensukseskannya dan bagi kemenangan Golkar.

Dalam ikut mensukseskan, HWK, telah melaksanakan pertemuan secara terencana dan terpadu, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan HWK, dewasa ini dapat dikatakan bersamaan dengan wanita Golkar. Dengan keharmonisan hubungan antara tokoh-tokoh wanita Golkar tampak semakin meningkat grafiknya. Sehingga potensi wanita Golkar kian memiliki daya dorong yang besar dalam rangka mensukseskan Tri Sukses Golkar, khususnya dalam upaya untuk memenangkan Pemilu tahun 1987 yang akan datang.☐

Suwito/ Badrul Mustofa

Ikut memperkuat Golkar.

Sistim Pengkaderan Dan Sasaran Organisasi

Kompetisi obyektif.

Bangsa Indonesia yang merdeka seperti lazimnya bangsa dari negara-negara lain di dunia bercita-cita untuk menciptakan kehidupan yang lebih maju, lebih sejahtera dan lebih adil bagi rakyatnya.

Perjuangan yang demikian ini adalah merupakan perjuangan seluruh lapisan masyarakat, khususnya perjuangan Golongan Karya yang dilaksanakan melalui kader-kadernya.

Perjuangan ini tidak dapat dicapai oleh satu lapisan generasi Golongan Karya saja, melainkan oleh generasi yang satu ke generasi selanjutnya.

Dengan harapan bahwa pada suatu saat perjuangan seperti tersebut diatas dapat terwujud dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Golongan Karya melaksanakan persiapan-persiapan dengan cara melakukan pendidikan dan pembinaan kader, yang pada dasarnya setiap kader Golongan Karya adalah merupakan Kader Pancasila, Kader Organisasi dan Kader Pembangunan.

Sebagai penjabaran dari jenis kader seperti tersebut diatas, maka dari setiap kader dituntut memiliki sifat loyal, berkualitas dan lain-lain.

Ketentuan yang ditetapkan dalam rangka pengkaderan yang selama ini dilaksanakan dan dapat dikatakan baik, tetapi alangkah baiknya bila ketentuan tersebut dapat disempurnakan dengan sistim klasifikasi kader yang didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman masing-masing kader.

Hal ini dimaksudkan agar supaya dapat terciptanya lapisan-lapisan kader, dengan melalui suatu proses pengujian dan penyaringan diperoleh suatu lapisan tertentu yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh organisasi untuk difungsikan baik pada bidang eksekutif, maupun legislatif.

Dengan terciptanya lapisan-lapisan kader seperti yang dimaksudkan diatas akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

Setiap kader langsung atau tidak langsung dipaksakan untuk setiap saat dapat melengkapi kekurangan-kekurangannya yang mungkin ada pada dirinya, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kwalitasnya.

Menghilangkan sifat ketergantungan kepada orang lain, yang sekaligus pula menimbulkan rasa percaya pada dirinya sendiri.

Setiap kader, sadar akan waktu, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk dapat ditampilkan oleh organisasi pada bidang-bidang tertentu.

Hal ini akan menghilangkan keresahan diantara sesama kader, karena penampilan seorang kader pada suatu bidang tugas tertentu telah melalui suatu proses yang dinilainya obyektif.

Dengan hilangnya rasa resah diantara sesama kader akan menimbulkan sifat loyal terhadap setiap keputusan/kebijaksanaan organisasi.

Kompetisi yang terjadi diantara sesama kader adalah merupakan suatu kompetisi yang sehat, tanpa harus melalui cara yang dinilainya kurang menguntungkan, yang lazim disebut orang dengan sistim loncat pagar.

Uraian seperti tersebut diatas belum juga sempurna bilamana kader-kader tersebut tidak dicegah dari emosi yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan yang sekaligus bertentangan dengan Wawasan Nusantara.

Sehubungan dengan masalah ini, maka bagi setiap kader perlu pula ditanamkan bahwa hakekat dari pertumbuhan Sosial Budaya Nusantara adalah pertumbuhan itu sendiri, yang dilandaskan pada pemahaman tentang pola kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sebagai kekayaan budaya yang tidak ternilai, yang apabila dipadukan secara serasi dan seimbang akan merupakan manfaat besar bagi kehidupan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun sebaliknya, sifat Kebhinekaan tersebut juga mengandung kerawanan dan mudah dapat dipecah belah antara lain oleh emosi suku, kepentingan-kepentingan pribadi atau Kepentingan-kepentingan tertentu, sampai kepada masalah-masalah agama, yang dapat merupakan suatu bencana hingga mengancam bukan saja Persatuan dan Kesatuan dalam organisasi, tetapi lebih dari itu dapat mengancam kelangsungan hidup Bangsa dan Negara.

Oleh sebab itu Kebhinekaan yang berpusat pada keaneka ragaman Sosial Budaya yang dikarenakan perbedaan kewilayahan atau daerah, harus dapat diciptakan oleh Kader-Kader Golongan Karya dalam wujud kesetiaan dan rasa perpaduan antara seluruh rakyat yang sepenuhnya terarah dan terpusat kepada Bangsa Indonesia sebagai perwujudan seluruh rakyat dan masyarakat.

Pertumbuhan Sosial Budaya Nusantara mengandung tata kerja untuk mendekatkan, menghubungkan dan mempersatukan bagian-bagian masyarakat yang berbeda-beda, terpencar dan terpisah-pisah, agar tercipta suatu Budaya Nasional, dimana unsur-unsur Kebhinekaan tersebut dapat dipadukan lebih erat, saling melengkapi, saling memberi dan menerima serta saling mempercaya dan menguntungkan satu sama lain sehingga merupakan suatu kebudayaan yang besar dan lengkap, kuat dan menyeluruh, mantap, serasi dan seimbang.

Faktor-faktor emosi suku, kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan tertentu sampai kepada masalah-masalah agama bukanlah tidak mungkin suatu saat akan timbul, dan bilamana hal ini terjadi selain berpengaruh terhadap setiap pelaksanaan dari keputusan/kebijaksanaan organisasi, tetapi juga merupakan hambatan dalam rangka tercapainya sasaran pengkaderan yaitu terwujudnya Kader Pancasila, Kader Organisasi dan Kader Pembangunan.

Sehingga dengan demikian bagi setiap kader perlu untuk diberikan penangkal sehingga ia dapat mencegah kemungkinan yang bisa terjadi sewaktu-waktu yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan tersebut. □

JOHN TETELEPTA, NPAG : 09010000121.

Bagaimana Seharusnya Seorang Kader

Seorang kader adalah seorang prajurit komando bagi Golkar.

Artinya, dia harus bekerja baik bersama-sama maupun pribadi atau sendirian untuk memenangkan Golkar.

Untuk itu maka pertama-tama yang harus dimiliki adalah keyakinan, suatu kekayaan mental, bahwa kemenangan Golkar adalah berarti pelestarian pembangunan, dan pembangunan berarti hidup bagi seluruh bangsa Indonesia.

Pembangunan dapat lestari jika ditunjang oleh keamanan yang mantap, persatuan dan kesatuan bangsa, kekuatan untuk menjaga tanah air dan bangsa dan menangkal dari segala tantangan dan rintangan.

Kerja sama yang erat antara Golkar dalam hal ini sebagai unsur sosial dan politik dengan ABRI yang kuat penting buat menjamin kondisi itu.

Indonesia walaupun diakui telah melangkah lebih maju, tetapi masih harus mengejar ketinggalannya dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan di Asia, dan Jerman, Perancis dan lain-lain di Eropa, serta Amerika Serikat.

Itulah sebabnya Indonesia perlu Pemerintahan yang mantap, kuat dan berwibawa, serta didukung oleh teknokrat-teknokrat yang tangguh.

Setelah punya modal keyakinan tersebut diatas, maka seorang kader Golkar harus mempunyai modal yang lain, seperti:

1. Merasa menjadi warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan bertaqwa kepada Tuhan YME.

2. Merasa menjadi abdi negara yang taat dan setia sepenuhnya, karena itu harus membela negara dan Pemerintah RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Kader harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara dan pemerintah serta korps Kader Golkar, memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sebagai kader Golkar serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

4. Dalam melaksanakan tugas seorang kader Golkar harus bekerja dengan jujur, bersemangat, berdisiplin, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

5. Harus yakin bahwa seorang kader Golkar adalah abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

6. Harus menempatkan kepentingan Golkar diatas kepentingan pribadi. Bahkan karena Golkar adalah berisikan seluruh unsur dalam masyarakat, maka ia harus menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

7. Mengutamakan kesatuan bangsa, dan senantiasa meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Setelah berbekal keyakinan, mental dan semangat seperti tersebut diatas, maka ia harus berbekal kemampuan untuk:

1. Dapat membuat rencana kerja dengan baik. 2. Dapat memimpin masyarakat. 3. Dapat mengorganisir massa. 4. Dapat mengawasi kerja massa dan sekaligus menilai keberhasilannya. 5. Harus kreatif dan dinamis. 6. Harus senantiasa hidup dan bergerak ditengah-tengah masyarakat.

Kader Golkar harus melayani segala unsur masyarakat, maka ia harus rendah hati, jika perlu juga menolong kesengsaraan masyarakat siapapun dia itu, itulah yang dimaksud menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian seorang kader Golkar akan mendapatkan simpati dari kawan maupun lawan.

Karena kepandaiannya dalam manangement dan leadership itu, maka seorang kader Golkar adalah ibarat air, garam dan terang yang menghidupi dan memimpin serta berada di segala lingkungan masyarakat.

Seorang kader Golkar harus mampu menjadi penggerak organisasi, baik di LKMD, Karang Taruna, Pramuka, Kelompencapir, Kelompok Belajar, Organisasi Simulasi P4, bahkan di organisasi-organisasi keagamaan.

Seorang kader Golkar harus selalu tampil untuk dapat memecahkan kesulitan, mengarahkan kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara, selalu mengulurkan tangan pertolongan, dan bahkan memberikan kegiatan-kegiatan bagi organisasi yang mandeg.

Oleh karena itu seperti tadi telah kita utarakan, seorang kader Golkar harus trampil, kreatif, dinamis, sehat rohani dan jasmani, berdaya guna dan berhasil guna dalam masyarakat sekitarnya.

Maka seorang kader Golkar juga harus pandai berbicara untuk dapat mengutarakan pendapat, isi hati yang sesuai dengan butir butir P4, mengarahkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Seorang kader tidak boleh diam dan menunggu untuk menyokong pendapat orang lain sebagai "yes man" belaka.

Seorang kader Golkar harus berdiri di depan untuk menjadi promotor, motor dan otak dari setiap kegiatan di desa, di kota dan di manapun ia berada.

Tetapi itu tidak berarti bahwa seorang kader Golkar itu diminta untuk gembar-gembor tanpa bukti nyata, ditengah-tengah masyarakat yang telah kritis dan minta bukti nyata suatu kesanggupan, atau ditengah masyarakat desa yang polos dan berpengalaman, yang minta bukti kejujuran dan contoh teladan.

Pada dasarnya sebutan kader Golkar bukan merupakan suatu predikat untuk gagah-gagahan atau status; tetapi kader Golkar disorot masyarakat; dia mewakili Golkar, dan bagi masyarakat apa yang disebut Golkar cermin pada diri kader Golkar.

Walaupun pandangan itu tidak seratus persen harus demikian, tetapi demikianlah kenyataan yang dihadapi seorang kader.

Maka kader Golkar harus berhati-hati dalam setiap patah kata dan setiap langkah di masyarakat, sedikit luncas, maka nama Golkar akan menjadi taruhannya.

Seorang pemimpin pemerintahan baik di kota maupun di desa, begitu pula para tokoh Golkar harus berhati-hati dalam memilih kader; jangan sekedar mengisi dan menurut perintah atasan, tetapi persyaratan-persyaratan tersebut diatas harus menjadi pertimbangan yang jeli dan penuh kewaspadaan.

Kesalahan dalam memilih kader Golkar akan menunjukkan betapa kemampuan yang memilihnya sendiri.

Memang segala sesuatu hasil karya seseorang menunjukkan betapa kecerdasan, kearifan, dan kejelian orang itu.

Maka apa yang dilakukan dan hasil kerja dari seorang kader Golkar juga tergantung kepada atasan yang memilihnya, dan tak dapat ditimpakan kepada kader itu sendiri.

Perlu ditambahkan masalah ketaqwaan kepada Tuhan YME, tidak berarti kefanatikan seseorang.

Seorang yang taqwa adalah orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Khalik sekalian alam, dan ia berbakti sesuai dengan perintah agama.

Seorang kader Golkar harus memadukan antara iman taqwa dan ilmu serta pengetahuan.

Dengan begitu maka seorang kader Golkar harus hidup yang selaras dan seimbang, tidak cenderung kepada ekstrimitas.

Terakhir seorang kader harus rajin belajar dan rajin bertanya kepada orang yang lebih mampu.

Sekian dan semoga berguna. ☐

Prayogo, BA NPAG 12330001366 adalah guru SGO Negeri di Pati, Jateng.

Karya Bhakti, Pembawa Missi Pengabdian Golkar

Di arena juang Tri Sukses kini, hampir tak ada kader Golkar yang tak mengenal 'Karya Bhakti' sebagai unit kegiatan dan satuan kader yang bergerak ke tengah-tengah masyarakat membawa missi pengabdian Golkar.

Bermula dari gerak spontanitas yang berlangsung secara sporadis dari kader-kader muda Golkar di masa penggalangan massa tahun 1976. Saat itu, daerah pinggiran Jakarta di hampir seluruh sudutnya, terlanda musibah banjir dengan berbagai akibat buruk yang menimpa. Dan, dengan spontan dan berlangsung secara sporadis, berlangsunglah aksi sosial para kader Golkar dalam turut menanggulangi beban yang menimpa masyarakat saat itu.

PENGOBATAN CUMA CUMA
UNTUK UMUM
OLEH KARYA BHAKTI GOLKAR

Penekanan pada penyuluhan dan pelayanan kesehatan

Gerakan itu berlanjut terus dengan penekanan pada penyuluhan dan pelayanan kesehatan serta bantuan-bantuan lain yang diperlukan masyarakat. Gerak sporadik yang spontan itu, dinilai positip dan perlu dilembagakan agar dapat berprogram dan berkesinambungan.

Kemudian, dengan dukungan para tokoh Golkar seperti Bapak R. Sukardi, Ibu Nani Sudarsono SH., Bapak Drs. Cosmas Batubara, Bapak Dr. Midian Sirait, Bapak Sukarton Marmosudjono SH, Bapak Bambang Gunawan Wibisono, Bapak H. Achmadi dan Bapak Dr. Adi Tagor, lahirlah 'Yayasan Karya Bhakti' dengan kader Golkar sebagai penyelenggara kegiatan.

Lembaga yang mendapat akte notaris pada tahun 1983 ini, kemudian lebih memperluas lingkup kegiatan, tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan semata, tetapi juga bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesejahteraan rakyat dan bidang sosial budaya umumnya.

Secara hakiki, tujuan kelahiran Yayasan Karya Bhakti yang tertuang dalam program kerjanya disebutkan: Ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui karya nyata dan menegakkan Panji Golongan Karya agar selalu jaya, dan agar di hati rakyat, Golkar selalu mengakar.

Dalam kehadirannya ke tengah-tengah masyarakat, Karya Bhakti menempuh dua pendekatan. Pertama, lewat kegiatan yang bersifat sporadis-situasional, yakni program pendadakan sesuai dengan tuntutan situasi. Kedua, program yang bersifat permanen konsepsional seperti rumah sakit, balai kesehatan, sekolah, depot obat dan kegiatan-kegiatan permanen lainnya.

Rumah Sakit di Bogor

Guna terpeliharanya semangat juang para kader Golkar yang berhimpun di Karya Bhakti, dikenal semboyan korp yang berbunyi: "Dengan berkarya kita berbhakti. Berjuang melalui pengabdian, untuk kesejahteraan".

Belum genap setahun Karya Bhakti berdiri, 14 Agustus 1984 lembaga ini telah berhasil meresmikan karya monumentalnya yang patut dibanggakan, sebuah rumah sakit di kota Bogor. Ibu Nani Sudarsono SH selaku salah seorang pendiri yayasan ini, 14 Agustus 1984 meresmikan Rumah Sakit Karya Bhakti.

Rumah Sakit yang berlokasi di Jalan Dr. Sumeru, kota madya Bogor ini, berdiri megah di atas tanah seluas 5 ha. Dengan ratusan tenaga medis yang terdiri dari dokter, paramedis, tenaga non medis, pelaksana bidang administrasi yang keseluruhannya terdiri dari kader-kader muda Golkar, menjadikan rumah sakit ini sepenuhnya dikelola oleh para kader profesional Golkar.

Berangkat dari sikap 'Karya Siaga Gatra Praja', Rumah Sakit Karya Bhakti yang dipimpin oleh Dr. Mismasdi Mihadi ini mengupayakan berbagai keringanan bagi 'siapa saja' yang meminta jasa kesehatan. Tidak menarik uang muka, pembayaran dengan angsuran serta berbagai keringanan lainnya.

Manajemen sosial yang ditempuh ini ternyata tidak mengganggu gerak maju R.S. Karya Bhakti. Malahan kian hari kian menunjukkan kemajuan pesat.

Selain itu, pengabdian lembaga ini di bidang kesehatan ditandai dengan munculnya Balai-Balai Kesehatan Masyarakat yang berada di tengah-tengah masyarakat. Empat puluh empat Balai Kesehatan kini terdapat di berbagai sudut Jakarta dan sekitarnya.

Pelayanan kesehatan bagi para peminta jasa kesehatan, ditempuh dengan pembayaran jasa dan obat seringan mungkin. Bahkan bagi warga Golkar asal dengan pengantar Komisaris Golkar, diberi kesempatan pelayanan gratis.

Bagi warga Golkar, gratis

Bencana

Dunia tak pernah sepi dari bencana. Dan, kalau bencana itu terjadi di bagian-bagian tertentu dari Nusantara ini, Karya Bhakti mempersiapkan satuan tugasnya untuk terjun di wilayah bencana. Dengan satuan tugas cepat, bantuan kesehatan (satgaspatbankes) Karya Bhakti mencatat pengalaman penerjunan di Galunggung, Dieng, Lahat, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Bandung Selatan dan di berbagai tempat lainnya.

Sedangkan di Jakarta, hampir setiap sudut rawan kota Metropolitan ini telah dijelajahi satuan kader dalam Karya Bhakti ini. Baik dalam penanggulangan wabah penyakit, khitanan massal, penyuluhan kesehatan, bantuan materi kebutuhan bagi korban bencana, serta berbagai bentuk operasi simpatik lainnya.

Operasi partisipasi, juga merupakan program tetap Karya Bhakti, di mana team dokter, team para medis, perlengkapan kesehatan termasuk ambulansenya serta obat-obatan secukupnya, tersedia untuk diperbantukan pada kegiatan-kegiatan pertemuan nasional. Tak kurang dari Munas Golkar, PON, Jambore Nasional, Sidang Umum MPR, Karya Bhakti berpartisipasi menangani pelayanan kesehatan.

Selain bidang kesehatan, Karya Bhakti yang dipimpin oleh Dr. F.X. Subagyo, Dr. JMV Suwarto, Dr. Sonny L. Tobing, Dr. Yusbandi, Dr. Lucky, Dr. Maringan dan lain-lain, juga bergerak dalam berbagai bidang lain yang bermanfaat bagi missi pembangunan dan pembaharuan Golkar.

Dalam peranan kemasyarakatannya, lembaga ini bekerjasama dengan berbagai lembaga lainnya seperti dengan Yayasan Prasetya Mulya, R.S. Sitanala, Team Sar Nasional, BKKBN dan lain-lain.

Bidang pendidikan pun ditekuni, terbukti dengan berdirinya Sekolah Menengah Industri di Depok, Sekolah Pemandu Acara (Master Of Ceremony), berbagai seminar dan simposium yang terselenggara secara insidentil.

Karya Bhakti yang telah beberapa kali membawa missi pengabdian masyarakat DPP Golkar ke berbagai daerah, kini mempertimbangkan untuk membentuk cabang-cabangnya di daerah-daerah yang memungkinkannya berkembang sesuai dengan kebutuhan setempat. ☐ A. Inayadi/ Djonharro

---

Tokoh-tokoh Muhammadiyah Dan Lembaga Adat Kerinci Dukung Golkar

Para Sesepuh dan tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jambi beserta keluarga besarnya, siap memenangkan Golongan Karya dalam Pemilu 1987 mendatang. Pernyataan itu disampaikan oleh para sesepuh dan tokoh-tokoh Muhammadiyah Jambi kepada Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Jambi, H. Masjchun Sofwan, SH pada suatu upacara khusus di Aula Gubernuran Jambi tanggal 24 Agustus yang lalu.

H. Masjchun Sofwan dalam kata sambutannya pada upacara yang juga dihadiri oleh Ketua DPD-I Golkar Jambi serta para fungsionaris Golkar lainnya itu mengatakan bahwa pernyataan tokoh-tokoh Muhammadiyah tersebut merupakan ikrar yang diniatkan dalam hati, diucapkan oleh lidah, dan tentunya akan diikuti oleh perbuatan. Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang telah tua usianya, lebih dari setengah abad. "Dari padanya diharapkan karya-karya nyata sesuai dengan ikrar yang telah disampaikannya," demikian Masjchun Sofwan.

Sementara itu Ketua DPD-I Jambi H.M. Syukur dalam sambutannya mengungkapkan penilaiannya bahwa pernyataan yang telah disampaikan oleh para tokoh Muhammadiyah itu lahir tanpa pamrih. "Golkar menyambut baik pernyataan tersebut," ujarnya.

Adapun isi lengkap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

"Dengan berserah diri kepada Allah SWT, para sesepuh dan tokoh-tokoh Muhammadiyah beserta keluarga besarnya dalam wilayah Jambi, menyatakan :

1. Siap dan waspada untuk mensukseskan dan mengamankan Pemilu 1987 dan Sidang Umum MPR 1988 dengan menyalurkan aspirasi politik kepada Golkar.
2. Menghimbau dan mengajak seluruh keluarga besar Muhammadiyah untuk lebih mantap memberikan hak pilihnya kepada Golkar dalam Pemilu 1987, untuk kesinambungan pembangunan dunia dan Ukhrawi, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Demi Kemantapan dan kesinambungan pembangunan tersebut di atas dalam doa kami mohonkan kiranya Bapak Suharto, dibuka Allah hati beliau untuk meneruskan kepemimpinannya sebagai Presiden RI, dan melalui Golkar kami mengusulkan agar MPR RI hasil Pemilu 1987 tetap menetapkan beliau kembali sebagai Presiden RI."

Pernyataan ditandatangani oleh 20 orang tokoh Muhammadiyah antara lain H. Djanan Thaib, H. Muchtar Rasyid dan lain-lain.

Pada kesempatan lain yaitu dalam upacara pelantikan 160 orang Depati dan Rio dalam lingkungan Payung nan Sekaki, Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Lembaga Adat Kerinci juga telah menyampaikan kebulatan tekad untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Pernyataan para pemuka adat dari enam kecamatan di Kabupaten Kerinci ini disampaikan kepada H. Masjchun Sofwan selaku Ketua Dewan Pertimbangan Golkar dan Sesepuh Adat Propinsi Jambi. ☐

Golkar Kokoh di Cipondoh

Minggu pagi 6 Juli 1986 keluarga besar Golkar wilayah kecamatan Cipondoh menyampaikan rasa bersyukur kepada Tuhan YME, atas diresmikan dan diperluasnya bangunan Pondok Pesantren Al-Quran-Wat Tahfizd kelurahan Pinang kecamatan Cipondoh dati II. Tanggerang. Terlaksananya pembangunan Pondok pesantren tersebut berkat kerjasama antara Ulama dan umaroh serta didukung pula oleh kerja keras para KaderGolkar, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, AMPI, FKPPI, dan warga setempat.

Upacara peresmian yang sederhana, namun penuh khidmad yang disaksikan oleh ribuan massa pendukung Golkar, ditandai dengan pembukaan selubung papan nama oleh ketua Dep. Kerohanian DPP Golkar KH. Qodratullah diiringi dengan teriakan Allahu Akbar tiga kali. Dengan demikian resmilah pondok pesantren tersebut, yang berarti Semakin Kokohlah pula Golkar di Cipondoh... Dalam Pidato pengarahannya KH. Qodratullah mengingatkan "Ulama bukanlah pemarah, tapi sebaliknya justru harus peramah terhadap siapapun. Sikap ini patut dijadikan teladan oleh masyarakat, sehingga apabila masyarakat bertemu dengan ulama akan merasakan dirinya terlindungi. Ulama adalah penuntun dan pemberi petunjuk kepada mereka yang membutuhkan, ibarat lampu pelita yang menerangi dalam kegelapan malam.

Ditekankan oleh Qodratullah:" Dengan diresmikannya pondok pesantren ini, maka bertambahlah sarana untuk mempelajari ilmu khususnya ilmu agama Isalam. Kenyataan pada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana ibadah di tanah air sangat pesat dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru, di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto atau Bapak Pembangunan Indonesia. Para lulusan pondok-pondok pesantren, nanti pada waktunya dapat menjadi duta-duta Golkar dengan memberikan penerangan mengenai program-program dan kegiatan Golkar, dan menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembangunan di bidang karya dan kekaryaan, organisasi masyarakat, menurut profesi dan fungsi masing-masing."

Ketua pelaksana pembangunan pondok pesantren tersebut KH. drs. A. Dasuki Adnand melaporkan bahwa pondok pesantren tersebut sanggup menampung lebih kurang 1500 orang, dengan fasilitas 75 orang bagi yang bertempat tinggal jauh. Luas tanah 1 (satu) hektar, sedang luas bangunan 7000 meter persegi. Dana yang diperlukan untuk pembangunan dan perluasannya diperkirakan akan menelan biaya 500 juta rupiah. Untuk itulah para dermawan yang terketuk hatinya diharapkan bisa mendermakan sebagian rezekinya untuk membantu terlaksananya pembangunan dan perluasan pondok pesantren tersebut. Penyerahan tanah wakaf dilakukan oleh Lurah Pinang drs. Wahidin, seorang kader Golkar tulen yang mewakili masyarakat setempat, kepada KH. drs. A. Dasuki Adnand yang didampingi oleh Ketua-Satkar Ulama Indonesia KH. Tubagus Arsyad Asnawi serta KH. Qodratullah yang mewakili Ketua Umum DPP Golkar, dan ribuan keluarga besar Golkar setempat. Hadir pula dalam acara peresmian tersebut Kadit Sospol dati II Tanggerang drs. Muhson mewakili Bupati Tangerang, ulama-ulama setempat dan para undangan lainnya.☐

Pujiantoro / Rendy MS

"Ulama bukanlah pemarah"

Banjir Di Ciamis, Telan 7 Korban Manusia

"Agar pengusaha muda tergerak membantu"

Hujan yang turun pada akhir tahun ini banyak menggelisahkan sebagian penduduk di pulau Jawa. Di Cilacap, Jawa Tengah, maupun di Babat, Jawa Timur, akibat dari hujan ratusan hektar sawah milik penduduk, rumah, serta binatang peliharaan menjadi korban.

Namun banjir yang melanda daerah Jawa Tengah, maupun di Jawa Timur lain dengan banjir yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Korban dari masyarakat Jawa Barat tidak hanya rumah, sawah, serta binatang piaraan, tapi juga telah menelan korban manusia.

Musibah yang terjadi di 11 kecamatan, dari 63 desa di kabupaten tersebut, tidak terbayangkan sebelumnya oleh penduduk setempat. Hari-hari sebelumnya, penduduk desa tersebut tampak-tenang-tenang saja, bahkan melakukan pekerjaan seperti biasanya. Namun menjelang pukul 7 seusai Isyak penduduk daerah itu, khususnya penduduk desa Sukadana, dan Digayam dikejutkan dengan suara yang aneh. Dan suara seperti itu tidak pernah terdengar dalam tahun-tahun sebelumnya. Semakin lama suara itu semakin keras kedengarannya. Ternyata suara itu datang dari sungai yang menghubungkan desa Sukadana, kecamatan Banjarsari dengan kecamatan Cigayam.

Mengetahui akan terjadinya musibah ini, penduduk setempat segera mengamankan segala isi dari perabotan rumah tangga. Namun datangnya air dirasakan terlalu cepat. Sehingga menghanyutkan apa yang terdapat di hadapannya.

Dari data yang dapat dihimpun Media Karya hingga tanggal 23 Juli lalu, banjir yang melanda 11 kecamatan dari 63 desa di kabupaten Ciamis, Jawa Barat telah merusak 3.552 hektar sawah, 4.63,50 hektar palawija, dan 381 hektar tanaman hortikultura. Selain dari itu juga merusak 749 rumah. Dengan rincian 291 rumah hancur, 185 rusak berat dan 273 rusak ringan. Dan kerusakan ini masih juga belum terhitung dengan kerusakan-kerusakan lain seperti sarana ibadah, tempat pendidikan dan yang lain. Namun akibat dari musibah ini yang paling tragis adalah, bahwa banjir ini telah menelan 7 korban manusia.

Dari pengamatan Media Karya ke tempat lokasi hingga tanggal 23 Juli lalu, 2 desa Banjarsari dan Cigayam merupakan desa yang paling parah terkena banjir. Dan dari lokasi itu masih terlihat rumah-rumah penduduk yang hanya terlihat fondasinya saja. Selain itu lumpur akibat banjir itu juga masih tampak.

Menurut penduduk yang tidak jauh dari lokasi sungai itu mengatakan, banjir akibat dari luapan sungai itu terjadi pada pukul 7 setelah isyak. Dan airnya mencapai lebih kurang 2 meter tingginya.

Tampaknya, akibat banjir yang menggenangi desa yang hampir 10 hari lamanya itu menjadikan bahan pangan, khususnya kebutuhan pokok seperti beras harganya menjadi melonjak. Harga 1 liter yang biasanya Rp. 320, naik menjadi Rp. 380. Dan kenaikan juga terdapat pada transportasi dari desa Banjarsari – Cigayam, yang biasanya Rp. 400, naik

Tak terbayangkan sebelumnya oleh penduduk.

menjadi Rp. 800.

Untuk memulihkan keadaan, serta membantu penduduk yang terkena musibah, berbagai upaya dilakukan. Untuk penduduk yang rumahnya terkena musibah banjir — rumah yang ditempati itu bukan dari tanahnya sendiri, pemerintah daerah menyediakan, atau membangun 22 KK di desa Entrong, Menurut Bupati Ciamis, tanah yang digunakan untuk perumahan penduduk itu adalah tanah milik negara.

Upaya-upaya untuk meringankan derita dari penduduk tersebut tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga datang dari pihak swasta. Dan akibat banjir yang melanda desa itu, tidak urung dari Ibu Tien Soeharto juga memberikan bantuan Rp. 50 juta. "Bantuan dari Ibu Tien Soeharto", tidak kami berikan dalam bentuk uang, tapi kami ujudkan berupa barang, beras misalnya. Ujar Momon Gandasasmita, yang bupati itu.

Selain bantuan datang dari Ibu Tien Soeharto, instansi pemerintah, swasta, juga datang dari Angkatan Pembaharu Indonesia — yang kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahunnya organisasi itu ke VIII.

Tanggal 23 Juli lalu rombongan yang diketuai Gunariyah Muchdi Kartasasmita, menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir, guna untuk ikut meringankan beban para korban. Sumbangan yang diberikan itu berupa; 25 pak supermi, 2500 buku tulis, 2500 pensil serta bahan-bahan pakaian. Dalam rombongan itu diantaranya C.H.M Muas, Anton Lesiangi, Inggriani Ganda, Berny Tamara, A.H. Zazili dan Saut L. Tobing.

"Saya mengharapkan pengusaha muda ...."

Dalam kesempatan itu pula, diberikan sumbangan kepada DPD Golkar Tk II Ciamis, yang disampaikan melalui Bupatinya, Momon Gandakartasasmita, berupa 100 kitab suci Al Qur'an, 50 bendera Golkar, serta kalender Golkar.

Mengenai bencana banjir yang melanda kabupaten Ciamis, dan yang lain, dilukiskan oleh Gunariyah sebagai hal yang mengharukan. Untuk itu saya mengharapkan kepada pengusaha muda, yang mempunyai penghasilan lebih agar ikut berpartisipasi dan membantu para korban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama, ujarnya.

Banjir yang melanda 11 kecamatan dari 63 desa, di kabupaten Ciamis ini baru pertama kali terjadi. Tahun-tahun sebelumnya memang sering terjadi banjir, akibat luapan dari sungai Citanduy. Tapi banjir yang melanda beberapa desa dalam tahun ini merupakan yang pertama kali terjadi, dan sangat mengerikan. Ujar Momon Kartasasmita. Dan katanya lebih lanjut, dalam penanggulangan banjir di Ciamis, biasanya berhasil. Tapi kali ini tidak, sebab banjir ini datangnya secara mendadak.

Menurut keterangan dari beberapa penduduk, banjir yang terjadi di beberapa desa itu merupakan suatu kelalaian. Dimana suatu perkebunan karet yang luasnya lebih kurang 450 ha, ditebang langsung diganti ditanami singkong. Sehingga waktu hujan tiba, air tersebut tidak dapat terbendung, dan terjadi banjir.

Untuk itu kata H. Muas, perlunya lebih memperhatikan lagi adanya penebangan-penebangan liar. Dan perlunya adanya pengaturan-pengaturan irigasi, serta lebih berperannya polisi hutan dalam menjalankan tugasnya. Dilukiskan, terjadinya banjir di Lampung belum lama ini, juga akibat kelalaian polisi hutan dalam menjalankan tugas. ☐

Badrul Mustofa

WALIKOTAMADYA/KDH TINGKAT II
BENGKULU
BESERTA SEGENAP KARYAWAN

Dengan ini mengucapkan :

DIRGAHAYU
PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. KE - 41
17 Agustus 1945 — 17 Agustus 1986

Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945
Kita sukseskan Pemilu 1987
Demi kesinambungan pembangunan bangsa

KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PROPINSI BENGKULU
BESERTA SEGENAP KARYAWAN

Dengan ini mengucapkan :

DIRGAHAYU
PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. KE - 41
17 Agustus 1945 — 17 Agustus 1986

Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945
Kita sukseskan Pemilu 1987
Demi kesinambungan pembangunan bangsa.

Prof. Bintoro Tjokroamidjojo

Sistim Menejemen Nasional

Unsur Penunjang Pelaksanaan Strategi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II

Pembahasan Sistem Menejemen Nasional dilandasi oleh beberapa pemikiran. Pertama-tama, ia merupakan sistem untuk mendukung pelaksanaan (strategi) pembangunan nasional. Dengan demikian suatu sistem perencanaan dan menejemen pembangunan, pengelolaan pembangunan, administrasi pembangunan.

Kemudian, sistem manajemen nasional itu, dapat dikembangkan dan dapat dilihat (digambarkan) sebagai suatu sistem. Sesuatu yang merupakan hal yang menyeluruh atau suatu totalitas yang terpadu, terdiri dari unsur-unsur dalam atribut-atributnya masing-masing yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung satu sama lain.

Pengembangannya juga merupakan penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam sistem dan praktek menejemen pembangunan nasional. Karena Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dimana dasar Integralistik dan kekeluargaan merupakan nada dasarnya.

Proses pembangunan adalah proses bertahap dan berkesinambungan, oleh karena itu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kelanjutan, peningkatan, dan pemantapan sistem.

Suatu sistem menejemen yang dapat menunjang tahapan-tahapan pembangunan sekarang dan masa datang (tahap Pembangunan Jangka Panjang Tahap II) perlu diarahkan untuk mendukung: masalah-masalah perubahan dasar jangka panjang (long term structural changes) maupun masalah-masalah gejolak jangka pendek (short term fluctuations).

Perlu diingat bahwa pembangunan berjalan dalam proses perubahan-perubahan yang cepat dan dalam dunia yang saling tergantung serta faktor ketidak-pastian yang tinggi.

Nasional dalam hal ini berarti meliputi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah serta Semua Bidang Pembangunan, dengan tetap didasari sifat integralistik dan Kekeluargaan Ideologi Nasional.

Pengembangan Sistem Menejemen Pembangunan Nasional

Sejak akhir tahun 1966 oleh Pemerintah Orde Baru telah dilakukan usaha untuk kembali kepada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan benar. Usaha ini pada dasarnya juga telah meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan Sistem Menejemen Pembangunan Nasional dalam berbagai peraturan perundangan (termasuk TAP-TAP MPR). Suatu rangsangan untuk pemikiran secara terus pengembangannya antara lain akhir-akhir ini dikemukakan oleh Drs. Moerdiono, dalam rangka menghadapi tinggal landas dan tahap pembangunan jangka panjang yang ke II.

Sistem Menejemen (Pembangunan) Nasional adalah suatu tata pola perumusan perencanaan, pemrograman (termasuk penganggaran), kelembagaan pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pasca berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan. Khusus dalam Sub Sistem perencanaan pembangunan dipakai jangka panjang, jangka menengah dan operasional tahunan.

Sistem menejemen ini meliputi kegiatan pembangunan seluruh masyarakat, baik oleh Pemerintah dan masyarakat. Dilihat dari segi pembangunan ekonomi, misalnya sektor Pemerintah, sektor Swasta dan Koperasi. UUD 1945 "Segenap Bangsa". Dalam GBHN disebutkan: "partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat."

Pengembangannya merupakan suatu proses. Banyak hal masih perlu dilengkapi dari telaahan-telaahan kontemplatif maupun belajar dari pengalaman empirik pembangunan nasional. Sehingga sistem menjadi lebih komprehensif. Banyak hal yang telah dikembangkan dalam sistem pun tidak diketahui, atau salah pemahamannya. Banyak pelaksanaannya masih sering tidak sesuai baik karena pengetahuan maupun kemampuan. Pada dasarnya dengan pendekatan kelanjutan, peningkatan dan pemantapan, penyempurnaan dan pemantapan juga masih harus secara terus menerus dilakukan. Terakhir pengembangan Sistem masih tergantung Manusia dan Budayanya.

Kerangka Sistem Menejemen Pembangunan Nasional sejak akhir 1966.

Sistem menejemen pembangunan nasional dasarnya dari sistem bernegara dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 yang sifat dasarnya integralistik dan kekeluargaan serta negara yang melakukan Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dikembangkan Sistem (Pembangunan) Nasional. Ada landasan ber Negara/Pembangunan, ada Tujuan Nasional, Tujuan Pembangunan Nasional. Ada hakekat Pembangunan Nasional. Tujuan Nasional juga merupakan Tujuan/Tugas (Pemerintah) Negara. Ada pula Doktrin Pembangunan Wawasan Nusantara, Bhineka Tunggal Ika. Dari landasan Pembangunan bermasyarakat, ber Bangsa, dan ber Negara tersebut untuk mencapai Tujuan-tujuannya dilakukan Pembangunan Nasional. Bersamaan dengan itu ditingkatkan Ketahanan Nasional. Demikian pula ada strateginya dalam Pembangunan Nasional tersebut yakni Trilogi Pembangunan. Biarpun ini bisa berubah. Untuk menguatkan kebersamaan ber Masyarakat, ber Bangsa, dan ber Negara sudah ada Eka Prasetya Panca Karsa.

Kemudian dalam ber Negara tersebut, atau bisa disebut mengelola pembangunan Bangsa sudah ada di UUD 1945

Sistim Pemerintahan Negara. Sistem Pemerintahan Negara sudah ada dasar-dasarnya dalam Tujuh Kunci Pokok. Di sini dikemukakan petunjuk pokok tentang Penyelenggara Negara dan Penyelenggara Pemerintah Negara. Inilah pedoman tata kenegaraan dan tata pemerintahan kita.

Dalam Penyelenggara Negara, di sini saya pakai pemikiran Drs. Moerdiono terdapat yang enumeratif disebut dalam UUD 1945 yaitu penyelenggara negara sebagai supra struktur dan organisasi sosial politik, kemasyarakatan, profesi sebagai penyelenggara negara Infra Struktur. Tatanan atau sistem penyelenggara negara masih perlu dikembangkan. Namun demikian dasar-dasar pijakannya sebagai sistem sudah ada antara lain 5 UU di bidang politik baru-baru ini. Demikian pula pengembangan Demokrasi Pancasila. Di bidang ekonomi sistem Demokrasi Ekonomi, keserasian dan hubungan saling mendukung antara sektor Pemerintah, Swasta, dan Koperasi. Berbagai hubungan antara penyelenggara negara juga sudah ada yang melembaga antara lain dalam bentuk Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, Dengar Pendapat dengan organisasi masyarakat. Hubungan Industrial Pancasila, Komunikasi Sosial Pemerintah, Media Massa dan masyarakat dan lain-lain. Organisasi profesi sebagai mitra sambung rasa (sounding partner) Pemerintah.

Dari Sistem Penyelenggara Negara sistem selanjutnya yang sudah jelas adalah Sistem Penyelenggara Negara tataran Supra Struktur yaitu dalam Fungsi Negara. Fungsi Negara yang terjabar dalam Fungsi Penyelenggara Negara tataran Supra Struktur yaitu yang enumeratif disebut dalam UUD 1945. Kemudian juga hubungan masing-masing Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara. Inilah mekanisme operasional dari Penyelenggara Negara tataran Supra Struktur dengan Penyelenggara Pemerintah Negara Tertinggi (Presiden). Dasar-dasar ketentuannya ada dalam UUD 1945 dan dikendalikan oleh Sistem Pemerintahan Negara melalui Tujuh Kunci Pokoknya. Ditopang oleh ketetapan tentang Hierarki Kebijaksanaan dan Peraturan Perundangan.

Satu subsistem penting dalam sistem penyelenggara negara tersebut adalah Sistem atau Mekanisme Kepemimpinan Nasional secara lima tahunan. Suatu mekanisme pengambilan keputusan Bangsa dalam Sistem Penyelenggara Negara, menetapkan haluan negaranya dan menunjuk Mandataris Pelaksananya. Disinilah jembatan antara Sistem Penyelenggara Negara dengan Sistem Penyelenggara Pemerintah Negara. Proses perumusan dan penetapan GBHN sebagai TAP MPR. GBHN menjadi pedoman baik bagi Negara (masyarakat Bangsa) dan Pemerintah.

Kemudian masuk dalam Sistem Penyelenggara Pemerintahan Negara yang menurut Drs. Moerdiono juga disebut sebagai Sistem Administrasi Negara. Dalam konstitusi Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah Negara Tertinggi. "Administrasi Negara Indonesia adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan Pemerintah Negara Indonesia dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur Negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan Negara Indonesia dan terlaksananya tugas Pemerintah Republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945".

Sistem Administrasi Negara ini oleh karena harus pula ditujukan agar mampu untuk mendukung pembangunan dan menjawab kebutuhan dinamika Bangsa harus pula merupakan Sistem Administrasi Pembangunan.

Hal ini dapat dibagi dalam:

— Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden dan Wakil Presiden:
— Tugas Pokok Pemerintah. Tugas Umum Pemerintahan dan Tugas Pembangunan;
— Kelembagaan Pemerintahan. Aparatur Pemerintah Pusat; di Daerah (dekonsentrasi, desentralisasi, pembantuan), Desa dan Aparatur Perekonomian Negara;
— Kepegawaian Pemerintahan. Sistem Karier dan Sistem Prestasi Kerja. Formasi, Pengadaan, Penempatan, Promosi, Disiplin, Gaji dan Pensiun, Diklat, dan lain-lain;
— Pengelolaan dana dan sarana Pemerintah. Administrasi keuangan, peralatan dan kekayaan, sarana kerja, dan lain-lain;
— Sistem Perencanaan dan Menejemen Pembangunan. (Ketatalaksanaan Pemerintahan).

Sistem Perencanaan dan Menejemen Pembangunan

Dasar pikiran Sistem Perencanaan dan Menejemen Pembangunan adalah bahwa Pembangunan dilakukan seluruh Rakyat baik Pemerintah maupun Masyarakat.

Sistem perencanaan dan menejemen pembangunan berkisar pada dua hal utama Kebijaksanaan dan Program. Bukan hanya program Inpres SD tetapi juga Paket Kebijaksanaan 6 Mei. Dalam perencanaan tersebut disusun baik rencana kebijaksanaan maupun rencana program. Dalam pelaksanaan dilaksanakan berbagai kebijaksanaan dan program. Hal tersebut kemudian juga harus dikendalikan dan diawasi. Dan terakhir diadakan evaluasi pasca pelaksanaannya.

Kebijaksanaan adalah pengarahan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah yang akan dilakukan baik oleh Pemerintah maupun dan terutama oleh masya-

BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

Dengan ini mengucapkan :

DIRGAHAYU

PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. KE-41

17 Agustus 1945 — 17 Agustus 1986

DENGAN SEMANGAT PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945
KITA SUKSESKAN PEMILU 1987
DEMI KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN BANGSA

rakat. Di sini peran penting Aparatur Pemerintah sebagai pendorong dan perangsang partisipasi aktif dan keswadayaan membangun masyarakat. Program adalah kegiatan Pemerintah yang melibatkan baik Pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan masyarakat dilakukan oleh kelembagaan (ekonomi) dalam masyarakat. Adapula kegiatan Pemerintah yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu sebagian atau seluruhnya pemilikan dengan penyertaan modal/kekayaan negara yang dipisahkan. Tetapi biasanya ini terliput dalam kebijaksanaan atau program tertentu.

Secara pokok-pokok sistem perencanaan sebagai keseluruhan sistem perencanaan dan manajemen pembangunan nasional adalah sebagai berikut ini.
Jangka Panjang: Kebijaksanaan dalam GBHN.

Jangka Menengah: Kebijaksanaan dan Program dalam Repelita.
Jangka Pendek: Program dalam POT = APBN dan Kebijaksanaan dalam Pidato Kenegaraan dan berbagai Paket Kebijaksanaan.

Perlu dicatat bahwa kebijaksanaan dalam Jangka Pendek tidak selalu bersifat Jangka Pendek. Sering dilupakan bahwa Administrasi Negara yang bersifat Administrasi Pembangunan, tidak saja memperhatikan hal-hal yang merupakan penyelenggaraan sendiri (program pembangunan) bahkan juga pemilikan sendiri, tetapi sering lebih efektif melalui fungsi Kebijaksanaan (policies).

Fungsi kebijaksanaan merupakan bagian Fungsi Pengaturan. Namun kebijaksanaan itu sendiri dapat bersifat mengurangi pengaturan (deregulasi) agar lebih mendorong/merangsang kegiatan membangun masyarakat.

Sistem pelaksanaannya dipegang dengan berbagai pedoman pokok tentang pelaksanaan anggaran (disini karena pemrograman disatukan dengan penganggaran). Pada dasarnya pedoman pelaksanaan proyek-proyek. Untuk ber-

MESIN
PENGUPAS KOPI

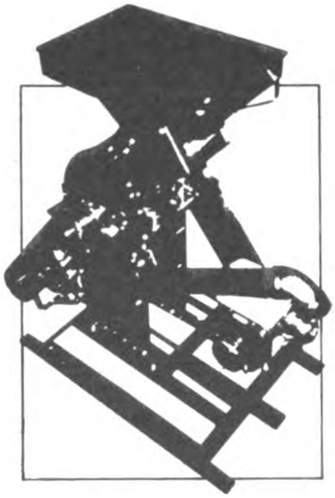

produksi :

PT Citra Lamtoro Gung Persada

- MENGHASILKAN & MENINGKATKAN MUTU KOPI RAKYAT JADI KWALITAS EKSPOR
- MESIN PENGUPAS KOPI INI 100% PRODUKSI DALAM NEGERI
- PENEMUAN HASIL KARYA PUTRA INDONESIA
- BILA ANDA INGIN PESAN HUBUNGILAH :

P.T. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA
BANK BUMI DAYA PLAZA Lt. 23
Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310
Tel. : 330822 - 337101 (5 Saluran) - Telex : CLAP 61304

bagai hal berdasar petunjuk-petunjuk pelaksanaan (Juklak dan SOP).

Dalam sistem pelaksanaannya ini dikembangkan pola-pola administrasi pembangunan "yang lebih berdasar atas asas kekeluargaan". Pola hubungan kerja antara unit-unit sektor pemerintah, sektor swasta/koperasi atau masyarakat, antara lain program BIMAS, SD/Sekolah-sekolah, KB, Transmigrasi, PIR, PKK, Pola Bapak Angkat - Anak Angkat bidang Industri dan lain-lain.

Demikian pula dorongan pada sektor masyarakat, antara lain Inpres Desa, pembiayaan PMP, Kebijaksanaan perkreditan, sistem pelelangan dan kontrak penggunaan dana APBN dan lain-lain. Hal ini didukung dengan penguatan sistem Monitoring (pengendalian) dan sistem pengawasan atasan langsung (built in control) serta berbagai penyempurnaan prosedur dan tata cara.

Berbagai Sistem Koordinasi pelaksanaan dilaksanakan dan banyak yang masih perlu dikembangkan dan dimantapkan. (Inti koordinasi pelaksanaan adalah Koordinasi Vertikal-Struktural dan Koordinasi horizontal/diagonal fungsional. Koordinasi adalah fungsi yang inhaerent dalam pelaksanaan pencapaian tugas sesuatu lembaga). Hal-hal yang terakhir berkenaan dengan pelaksanaan program dan lebih sulit mengenai pelaksanaan kebijaksanaan.

Dikembangkan dan dimantapkan Sistem pengawasan fungsional terpadu (BPKP — Program Kerja Pengawasan Tahunan).

Dapat dicatat, pengawasan bukan lagi hanya keuangan tetapi pembangunan. Disini yang penting adalah tindak lanjut hasil pengawasan oleh Departemen/Lembaga tersendiri dan Lembaga yang berwenang. Pengawasan Pembangunan pada dasarnya juga dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini dikembangkan "Sosial Control yang bertanggungjawab, antara lain melalui investigative reporting media massa.

Dikembangkan Sistem evaluasi pasca pelaksanaan antara lain melalui Studi-studi Implementasi, mid-term review, dan lain-lain.

Tatapan terhadap pengembangan Sistem untuk mampu menopang Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.

Penelaahan, pengembangan dan pemantapan sistem Penyelenggara Negara, antara lain dalam bentuk-bentuk Komunikasi Sosial, Kerabat Kerja, dan lain-lain. Dengan landasan satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, ber Bangsa, dan ber Negara, yaitu Pancasila hal tersebut makin lebih bisa diusahakan. Sistem Menejemen ini akan memberi peluang bagi peningkatan asas integralistik dan kekeluargaan Bangsa. Dalam Repelita disebutkan "untuk menciptakan kerangka landasan sebagaimana diamanatkan GBHN tersebut perlu diusahakan terciptanya kondisi nasional yang memberikan rangsangan serta peluang seluas-luasnya bagi semua potensi pembangunan untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam usaha pembangunan nasional ...."

Pendulum pelaksanaan oleh Pemerintah sendiri akan harus beralih kepada mendorong, merangsang partisipasi aktif dan keswadayaan masyarakat sendiri. Di sini peningkatan peranan perencanaan dari bawah (antara lain konsiderasi Regional dalam Konsultasi Nasional) dan desentralisasi (Kebijaksanaan dan program pembangunan di Daerah lebih oleh daerah sendiri atau masyarakat).

Demikian pula peningkatan peranan dan kemampuan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaannya sebagai pengarah kegiatan masyarakat membangun sendiri. Pembangunan di masa depan lebih melihat pada aspek-aspek kebijaksanaan seperti kependudukan, keseimbangan struktur ekonomi, sektor pertanian, industrialisasi (hulu-hilir dan comparative cost advantage), peningkatan peranan sektor usaha dan koperasi, kebijaksanaan perdagangan dan proteksi, efisiensi dan produktifitas (antara lain dengan pengendalian perizinan), pengembangan teknologi dan R and D, kewiraswastaan dan sumber daya manusia, lingkungan dan pemerataan kesempatan, daerah urban dan pedesaan, dan lain-lain. Apalagi dalam proses perubahan yang cepat dan serba ketidakpastian.

Apabila dalam masa awal Orde Baru diberi perhatikan pada dasar sistem menejemen pembangunan nasional yaitu sistem Pembangunan Nasional, sistem Politik (mekanisme kepemimpinan Nasional) dan sistem perencanaan pembangunan maka pendekatan perhatian perlu ditujukan pada segi pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan pembangunan serta aspek manusia dalam menejemen Pembangunan.

Sebagai catatan penting di sini: dikhotomi tahapan politik dan administrasi/menejemen sudah ditinggalkan.

Perhatian pada aspek kualitas manusia dalam menejemen pembangunan baik di sektor pemerintah maupun masyarakat perlu ditingkatkan antara lain melalui program-program pendidikan dan latihan yang lebih relevan. Pengembangan sumber daya manusia. Citra bersih dan berwibawa (tertib administrasi, disiplin dan sanksi, kemampuan sebagai Abdi Masyarakat mendorong ke arah keswadayaan), kualitas daripada kuantitas dalam Aparatur Pemerintah serta kewiraswastaan dan kemampuan ekonomi niaga dalam menejemen usaha.

Dan tentu saja menyusun, mengembangkan hal-hal yang masih kurang dalam kerangka sistem secara keseluruhan sehingga merupakan sistem menejemen pembangunan nasional yang lebih komprehensif. ☐

HARIAN UMUM
Haluan

HUBUNGI KAMI :
Redaksi ----- Telp. 22-003 Padang
Tata Usaha - Telp. 23-103 Padang
Percetakan - Telp. 27-050 Padang

Alamat : Jl. Damar No. 59 D-E-F
Padang
Telex : 55137 haluan pd.
P.O. Box 28 - Padang.

- Tertua dan terbesar di Sumatera Tengah;
- Tiap hari terbit dua belas halaman dengan tehnik percetakan yang modern;
- Menyajikan berita-berita daerah, nasional dan internasional;
- Edisi Minggu beredar pada hari Minggu;
- Karena itu merupakan sarana yang tepat untuk bacaan dan promosi business anda.

MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT
INDUK KOPERASI

Dengan ini mengucapkan :

DIRGAHAYU
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN R.I. KE - 41
17 - 8 - 1945 — 17 - 8 - 1986

Dengan semangat Propklamasi
17 Agustus 1945
Kita sukseskan Pemilu 1987
demi kesinambungan
pembangunan bangsa

Oleh Nurcholis Madjid

Profesionalisasi Politik Untuk Pembangunan Demokrasi Pancasila

Akhir-akhir ini cukup santer dilancarkan orang gagasan tentang kemungkinan diterapkannya pikiran tentang "profesionalisme politik" atau "politik profesional." Lepas dari pengertian yang kurang jelas atau berbeda-beda sekitar istilah-istilah itu, namun gejala pelontarannya itu sendiri harus dipandang sebagai indikasi kepada suatu perkembangan sosial-politik kita yang positif.

Perkembangan positif itu ialah adanya keberanian yang semakin meningkat untuk menyatakan suatu keinginan di bidang politik. Pelontaran sekitar gagasan "profesionalisme politik" tentu mengimplikasikan penilaian bahwa sistem perpolitikan kita masih belum profesional, alias "amatir" atau malah barangkali "amatiran." Oleh karena itu di balik pelontaran ide tentang "profesionalisme politik" terselip keinginan agar mutu perpolitikan kita, melalui para aktor politiknya, hendaknya ditingkatkan. Dan adanya keinginan itu sendiri dapat dipandang sebagai gejala adanya tuntutan yang meningkat politik, yang tentunya juga berarti meningkatnya kesadaran rasa ikut punya dan peran serta di bidang politik. Karena itu sikap yang pertama-tama harus ditegakkan menghadapi berbagai pelontaran tuntutan itu ialah memahami dan menerimanya secara positif.

Sesungguhnya, artikulasi politik tidaklah hanya menjadi tugas kaum politisi saja. Di setiap masyarakat, hanya sebagian kecil saja komunikasi politik berasal dari para politisi. Bahkan ada indikasi yang amat kuat bahwa semakin maju masyarakat, semakin banyak tumbuh partisipan politik tanpa kekuasaan atau peran politik formal. Mereka ini dapat tumbuh menjadi kelompok komunikator profesional. Justru setiap pembangunan atau modernisasi, dalam pengertian mendasarnya, akan melibatkan tampilnya kelompok komunikator profesional.

Tapi jika proporsi artikulasi politik oleh kaum politisi dan bukan politisi tergantung kepada tingkat kemajuan masyarakat (makin maju makin banyak peranan non-politisi formal), maka sesuai dengan tingkat perkembangannya, negara kita masih dalam tahap pertumbuhan yang meminta peranan lebih besar dari para politisi (betapa pun usaha "depolitisasi" yang pernah ada, yang antara lain memberi dasar keberadaan Golkar yang bukan "organisasi politik" melainkan "kekaryaan," berbeda dengan PDI dan PPP).

Namun, dalam kenyataan, Golkar adalah lembaga politik yang jauh lebih berperan daripada dua lainnya, PDI dan PPP. Ini berarti bahwa Golkar memikul tanggung jawab lebih besar daripada yang dipikul dua lainnya itu, dan berarti pula bahwa peningkatan mutu profesionalisme politik lebih dituntut dari Golkar daripada dari yang lain. Ini harus kita kaitkan dengan strategi besar bangsa kita untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila. Sedikit pembicaraan tentang apa itu "Demokrasi" dengan mengetengahkan hasil penelitian Unesco pada 1949 bisa cukup relevan. Dari jawab para ahli di seluruh dunia, terungkap permasalahan demokrasi:

Tidak ada jawab yang menentang demokrasi. Barangkali untuk pertamakalinya dalam sejarah, "demokrasi" diaku sebagai gambaran ideal yang wajar tentang semua sistem organisasi sosial dan politik yang dibela oleh para pendukung yang berpengaruh.

Ide tentang demokrasi dianggap sebagai kabur dan bahkan mereka yang mengira bahwa demokrasi jelas maknanya atau bisa diterangkan dengan baik ternyata harus mengakui adanya kekaburan tertentu baik di dalam pelembagaannya atau pun dalam piranti yang digunakannya untuk mewujudkan ide itu atau di dalam ruang lingkup kultural dan historis tempat kata-kata, ide dan praktek nyatanya dibentuk.

Kajian-kajian tentang demokrasi juga menunjukkan bahwa pada masa-masa tertentu, khususnya sebelum PD I, kata-kata itu digunakan dalam makna yang tidak begitu positif, malah mengandung pengertian yang bersifat mengejek atau menyindir - *(pejorative).* Hitler bahkan tercatat pernah berusaha menggunakan perkataan itu dengan nada menghina. Tapi cukup ironis baginya bahwa perang yang diletuskannya dimenangkan oleh musuh-musuhnya yang justru mengaku sebagai pendukung "demokrasi," yaitu negeri-negeri sekutu, khususnya Barat.

Tinjauan itu menunjukkan bahwa masalah "demokrasi," secara konsepsional, tidaklah sederhana. Kini demokrasi secara erat dikaitkan dengan Barat. Namun Barat sendiri menganut berbagai versi demokrasi, sesuai dengan kultur politik negara atau bangsa bersangkutan. Dalam sejarah Amerika Serikat, perkataan "Demokrasi" pada asal mulanya tidaklah begitu banyak digunakan. Mereka menggunakan perkataan "republik" dengan pengertian seperti pengertian perkataan "demokrasi" sekarang ini. Bahkan Madison pun, yang diacu sebagai "pencipta" demokrasi perimbangan politik dan dinamakan *"Madisonian democracy"* juga selalu menggunakan perkataan "republik" untuk menyatakan pandangan politiknya itu. Namun cukup menarik bahwa dari lima belas negara di dunia—semuanya dari Barat—yang dianggap "mantap" demokrasinya, yaitu Inggris, Perancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, Swedia, Denmark, Swiss, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, sebagian besar berbentuk kerajaan atau monarki, meskipun konstitusional).

Berdasarkan itu maka dapat dibenarkan bahwa Bangsa Indonesia berpandangan tentang adanya bentuk demokrasi tertentu yang cocok untuk Indonesia, yaitu "Demokrasi Pancasila." Ini dapat dilihat sebagai penegasan bahwa demokrasi Pancasila adalah pandangan politik Bangsa Indonesia yang meskipun modern dan sejalan dengan perkembangan zaman namun berakar dalam "budaya politik" Indonesia, dan berdasarkan kejelasan itu harus ada kreatifitas (yang dinamis) dalam menumbuhkan konsep-konsep "Demokrasi Pancasila" yang relevan dengan tahap perkembangan akhir bangsa dan negara.

Maka dari itu yang pertama-tama diperlukan dalam usaha profesionalisasi politik kita ialah pemerataan pengertian yang mendalam tentang budaya politik kita yang kompleks itu oleh para pelaku politik yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Para pelaku politik itu tidak bisa tidak harus terdiri dari orang-orang yang kepentingan politiknya tidak terbatas hanya kepada pemenuhan berbagai keinginan yang bersifat pribadi, tapi ia sanggup melambungkan pandangan dan wawasannya mengatasi hal-hal sementara.

Keterbukaan merupakan bagian integral

Dahulu di negeri kita ini pernah muncul adu pendapat tentang pilihan antara partai kader dan partai massa. Herbert Feith, seorang pengamat Indonesia dari Australia, mengaitkan ide tentang partai kader dengan mereka yang berorientasi politik - *"problem solving"* dan partai massa dengan mereka yang berpandangan *"solidarity making"*. Sekaligus disitu ada perbedaan peranan aktifitas intelektual dan peranan aktifitas sentimental atau emosional. Juga terdapat kesejajaran itu semua dengan peranan demagog dan kader.

Karena itu langkah pertama menuju profesionalisasi politik ialah pemantapan pendidikan politik yang penuh tanggung jawab, tidak bersifat demagogi dan propaganda semata-mata. Rakyat harus dididik dan disadarkan tentang berbagai kenyataan negara, yang manis maupun yang pahit, dan tuntutan atau harapan harus diajukan dengan berpijak kepada kenyataan-kenyataan itu. Dalam implikasinya yang lebih luas, seperti dikatakan Shils dalam awal kutipan di atas, berarti penciptaan masyarakat yang terbuka dan bebas, khususnya yang menyangkut informasi dan komunikasi. Ketertutupan di bidang informasi dan komunikasi politik akan banyak menumbuhsuburkan budaya fitnah, desas-desus dan umpat-mengumpat (sebagai bentuk-bentuk komunikasi tertutup), dan itu semua pada urutannya akan menjadi lahan yang baik bagi demagogi dan agitasi politik oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Justru keterbukaan itu merupakan bagian integral demokrasi itu sendiri, termasuk Demokrasi Pancasila. Keterbukaan itu terlebih dahulu dan terutama dituntut dari pada pelaku politik sendiri, sebab tingkah laku mereka adalah salah satu sumber peneladanan, dan peneladanan oleh orang banyak akan tumbuh menjadi kultur politik umum. Maka jika dikehendaki pertumbuhan demokrasi, pola-pola hubungan antar para pelaku politik itu sendiri haruslah demokratis, dengan menghindari peragaan konflik-konflik terbuka. Sistem pergaulan demokratis sampai batas yang cukup jauh menghendaki sikap saling percaya dalam semangat persamaan, seperti kata Sidney Verba, *"Democratic politics implies a set of relationships among political actors that is both relatively equalitarian in terms of power and relatively non-conflictual."*

Tidak kurang pentingnya ialah penyadaran umum bahwa demokrasi mengimplikasikan kebebasan, dan kebebasan itu menuntut tingkat keberanian yang lebih tinggi untuk memikul tanggung jawab pribadi. Penyadaran ini penting, begitu pula latihan dan pendidikan untuk memikul tanggung jawab pribadi adalah vital dalam rangka pembangunan demokrasi, sebab tidak semua orang yang meneriakkan slogan-slogan kebebasan dan tanggung jawab mengerti makna kebebasan dan implikasinya. Justru, menurut Eric Fromm, banyak orang sebenarnya takut kepada kebebasan, karena takut atau tidak sanggup memikul beban tanggung jawab pribadi yang menjadi implikasinya. Ketakutan inilah yang bisa menjilma dan tumbuh menjadi psikologi massa yang menghalangi pertumbuhan demokrasi, karena keadaan itu mempersiapkan massa untuk menjadi mangsa para demagog. Dengan segala kelemahannya, organisasi politik masih merupakan sarana yang terbaik untuk memantapkan pemerintahan nasional yang sah, maka harus digunakan bagi proses demokratisasi. □

TERBIT SEBULAN SEKALI
Lari Termahal di Dunia !?

Sportif

edisi September/Oktober 1986 No. 126

Luar Biasa Baru di Bali terjadi. .. Pemenang lomba lari sepuluh kilometer .. dapat hadiah 320 juta rupiah!..

Bali Ten-Ki :

Benar-benar lomba lari termahal di dunia! .. Terbanglah ke sana bersama SPORTIF..

Celoteh Dono :

Berdoa untuk olahraga-wan atau agar listrik menyala lagi....

Soraya Perucha

berkata : Senam bukan untuk kebahagiaan di ranjang.. Tapi nggak nolak bila benar senam membuka jalan ke arah itu... Resepnya bagaimana Ucha?

Berita Menarik :

AIDS YANG MENGHANTUI GEDUNG-GEDUNG OLAHRAGA!........

Perlu saudara baca pada SPORTIF edisi terbaru No. 126!

DAPATKAN SEGERA SPORTIF DI SUPERMARKET ATAU AGEN MAJALAH TERDEKAT. ATAU LANGSUNG KE BAGIAN SIRKULASI : JALAN RAYA CIBUBUR NO. 1 JAKARTA. TELPON 870985, 870142.

''Dian Group'' dan ''Tom Tam''

Pelawak Pelawak Golkar Yang Tak Pernah Absen

Pelawak dimana-mana kerjanya membuat orang tertawa dan gembira membuat orang jadi ger-geran terpingkal-pingkal dan bahkan tak jarang sampai para penontonnya terkencing-kencing, karena lucu dan segarnya tontonan yang disuguhkan.

Tapi, baik kata Dian Group ataupun kata Tom Tam Group melawak di tanah air kita belum menjadi profesi yang profesional, dimana mampu mendatangkan rezki yang berlimpah, bahkan orang kadangkala menilai rendah dalam dunia yang kami gumuli ini.

Tapi biarlah apa kata mereka, selain diantara kami juga punya kerja yang tetap, baik dikantor swasta ataupun sebagai pegawai negeri, rasanya dunia lawak adalah bagian hidup kami yang sulit kami ceraikan, ia begitu menggelitik dan selalu menggoda, rasanya seperti sakit rindu yang berkepanjangan bila agak lama kita tidak manggung untuk melawak.

Kami melawak dipanggung, tapi ketika kami berada di kantor dimana kami-kami bekerja tentu tidak melawak sekalipun kadang diantara teman sejawat suka ganggu-ganggu juga, akhirnya secara tidak disengaja kita semua jadi pelawak yah sekedar melepas kejenuhan hari-hari. Di rumah sebagai anggota atau kepala keluarga kita tidak melawak, serius dong, ungkap Andy pimpinan Dian Group yang berangkat dalam dunia lawak ini sudah cukup lama, karena kebetulan Andy inilah yang bersama-sama merintis dan seangkatan dengan Cahyono, ada sebab mengapa kita harus berpisah, sebab itulah tak seorangpun boleh tahu, tapi Dian Group tetap jalan terus dengan personal yang sekarang. Komar dan Tom Tam groupnya juga demikian bahwa hanya dipanggunglah tempat kita melawak, dihadapan anak dan istri bahkan kekasih kita — tentunya tidak melawak, kita memang pelawak tapi kita tetap serius menjawab masa depan keluarga, hidup kan adalah perjuangan baik secara lahir ataupun bathin.

Nah bagaimanakah kesan-kesan anda semua terhadap perjuangan Golkar? Baik Tom Tam ataupun Dian Group memberikan keyakinan yang mantap bahwa tiada pilihan lain hanya Golkarlah kelak, hari kemarin hari ini yang telah benar-benar mampu mewujudkan program-programnya untuk rakyat, untuk Bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan kami merasakan hal itu. Untuk itulah kami pilih Golkar dan hadir untuk Golkar bukan karena disuruh tapi karena memang adalah pilihan kami.

Lihat kami berarti lihat Golkar, Golkar telah bersatu padu dengan jiwa-jiwa kami, untuk Golkar dimanapun berada kami akan selalu bersama-sama, dan untuk Golkar juga kami selalu siapkan lawakan-lawakan yang segar yang sesuai dengan program Golkar, dimana program Golkar adalah program Orde Baru yang berarti program pembangunan. Lewat lawak sesungguhnya paling gampang murah dan meriah pesan-pesan pembangunan bisa disampaikan kepada seluruh rakyat karena lawak adalah hiburan rakyat dan bahasanyapun adalah bahasa rakyat. Begitu kita muncul memang kita telah siap untuk ditertawakan oleh penonton, atau bila muncul kita di T.V yah oleh pamirsa TV, kami muncul untuk pamirsa dan untuk penonton, kami untuk mereka yang sedang dilanda kesedihan dilanda asmara dilanda segala duka, melihat pelawak beraksi berarti leburlah sudah kemelut dan problema, dan meledaklah tawa. Itulah tugas kami

Tom Tam Group. Wajah Golkar

Dian Group dan Yulia Yasmin manggung bersama.

sebagai kaum pelawak, tugasnya yah menghibur manusia agar semua menjadi bergembira agar semua menjadi tertawa. Sangat bahagia hati kami bila semua pemirsa dan penonton yang menonton kami tertawa terpingkal-pingkal berarti lawakan kita berhasil, tapi ada juga saat-saat yang cukup menyedihkan bila ternyata lawakan kami tidak terlalu banyak mengundang tawa — kami semua merenung kembali, berfikir lagi, karena bila penonton tidak tertawa adalah kegagalan kami sebagai pelawak.

Untuk itulah sebenarnya tugas kami adalah tugas mulia tugas kemanusiaan, kami buat orang gembira dan tertawa, kami buat orang lupa akan problema rumah tangga, dan kami bawa semua penonton bersuka ria tanpa berfikir hal-hal yang ruwet.

Kami semua juga ikut bergembira bila penonton bergembira, jadi kami tak hanya gembira karena mendapat imbalan yang besar, imbalan besar itu memang perlu, tapi bila ternyata sajian kami tak mampu mengundang gelak tawa, berarti kami gagal.

Berjuang sebagai pelawak ada gampangnya ada susahnya juga, kerjanya membuat orang gembira, padahal kami sebagai manusia yang seperti manusia lain juga tidak kurang hari-harinya menghadapi masalah-masalah, tapi yang paling penting bila kami sedang bertugas sebagai pelawak harus mampu membangun rasa dan hati penonton agar siap untuk gembira. Berat lho kata Komar, aneh tapi nyata kerja di panggung sebagai pelawak.

Suka dan duka sebagai pelawak

Rasa "suka" yang seperti kami kemukakan diatas tadi, bila semua penonton betul-betul merasa terhibur, bukti mereka merasa terhibur bila semua tertawa segar tanpa dipaksa-paksa, dan paling sedih deh bila sulit sekali para penonton untuk tertawa, yang berarti sajian kami membosankan, itu juga untuk bahan-bahan renungan kami tapi berarti saat itu kami merasa gagal dan sungguh kecewa. Tapi kami sadar bahwa di dunia ini ada kecewa ada bahagia, ada siang ada malam, ada bulan ada matahari, untuk semua itu kami sudah siap. Bila sukses kami pasti akan dikenang dan bila gagal kami pasti akan dimaki dan ditinggal pergi. Tapi sudah kami pilih dunia yang satu ini, sama halnya seperti kami juga memilih golkar.

Sebagai pelawak yang telah menjatuhkan pilihan kepada Golkar konsekwensinya harus mendukung program-program Golkar tentunya lewat bidang kami sebagai pelawak, untuk Golkar kami siap melawak dimana saja di seluruh pelosok tanah air, tercinta. Dan kepada Golkar kami siapkan lawakan-lawakan yang cocok dengan program-program Golkar. Lawak memang dunia aneh dan lucu tapi semua manusia bisa cepat mati karena stress, dan lawak andil — menghilangkan strees serta ketegangan urat syaraf, karena lawak adalah kegembiraan. ☐

Rendy. MS.

Pimpinan Dian Group, di antara penggemar.

oleh : Maria Sugiharto

Padihershef, Mummy Dari Mesir

Bila kita berbicara tentang *Mummy,* maka belum-belum sudah bergidik, karena perkataan mummy mengandung konotasi menakutkan. Mengapa menakutkan, karena mummy adalah mayat, atau jasad orang yang sudah meninggal. Jasad biasanya terkubur didalam tanah, dan hilang bersatu bersama tanah, tinggal tulang belulang saja. Tetapi mengapa ada mummy, dan mengapa hal ini penting adanya. Mummy adalah jasad manusia yang sudah meninggal yang diawetkan dengan cara membalsemnya. Nama mummy diambil dari kata Arab *mumiya,* yang artinya proses pembalseman dan menjadi hitam. Dan hasil dari jasad yang diawetkan dengan balsam tersebut selalu menjadi kehitam-hitaman, karena efek mummy ialah mirip batubara hitam.

Pembalseman jasad manusia yang sudah meninggal bermula kira-kira 2600 sebelum Masehi di Mesir Kuno. Cara preservasi ini dilakukan karena pada jaman dulu mayat manusia ditanam dipasir, dan mengalami proses pengeringan. Budhaya pembalseman timbul, setelah dikenal kuburan dan peti mayat, dan karena mayat yang ditaruh didalam kuburan semacam ini mengalami kerusakan. Maka, dibalsemlah mayat-mayat tersebut, sesuai kepercayaan mereka, bahwa sukma si mati akan selalu "hidup" dengan atau bersama badan yang masih ada, di alam sana. Hanya orang-orang kaya dan berada dapat memummykan badannya, meskipun ada cara-cara yang praktis untuk memummykan diri. Binatang-binatang yang dianggap suci dan memiliki *Dewa* juga dimummykan setelah mati, seperti sapi, kucing.

Pengawetan dengan jalan *disikasi* (pengawetan dengan jalan pengeringan) itu dilaksanakan dengan mempergunakan zat kimia *natron* (native sodium carbonate). Mula-mula isi badan dikeluarkan, seperti otak, dikeluarkan melalui lubang hidung. Kemudian paru-paru, isi perut dan usus, dikeluarkan dengan jalan membedah sedikit bagian badan sebelah kiri. Benda-benda dari dalam badan ini dikeringkan, dan kemudian ditaruh didalam pundi-pundi tanah atau guci, serta ditempatkan disampingnya bersama badan yang dimummykan. Hati dan ginjal tidak diambil dari dalam badan. Biasanya, rongga badan diisi dengan damar, kain yang telah dicelup didalam damar, dan serbuk kayu.

Proses pengeringan sedemikian akademis, karena disamping dipergunakan zat-zat kimia (natron), juga dipergunakan minyak-minyak dan balsam. Setelah itu, badan dibalut dengan kain putih, sentimeter demi sentimeter dengan telitinya, sehingga bentuk bungkusan itu menjadi cukup artistik. Dijaga, agar kuku jangan sampai copot. Ada masker khusus berbentuk wajah, dan bila itu laki-laki juga topeng laki-laki. Dan bila perempuan berbentuk topeng wanita, tujuannya menutupi wajah si mati, agar wajah terpelihara dan tidak rusak. Proses pe"mummy"-an tersebut dari saat meninggal sampai siap menjadi mummy, memakan waktu sekitar 70 hari. Mumminisasi di Mesir berjalan sampai agama Kristen masuk, kira-kira abad-4. Meskipun para ahli arkeologi menyebut mummy sebagai mayat yang diawetkan di Mesir dan dimana saja di dunia ini (juga terdapat di Irian Jaya), tetapi proses pembuatan mummy di Mesir sendiri telah berjalan lama dengan cara-cara alamiah.

Kepercayaan tentang Kuburan di Mesir Kuno

Menurut sejarah Mesir kuno, maka kepercayaan mengenai kuburan dan penguburan mengalami perubahan-perubahan, asal saja keperluan penguburan seluruh tubuh tetap utuh. Pada jaman dahulu, orang Mesir mengubur leluhurnya atau orang mati lainnya dalam kuburan yang dangkal, di padang pasir. Dengan menguapnya cairan-cairan dari tubuh, maka tubuhpun menjadi kering. Dalam situasi begini, maka ia akan demikian terus, tidak rusak lagi didalam waktu yang lama sekali. Bentuk anatomis dari badan mayat yang sudah kering dari jaman prasejarah Mesir kuno, bisa dilihat di beberapa museum terkenal di dunia ini. Bila kuburan baru dibangun dengan bentuk seperti kamar dan dengan kesejukan serta dingin, maka tubuh malah cepat menjadi rusak. Karena kepercayaan bangsa Mesir bahwa tubuh orang yang meninggal dan masih berbentuk, sangat penting adanya, karena jiwa si mati akan masih tetap hidup, sepanjang tubuhnya masih ada. Maka preservasi tubuh manusia yang sudah mati adalah penting adanya, dan bentuk mummy adalah bentuk sempurna dari penghayatan kepercayaan tentang kematian bagi bangsa Mesir kuno.

Adalah penting sekali artinya bagi bangsa Mesir bahwa tubuh manusia yang telah meninggal utuh daripada rusak karena dimakan waktu. Menurut kepercayaan bangsa Mesir tubuh simati harus diawetkan, untuk menjaga ketenteraman tempat tinggal untuk *BA* dan *KA,* yang adalah dua jiwa yang selalu hidup terus setelah orang meninggal, dan tinggal dalam tubuh si mati. BA, bisa melancong sampai surga, dan bila kembali ke dunia membutuhkan untuk mengenali tempat tinggal didalam tubuhnya. BA memiliki baik kemampuan fisik dan mental dari orang yang telah meninggal, sedangkan

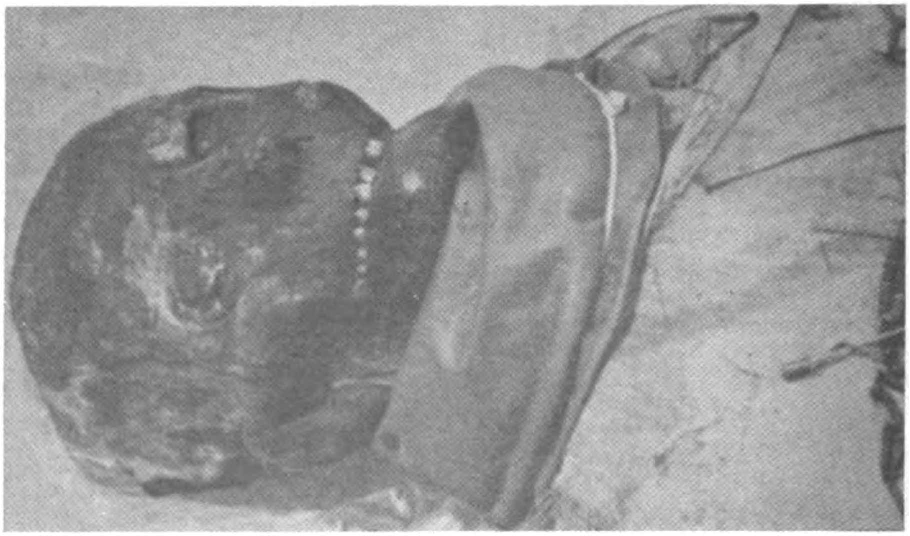

Wajah Padihershef yang telah berusia 2500 tahun.

Peti mummy dengan inskripsi tulisan hieroglyphs.

KA adalah merupakan kekuatan vital bagi laki-laki, yang lahir sebagai kembaran si manusia tersebut. Dan bila dia mati, maka KA akan menggantikan kedudukan dalam kehidupan. Karena kepercayaan bangsa Mesir bahwa KA selalu tinggal di dalam tubuh manusia yang telah meninggal, maka sesajian secara teratur diadakan untuk pemeliharaannya. Apabila KA tidak dirawat dengan baik, dan bila saja terjadi sesuatu terhadap jasad yang merupakan tempat tinggal KA, maka keabadian orang tersebut terancam bahaya. Pada sebuah sisi dari peti mati mummy Padihershef misalnya, disebutkan secara terinci persembahan atau sajian-sajian kepada KA: "Suatu persembahan diberikan oleh raja kepada OSIRIS. Bolehkah dia memberi saji-sajian makanan, semuanya yang baik dan murni, semua yang indah untuk *KA* dari Padihershef". Osiris adalah dewa pelindung Raja-raja Mesir. Menurut mytologi, ceritanya begini: *Osiris,* raja Mesir kuno, pada suatu hari dikhianati dan dibunuh oleh adiknya bernama Seth. Mayatnya dicincang, dan disebarkan ke seluruh Mesir. *Isis,* isteri Osiris bersama adiknya, *Nepthys,* mengumpulkan cincangan tubuh Osiris, dan dikubur dengan semestinya. Osirispun hidup kembali, dan menjadi raja dari Dewa-dewa serta menguasai kehidupan dunia bawah. Anaknya, bernama *Horus* membalas dendam atas kematian ayahandanya mengalahkan Seth, dan kemudian menjadi Raja di dunia.

Tokoh-tokoh Osiris, Isis dan Nepthys, biasanya menjadi lukisan hiasan sarcophag atau peti mati dari kayu tempat menyimpan mummy-mummy itu.

Upacara Mummifikasi & Mummy Padihershef

Setelah mummi dipersiapkan dengan pembalutan yang rapih serta menurut adat, maka mummi-mummi ini (bisa satu saja didalam satu peti, dan bisa beberapa di dalam beberapa peti yang kemudian disemayamkan didalam satu kamar kuburan), ditaruh didalam persemayamannya, ialah peti-peti kayu yang telah dilukisi beberapa lukisan yang sifatnya sakral, seperti lukisan Dewa-dewa Mesir kuno. Penguburan mummy, dilukiskan di dalam sebuah lukisan yang berprasasti huruf hyroglyph, dokumen mana sebenarnya tidak pernah ada dari Mesir sendiri, tetapi atas jasa *Herodotus* seorang sejarahwan Yunani yang hidup abad ke-15 SM. Herodotus merupakan satu-satunya sumber informasi mengenai mumifikasi, karena Mesir sendiri tidak pernah meninggalkan dokumen-dokumen mengenai praktek-praktek kematian bangsa Mesir kuno.

Mummi-mummi yang akan dikuburkan itu ditaruh dalam kereta yang ditarik oleh lembu menuju daerah *necropolis.* Bila penguburan harus menyeberang sungai Nil, maka seluruh pelayat juga akan diseberangkan dengan perahu-perahu tambang. Arak-arakan pelayat ini terdiri dari keluarga si mati, teman-teman, para pelayat serta para pendeta yang membawa ratus dan kemenyan. Dokumen mengenai hal ini terdapat di dalam lukisan pada *papyri.* Lukisan itu menunjukkan para pelayan wanita yang nampak sedih dengan air mata bercucuran, mulut yang sedih terbuka karena menangis. Bila kekurangan pelayat, maka dapat diambilkan para pelayat profesional. Kebiasaan menyewa pelayat profesional ini masih ada sampai sekarang.

Makanan sebagai saji-sajian dibawa ke kuburan pula, seperti roti, kuweh, sayur mayur, bunga, daging sapi dan daging burung, juga guci-guci yang berisi minyak serta jambangan-jambangan untuk membuat damar. Sejumlah busana, perhiasan, alat serta senjata dan perabotan, semuanya diikutsertakan si mati. Ini semua dianggap sebagai kekayaan si mati untuk bekal menjalani hidup selanjutnya, di alam sana.

Kini bersemayam di *Barney Musoleum,* Springfield, Massachusettes, mummy Padihershef memiliki kisah yang menarik. *Padihershef,* orang yang dimummykan ini, hidup sekitar 650 SM di lembah sungai Thebes, dan bekerja sebagai tukang batu di necropolis. Dari mummy dapat diketahui bahwa dia ini berusia kurang lebih empatpuluh tahun. Tentang penyakit yang menyebabkan kematiannya, kurang nampak. Dari inskripsi yang ada di peti, dapat dipelajari tentang hidupnya, bahkan tentang orang tuanya, nenek moyangnya, jabatannya, status sosialnya, kepercayaannya, bahkan dapat diperkirakan tentang berapa ongkos membuat mummy untuknya. Menilik dari namanya, maka bisa dipastikan bahwa dia ini berasal dari daerah dimana orang menyembah dewa berkepala biribiri, ialah Herakleopolis, di Fayum.

Perjalanan Padihershef ke zaman keabadian, bukannya jalan pendek. Dia, yang dalam kehidupan nyata memiliki profesi tukang batu, pasti tidak mengira bahwa perjalanan panjang kekeabadian baru datang 3000 tahun kemudian. Dan dia bukannya mengadakan perjalanan dengan perahu menuju ke dewanya, tetapi berada di atas kapal Amerika bernama *Sally Ann,* menuju persemayamannya terakhir dengan suatu perjalanan yang anggun serta suci. Tetapi, perjalanannya merupakan perjalanan komersial, menyeberangi Atlantik Utara. Bukan menuju tempat dewa keabadian, tetapi ke suatu tempat yang bernama *Boston.* Bukan, sekali lagi bukan menuju kekelanggengan, tetapi kepada suatu tahun yang bertanda *1823.* Bukan dengan arak-arakan para pelayat serta para penabuh musik serta genderang seperti lazimnya para mummy dibawa ke kuburannya, tetapi bersama komoditi barang dagangan yang akan dijual ke Amerika. Dan, bila bebat yang membalut badannya dibuka, bukannya dibuka oleh para dewa junjungannya, tetapi oleh sebuah sinar redup yang menemaninya selama dia berada disitu, ialah di ruangan *Medical College,* Boston.

Padihershef telah diambil dari kuburannya di Thebes oleh *Mr. Lee,* seorang konsul Inggeris di Iskandariah, merupakan hadiah dari *Jacob van Lennep,* pedagang bangsa Belanda di Smyrna. Hadiah ini dimaksudkan untuk penghormatan kepada kota, dan untuk kepentingan umum.

Padihershef akhirnya tiba di Boston, dan akan menjalani suatu "kehidupan" yang baru baginya. Di sana dia ditempatkan di Massachusettes General Hospital. Sang Mummy tidak lepas dari pemikiran komersial, meskipun dia pada mulanya pasti mengharapkan bahwa nantinya dia akan mengalami perjalanan ke sorga tanpa urusan material apalagi komersial.

Maka, MGH (Massachusettes General Hospital) pun mengkomersialkan hadiah tersebut, dengan memodali beberapa hal yang dibutuhkan oleh Mummy. Promosi diadakan, karena Mummy akan menjadi obyek ekshibisi yang menarik. Menurut data pembalutannya, maka dikatakan oleh para ahli bahwa pembalutan dengan kain (kafan) dari mummy ini merupakan pekerjaan yang sempurna yang pernah diproduksi dari sebuah ...... *Kota kematian.* Dan, dengan modal yang dikeluarkan oleh MGH, antara lain brosur, peti kayu untuk menempatkan barang antik tersebut, serta kamar kaca, serta publikasi yang berupa iklan yang sangat profan sifatnya, Mummy itupun menjadi sebuah komoditi dagangan yang laris, karena banyak orang tertarik untuk menyaksikan, dengan membayar karcis masuk.

Dan sang Mummy Padihershef pun telah mengilhami beberapa orang untuk mengadakan business mummy, sehingga beberapa yang menamakan dirinya *"Ekspedisi"* pergi ke Timur Tengah untuk menggali mummy serta menyelidiki peradaban bangsa yang telah ribuan tahun usianya ini, serta memiliki budhaya yang tinggi. Pernah, ada promosi tentang mummy yang sangat menyakitkan bagi para ilmuwan arkeologi, seperti misalnya (setelah penemuan Padihershef) yang tertulis di dalam koran-koran di Boston, yang mengatakan bahwa kapal *Peregrine* baru saja tiba dari Gibraltar serta membongkar muatan:

"Dua Mummy, masih segar dari Thebes. Dalam kaitan ini, daging mummy bisa terbeli, karena semurah harga daging anjing. Pasar memiliki persediaan yang melimpah. Beberapa lagi jasad mayat dari Mesir dengan jenis wanita dan priya, dan harga melawan, stock untuk museum-museum, semurah pencalonan presiden".

Iklan dan kabar yang begini tentu saja membuat murka banyak fihak, juga bagi politikus. Dan ini selalu merupakan ulah pedagang, yang lebih mementingkan barang antik menjadi sebuah komoditi dagangan daripada menilai antiquitas serta nilai budhayanya.

Tetapi sejarah membuktikan lain. Penemuan Padihershef toh memberikan dorongan bagi para arkeolog untuk menggali lebih banyak artefact sejenis dari negeri yang sama, demi kepentingan ilmu pengetahuan. Dan Amerika menjadi negara yang melindungi serta mempreservasi dengan teliti terhadap benda-benda semacam ini, diikuti oleh beberapa negara lain yang meletakkan benda-benda berharga tersebut didalam museum-museum yang eksklusif.

Pernah melihat mummy?

Mummy menjadi barang yang sangat berharga, tetapi sekaligus menjadi sebuah benda untuk menakut-nakuti yang secara sinis banyak dikemukakan dalam film-film yang bersifat horor, juga dalam film anak-anak berupa kartun yang mengungkapkan sejarah mummy sebagai suatu lelucon.

Di sebuah ruangan *Egypt* di Museum *"The Royal Ontario Museum"* Toronto, Kanada, terbaring mummy dari seorang bangsawati, bersama beberapa benda peradaban Mesir kuno lainnya. Mummy tersebut berusia ribuan tahun, terbaring dalam peti kaca, dan peti aslinya lengkap dengan lukisan serta inskripsi di dalam tulisan Hyroglyph serta topeng berupa wanita, dipamerkan di sebelahnya. Rambut sang mummy masih nampak utuh kendati usianya sudah ribuan tahun, baik macam dan warnanya yang adalah brunette — kecoklatan. Karena ini mummy seorang bangsawati, terdapat juga pengiringnya, ialah kucing kesayangannya yang juga dimummykan. Situasi di ruangan Egypt itu agak redup, barangkali disengaja agar memiliki suasana seperti dalam kuburan Mesir kuno, dengan lampu yang taram temaram. Banyak juga yang hadir disana menyaksikan mummy dan benda-benda Mesir kuno lainnya. Tetapi beberapa saat kemudian, ruang yang ber-AC tersebut terasa lebih dingin karena meskipun panas yang menyengat di Toronto, hari itu tiba-tiba cuaca berubah menjadi hujan deras, mempengaruhi suasana didalam Royal Ontario Museum tersebut. Lebih-lebih dalam ruang Mesir dengan benda-benda kuno yang bisa-bisa saja membuat pengunjung bergidik. Dan ketika saya telah tamat terhadap benda-benda tersebut serta mengaguminya, terasa bahwa kedinginan yang berada di sana bertambah, dan tidak banyak orang lagi berada di sekitar sana. Maka ketakutanpun mulai menjalari diri saya, meskipun sang mummy tetap saja berbaring disana. Tenang tidak bergerak. Kendati kecantikannya sudah tidak nampak lagi, tetapi dari garis-garis wajahnya kelihatan bahwa dulunya dia seorang yang rupawan. Dan karena saya tahu bahwa KA si mummy setiap kali bisa kembali, maka sayapun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, takut bila sesuatu terjadi terhadap diri saya, seperti para penggali kubur di Mesir yang kerap sekali mendapat gangguan-gangguan yang tidak jelas asal usulnya. ☐

Sudahkah Anda Berlangganan Media Karya? Kalau belum, Segeralah!

Media Karya akan memberikan kepada Anda informasi mengenai GOLKAR dan berbagai artikel politik lainnya yang menarik.

Bila Anda berminat, kirimlah nama dan alamat disertai pos wesel pengganti ongkos cetak dan perangko sebesar a Rp 10.000,- per-tahun pada bagian Sirkulasi Media Karya Jl. Taman Anggrek-Slipi, Jakarta, atau hubungi telp. 5485090.

HARIAN

Pelita

MANAGEMENT BARU

Lebih Berisi !

Harian Pelita kini tampil dengan
**aspirasi generasi muda dan ummat Islam
yang lebih pas.**

Didukung oleh penulis-penulis Intelektual Islam.

- ☑ Berita-berita lebih **AKURAT.**
- ☑ Tulisan-tulisan lebih **BERISI.**
- ☑ Mengungkap masalah lebih **DEWASA.**
- ☑ Rubrik : Generasi Muda yang ***Akrab.***
  Kesehatan yang ***mudah dipahami.***
  Agama Islam ***mantap tapi teduh.***

Pelita sekarang, memang lain !

Mulai
11 Maret '86.

Hubungi :
Redaksi/Iklan :
Jl. Jend. Sudirman No. 100
Telp. 581362 Jakarta.

Pena Berlogo GOLKAR.

Karya Putra Bangsa yang Patut Kita Hargai.

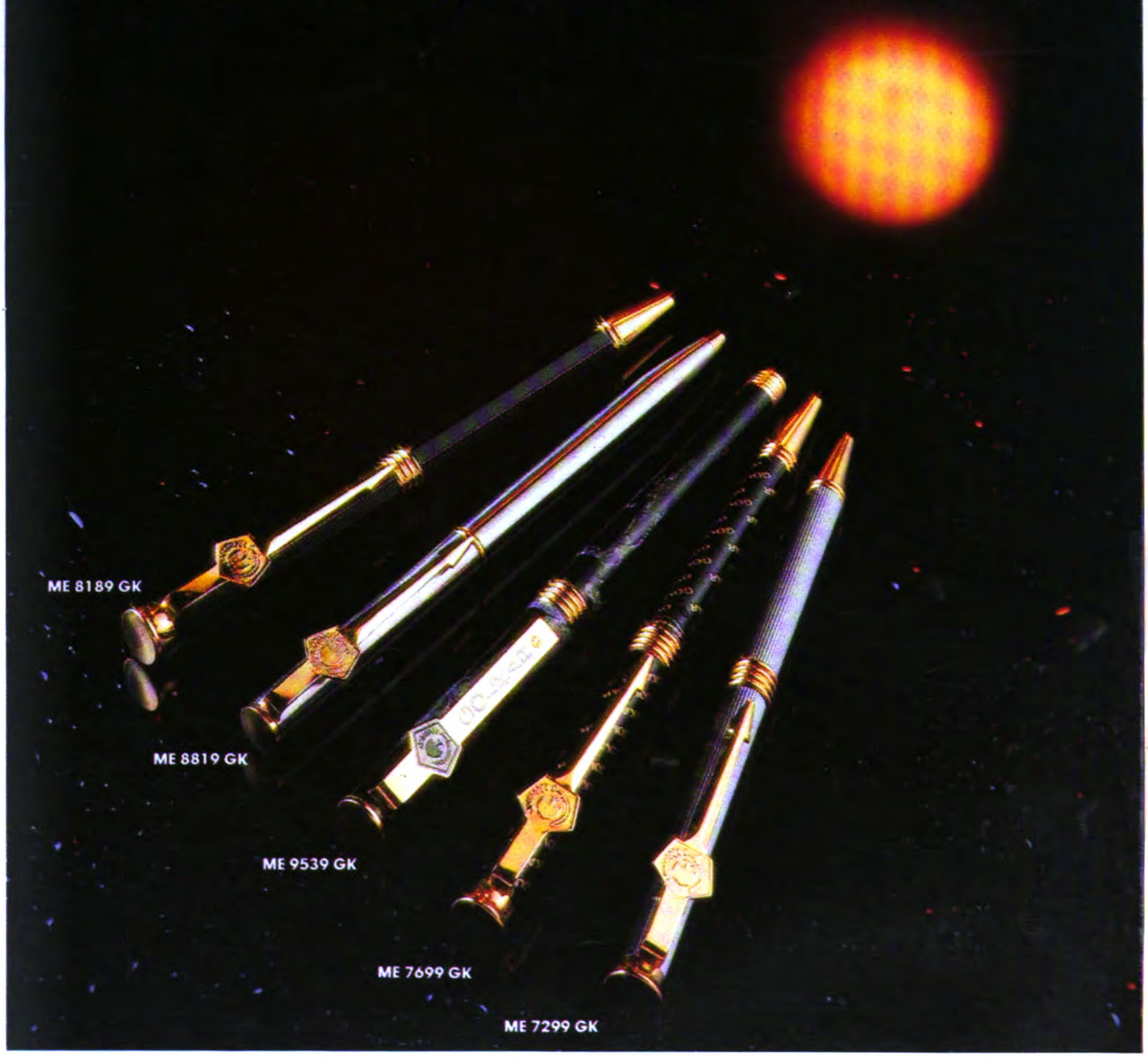

Pena berlogo GOLKAR - begitu indah penampilannya, begitu berwibawa citranya.

Rangkaian pena-pena berlogo GOLKAR khusus diciptakan untuk anda oleh Yayasan KORPRI, dengan ijin dan persetujuan D.P.P. GOLKAR, bekerjasama dengan P.T. Vanadium - produsen pena terkemuka di Indonesia.

Memakai pena berlogo GOLKAR akan memberi anda suatu kebanggaan tersendiri bahwa produsen dalam negeri telah mampu menghasilkan pena-pena yang bermutu prima. Dan sekaligus ikut berperanserta menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri.

Anda dapat memperoleh pena berlogo GOLKAR ini hanya dengan mengganti beaya produksi melalui **Koperasi Karya Kita, D.P.P. GOLKAR,** Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta 11480 Tel. 548-68-55, 548-06-54, 548-16-18, atau **Yayasan KORPRI,** Jl. Kramat VI No. 6, Jakarta Pusat Tel. 371-070, 356-354, atau perwakilan-perwakilan yang khusus ditunjuk.

YAYASAN KORPRI
Jl. Kramat VI No. 6, Jakarta Pusat
Tel. 356-354, 371-070.

Penggantian beaya produksi, transportasi dan administrasi :

Type	ME	8189	GK	Eksekutip	Rp.	15.000,-
Type	ME	8819	GK	VME	Rp.	2.750,-
Type	ME	9539	GK	Signpen	Rp.	4.250,-
Type	ME	7699	GK	Ballpen Hitam	Rp.	3.750,-
Type	ME	7299	GK	Ballpen Putih	Rp.	3.750,-

Khusus untuk type ME 8189 GK Eksekutip yang eksklusif, anda akan mendapatkan pelayanan grafir gratis untuk nama pemilik, jabatan dan kantor atau perusahaan.

PT. VANADIUM MODERN ELECTROPLATING
Factory & Head Office : Jl. Raya Tambun-Bekasi Km. 37,9
Tel. (99) 710-85, 718-23, 729-96, Tlx. 426-85 KAPUS IA
463-88 EMBICY IA

Jakarta KOPEPASI KARYA KITA
D.P.P. GOLKAR, Jln. Anggrek
Neli Murni, Slipi, P.O. BOX 441,
Tel. 548-68-55, 548-06-54,

Jakarta Drs. Hiendarto, Gandhi
Gunadi, Safrizal, Kol. Pum. Gatot
Sutoto, SH, Cendrawasih Bldg,
Blk II/C-8, Jl. Pangeran Jayakarta
141, Tel. 629-31-90, 635-878

Bandung Zulfialdi, Jln. Lele 6
Yoga S. Kosasih, Jl. Ciumbuleuit
No. 152, Tel. 813-28, 847-42.

Semarang Drs. Syukur Nuralam,
Jln. Abd. Rachman Saleh 11,
Telp. 269-53, 285-326

Solo Eddy Djupri, Jln. Urip
Sumoharjo 41, Tel. (0271) 6462

Yogyakarta Iwan Y.S.,
Jln. Pangeran Diponegoro 61
Stephanus Bambang Indarto
Arjuna Plaza Hotel,
Jl. P. Mangkubumi No. 48
Tel. 3063-868-62

Surabaya R. Winoto, Jln. Karimun
Jawa No. 4, Tel. (031) 450-06
Djaja Sasmita, Jln. Dinoyo 127

Jember Aries Tjaroko, Jln. Yos
Sudarso No. 102 Tel. 216-58

Tanjung Karang Hartono,
Jln. Tamin No. 38, RT. 002
RW.02 Ling. III, Tanjung
Karang, Bandar Lampung

Medan Eben H.S., Jln. Bakau
No. 23, Tel. (061) 526-888

Palembang Subran D., Jln. Mayor
Salim Batubara, Lorong Pendopo
No. 700-18 RT. 33

Jambi Herman Arifin, Zainin
Kemala Bachri, Jln. Karya (Jen.
Thalib) No. 11, Tel. 22282
Telanaipura - Jambi

Ujung Pandang Sudibjo,
Jln. Cendrawasih No. 476A,
Tel. (0411) 837-71

Menado Suprianto, Jln. Jend.
Sudirman No. 106, Paal II Ling.
IV, Manado Tengah

Samarinda Ruswoyo S.,
Jln. Arga Mulya No. 2, Sidodadi,
Samarinda, Kalimantan Timur.

Pontianak, C. Hady
Wiryawan, Jln. Let. Jen.
Suprapto No. 15, Tel. 2510
Pontianak, Kalimantan Barat

Kalsel & Kalteng, Masran Mansyur,
Jln. Cempaka VII/16, Tel. 3001

N.T.B. H. Zurkasi Arifin, I.G.N.
Jaya Persada, Nyoman Kertia,
Jln. Kebyar No. 12, Tel. 21419-
22018, Mataram

No. 33. 11 Nopember 198

MEDIAKARYA

PENGEMBAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

DS
611
.M48

BANK INDONESIA
LIMA RIBU RUPIAH
1980
DIREKSI
5000
50
B 09775094 A
WASHINGTON, D.C.
THIS NOTE IS LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS, PUBLIC AND PRI
B 09775094
GRANT
UNITED STATES OF AMERICA
FIFTY DOLLARS

UNIV. OF MICH.
JAN 10 1990
Current Serials

TINDAK LANJ
SETELAH
12 SEPTEMBER

Tiap Generasi Mempunyai Zamannya Sendiri

Sejarah Bukan Soal Hitam Putih

PERPUSTAKAAN
DPP.GOLKAR

SN 0216 — 2571
Majalah Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya

Pena Berlogo GOLKAR.

Karya Putra Bangsa yang Patut Kita Hargai.

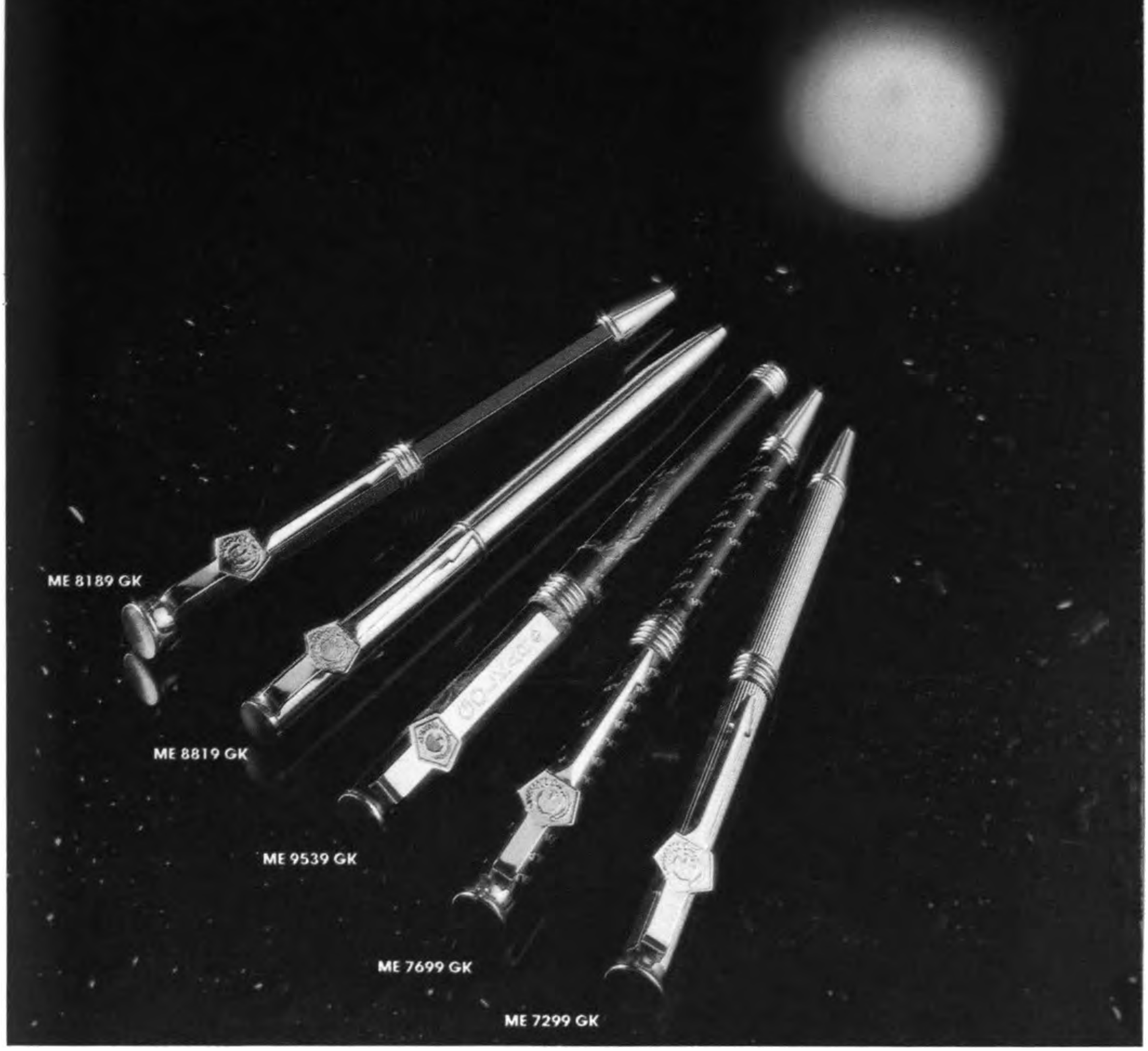

Pena berlogo GOLKAR - begitu indah penampilannya, begitu berwibawa citranya.

Rangkaian pena-pena berlogo GOLKAR khusus diciptakan untuk anda oleh Yayasan KORPRI, dengan ijin dan persetujuan D.P.P. GOLKAR, bekerjasama dengan P.T. Vanadium - produsen pena terkemuka di Indonesia.

Memakai pena berlogo GOLKAR akan memberi anda suatu kebanggaan tersendiri bahwa produsen dalam negeri telah mampu menghasilkan pena-pena yang bermutu prima. Dan sekaligus ikut berperanserta menggalakkan penggunaan produksi dalam negeri.

Anda dapat memperoleh pena berlogo GOLKAR ini hanya dengan mengganti beaya produksi melalui **Koperasi Karya Kita, D.P.P. GOLKAR,** Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta 11480 Tel. 548-68-55, 548-06-54, 548-16-18, atau **Yayasan KORPRI,** Jl. Kramat VI No. 6, Jakarta Pusat Tel. 371-070, 356-354, atau perwakilan-perwakilan yang khusus ditunjuk.

YAYASAN KORPRI
Jl. Kramat VI No. 6, Jakarta Pusat
Tel. 356-354, 371-070.

Penggantian biaya produksi, transportasi dan administrasi :

Type ME 8819 GK VME	a Rp. 3.250,-
Type ME 7699 GK Ballpen Hitam	a Rp. 4.250,-
Type ME 7299 GK Ballpen Putih	a Rp. 4.250,-
Type ME 9539 GK Signpen	a Rp. 5.000,-
Type ME 8189 GK Eksekutip	a Rp. 17.500,-

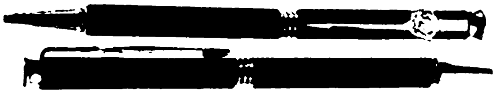

Khusus untuk type ME 8189 GK Eksekutip yang eksklusif, anda akan mendapatkan pelayanan grafir gratis untuk nama pemilik, jabatan dan kantor atau perusahaan.

PT. VANADIUM MODERN ELECTROPLATING
Factory & Head Office : Jl. Raya Tambun-Bekasi Km. 37,9
Tel (99) 710-85, 718-23, 729-96, Tlx. 426-85 KAPUS IA
463-88 EMBICY IA

Jakarta, Drs Hiendarto Gandhi
Gunadi R Gatot Soetoto, S H
Cendrawasih Bldg., Blk II/C-8
Jln Pangeran Jayakarta 141,
Tel 629 31-90 & 635-878
KOPERASI KARYA KITA,
D.P.P. GOLKAR, Mudjiatmo,
Soetarman Jln Anggrek Neli
Murni Slipi, Jakarta 11480
Tel 548-68-55, 548-06-54,
548-16-18 P O BOX 441
Bandung, Zulhaldi,
Jln Lele No 6

Yogyakarta, Iwan Y S
Jln. Pangeran Diponegoro 61

Solo, Edy Djupri, Jln Urip
Sumoharjo 41, Tel (0271) 6462

Surabaya, R. Winoto,
Jln Karimun Jawa No. 4,
Tel (031) 450-06
Djaja Sasmita, Jln Dinoyo 127

Jember, Aries Tjaroko Jln Yos
Sudarso No 102 Tel 216-58

Bali, Ida Bagus Werdhi,
Gnya Wanapuspa, Jln Kenyeri
No 100 X, Tel. 28287,
Denpasar-Bali
Tanjung Karang, Hartono,
Jln Tamin No 38, RT 002 RW 02
Ling III, Tanjung Karang,
Bandar Lampung
Palembang, Subran D Jln Mayor
Salim Batubara Lorong
Pendopo No 700 18 RT 33
Medan, Eben H S Jln
Bakau No 23 Tel (061) 526 888

Padang, Lilik Supardi Jln
Pasar Baru No 12A,
Tel 26063 0751 Sumatera Barat
Jambi, Herman Anfin, Zainn
Kemala Bachn Jln Karya
(Jen Thalib) No 11, Tel 22282
Telanaipura - Jambi
Ujung Pandang Sudibjo
Jln Cendrawasih 476A,
Tel (0411) 837 71
Menado, Suprianto, Jln
Jend Sudirman 106, Paal II
Ling IV Menado Tengah

Palu, Rustam Lawido
Jln Lorong Bakti No 32,
Tel 21979, Sulawesi Tengah

Samarinda, Ruswoyo S
Jln Arga Mulya No 17 Sidodadi
Samarinda, Kalimantan Timur

Pontianak, C Hadi Wiryawan
Jln Let Jen Suprapto No 15,
Tel 2510 Pontianak,
Kalimantan Barat

Kalteng/Kalsel, Masran Mansyur,
Jln Cempaka VII-16 Tel 3001

N.T.B., H Zurkasi Arfin, I G.N
Jaya Persada, Nyoman Kertia.
Jln Kebyar No. 12, Tel. 21419-
22018. **Mataram.**
Kupang, Iwan Santoso,
Jln P Sudirman No. 90
Tel 22607 - NTT
Ambon, T. Anastasia
Jln Pahlawan Revolusi SK-4/1-5
Tel (0911) 3363, 41363, 42021
Jayapura, Ny AmbariV
R Wimbo Suryanto, Jln. Mandala
No 7 Tel 21865, Dok V/Atas.

GOLKAR

Diterbitkan oleh :
DPP GOLKAR

Pimpinan Umum :
Sudharmono SH.
Wakil Pimpinan Umum :
RH Soegandhi.
Pimpinan Redaksi/
Penanggung-Jawab :
Sarwono Kusumaatmadja.
Zulharmans.
Dewan Redaksi :
Sarwono Kusumaatmadja.
Akbar Tandjung.
AA Oka Mahendra SH.
Drs Soedarmadji.
David Napitupulu.
Zarlons Zaghlul SH.
Ny TS Darsoyo.
Andi Mochtar SH.
Zulharmans.
Anang Adenansi.
Prof Dr Fuad Hasan.
Yusuf Wanandi SH.
Drs M. Syafaat Habib.
M. Sani.
Pembantu Tetap :
Drs DH Asegaff.
Bambang Warih Kusumah.
Indra Abidin.
Drs Thomas Suyatno.
Ny Maria Sugiharto.
Widjanarko Poespoyo MA.
Ny Ida Ayu Utami Pidada.
Drs Ishadi.
Redaksi Pelaksana :
Anang Adenansi.
Peter Tomasoa.
HM Irsyad Sudiro.
Sugyanto.
Soegyarto PS.
M Dawoed Atmodiwirjo.
Mahmudi Romli.
Staf Redaksi :
Sudarsono SH.
T Ariono Poernomo.
Subandrio.
Djonharro.
Rum Aly
Ibnu Sawarno.
Tata Usaha :
Sudarsono SH.
Rd Pand Dv Noerijathy.
Robert Puang Sunur
Issidarto BA.
Subyanto SP.
Untung Djumadi.
H Mesri Pasaribu.

STT NO : 823/SK/DITJEN PPG/SIT/81
Tgl 11 Maret 1981
Alamat :
Jl. Taman Anggrek Slipi
telp. 5480654-5481618-5481810
Jakarta 11480
Dicetak oleh : PT Enka Parahiyangan.

Redaksi menerima sumbangan naskah karangan, artikel-artikel (ulasan, komentar, analisa) dan foto-foto peristiwa asalkan sesuai dengan missi penerbitan 'Media Karya' sebagai media pengemban pembaharuan dan pembangunan bangsa. Dan redaksi berhak melakukan penyuntingan atas naskah karangan dan artikel-artikel sumbangan tersebut, dengan tidak mengurangi isi

ISI DAPAT DIKUTIP
DENGAN MENYEBUT SUMBER

INDEKS

MEMO REDAKSI

Tantangan Zaman dan Kepahlawanan.

FOKUS

Tiap Generasi Mempunyai Zamannya Sendiri.
Wawancara dengan Prof. Dr. Fuad Hassan.

LAPORAN UTAMA

Setelah 12 September : Sejumlah Tindak Lanjut.
Apa saja tindak lanjut itu dan bagaimana?

LAPORAN KHUSUS

Kriminalitas Dalam Usia Muda.
Sejumlah Wawancara dengan psikolog dan pendidik.

NASIONAL

Pahlawan Proklamator, Bukan Untuk Pelestarian Kekuasaan dan sejumlah catatan peristiwa nasional lainnya.

KOMENTAR

Jangan sakiti hati rakyat, Mawas diri Polri,
Masyarakat vs kriminalitas.

ORGANISASI

Dari Kampus ke Kampus, Ketua Umum di Buleleng,
Peranan Golkar dalam pembangunan memang menonjol, Sukses Pemilu 1987 dan berbagai rekaman peristiwa organisasi lainnya.

SPEKTRUM

Yang diperlukan ialah terbinanya Masyarakat Indonesia yang patriotik (Oleh M. Syafaat Habib); Tinjauan tentang RUU PTUN (Dr. A. Baramuli SH).

INTERNASIONAL

Gorbachev dan Kawasan Asia Pasifik

SENI BUDAYA

Dari Demak ke Kalimantan Selatan.

Disain cover Multi Design Studio/HY Sudarsono
Fotografer: Subandrio, Soewito, Badrul Mustofa

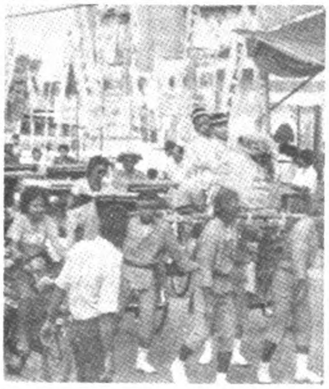

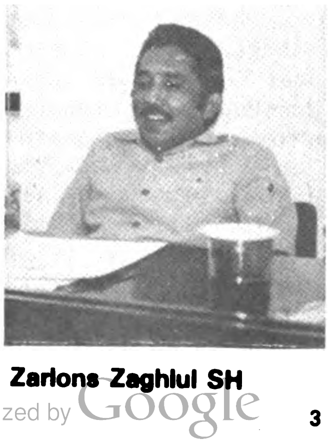

Zarlons Zaghlul SH

MEMO REDAKSI

Tantangan Zaman Dan Kepahlawanan

Apakah kepahlawanan itu? Presiden Soeharto memberikan definisi aktual tentang kepahlawanan yang berkaitan dengan keadaan bangsa ini ketika membuka pendidikan Manggala BP7 di Istana Bogor tepat 10 Nopember ini. "Kepahlawanan bagi kita adalah semua yang menyangkut perjuangan merintis, melahirkan, menegakkan, memelihara dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". Dengan definisi yang cukup luas ini, seperti kata Presiden pula, maka generasi yang sekarang atau generasi penerus pun memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi pahlawan, yakni pahlawan pembangunan.

Selain itu, menurut Presiden, setiap kurun waktu perjuangan memiliki tantangan tersendiri dan setiap tantangan itu harus kita beri jawaban setepat-tepatnya. Dan tantangan kita yang terbesar saat ini adalah bagaimana membangun masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Maka dalam zaman pembangunan ini yang diperlukan adalah pahlawan-pahlawan pembangunan.

Bagaimana membangun masyarakat adil makmur, sebagaimana dikatakan Presiden Soeharto, memang merupakan tantangan. Sebagai cita-cita, hal itu belum tercapai. Memang ukuran baku bagaimana masyarakat adil makmur itu sendiri relatif, tetapi sebagai tujuan ia dapat didekati terus menerus. Dan kini, kendati telah begitu banyak kemajuan yang kita capai sebagai hasil pembangunan Pelita demi Pelita, dengan memakai angka dan ukuran-ukuran garis batas kemiskinan, kita sama-sama mengakui jarak menuju adil makmur masih amat jauh. Banyak kemajuan, tetapi masih begitu banyak yang harus dikejar untuk menyentuh kehidupan rakyat banyak. Selama kita melihat masih tingginya angka tingkat pengangguran, selama kita masih melihat banyaknya manusia rentan dan marginal, selama kita masih melihat masih lebih sedikitnya warganegara yang hidup layak dibanding dengan yang tidak, maka kita sadar bahwa jarak pencapaian cita-cita itu masih cukup jauh.

Mengenai tantangan yang masih dihadapi bangsa ini, lebih jauh dapat dicatat beberapa hal yang untuk sebagian pernah diutarakan dalam media ini dua tahun lalu. Kita mencatat bahwa kepincangan demografi belum terpecahkan, sehingga terjadi kepadatan penduduk yang amat tinggi di pulau Jawa sementara sejumlah pulau lainnya relatif kosong. Resesi dunia dan goncangnya harga minyak bumi menghambat laju pembangunan yang sebelumnya telah sempat menggembirakan kita semua dalam rangka dimensi 'makmur' dari cita-cita adil makmur. Sehingga akhir-akhir ini terpaksa diambil sejumlah langkah yang terasa pahit namun tak terelakkan bila ingin menyelamatkan kelanjutan jalannya pembangunan. Institusi-institusi bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat yang bertugas mengatur dinamika pembangunan serta mengarahkan potensi bangsa ini mencapai tujuan nasionalnya, sejauh ini di sana-sini masih kewalahan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pembaharuan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan beberapa tahun terakhir, telah melahirkan suatu generasi baru yang lebih cerdas, lebih kritis dan dengan sendirinya mempunyai kualitas pengharapan dan tuntutan yang lebih meningkat. Tidak hanya sekedar menuntut tersedianya bahan-bahan pokok kebutuhan hidup secara material, tetapi juga menuntut peningkatan kebutuhan non material: tentang keadilan, pemerataan peluang, iklim demokrasi yang lebih hidup dan dinamis, komunikasi lebih terbuka dan segala perilaku yang lebih tinggi tingkat rasionalitasnya. Dalam pada itu, kelambanan, segala sesuatu yang monoton dan berkepanjangan tidak mengalir, sikap dan ucapan mengambang, perilaku proforma dan sloganistis — yang pada pihak lain memang juga menggejala — menjadi hal-hal yang makin tidak disenangi.

Dikaitkan dengan ucapan Presiden tentang tantangan zaman dan kesempatan menjadi pahlawan, maka peta kecenderungan dan hasrat generasi muda tadi disatu pihak dan pada sisi lain terjadinya kecenderungan perilaku tidak adil pihak tertentu yang memanfaatkan pembangunan untuk kepentingan eksklusif, menjadi hal yang menarik dan perlu diperhatikan. Menarik, karena ia berkait dengan dimensi 'adil' dari cita-cita adil makmur. Perlu diperhatikan, karena masih terdapatnya penyimpangan untuk kepentingan yang eksklusif tadi. Kita dapat sepakat, bahwa generasi penerus atau generasi baru, pada waktunya harus tampil sebagai pemeran utama untuk menjawab tantangan zaman — dan dengan demikian pada hakekatnya menempuh pola perilaku kepahlawanan. Akan tetapi, tentang dimensi 'adil', penegakan dan pencapaiannya tetaplah milik semua tanpa pembatasan generasi. Adil merupakan kebutuhan setiap saat. Maka kendati generasi pembebas kini sedang mempersiapkan diri mundur dari peran-peran utama pengabdian bagi kehidupan bangsa — katakanlah demikian — toh suatu peran yang menyangkut dimensi 'adil' masih dapat dilakukan. Dan banyak yang dapat dilakukan dalam hal ini: mengoreksi rekan-rekan yang tergelincir, mematikan bibit-bibit ketidakadilan yang dapat menular kepada yang lebih muda, memberantas etatisme yang merupakan kerawanan bagi setiap kekuasaan ... dan sebagainya. Sehingga, paripurnalah teladan kepahlawanan yang pernah ditunjukkan generasi pembebas sepanjang lebih dari empat dasawarsa ini. Insya Allah generasi baru akan tergerak meneruskan semangat kepahlawanan itu ....!

Wawancara dengan Prof. Dr. Fuad Hassan

Tiap Generasi Mempunyai Zamannya Sendiri

Tidak Benar Patriotisme dan Semangat Kepahlawanan Pemuda Indonesia Luntur

Benarkah semangat patriotisme dan kepahlawanan pemuda-pemudi Indonesia merosot, erosi, tercemar? Benarkah terjadi dekadensi moral di kalangan mereka? "Saya tidak sependapat, dan menolak tegas kalau ada anggapan seperti itu," demikian dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Fuad Hassan ketika memberikan wawancara kepada Media Karya.

"Indikasinya cukup banyak".

Tentunya tidak begitu saja Prof Fuad Hassan menarik kesimpulan terhadap masalah pemuda-pemudi atau generasi muda Indonesia. Tokoh yang mampu menyelami aspek kejiwaan kalangan generasi muda itu tetap melihat bahwa semangat patriotisme dan kepahlawanan di kalangan generasi muda tetap besar dan berkembang sesuai tantangan jaman. "Indikasinya cukup banyak", katanya, mengungkapkan sejumlah contoh. Antara lain, perasaan keindonesiaan anak-anak muda cukup kuat, dan di antaranya dalam beberapa hal tersirat dalam karya nyata mereka, baik berupa karya cetusan hati, karya seni maupun karya berupa ungkapan kebudayaan lain. Belum lagi dalam hal-hal yang tersirat sebagai motivasi gerak hidup mereka.

Ada contoh lain yang sangat mudah dikenali, yang sedikit banyak menggambarkan semangat kebangsaan. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri semuanya kembali, pulang ke tanah air. Ini tidak mungkin terjadi apabila mereka itu tidak memiliki semangat cinta tanah air. Sebagai perbandingan, tidak semua negara Asia Tenggara memiliki mahasiswa seperti itu.

Menurut Menteri, kecintaan para mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap tanah airnya tidak terbatas pada tingkat kepulangan mereka yang 100 persen. Mahasiswa Indonesia juga terkenal gigih dalam mempertahankan citra Indonesia. Kalau ada masalah-masalah dalam negeri diserang oleh pendapat umum di negara setempat, para mahasiswa itu akan gigih mempertahankan nama Indonesia. "Siapapun yang pernah berada di luar negeri akan melihat kegigihan pemuda-pemudi Indonesia yang belajar di sana", ungkap Menteri.

Suatu hal yang menarik, semangat cinta tanah air itu tidak hanya merasuki mahasiswa yang berasal dari suku atau asal tertentu. Semua pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, keturunan, ternyata memiliki semangat yang sama. Di luar negeri mereka telah menunjukkan semangat kebangsaan yang satu.

Menteri Fuad Hassan mengakui, aktualisasi semangat kebangsaan dan kepahlawanan berbeda dari generasi satu ke generasi lainnya. Tantangan dalam kurun jaman yang dihadapi oleh generasi yang satu berbeda dengan generasi yang lainnya. Aktualisasi patriotisme dan kepahlawanan generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya, misalnya generasi Angkatan '45. Anak-anak muda generasi sekarang mungkin tidak dapat membayangkan dan menghayati sepenuhnya bagaimana revolusi fisik dan perjuangan mati-matian mempertahankan kemerdekaan, seperti halnya generasi Angkatan 45 mungkin juga tidak menghayati secara penuh apa yang diperbuat oleh generasi Angkatan 1928 atau pun 1908.

Tiap Generasi Ditantang Untuk Tanggap Pada Zamannya

Tiap generasi mempunyai zamannya sendiri. Seperti misalnya, kini tidak akan ada lagi pahlawan gerilya, tetapi sekarang dapat mempunyai pahlawan KB lestari, yang pasti tak terpikirkan pada zaman revolusi fisik dulu.

Tiap generasi ditantang untuk tanggap pada zamannya. Tanggap terhadap jaman bukan sekedar reaksi, tetapi berupa semangat untuk bertahan hidup dengan identitas

MEMO REDAKSI

Tantangan Zaman Dan Kepahlawanan

Apakah kepahlawanan itu? Presiden Soeharto memberikan definisi aktual tentang kepahlawanan yang berkaitan dengan keadaan bangsa ini ketika membuka pendidikan Manggala BP7 di Istana Bogor tepat 10 Nopember ini. "Kepahlawanan bagi kita adalah semua yang menyangkut perjuangan merintis, melahirkan, menegakkan, memelihara dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945". Dengan definisi yang cukup luas ini, seperti kata Presiden pula, maka generasi yang sekarang atau generasi penerus pun memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi pahlawan, yakni pahlawan pembangunan.

Selain itu, menurut Presiden, setiap kurun waktu perjuangan memiliki tantangan tersendiri dan setiap tantangan itu harus kita beri jawaban setepat-tepatnya. Dan tantangan kita yang terbesar saat ini adalah bagaimana membangun masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Maka dalam zaman pembangunan ini yang diperlukan adalah pahlawan-pahlawan pembangunan.

Bagaimana membangun masyarakat adil makmur, sebagaimana dikatakan Presiden Soeharto, memang merupakan tantangan. Sebagai cita-cita, hal itu belum tercapai. Memang ukuran baku bagaimana masyarakat adil makmur itu sendiri relatif, tetapi sebagai tujuan ia dapat didekati terus menerus. Dan kini, kendati telah begitu banyak kemajuan yang kita capai sebagai hasil pembangunan Pelita demi Pelita, dengan memakai angka dan ukuran-ukuran garis batas kemiskinan, kita sama-sama mengakui jarak menuju adil makmur masih amat jauh. Banyak kemajuan, tetapi masih begitu banyak yang harus dikejar untuk menyentuh kehidupan rakyat banyak. Selama kita melihat masih tingginya angka tingkat pengangguran, selama kita masih melihat banyaknya manusia rentan dan marginal, selama kita masih melihat masih lebih sedikitnya warganegara yang hidup layak dibanding dengan yang tidak, maka kita sadar bahwa jarak pencapaian cita-cita itu masih cukup jauh.

Mengenai tantangan yang masih dihadapi bangsa ini, lebih jauh dapat dicatat beberapa hal yang untuk sebagian pernah diutarakan dalam media ini dua tahun lalu. Kita mencatat bahwa kepincangan demografi belum terpecahkan, sehingga terjadi kepadatan penduduk yang amat tinggi di pulau Jawa sementara sejumlah pulau lainnya relatif kosong. Resesi dunia dan goncangnya harga minyak bumi menghambat laju pembangunan yang sebelumnya telah sempat menggembirakan kita semua dalam rangka dimensi 'makmur' dari cita-cita adil makmur. Sehingga akhir-akhir ini terpaksa diambil sejumlah langkah yang terasa pahit namun tak terelakkan bila ingin menyelamatkan kelanjutan jalannya pembangunan. Institusi-institusi bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat yang bertugas mengatur dinamika pembangunan serta mengarahkan potensi bangsa ini mencapai tujuan nasionalnya, sejauh ini di sana-sini masih kewalahan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pembaharuan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan beberapa tahun terakhir, telah melahirkan suatu generasi baru yang lebih cerdas, lebih kritis dan dengan sendirinya mempunyai kualitas pengharapan dan tuntutan yang lebih meningkat. Tidak hanya sekedar menuntut tersedianya bahan-bahan pokok kebutuhan hidup secara material, tetapi juga menuntut peningkatan kebutuhan non material: tentang keadilan, pemerataan peluang, iklim demokrasi yang lebih hidup dan dinamis, komunikasi lebih terbuka dan segala perilaku yang lebih tinggi tingkat rasionalitasnya. Dalam pada itu, kelambanan, segala sesuatu yang monoton dan berkepanjangan tidak mengalir, sikap dan ucapan mengambang, perilaku proforma dan sloganistis — yang pada pihak lain memang juga menggejala — menjadi hal-hal yang makin tidak disenangi.

Dikaitkan dengan ucapan Presiden tentang tantangan zaman dan kesempatan menjadi pahlawan, maka peta kecenderungan dan hasrat generasi muda tadi disatu pihak dan pada sisi lain terjadinya kecenderungan perilaku tidak adil pihak tertentu yang memanfaatkan pembangunan untuk kepentingan eksklusif, menjadi hal yang menarik dan perlu diperhatikan. Menarik, karena ia berkait dengan dimensi 'adil' dari cita-cita adil makmur. Perlu diperhatikan, karena masih terdapatnya penyimpangan untuk kepentingan yang eksklusif tadi. Kita dapat sepakat, bahwa generasi penerus atau generasi baru, pada waktunya harus tampil sebagai pemeran utama untuk menjawab tantangan zaman — dan dengan demikian pada hakekatnya menempuh pola perilaku kepahlawanan. Akan tetapi, tentang dimensi 'adil', penegakan dan pencapaiannya tetaplah milik semua tanpa pembatasan generasi. Adil merupakan kebutuhan setiap saat. Maka kendati generasi pembebas kini sedang mempersiapkan diri mundur dari peran-peran utama pengabdian bagi kehidupan bangsa — katakanlah demikian — toh suatu peran yang menyangkut dimensi 'adil' masih dapat dilakukan. Dan banyak yang dapat dilakukan dalam hal ini: mengoreksi rekan-rekan yang tergelincir, mematikan bibit-bibit ketidakadilan yang dapat menular kepada yang lebih muda, memberantas etatisme yang merupakan kerawanan bagi setiap kekuasaan ... dan sebagainya. Sehingga, paripurnalah teladan kepahlawanan yang pernah ditunjukkan generasi pembebas sepanjang lebih dari empat dasawarsa ini. Insya Allah generasi baru akan tergerak meneruskan semangat kepahlawanan itu ....!

Wawancara dengan Prof. Dr. Fuad Hassan

Tiap Generasi Mempunyai Zamannya Sendiri

Tidak Benar Patriotisme dan Semangat Kepahlawanan Pemuda Indonesia Luntur

Benarkah semangat patriotisme dan kepahlawanan pemuda-pemudi Indonesia merosot, erosi, tercemar? Benarkah terjadi dekadensi moral di kalangan mereka? "Saya tidak sependapat, dan menolak tegas kalau ada anggapan seperti itu," demikian dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Fuad Hassan ketika memberikan wawancara kepada Media Karya.

Tentunya tidak begitu saja Prof Fuad Hassan menarik kesimpulan terhadap masalah pemuda-pemudi atau generasi muda Indonesia. Tokoh yang mampu menyelami aspek kejiwaan kalangan generasi muda itu tetap melihat bahwa semangat patriotisme dan kepahlawanan di kalangan generasi muda tetap besar dan berkembang sesuai tantangan jaman. "Indikasinya cukup banyak", katanya, mengungkapkan sejumlah contoh. Antara lain, perasaan keindonesiaan anak-anak muda cukup kuat, dan di antaranya dalam beberapa hal tersirat dalam karya nyata mereka, baik berupa karya cetusan hati, karya seni maupun karya berupa ungkapan kebudayaan lain. Belum lagi dalam hal-hal yang tersirat sebagai motivasi gerak hidup mereka.

"Indikasinya cukup banyak".

Ada contoh lain yang sangat mudah dikenali, yang sedikit banyak menggambarkan semangat kebangsaan. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri semuanya kembali, pulang ke tanah air. Ini tidak mungkin terjadi apabila mereka itu tidak memiliki semangat cinta tanah air. Sebagai perbandingan, tidak semua negara Asia Tenggara memiliki mahasiswa seperti itu.

Menurut Menteri, kecintaan para mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap tanah airnya tidak terbatas pada tingkat kepulangan mereka yang 100 persen. Mahasiswa Indonesia juga terkenal gigih dalam mempertahankan citra Indonesia. Kalau ada masalah-masalah dalam negeri diserang oleh pendapat umum di negara setempat, para mahasiswa itu akan gigih mempertahankan nama Indonesia. "Siapapun yang pernah berada di luar negeri akan melihat kegigihan pemuda-pemudi Indonesia yang belajar di sana", ungkap Menteri.

Suatu hal yang menarik, semangat cinta tanah air itu tidak hanya merasuki mahasiswa yang berasal dari suku atau asal tertentu. Semua pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, keturunan, ternyata memiliki semangat yang sama. Di luar negeri mereka telah menunjukkan semangat kebangsaan yang satu.

Menteri Fuad Hassan mengakui, aktualisasi semangat kebangsaan dan kepahlawanan berbeda dari generasi satu ke generasi lainnya. Tantangan dalam kurun jaman yang dihadapi oleh generasi yang satu berbeda dengan generasi yang lainnya. Aktualisasi patriotisme dan kepahlawanan generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya, misalnya generasi Angkatan '45. Anak-anak muda generasi sekarang mungkin tidak dapat membayangkan dan menghayati sepenuhnya bagaimana revolusi fisik dan perjuangan mati-matian mempertahankan kemerdekaan, seperti halnya generasi Angkatan 45 mungkin juga tidak menghayati secara penuh apa yang diperbuat oleh generasi Angkatan 1928 atau pun 1908.

Tiap Generasi Ditantang Untuk Tanggap Pada Zamannya

Tiap generasi mempunyai zamannya sendiri. Seperti misalnya, kini tidak akan ada lagi pahlawan gerilya, tetapi sekarang dapat mempunyai pahlawan KB lestari, yang pasti tak terpikirkan pada zaman revolusi fisik dulu.

Tiap generasi ditantang untuk tanggap pada zamannya. Tanggap terhadap jaman bukan sekedar reaksi, tetapi berupa semangat untuk bertahan hidup dengan identitas

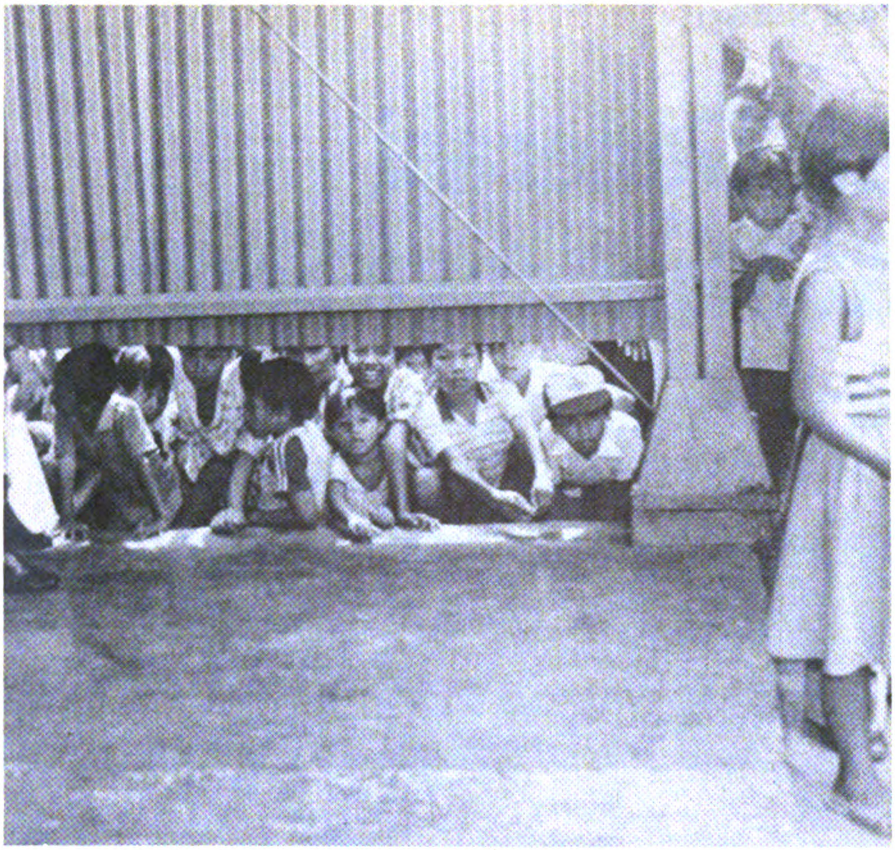

Sekarang anak-anak merasa bebas dalam pergaulan.

Indonesia. Hal itu telah ditunjukkan oleh tiap generasi Indonesia.

Sebagai gambaran, Menteri menunjukkan suatu contoh. Suatu hal yang sangat menonjol bila dibandingkan dengan masa-masa lalu, generasi muda Indonesia sekarang memiliki kebanggaan nasional yang tinggi, tidak merasa rendah diri untuk tampil di tengah pergaulan antar bangsa. ''Tidak seperti dulu, orang-orang tua kita kalau melihat bule botak sudah minder. Kalau ada anak rewel ditakuti dengan ungkapan 'ada Londo botak''' katanya. Berbeda dengan sekarang, anak-anak merasa bebas dalam pergaulan, sampai-sampai bicara dengan berkacak pinggang sudah bukan pantangan, yang bagi orang dulu tidak terbayangkan karena dinilai tidak sopan.

Rasa harga diri yang makin tebal itu dapat menjadi modal yang besar bagi bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional, sebagaimana telah ditunjukkan selama ini. Prestasi bangsa Indonesia di bidang diplomatik atau pergaulan internasional cukup menonjol. Indonesia merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam banyak masalah internasional. ''Meski kita tidak perlu membusungkan dada karena itu'', katanya. Prestasi itu merupakan ukuran bahwa bangsa Indonesia sanggup tampil sebagai entitas yang mantap dalam komunitas bangsa-bangsa. Atas pertanyaan, Menteri mengatakan pandangan akan kepahlawanan mengalami perubahan, sesuai jamannya. Pahlawan tidak saja bagi mereka yang berjasa dalam perjuangan di medan perang tetapi juga bagi mereka yang dengan tulus mengabdikan diri di berbagai/di segala bidang kehidupan. Kepahlawanan dapat diejawantahkan di segala bidang.

Menteri juga menolak bahwa peningkatan kesejahteraan berkat pembangunan akan menipiskan semangat kepahlawanan. ''Pahlawan tidak identik dengan kesengsaraan karena kemiskinan'', katanya. Kepahlawanan mengandung makna kepekaan terhadap situasi masyarakat sekeliling, dan kepekaan itu mendorongnya untuk mengabdi sepenuh hati, bahkan tidak takut menghadapi resiko yang paling beratpun. Karenanya, kepahlawanan tidak terbatas pada bidang militer, politik, tetapi juga berada pada bidang seni, ilmu pengetahuan, pelayanan kepada masyarakat. ''Pak Affandi ataupun Pak Basuki Abdullah yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya pada dunia seni lukis pasti dimotivasi semangat kepahlawanan'', katanya.

Apresiasi Kreatif

Semangat kepahlawanan juga perlu diapresiasikan secara kreatif. Menteri melihat bahwa kegiatan muda-mudi melaksanakan gerakan cinta lingkungan, petualangan mendaki gunung adalah salah satu bentuk kreativitas dalam upaya menyalurkan semangat kepahlawanan secara positif, sesuai ruang lingkup jamannya.

Menurut Menteri, peningkatan kesejahteraan justru akan memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan semangat kepahlawanan, dan bukan sebaliknya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan, kesejahteraan janganlah diukur dengan materi. Kesejahteraan hendaknya justru dilihat dari segi non-materi, yakni adanya kemajuan serempak dalam masyarakat yang kemudian juga menumbuhkan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Sebagai gambaran, bagaimana perkembangan masyarakat desa dan kota dewasa ini. Dari segi kejiwaan, sebenarnya tidak ada perbedaan. Siapapun sekarang ini, baik dari desa atau dari kota mempunyai hak dan melaksanakan hak yang sama di bidang pendidikan. Pemuda-pemuda dari desa pun tak kalah dengan pemuda dari perkotaan dalam menuntut ilmu, misalnya di perguruan tinggi.

Suatu hal yang dapat mendorong persamaan dan hidup yang demokratis, antara lain diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan.

Bahasa Indonesia adalah pengungkapan dan pengejawantahan budaya bangsa yang optimal. ''Karenanya tidak berkelebihan kalau saya katakan bahasa Indonesia ini anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kok bisa bahasa yang sederhana ini mengikat 160 juta manusia, yang masing-masing mempunyai bahasa sendiri. Bayangkan saja, di Irian Jaya terdapat 200 bahasa, bahasa bukan dialek'', katanya.

Kesemua unsur, baik bahasa Indonesia, baik Pancasila maupun pembangunan yang dilakukan, ternyata mampu membawa manusia Indonesia pada tingkat emansipasi sehingga terwujud manusia Indonesia seutuhnya. Emansipasi tidak saja anak, tetapi juga orang tua, tidak saja orang berusia lanjut tetapi juga usia muda. Kesemuanya itu memungkinkan bangsa Indonesia berkembang, berkembang dalam menjawab tantangan jaman. ''Karenanya saya termasuk orang yang optimistis. Saya yakin semangat kepahlawanan bangsa Indonesia, terutama generasi mudanya tidak luntur'', katanya.

Diakuinya, di antara pemuda-pemudi memang terdapat yang mengalami dekadensi moral, terkena kecanduan narkotika akibat pergaulan yang salah. Tetapi menurut Menteri hal itu merupakan pengecualian. Masa lalu pun ada pemuda seperti itu. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam kelompok sandiwara terkenal masa lalu, juga dikenal masyarakat sebagai pemuda mabuk-mabukan. Kenakalan remaja bukan monopoli remaja masa kini. ''Karenanya saya tidak mengerti apa ukurannya sampai-sampai ada orang mempunyai pendapat yang stereotip bahwa pemuda sekarang sudah merosot semangat patriotismenya, dan semangat kepahlawanannya''. ☐

Sugyanto/Badrul M

Setelah 12 September: Sejumlah Tindak Lanjut

"Pemerintah telah menghilangkan kerisauan para pengusaha yang merasa bimbang setelah adanya devaluasi"

Ketika tampil dalam suatu seminar yang dihadiri sejumlah pengusaha Jumat 24 Oktober, kepada Drs Radius Prawiro terlontar pertanyaan: Apakah pemerintah mempunyai rencana untuk memperbaiki keadaan? Menteri Keuangan RI ini menjawab: Ada. "Mari kita lihat apa yang bisa disampaikan pemerintah dalam beberapa hari atau beberapa pekan mendatang".

Ali Wardhana : Sejak 1983

Waktu tak perlu berlalu terlalu banyak, hanya sehari, sebelum jawaban pemerintah datang. Sabtu 25 Oktober, sembilan menteri disertai Gubernur BI menghadap Presiden Soeharto. Usai pertemuan, diumumkan satu paket besar kebijaksanaan pemerintah yang dimaksudkan sebagai tindak lanjut kebijaksanaan 12 September 1986. Sejumlah kebijaksanaan yang diumumkan 25 Oktober ini, sekaligus merupakan jawaban bagi masyarakat dan akan menenteramkan seperti yang pernah disampaikan Ketua MPR/DPR Amirmachmud beberapa hari sebelumnya. "Penjelasan yang cepat dari pemerintah terhadap isyu ataupun pemberitaan yang spekulatif yang menyangkut bidang ekonomi menenteramkan masyarakat dan persoalannya pun menjadi jelas bagi masyarakat".

"Agaknya kita tak perlu mengulang-ulang pembicaraan mengenai tindakan devaluasi 12 September 1986", ujar Ketua FKP R. Soekardi. "Yang penting adalah tindak lanjutnya yang mendukung suksesnya kebijaksanaan pemerintah tersebut. Seperti terlihat saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Keppres, peraturan dan sebagainya yang semuanya menuju ke arah sukses tindak lanjut itu".

4 Pokok Kebijaksanaan

Lama dinanti-nantikan oleh masyarakat ekonomi, akhirnya pemerintah mengumumkan sejumlah tindak lanjutnya atas kebijaksanaan devaluasi 12 September. Paket kebijaksanaan yang diumumkan 25 Oktober itu, pada dasarnya terdiri atas 4 pokok penting: Kebijaksanaan penurunan biaya produksi, pengefisienan perlindungan produksi dalam negeri, perluasan dan penyempurnaan fasilitas Swap, dan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang penanaman modal.

Menko Ekuin/Wasbang Prof Ali Wardhana tampil mengumumkan kebijaksanaan 25 Oktober ini — didampingi oleh sejumlah menteri lainnya. Pertemuan dengan Presiden yang mendahului pengumuman itu sendiri dihadiri oleh Menko Ekuin Ali Wardhana, Menteri Keuangan Radius Prawiro, Menteri Perindustrian Hartarto, Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas JB Sumarlin, Menteri Koperasi Bustanil Arifin, Menmud UP3DN/Ketua BKPM Ginandjar Kartasasmita, Gubernur BI Arifin Siregar. Dan menteri kabinet lainnya, Mensesneg Sudharmono dan Menmud Seskab Moerdiono.

"Langkah yang diambil ini", kata Menko Ekuin Ali Wardhana "merupakan tindak lanjut devaluasi 12 September dan kelanjutan rangkaian kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah 2 Oktober yang lalu". Langkah yang diambil 2 Oktober meliputi tentang revaluasi kekayaan, pembayaran hutang luar negeri yang berkaitan dengan perpajakan, kelangsungan proyek-proyek pembangunan pemerintah dan penyesuaian kontrak pekerjaan sipil/borongan, pembatasan penggunaan devisa dan meliputi pula perubahan tarif fiskal. Ali Wardhana juga mengungkap bahwa segala tindakan yang diambil sekarang ini tetap tak terlepas dari rangkaian kebijaksanaan pemerintah sejak 1983.

Bila diurut, tak kurang dari 7 kelompok kebijaksanaan penting diambil pemerintah di bidang ekonomi sejak tahun 1983. Pertama adalah devaluasi tahun 1983 dan penterapan devisa sistim nilai tukar mengambang terkendali. Kedua, juga ditahun 1983, penjadwalan kembali sejumlah proyek pembangunan besar yang menggunakan banyak komponen impor dengan tujuan penghematan devisa. Tindakan ketiga adalah deregulasi perbankan yang melepaskan tingkat bunga kredit kepada kekuatan pasar, bukan lagi melalui penetapan pemerintah. Selama tahun 1984, 1985 dan 1986 dikeluarkan sejumlah UU perpajakan baru, mengenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan. Ini merupakan pokok keempat. Sedang pokok kebijaksanaan kelima adalah Inpres 5 tahun 1984 tentang penyederhanaan berbagai ketentuan dan peraturan di lingkungan departemen dan lembaga pemerintah. Lalu yang keenam adalah Inpres No. 4 tahun 1985 untuk menekan ekonomi biaya tinggi: Fungsi dan peran BC ditekan mendekati titik nol dan fungsi pemeriksaan barang dalam lalu lintas ekspor-impor diserahkan kepada SGS. Penyederhanaan juga dilakukan dalam lalu lintas barang antar pulau. Dan sebelum devaluasi, keluar pokok kebijaksanaan ketujuh yang dikenal sebagai Paket 6 Mei tahun 1986 untuk mendorong ekspor non migas dan sektor penanaman modal.

Semua kebijaksanaan di bidang ekonomi dan moneter ini, sejak Inpres 4, Paket 6 Mei, Kebijaksanaan 12 September dan Kebijaksanaan 2 dan 25 Oktober, menurut Ketua Komisi VI DPR-RI Ir Sunaryo Haddade, jelas merupakan suatu kesatuan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang cukup keras yang kita hadapi belakangan ini.

R. Sukardi : Menghilangkan kerisauan

Penurunan Biaya dan Perlindungan

Akibat devaluasi, pemerintah mengakui terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan baku dan bahan penolong yang masih diimpor oleh industri dalam negeri. Untuk menolong industri dalam negeri tersebut mampu menekan biaya produksi, pemerintah dalam paket kebijaksanaan 25 Oktober ini menurunkan tarif bea masuk 59 mata dagangan dari 5–30 persen menjadi 0 persen, dan terhadap 94 mata dagangan lain yang bea masuknya semula 10–40 persen diturunkan menjadi 5 persen. Keputusan penurunan bea masuk itu tercantum dalam SK Menteri Keuangan No. 915 tahun 1985. Dengan itu diharapkan bahwa biaya produksi industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku dan penolong eks impor dapat menjadi efisien, sehingga pada gilirannya dapat kompetitif dan memperkuat ekspor non migas dan membantu pemasukan devisa — yang berarti memperkuat neraca pembayaran. Kelompok komponen 94 jenis yang diturunkan bea masuknya menjadi 5% menurut Menteri Perindustrian Hartarto, untuk jangka panjang mempunyai kemungkinan dibuat di dalam negeri. Sedang kelompok komponen yang 59 jenis mendapat pembebasan sampai 0% karena untuk jangka panjang belum atau tidak akan dibuat di dalam negeri.

Sebenarnya mata dagangan tersebut merupakan bagian dari seluruhnya .06 jenis yang memperoleh keringanan bea masuk menjadi 0 sampai 5 persen. Akan tetapi sebaliknya, terdapat sejumlah mata dagangan yang justru dinaikkan bea masuknya, ada yang mencapai 60 persen, terutama yang sudah diproduksi di dalam negeri, seperti lampu TL, kipas angin dan sebagainya. Ini merupakan dimensi perlindungan bagi produksi dalam negeri.

Sebenarnya mata dagangan tersebut merupakan bagian dari seluruhnya 306 jenis yang memperoleh keringanan bea masuk menjadi 0 sampai 5 persen. Akan tetapi sebaliknya, terdapat sejumlah mata dagangan yang justru dinaikkan bea masuknya, ada yang mencapai 60 persen, terutama yang sudah diproduksi di dalam negeri, seperti lampu TL, kipas angin dan sebagainya. Ini merupakan dimensi perlindungan bagi produksi dalam negeri.

Ketua FKP R. Soekardi — yang juga adalah Ketua DPP Golkar yang membidangi masalah-masalah ekonomi dan keuangan — peninjauan prosentase bea masuk itu jelas adalah untuk kepentingan produk-produk dalam negeri yang bahan bakunya masih diimpor. Produk itu nantinya akan diekspor lagi ke luar negeri. Sebaliknya, peninjauan pajak ekspor yang juga dilakukan pemerintah, menurut R. Soekardi merupakan kebijaksanaan yang menunjang ekspor produksi dalam negeri. "Tujuannya jelas, agar ekspor Indonesia semakin kompetitif di pasaran dunia. Bahkan yang cukup positip pula, ada sementara bahan baku yang diimpor tersebut samasekali dibebaskan bea masuknya".

Ali Wardhana juga mengungkap bahwa sejumlah produksi dalam negeri kini diberi perlindungan. Diantaranya melalui kebijakan non tarif seperti kuota, importir terdaftar dan sebagainya. Dua hal ini diatur melalui SK Menperdag No. 307/1986 dan SK Menkeu No. 915/1986. Perlindungan baru itu akan diterapkan melalui sistem tarif, melalui penentuan bea masuk dan bea masuk tambahan maupun spesifik dengan tidak melalui peraturan tata niaga. Dengan cara itu, kata Ali Wardhana, umumnya akan lebih mudah memberi perlindungan, disamping lebih efektif dan lebih mudah mendorong efisiensi. Jika diperlukan, akan sangat mudah dan cepat memberikan peningkatan perlindungan, karena tak terikat kepada pelaksanaan administrasi yang rumit. "Sistim ini akan membawa dampak menguntungkan bagi harga-harga secara umum dan memungkinkan peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi sekaligus kesempatan kerja", ujarnya. Namun terhadap sejumlah mata dagangan bidang pertanian, dan beberapa mata dagangan industri otomotif dan elektronika, besi baja dan sebagainya, tetap diberi perlindungan menurut tata cara yang lama.

Di sektor penanaman modal, juga diambil serangkaian kebijaksanaan baru yang oleh Menteri UPDN/Ketua BKPM dinyatakan sebagai tindak lanjut dari Paket 6 Mei. Terdapat pengaturan-pengaturan baru dalam kebijaksanaan 25 Oktober, antara lain mengenai penyertaan saham pihak asing dalam perusahaan yang telah berdiri. Guna mendorong ekspor, diberikan kelonggaran kepada perusahaan PMA yang memerlukan tambahan modal. Pemilikan saham asingnya bisa ditingkatkan dengan syarat bahwa saham milik fihak nasionalnya tidak sampai menjadi lebih kecil dari 5%. Sementara itu penyertaan lembaga-lembaga keuangan multilateral — yang sahamnya turut dimiliki pemerintah seperti misalnya Asian Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank — dalam perusahaan-perusahaan nasional dianggap sebagai penyertaan nasional. Masih dengan tujuan mendorong ekspor non migas, perbedaan fasilitas antara PMA dengan perusahaan nasional ditiadakan. Dengan demikian PMA pun dapat ikut menikmati kredit ekspor dengan bunga 15% setahun. Sebelum ini PMA dibebani bunga 30% sedang perusahaan nasional 9%. Khusus bagi PMA yang telah membuktikan diri dalam kemampuan ekspor, dengan izin Menperdag kini dapat mengekspor langsung baik produknya sendiri-sendiri maupun hasil perusahaan lainnya.

Fasilitas SWAP

Ada pula kebijaksanaan mengenai fasilitas Swap. Menurut Soekardi, setelah devaluasi sejumlah pengusaha mengalami kerisauan karena hutang-hutang luar negeri mereka yang dilakukan sebelum devaluasi adalah dalam satuan mata uang asing. Timbul pertanyaan, bagaimana mereka akan mengembalikan hutang tersebut? ''Pemerintah telah menghilangkan kerisauan para pengusaha yang merasa bimbang itu. Pemerintah menjelaskan pihaknya akan memperlonggar fasilitas Swap,'' ujar Soekardi.

Gubernur Bank Indonesia Dr Arifin Siregar ketentuan tentang fasilitas Swap akan disempurnakan dan diperlonggar. Selama ini, Swap dibatasi oleh pagu karena adanya subsidi preminya. Sebagai akibatnya, terjadi kesulitan dalam pengalokasian pagu, sehingga banyak perusahaan PMA maupun PMDN tidak memperoleh fasilitas Swap tersebut dalam jumlah yang mereka inginkan. Swap itu sendiri adalah suatu sarana atau fasilitas bagi pemodal asing untuk mengatasi masalah sebagai akibat perubahan kurs.

Pemerintah bermaksud merangsang pemasukan modal luar negeri. Maka dikeluarkanlah ketentuan baru mengenai Swap ini. Swap dapat diselenggarakan oleh bank-bank devisa maupun lembaga keuangan non bank tanpa pembatasan pagu dan preminya mereka tetapkan sendiri. Sementara itu Bank Indonesia menyediakan fasilitas Swap ulang bagi bank-bank devisa dan lembaga non bank tersebut yang juga tidak dibatasi pagu. Namun untuk menghindarkan agar fasilitas Swap ini tidak disalahgunakan — misalnya untuk spekulasi yang tak ada hubungannya dengan penanaman modal, maka bank-bank yang melakukan Swap ulang harus mengajukan bukti kepada BI bahwa dana yang ditutup Swap ulang itu betul berasal dari pinjaman luar negeri. Penetapan premi Swap ulang BI ditentukan berdasar perkembangan dan suku bunga dalam maupun luarnegeri, supaya tetap menarik para penanam modal. Di dalam masa peralihan ini, perusahaan maupun bank yang saat ini menggunakan fasilitas Swap tetap disediakan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku sampai pinjaman luarnegeri dasar transaksi Swap bersangkutan jatuh tempo. Menurut Arifin Siregar, dengan fasilitas Swap tanpa pagu, PMA dapat memperoleh dana rupiah seperti halnya perusahaan-perusahaan nasional yang mendapat kredit bank pemerintah. Diharapkan ini menjadi daya tarik. Pengalokasian dana diatur dengan mekanisme harga tanpa premi yang disubsidi pemerintah, sehingga diharapkan akan mendorong efisiensi penggunaan dana tersebut.

Arifin Siregar : Kelonggaran swap

Soekardi menggambarkan manfaat Swap, apalagi setelah ada ketentuan baru. Menurut Soekardi, Swap merupakan suatu kemudahan bagi pengusaha. Jika berhutang ke luar negeri dengan fasilitas Sswap, dijamin bahwa kurs mata uang asingnya akan tetap sama pada waktu nantinya dikemudian hari hutang pengusaha itu jatuh tempo dan harus dikembalikan. Namun, pengusaha yang mengambil fasilitas Swap harus membayar semacam premi secara periodik kepada bank pemerintah yang mengeluarkan Swap tersebut. Sekarang, kata Soekardi lebih lanjut, Swap itu lebih diperlonggar lagi. Misalnya, bila pengusaha punya hutang luar negeri dalam jumlah tertentu, jumlah itu bisa diajukan keseluruhan guna mendapat fasilitas Swap. Bahkan penentuan preminya dapat dilakukan melalui jalan tawar menawar. Sedangkan sebelum devaluasi — atau sebelum 25 Oktober — fasilitas Swap hanya dikeluarkan untuk tingkat hutang tertentu. Dalam artian, tak seluruh hutang luar negeri si pengusaha dapat memperoleh fasilitas Swap. ''Pemerintah kini tidak membatasi pagu'', ujarnya, ''berapapun pengusaha memajukan permintaan fasilitas Swap, akan dilayani''.

Salah satu efek pelonggaran fasilitas Swap yang diharapkan, seperti kata Arifin Siregar, adalah bahwa pemerintah dapat mengurangi pencetakan atau penciptaan uang melalui Bank Sentral. Berarti akan mengurangi dampak inflatoar, kendati di lain pihak jumlah hutang dalam rangka Swap tak dibatasi dengan pagu lagi.

Jawaban Yang Memadai

Kepada Media Karya Ketua Komisi VI DPR-RI, Ir Sunaryo Haddade mengatakan, materi-materi kebijaksanaan yang telah ditempuh pemerintah itu sudah cukup merupakan jawaban bagi adanya keprihatinan di bidang ekonomi saat ini. Dengan kata lain, kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut memang diperlukan dalam menghadapi tantangan seperti diatas. Memang, dalam waktu yang relatif singkat, masih belum kelihatan hasilnya. Tapi dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan Pemerintah yang arahnya demi memperbaiki posisi ekonomi kita, jelas menunjukkan pemerintah cukup tanggap dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini.

Sasaran yang akan dicapai terutama adalah meningkatkan pendapatan dari sektor non migas. Realita yang ada di tanah air mendukung ke arah itu, karena potensi sumber daya alam Indonesia cukup melimpah. ''Oleh karena itu, sasaran tersebut bukan impian bagi kita. Dalam arti suatu ketika akan menjadi kenyataan!'' tegasnya.

Yang penting potensi yang dipunyai tanah air ini, menurutnya, bagaimana diusahakan supaya bisa menjadi potensi yang riel. Ia bahkan menunjuk, komoditi kayu serta tekstil saat ini jelas bisa kompetitif di luar negeri.

R. Soekardi sementara itu mengungkap bahwa akhir-akhir ini Departemen Perdagangan juga telah melakukan perbaikan-perbaikan tata niaga, antara lain impor, ekspor serta menurunkan bea masuk, pembebasan keagenan, dan sebagainya. Ini sangat penting,'' katanya, karena devaluasi baru berhasil kalau daya saing barang-barang kita di pasar luar negeri meningkat. ''Peningkatan itu tidak hanya ditopang dengan adanya perbedaan kurs setelah devaluasi, tapi juga harus ada keringanan dan kemudahan lainnya serta perbaikan tata niaga baik di dalam negeri maupun untuk kepentingan ekspor ke luar negeri!''

Soekardi mengatakan, yang perlu pula diperhatikan adalah masalah approved trader atau masalah monopoli. Ia bisa memahami atau mengerti adanya monopoli beberapa komoditi perdagangan saat ini. Mungkin hal ini untuk mencegah persaingan yang tidak sehat serta mempercepat pengiriman barang dan masih ada lain-lainnya.

Kita memang tidak perlu a priori menolak approved trader, namun yang penting, apapun barang-barang keperluan produksi yang masih diimpor, jika melalui approved trader, hendaknya harga jualnya tidak sedemikian tinggi yang nantinya mengakibatkan semakin tingginya biaya produksi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Dengan kata lain, dengan adanya approved trader, di-

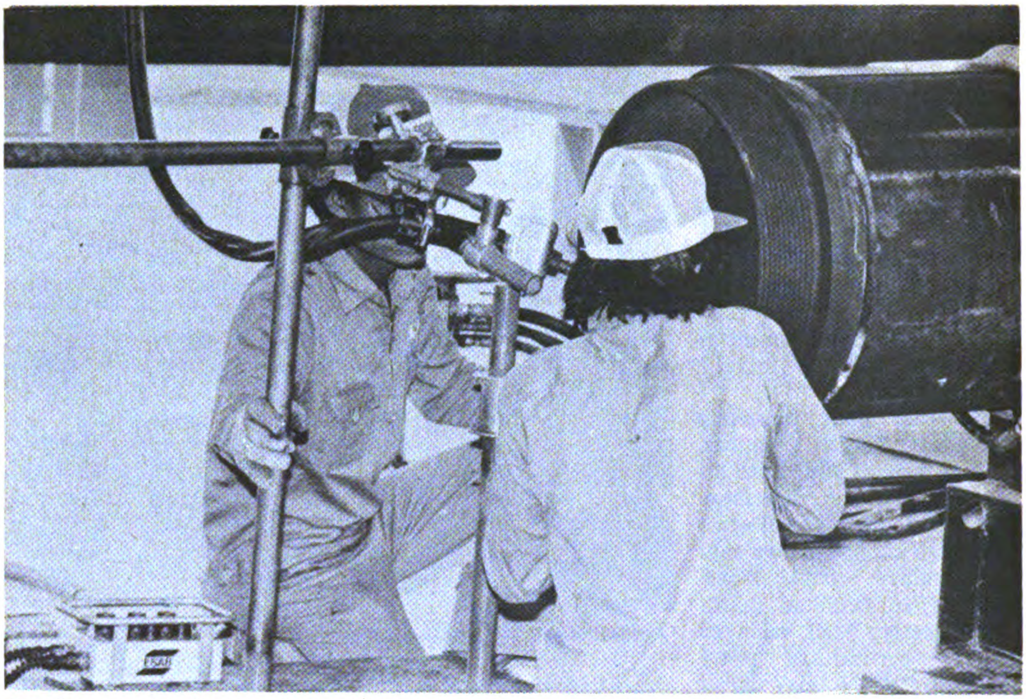

Bagaimana menjadi potensi yang riel

harapkan, justru memberi kemudahan-kemudahan yang lebih luas bagi para industriawan. Analog dengan rencana membentuk trading house, hendaknya badan itu justru akan memberi kemudahan dan memperlancar perdagangan Indonesia di luar negeri," jangan justru mempersulit."

Soekardi menambahkan, seperti yang sering dibicarakan orang mengenai monopoli impor keperluan-keperluan besi baja untuk industri mobil, katanya masih ada yang lewat approved trader. Padahal, industri mobil bisa langsung impor dari luar. Masalahnya, menurut Soekardi, mungkin, jika industri mobil masing-masing impor sendiri, impornya terpecah-pecah dalam jumlah kecil, sehingga harganya mahal. Namun jika lewat approved trader, harganya akan lebih murah, karena membeli sekaligus dengan jumlah yang banyak. Namun ia mengingatkan, "jika memang pembeliannya murah, menjualnya di dalam negeri juga harus murah". Jangan sampai harga itu justru lebih mahal dibanding jika pengusaha industri membeli sendiri di luar negeri. "Teoritis," katanya, "harganya harus lebih murah dibanding jika industri mobil mengimpor bahan baku sendiri!"

Bagaimana approved trader mencari untung? Soekardi menjawab, diumpamakan distributor mobil, keuntungannya diambil dari discount dealer dari pabrik mobil. "Berarti si approved trader mengambil keuntungan dari discount yang diberikan oleh eksportir bahan baku di luar negeri tersebut!" Ia menegaskan, jika memang atas pertimbangan tertentu approved trader itu masih diperlukan, silahkan jalan! Tetapi jangan sampai merugikan industri yang membeli bahan baku dari approved trader.

Supaya semua peraturan-peraturan yang baik itu bisa berhasil pelaksanaannya, harus dibarengi dengan kontrol yang baik, effektivitas serta produktivitas kerja aparatur di segala lapisan. Untuk itu perlu adanya audit manajemen. Sekarang ini masih ada keluhan dari pengusaha, mengenai lambatnya pengurusan izin bagi mereka. Menurut Soekardi, masalahnya bagi pengusaha-pengusaha itu bukan beaya pengurusan yang katanya perlu tambahan 1 persen, tapi yang penting cepatnya izin itu dikeluarkan. "Kecepatan dan ketepatan waktu bagi pengusaha memang sangat penting!" ungkapnya.

Penanaman Modal Asing

Berbicara mengenai PMA, dikatakan Soekardi, masalah itu harus benar-benar tunduk pada UU-nya sendiri. Kalau UU-nya saat ini dianggap masih kurang cocok, tentunya bisa dirubah kembali. Namun harus diakui, kita tidak boleh hanya berkaca pada wajah ekonomi nasional, tetapi harus pula membandingkan dengan negara-negara tetangga, bagaimana mereka menciptakan iklim bagi fasilitas PMA itu. Kalau ternyata di negara tetangga iklim guna masuknya PMA lebih baik, jelas PMA akan mengalir ke sana. Untuk itu kita harus bersaing dalam menciptakan iklim bagi PMA.

Soekardi mengungkapkan, kelebihan Indonesia adalah stabilitas nasional yang benar-benar mantap. "Dan ini sudah diketahui oleh seantero dunia". Namun, nampaknya bagi PMA, satu faktor itu saja belum cukup, harus ditunjang dengan faktor lainnya yaitu kemudahan-kemudahan dalam berbagai bidang, misalnya, kemudahan mendapatkan

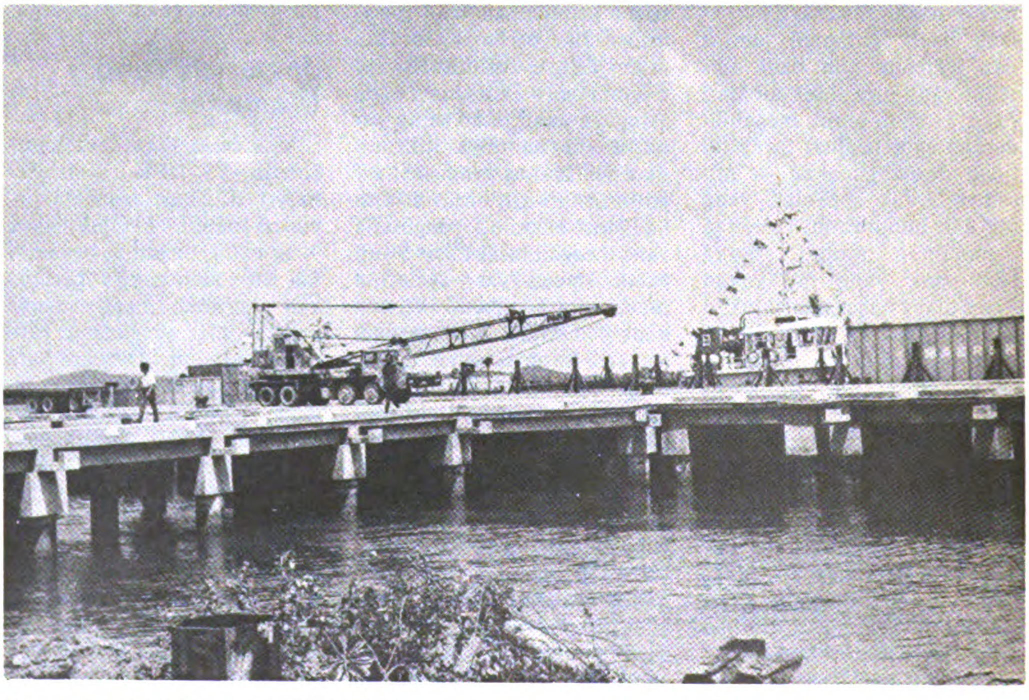

Kecepatan dan ketepatan waktu penting

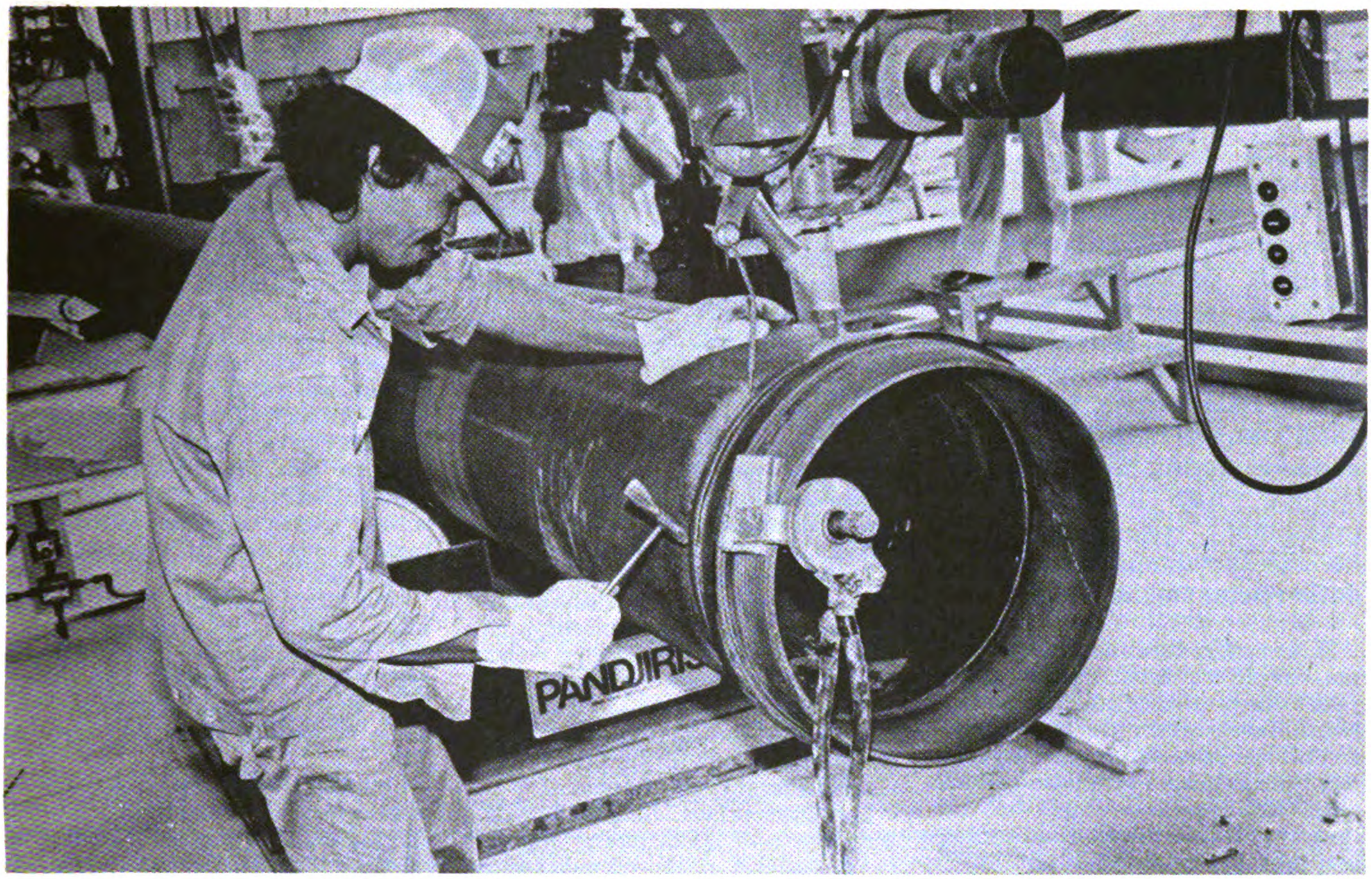

Optimis berhasil

tanah, hak tanah yang cukup lama jika PMA ingin mendirikan perkebunan serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap jika mereka ingin mendirikan industri, misalnya komunikasi, air, dan masih banyak lainnya.

Yang sering ditanyakan oleh pihak PMA, juga menyangkut pengawasan lalu lintas valuta asing (foreign exchange controlled). Semakin ketat pengawasan terhadap lalulintas valuta asing, PMA jelas akan lebih berpikir dua atau tiga kali untuk menanamkan modal. Karena mereka menginginkan supaya lebih bebas memasukkan modalnya ke Indonesia.

Bagi kita, kata Soekardi, yang penting mereka bisa berusaha dengan lancar di tanah air yang berarti pula memperluas lapangan kerja serta ikut membantu pertumbuhan ekonomi serta pembangunan Indonesia dalam arti yang luas. Dan yang juga penting, mereka jangan sampai membawa pengaruh politik ke Indonesia.

Mengenai multi national corporations, Soekardi berpendapat, kita tidak perlu apriori, karena di seluruh dunia ada MNC. Masalahnya, bagaimana mengawasi MNC supaya tidak keluar dari rel yang ditentukan. "Hal ini tentunya kembali, bagaimana kita meningkatkan kemampuan untuk audit manajemen!"

Monitoring Dan Pengawasan

Telah keluar sejumlah tindak lanjut 25 Oktober. Bagaimana selanjutnya? Dalam hal ini, Ir. Sunaryo menekankan masalah monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta kelancaran kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan pemerintah itu. Ia mengutip ucapan Ketua BKPM yang dalam raker dengan Komisi VI DPR-RI mengatakan, hambatan terhadap kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah memang masih ada, antara lain mental dari sementara aparat yang masih kurang mendukung lancarnya pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah tersebut.

Sedangkan bagi DPR, cara memonitornya antara lain lewat raker-raker dan dengar pendapat. Pada waktunya Komisi VI akan mengundang asosiasi-asosiasi industri guna mengetahui hasil dari kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, dalam waktu satu atau dua bulan jelas pihak asosiasi sendiri belum bisa memberikan laporan mengenai dampak kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang telah dikeluarkan.

Namun ada juga hasil yang cepat bisa dimonitor seperti di bidang tekstil, yaitu masalah CBTI dimana sebelum adanya devaluasi terjadi gejolak-gejolak di dalamnya. Namun dengan adanya devaluasi, gejolak-gejolak itu justru menghilang. "Inilah antara lain hasil yang bisa cepat dimonitor!" tambahnya.

Sedangkan di sektor industri mobil, menurut Sunaryo, telah ada keringanan bea masuk bagi bahan baku tertentu. Oleh sebab itu, ia mengharapkan, jika tokh ada kenaikan harga mobil, tentunya kenaikannya jangan terlalu tinggi. Ia mendengar merek mobil tertentu akan menaikkan harganya 30 persen di bulan Januari mendatang. "Apakah ini tidak bisa ditinjau kembali?"

Ia optimis terhadap berhasilnya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah baik sebelum devaluasi maupun setelah adanya devaluasi. Hal ini berdasar aspirasi yang beredar di kalangan industriawan sendiri, dan sebenarnya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan Pemerintah itu, sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditunggu-tunggu.

Disamping pengawasan, dan monitoring yang penting pula adalah keterpaduan dalam pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Ia bisa memahami hampir setiap departemen yang ada kaitannya dengan bidang ekonomi dan industri saat ini berlomba-lomba mengeluarkan peraturan untuk mensukseskan tindak lanjut devaluasi. Namun, Sunaryo mengharapkan, supaya perturan-peraturan yang dikeluarkan masing-masing departemen dilaksanakan secara terpadu dan jangan sampai bersifat parsial. ☐ **Mahmudi Romli/ Subandrio/ SK/ Rum Aly**

Kriminalitas Di Kalangan Remaja

Tindak kejahatan di kalangan remaja cenderung meningkat baik dalam kadar maupun jumlahnya. Nyawa manusia yang begitu bernilai, bisa melayang hanya karena alasan sepele. Sayangnya para pelaku usia remaja, kelompok yang menjadi harapan bangsa, semakin sering terlibat di dalamnya. Ada konsep peran maksimal "tritunggal" yang keren bila diucapkan, tapi sulit dalam pelaksanaannya.

Setiap hari, di koran-koran ibukota cerita tentang kejahatan menjadi sajian yang menarik. Sekelompok remaja di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, membunuh penjual bakso dorongan, hanya karena ingin merampas uang jajan. Atau di sebuah dusun di Jawa Tengah, seorang anak usia SD memperkosa 11 adik kelasnya hanya dalam kurun tiga bulan.

Dan remaja yang mencuri, merampok, menipu, mengeroyok, membajak dan yang mencandui narkotika semakin membosankan para orangtua yang putus asa, tapi mencemaskan mereka yang masih memiliki rasa tanggungjawab.

Konsep remaja dalam laporan ini dipergunakan angka kompromi, yaitu kelompok yang berusia di bawah 30 tahun. Dalam kelompok ini masih dilakukan penggolongan kasar, remaja usia sekolah dan remaja purna sekolah dan kelompok Balita (yang berusia di bawah 5 tahun).

Dan bila lingkup pendidikan tinggi masuk hitungan, maka remaja dalam laporan kali ini berarti kelompok yang tergolong dalam usia sekolah. Memang ada remaja putus sekolah, tapi mereka ini tidak diperlakukan sebagai kelompok tersendiri, karena seharusnya masuk dalam golongan usia sekolah, kendati dalam tindak kejahatan, mereka punya pengaruh dan karakter tersendiri.

Tritunggal

Mencari jawab dan sebab di balik kriminalitas remaja, Prof. Dr. Cony Semiawan, Rektor IKIP Jakarta menunjuk tiga lingkungan yaitu masyarakat, rumahtangga dan sekolah sebagai faktor dominan. Dia menyebut ketiga lingkungan ini sebagai tritunggal yang saling mempengaruhi dan isi-mengisi.

Sedangkan Hakim Agung Bismar Siregar, kendati mengaku betapa vitalnya tiga sokoguru yang membentuk perilaku remaja, namun melihat agama sebagai palingan yang jitu. "Saya mengakui kejahatan di kalangan remaja memang meningkat. Tapi sebagai seorang beriman, saya mencari dan menemukan jawabannya dalam ayat-ayat kitab suci Al Qur'an," katanya yakin.

Sementara 3 orang guru sekolah menengah atas masing-masing Tachronie Ramlan, Direktur STM Penerbangan, Drs. Joelious Joesoef, Direktur SMA 70 dan Drs. Soebroto, Direktur SMA 6, — yang semuanya berada di Jakarta —, tritunggal yang disebut Cony Semiawan belum menemukan harmoni dalam interaksinya membentuk perangai remaja.

Dalam keadaan normal, menurut Cony, kriminalitas remaja disebabkan oleh lingkungan yang tidak memberinya panutan dalam masa transisi. Bila rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat tidak membentengi remaja dengan sikap moral, etika dan perilaku terpuji, maka pengaruh negatif dari luar menembus benteng pertahanan remaja itu sendiri.

Kemungkinan lain, kriminalitas remaja bersumber pada faktor genetis. Menurut teori, demikian Cony, seorang remaja yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan kriminal, mempunyai bawaan kuat untuk menjelma menjadi seorang kriminal. "Dan apabila lingkungan tidak mawas dan tidak sabar, maka perangai bawaan itu akan mudah menjelma jadi kepribadian nyata," katanya.

Cony Semiawan

Tanpa mengabaikan peranan sekolah dan masyarakat, Bismar nampaknya lebih mempercayai fungsi pendidikan keluarga sebagai benteng terampuh membentuk kepribadian dan penangkal mujarab selera kriminal. "Jangan salahkan siapa-siapa bila anak melakukan kejahatan. Bila rajin membaca ayat-ayat Al Qur'an, maka penyebab itu mudah dilacak, yaitu dalam diri kita masing-masing," ujarnya. "Kalau menghadapi kriminalitas remaja sikap masyarakat dan orangtua hanya menyesali, tidak akan memecahkan masalah."

Bila kriminalitas remaja itu ibarat penyakit, maka menurutnya penyebab terutama "ada dalam diri kita masing-masing." Seorang suami seharusnya bertanya, "apakah saya telah berfungsi sebagai panutan baik terhadap isteri dan anak-anak?"

Kedudukan seseorang entah sebagai suami, entah sebagai tokoh yang mempunyai jabatan formal atau tidak formal, tidak terlepas dari sorotan masyarakat. "Jadi kuncinya adalah bagaimana setiap orang membaca dan memahami diri sendiri."

Kita masyarakat yang beragama yang sarat dengan nilai-nilai terpuji. Masyarakat kita juga memberikan sejumlah perangkat kultur dan etika yang sangat terpuji. "Kita adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan," kata Bismar sambil mengungkapkan bahwa kultur religi seperti ini jarang ditemui dalam lingkungan masyarakat lain, apalagi di negara-negara yang telah maju.

Masyarakat dan keluarga, menjadi sorotan pula para pendidik. Joelious Joesoef, menangkis bila dituding bahwa sekolah sekarang tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pembentuk perilaku. "Lembaga perilaku tetap di rumah, dengan orangtua sebagai pemeran utama," katanya.

Bukan titipan

Soebroto bahkan menuding orangtua sekarang menganggap sekolah sebagai lembaga yang mengambilalih semua fungsi dan peranan pendidikan terhadap anak. Metropolitan yang penuh dengan kesibukan, "membuat hubungan anak-ayah-dan ibu berlangsung tanpa hawa kemesraan," kata Soebroto.

Dia mengatakan, sekolah bukan tempat titipan anak. Banyak orangtua yang merasa bila anaknya masuk ke sekolah, maka terlepaslah seluruh tanggungjawab pendidikan rumah. Selera konsumerisme dan keharusan mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah yang menjadi tuntutan sebuah masyarakat yang sedang membangun, menyebabkan orangtua menyerahkan anak mereka ke lembaga pendidikan formal.

Sayangnya, para orangtua yang sukses dewasa ini, lebih memperhatikan mobil dan rumah mewah ketimbang anaknya di sekolah. Soebroto memberi contoh, orangtua yang mempunyai mobil, bila diparkir di tempat ramai, akan menengoknya setiap satu jam, takut kalau dicuri orang-orang. Atau menyewa tukang parkir secara khusus untuk menjaga mobilnya.

"Namun anak yang begitu bernilai, setelah masuk sekolah, ada orangtua yang tidak pernah menengoknya," kata Soebroto yang merasa tidak masuk akal dengan gejala ini.

Sedangkan Joelious Joesoef membantah keras bila sekolah sekarang dianggap kurang berfungsi membentuk moral dan perilaku, karena terbuai dengan missi mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditafsirkan sebagai penjejalan anak didik dengan ilmu; pengetahuan.

"Tidak benar, bila sekolah telah berubah fungsi ke ekstrim penjejalan sains semata. Sekolah sekarang bahkan tambah kerjaan dengan pelajaran modal dan agama, yang seharusnya tanggungjawab rumah," ujarnya. Pengalihan tidak sengaja ini dilihatnya sebagai gejala yang merisaukan.

Namun Tachronie Ramlan coba memahami gejala ini dari sisi penalaran praktis ekonomis yang melanda masyarakat moderen. Para orang tua merasa bahwa mereka telah membayar uang sekolah dan oleh karena itu, sekolah harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak mereka. "Penyaluran kasih sayang dalam bentuk membayar segala macam kebutuhan anak dengan uang, tidak menjawab masalah kepribadian," katanya. "Tapi sekolah mau tidak mau harus melaksanakannya, ketimbang tidak sama sekali. Sebab bila pendidikan di rumah telah terabaikan oleh alasan kesibukan, dan bila sekolah juga tidak menghiraukan kebutuhan pembentukan watak dan kepribadian, maka akan jadi apa remaja kita?" tanya Ramlan.

Bismar Siregar

Anak yang lepas di sekolah dan tak terkendali di rumah, menurut Cony akan mencari kegiatan supaya dia menjadi pusat perhatian. Gejala psikologis seperti ini erat berkaitan dengan gejolak remaja yang progresif. "Mereka ingin maju. Mereka ingin diperhatikan dan mereka juga butuh kasih sayang."

Lantas, apakah masyarakat kita sekarang tidak mesra lagi terhadap remaja? "Jangan dalam serba situasi dan perilaku timpang remaja, mereka dipersalahkan," pinta Joelioes Joesoef. Remaja adalah produk lingkungan. Dia berkembang dan bertumbuh sesuai dengan irama dan kualitas masyarakat yang menempanya.

Masyarakat kita menurut Cony secara kasar sedang bergejolak membentuk kemapanan diri. Antara kota yang terus berbenah dan desa yang ngotot mengejar, terjadi interaksi. Dia saling mengisi se-

Guru Dan Kisah Dua Tetangga

Siapa yang tidak kenal nama SMA VI dan SMA 70? Dua sekolah menengah atas yang bertetangga di bilangan Bulungan Jakarta ini, dulu terkenal sebagai biang perkelahian. Mereka bukan saja menyimpan dendam dan rivalitas antara keduanya, tapi juga ancaman bagi sekolah lain di bilangan Kebayoran. Itu dulu!

Sekarang citra dua tetangga yang hanya dipisahkan tembok itu mulai perlahan mengubah citra dari "jagoan perkelahian ke tauladan prestasi." "Kami ingin menciptakan sekolah sebagai learning situation," kata Soebroto, Direktur SMA VI.

Sedangkan Joelioes Joesoef yang memimpin SMA 70 dengan bangga menantang, "siapa yang sekarang ini berani menyebut sekolah yang saya pimpin sebagai tukang berkelahi?" Tantangan ini sebenarnya ingin diungkapkannya dengan perkataan lain bahwa SMA 70 sekarang tidak lagi SMA 70 lima tahun lalu yang beringas, dan penuh dengan kenakalan tak terkendali.

Dulu bila perkelahian antarpelajar terjadi di bilangan Kebayoran, 90 persen kemungkinan SMA VI dan SMA 70 terlibat di dalamnya. Tapi sekarang, cerita tentang perkelahian antara kedua "musuh bebuyutan" ini makin jarang terdengar.

Siapa yang berjasa dalam membalikkan perilaku tersebut? "Tentu saja semua pihak," ujar Joelioes dan Soebroto. Keduanya tidak setuju bila perkelahian dan kekerasan yang pernah melekat sebagai citra-citra pada kedua SMA ini, disebut sebagai gejala kriminalitas remaja. Mereka lebih senang disebut sebagai kenakalan remaja, atau delikuensi anak, yang sebenarnya gejala umum, bukan monopoli SMA VI dan 70. Hanya frekuensi yang berbeda antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain.

Perkelahian yang dulu selalu terjadi antara murid kedua sekolah ini setiap kali bebas bertemu di jalan, bukan karena mereka sudah terpengaruh oleh watak membunuh dan merusak. Perkelahian antara kedua murid sekolah yang bertetangga ini justru karena alasan sepele dan sederhana. Ya karena kesenggol di warung yang sebenarnya tidak disengaja tapi ditafsir sebagai tantangan adu otot, ya karena uang jajan dan juga karena cemburu teman puteri diganggu atau dilirik kurang senonoh.

Perkelahian adalah wujud dominan dari delikuensi remaja di kedua sekolah ini. Sedangkan kenakalan yang menjurus ke tindak kejahatan seperti pemerkosaan, perampokan walaupun ada tapi sangat jarang. Sementara kecanduan narkotika, masih mengkhawatirkan.

Lantas mengapa sekarang ini cerita perkelahian di SMA VI dan 70 bisa dicegah? Menurut Soebroto, selama murid masih berada di dalam tembok sekolah, "kami bisa menjamin perkelahian tidak terjadi. Atau kalau terjadi, bisa diatasi secara cepat." Dan Joelioes menambahkan, "bila perkelahian itu terjadi di luar sekolah seharusnya bukan sekolah yang dipersalahkan tapi tanggung jawab masyarakat terutama aparat kepolisian.

Tapi karena nama SMA 70 dan IV begitu melekat dengan tindakan perkelahian, maka Joelioes pernah dipanggil malam ke lokasi kejadian, karena ada seorang muridnya terlibat perkelahian. "Sebenarnya ingin saya tolak, tapi karena demi nama SMA 70, terpaksa panggilan polisi dipenuhi juga," katanya.

Orang luar

Perkelahian antara kedua SMA bertetangga ini yang dulu pernah menjadi pemandangan mengasyikkan di Blok M hampir setiap minggu, juga dipengaruhi atau dihasut oleh pihak luar. Penegasan polisi dan aparat keamanan bahwa ada pihak tertentu yang menggunakan anak SMA untuk kepentingan tertentu, bukan hanya silat lidah untuk mencari pembenaran diri, tapi ada. Soebroto bercerita bagaimana sebuah kasus perkelahian yang ternyata didalangi oleh orang luar yang menyamar dengan menggunakan seragam SMA VI.

Selain itu lokasi kedua SMA ini yang berdempet dengan pusat keramaian, Blok kaligus saling mempengaruhi. Di tengah pergulatan itu, remaja mencari pernyataan diri.

Sejalan dengan Joesoef, yang tidak sependapat bila remaja terus dipersalahkan, Cony menganjurkan, "untuk mengetahui secara persis kenakalan atau kriminalitas remaja, mereka perlu didekati apa adanya." Oleh karena itu dia berpendirian bahwa kriminalitas kalangan remaja adalah ekses dari suatu bangsa yang sedang dalam masa transisi mencari kemapanan di tengah pergaulan dan pengaruh antar bangsa.

Pendapat serupa juga terlontar dari Bismar Siregar. Remaja terlalu polos untuk dipersalahkan. "Kalau remaja nakal atau melakukan tindak kejahatan, saya lebih cenderung mempersalahkan diri sendiri, ya orangtua, ya masyarakat." Remaja adalah kelompok bebas nilai. "Dia tidak perlu dipersalahkan kalau berperilaku menyimpang, tapi mendapat pahala kalau berbuat baik."

"Jadi jangan pakai standar orangtua untuk menilai remaja," kata Bismar Siregar.

Empat lembaga

Dalam tritunggal yang diistilahkan Cony, dia menambahkan satu fungsi lagi yaitu, kepolisian. Jadi sebenarnya ada empat pihak yang patut bertanggungjawab terhadap kriminalitas remaja, yaitu, sekolah, rumah tangga (orangtua) dan masyarakat serta kepolisian.

Keempat elemen ini berfungsi edukatif, persuasif (preventif) dan represif. Kepolisian memang lebih banyak berperanan dalam tindak represif. Tapi tidak boleh melupakan aspek edukatif dan preventif. Masyarakat dan orangtua menjalankan ketiga-tiganya. Demikian pula sekolah. "Jadi untuk mencegah kriminalitas di kalangan remaja, harus ada keharmonisan hubungan dan peranan mereka," kata tokoh pendidik ini.

Koordinasi yang baik jangan sampai diletakkan pada sistem yang formal saja. "Untuk aspek edukatif, sangat diperlukan suasana informal," ujarnya. Suasana seperti ini hanya tumbuh dalam masyarakat dan keluarga yang terbiasa oleh karakter demokrasi. Orangtua yang serba tahu segala dan mendekati anak dengan ancaman dan pecutan, "jelas tidak mendidik."

Si anak akan mencari dan meraba suasana akrab dan penuh kasih sayang di luar rumah. Dan bila hal ini yang terjadi, menurut pengamatan Soebroto, "si anak akan terjerumus pada pengaruh luar dari teman sebaya atau pengaruh dominan lainnya yang bisa memaksanya melakukan tindakan kriminal."

Pengalamannya sebagai guru mengungkap satu fakta menarik, bahwa anak usia sekolah yang melakukan kenakalan berbau kriminal, umumnya berasal dari orangtua yang terlalu sibuk, yang tidak memiliki lagi waktu berbincang dan bercanda dengan anak-anaknya. Suasana di rumah yang seharusnya informal, menjelma menjadi situasi serba formal. "Inilah salah satu sebab mengapa anak merasa terasing di rumahnya sendiri dan mencari keakraban dengan narkotik, perkelahian dan bahkan perampokan serta pembunuhan."

Masyarakat adalah cermin raksasa tempat remaja berkaca. Masyarakat yang cenderung konsumeristis, jangan mengharapkan akan melahirkan remaja militan. Atau menggunakan pepatah lama yang diungkapkan Bismar, "bila guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari."

Menurut pengamatan hakim agung ini, banyak sekali produk dan gaya selera masyarakat kita yang tidak mendidik. Film-film kita ada yang mengangkat cerita utama dengan seorang pemeran wa-

---

M. Untuk menghindari ini diinstruksikan agar segera setelah habis jam sekolah, anak-anak tidak boleh bergerombol di terminal, tapi secepatnya pulang ke rumah masing-masing.

Sementara kerjasama yang makin baik antara orangtua murid dengan sekolah berperan positif dalam mengurangi kenakalan di kedua sekolah ini. Setiap bulan ada forum orangtua murid dan guru di sekolah.

Kemudian peraturan yang ketat dengan ancaman keras, di kedua SMA ini yang mengeluarkan tanpa ampun mereka yang terlibat perkelahian, juga membantu membangun citra mereka. Baru-baru ini sekitar 13 orang murid disana dikeluarkan karena membiangi perkelahian. "Dengan berbagai tindakan keras dan disiplin terhadap peraturan, insya Allah SMA kami tidak lagi seperti dulu dikesankan orang," ujar Joelioes.

Dan di atas semuanya ini, masyarakat perlu mengetahui bahwa kenakalan, tidak menjadi watak dominan remaja-remaja sekolah kita. Cerita tentang kebrutalan mereka memang ada, tapi remaja yang baik sangat banyak. Di kedua sekolah ini, mereka yang nakal tidak sampai 1 persen, menurut pengakuan Joelioes dan Soebroto. Jadi mereka tidak menjadi kekuatan dominan. "Saya berani jamin, 99 persen murid sekolah kami adalah anak-anak yang baik dan berprestasi," ujar Soebroto. Terbukti, SMA VI dan 70 masih merupakan sekolah favorit di Jakarta. Banyak lulusannya yang berhasil lolos seleksi perguruan tinggi favorit yang cukup sulit dewasa ini.

Jadi masih terlalu banyak remaja kita yang baik. Tuduhan seolah remaja sekolah dewasa ini brengsek dan tidak tahu diri, adalah tudingan tidak bijaksana," ujar Joelioes.

Kenakalan adalah ekspresi mereka dalam mencari aktualisasi diri. Tinggal sekarang bagaimana orangtua, masyarakat dan sekolah menyalurkannya secara tepat. Joelioes bercerita bagaimana sehabis pengumuman ujian sekolah dia takut setengah mati ketika serombongan anak muridnya mengundangnya hadir di lapangan terbuka untuk diadili. Walaupun berat hati, terpaksa dia "mempertaruhkan" nyawa untuk menghadiri undangan tersebut. "Saya pikir akan dikeroyok, tau-taunya digendong ramai-ramai untuk disiram air dari pipa karet mobil pemadam kebakaran," kenangnya geli bercampur bangga.

Atau bagaimana cerita Ramlan yang terpaksa mendatangi rumah muridnya yang tidak lulus untuk memberi pengertian kepadanya walaupun diancam akan dibunuh segala.

Tauladan guru

Karena sekolah sekarang menjadi lembaga formal yang dibayar untuk mendidik anak dalam segala hal, — satu kecenderungan yang memprihatinkan —, maka peranan guru menjadi sangat penting. Guru dengan demikian harus berfungsi serba sempurna sebagai pendidik, teman dan bahkan orangtua.

Disini sebenarnya tauladan seorang guru menjadi sorotan. Masyarakat memang telah bergeser ke arah yang keliru dengan menyerahkan semua fungsi pendidikan kepada guru, hanya karena "telah membayar mahal untuk itu."

Mau tidak mau, guru walaupun semakin berat harus menerima peran generalis ini. Joelioes maupun Soebroto mengaku betapa berat menjadi guru untuk diteladani. Dengan segala kekurangannya guru berusaha memenuhi harapan dan tuntutan itu.

Menurut Joelioes guru-guru di SMA 70 diwajibkan untuk berdisiplin. Bila murid diminta untuk datang jam delapan pagi, jangan guru datang jam sembilan. Guru juga diwajibkan tidak merokok di depan kelas, dan harus menerima setiap keluhan muridnya secara bijaksana. Bila guru tidak menjadi tauladan bagi muridnya, maka pepatah yang diungkap Bismar Siregar bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari terwujud.

Pengakuan Cony

Kekurangan guru sebagai pemberi tauladan, diakui Cony Semiawan secara terbuka. Namun tidak berarti guru sekarang tidak ada lagi yang patut dicontohi.

Masyarakat dalam menilai guru, cenderung membandingkan keadaan dan kualitas pendidik di jaman dulu dan sekarang. Kecenderungan ini tidak selamanya salah tapi tidak semuanya benar. Salah bila pembandingan itu terlalu mengada-ada. Dan benar jika kita mengaitkan pada kebutuhan kuantitas maupun kualitas guru.

nita yang bersuamikan ular. Surat-surat kabar memuat headline peristiwa perkosaan dan perampokan serta pembunuhan lengkap dengan foto-foto yang menggelitik.

Lalu di dalam bis, individualistis penumpang terasa mencekam. Orang sudah tidak mau tahu lagi apa yang terjadi dengan orang lain, asal dia sendiri tidak diganggu. Seorang pencopet misalnya bisa bebas menggerayangi penumpang, tanpa ada yang mau berteriak atau melawan kendati menyaksikannya. "Masyarakat sebenarnya menciptakan peluang untuk menimbulkan diktator minoritas dengan sikap seperti ini," kata Bismar.

Sedangkan polisi, selain mengeluh karena jumlah personil sudah tidak mengimbangi lagi jumlah warga yang harus dilindungi, juga masih memberi peluang terjadinya kriminalitas. Praktek seorang penjahat atau pelaku kejahatan bisa bebas tanpa tersentuh asal pintar-pintar main dengan polisi, kendati selalu dibantah, tetap menjadi perbincangan dalam masyarakat.

Soebroto menunjuk contoh, bagaimana sejumlah murid SMA VI yang dikeluarkan karena terlibat perkelahian dan dimasukkan ke tahanan, bisa dikeluarkan tanpa proses apa-apa oleh polisi, setelah "berunding" dengan orangtua murid bersangkutan. Oleh karena itu dia meminta khususnya kepada aparat kepolisian agar "antara hukuman dan penghargaan harus dijalankan secara tertib dan konsisten untuk menumbuhkan suasana taat hukum".

Tapi terlepas dari kelemahan aparat kepolisian, baik Soebroto maupun Joelioes dan Ramlan, kenakalan murid-murid sekolah di tiga "biang perkelahian" ini menyurut pada tahun-tahun terakhir karena kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian."

Berbicara tentang masyarakat yang mendidik, banyak contoh bisa dituangkan. Kalau Bismar menunjuk bintang film bersuamikan ular sebabai plot yang tidak kena dengan budaya Pancasila yang menurutnya harus menjadi perwujudan iman, Cony menunjuk serial film TV Losmen sebagai contoh pendidikan yang baik. "Film ini enak ditonton dan mengandung aspek pendidikan, karena disenangi oleh semua lapisan masyarakat," katanya sambil mencela film anak-anak Si Unyil yang dinilainya kurang mendidik karena terlalu menggurui dan sok pintar.

Kebiasaan mencium

Menuding masyarakat dan aparat kepolisian serta sekolah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kriminalitas remaja, agaknya tidak bijaksana bila tidak mengungkit peranan orangtua. Bagaimana pun juga, masyarakat, keluarga dan sekolah harus berinteraksi harmonis. Tapi menurut Cony, masyarakat yang harmonis tetap akan menjadi utopia, bila tidak didukung oleh keluarga yang harmonis.

Cerita tentang hubungan dalam rumahtangga antara suami-isteri dan anak yang semakin digerogoti oleh kesibukan masing-masing, sudah menjadi pengetahuan umum. Berpegang pada keyakinannya pada ayat Al Qur'an, Bismar mempraktekkan keharmonisan itu dengan caranya sendiri. "Kami selalu bersembahyang bersama menjelang tidur."

Cony misalnya membiarkan anaknya berkomentar tentang cara dan warna pakaian yang dipakainya bila mereka duduk makan bersama penuh suasana keakraban dan dialog hangat. Joelioes, mempraktekkan suatu doktrin, "bila anda harus berterimakasih dan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan pertama-tama. Sebelum setiap orang berangkat dengan kesibukan masing-masing, mereka membiasakan diri untuk sembahyang bersama."

Kalau dulu profesionalisasi guru begitu dijaga dan dihormati, karena memang dulu guru berasal dari keluarga priyayi dengan tata nilai begitu ketat, dan apalagi jumlah mereka sangat sedikit.

Sekarang yang menjadi mahasiswa IKIP berasal dari segala macam lapisan masyarakat. Ada anak petani, ada anak pegawai negeri sampai anak Jenderal dan diplomat, sampai anak tukang sapi. Ada yang berasal dari Irian dan ada pula yang berasal dari Aceh. Setiap kelompok ini meminati guru dengan latar belakang tata nilai dan kultur yang berbeda.

Maka jadilah guru sekarang sebagai kelompok yang homogen secara formal, tapi sangat beragam dalam karakter serta kualitas. Tapi apaboleh buat. "Menjaga kualitas, berarti ledakan anak usia sekolah tidak akan memperoleh pendidikan karena ketiadaan guru. Sedangkan bila hanya mengejar kuantitas dengan mencetak guru sebanyak-banyaknya, juga timbul masalah keteladanan dan profesionalisme yang kini dikeluhkan.

Dampak mobilitas sebagai sukses pembangunan, menyebabkan "kita menerima siapa saja untuk menjadi guru dengan segala resiko positif dan negatifnya," ujar Cony. Positif dalam arti guru yang banyak bisa menciptakan lonjakan prestasi dalam upaya mencerdaskan bangsa, atau paling tidak dalam memberantas butahuruf. Sedangkan dampak negatif, tidak ada homogenitas karakter dan budiluhur yang didambakan sebagai seorang pembeli tauladan.

Dulu seorang guru yang hanya naik sepeda ke sekolah, begitu disegani oleh muridnya yang anak Wedana. Menurut Cony, fakta itu tidak lain karena guru dulu berasal dari keluarga elit. Mereka mempunyai privilese yang dibanggakan. Seharusnya guru sekarang pun demikian. Kalau tidak bisa menciptakan guru yang semuanya berasal dari status sosial orangtua yang terpandang, harus bisa diciptakan homogenitas formal yang juga bisa dibanggakan. "Tapi ini sangat tidak mungkin."

Guru sekarang mulai tidak dihormati muridnya, karena keteladanannya yang merisaukan. Di kelas mereka melarang murid merokok, tapi di luar sekolah mereka minta duit murid untuk beli rokok. "Contoh guru seperti inilah yang memporak-porandakan kewibawaan pendidik," kata Cony.

Karena guru memang bukan profesi untuk menjadi kaya dan serba cukup, maka di IKIP Jakarta, Cony menekan sejak awal, "bila kalian ingin menjadi guru dengan cita-cita supaya kaya raya, bukan disini tempatnya. Tapi kalau ingin menjadi guru yang berwibawa, ciptakanlah bekal pribadi luhur dan pengabdian."

Guru memang tidak selamanya harus berasal dari keluarga priyayi. Tapi bilaberbicara tentang guru sebagai pemimpin arus keteladanan dan wibawa, masyarakat kita yang masih feodal membutuhkan itu. Di Jepang misalnya, kelompok priyayi, umumnya mendominir dunia usaha, yang kita akui betapa suksesnya mereka. Namun bila semua anak priyayi jadi guru, Cony melihat ada bahaya bahwa guru akhirnya menjelma menjadi tukang perintah. "Priyayi kan tidak mau tangannya kotor. Padahal sebagai guru kita kadang-kadang harus terjun sebagai pekerja kasar yang membantu murid."

Tapi terlepas dari pro dan kontra tentang asal seorang guru dari kalangan priyayi atau bukan, terasa bahwa kebutuhan seorang guru sebagai penular budi luhur sangat penting. Seorang guru harus punya kebanggaan profesi, untuk bisa tampil sebagai tauladan.

Hanya Cony sekarang terpaksa memerangi citra guru yang dikesankan masyarakat. Guru dianggap profesi buangan karena bakal makan batu kemudian hari karena gajinya tidak mencukupi.

Karena kesan itu begitu kuat mengakar, sampai-sampai mahasiswa IKIP pun merasa rendah diri. Di IKIP Jakarta yang bertetangga dengan beberapa fakultas Universitas Indonesia itu, menurut Cony, mahasiswanya malu memakai jaket biru almamater di luar kampus, karena takut malu dilihat oleh anak UI yang berjaket kuning.

Untuk menumbuhkan harga diri dan kebanggaan profesi, terpaksa Cony memakai jaket hijau bila mondar-mandir di sekitar UI. "Insya Allah sekarang mahasiswa saya tidak malu lagi memakai jaket hijau," ujarnya. ☐

Perangkum: TG
Wawancara: BM, TG, RA, IMH.

Lain lagi cerita, Ramlan. Guru yang sudah memiliki cucu ini hingga sekarang mempraktekkan ciuman kepada anak-anaknya setiap mereka mau pergi dan kembali ke rumah. Bukan hanya itu. Terhadap menantunya pun dia mempraktekkan kebiasaan serupa. "Dengan cara ini bila ada anak atau menantu saya yang meneguk minuman keras misalnya, akan diketahui." Dan untuk pendidikan anak-anaknya, dia tidak pernah bertengkar dengan isterinya di depan mereka.

Dari praktek-praktek ini, tersembul sebuah kesan, bahwa keharmonisan keluarga, — suatu hal yang menjadi semakin mahal di kota besar —, ternyata bisa diakali dengan cara sederhana dan murah.

Bukan balas dendam

Keharmonisan, bukan saja dibutuhkan dalam keluarga dengan segala suasana kejiwaan yang mendukung, tapi juga diperlukan dalam bidang represi, yaitu pengadilan. Bismar Siregar memaparkan pengalamannya dalam menangani sejumlah pengadilan anak ketika menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dulu. Hakim yang terkenal galak ini, ternyata berpendirian lembut bila menyangkut remaja yang melakukan tindak kejahatan.

Dalam menjatuhkan vonis, Bismar berpegang pada kebenaran terpokok, bahwa anak belum bisa dimintai pertanggungjawaban apapun. Oleh karena itu vonis-vonis yang atas tindak kejahatan mereka, harus bersifat mendidik. "Pengadilan dan putusan hakim tidak boleh berkonotasi balas dendam."

Menurutnya untuk remaja di bawah 16 tahun, hukuman penjara tidak cocok. Mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil. "Kalau kita menuntut mereka bertanggungjawab, malah kita yang berdosa."

Jalan yang ditempuh adalah mengembalikan mereka kepada orangtuanya. Atau menjadikan mereka anak negara. Pilihan terakhir ini hanya bisa diambil bila remaja bersangkutan tidak memiliki orang tua lagi. Sebab bila orangtuanya masih ada, anak tersebut harus dikembalikan sehingga memaksa tanggungjawab para orangtua. Tapi celakanya, ada orangtua yang secara lahiriah mapan, tapi secara batiniah melarat. Untuk itu dibutuhkan tanggungjawab dari semua pihak yang terlibat dalam pembentukan moral dan masa depan remaja.

Bila yang melakukan tindak kejahatan itu adalah remaja di atas 16 tahun, maka berilah mereka hukuman sebagai pendidikan. Tapi celakanya lagi, lembaga peradilan kita semakin condong sebagai badan yang menghukum dengan penuh rasa dendam dan kebencian terhadap pelaku kejahatan. Untuk kasus kejahatan remaja, kata hukuman sebaiknya diganti dengan "pemberian maaf". Contohnya, bila si anak memecahkan kaca jendela tetangga, jangan dipenjarakan, tapi meminta dia dengan penuh pengertian agar mengganti kaca jendela yang pecah itu.

Kalau si anak tidak mampu, hadapkan orangtua ke pengadilan untuk menjawab pertanyaan hakim, "apakah saudara masih mampu mendidik anak atau tidak?" Bila dijawab mampu, "kembalikan anak tersebut kepada orangtuanya, sehingga mereka dipaksa untuk bertanggungjawab." Dan sebagai orangtua yang bertanggungjawab, tidak akan menjawab tidak mampu.

Tapi gagasan Bismar ini tidak umum di kalangan para hakim. Lembaga-lembaga peradilan kita terkadang terjebak pada keharusan kaku membalas dendam demi hukum. "Hukum semakin kehilangan semangat cinta kasih dalam pelaksanaannya."

Hukum kita berdasarkan Pancasila, yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Berarti cinta dan kasih yang menjadi ajaran terutama agama-agama di Indonesia, tercakup dalam sila pertama itu.

Tapi, "kelembutan" Bismar, tidak berlaku untuk semua kasus kriminal. Bagi anak berusia 16 tahun ke atas yang melakukan pemerkosaan, "tidak akan ada maaf bagimu". Demikian untuk kasus pembunuhan, yang patut diberi hukuman keras. Tapi untuk remaja yang mencuri di Aldiron Plaza misalnya, harus diteliti dulu sebab-musababnya. "Mereka mungkin melakukan itu karena terdorong oleh semangat konsumerisme yang dipertontonkan oleh lingkungan."

Setiap kurun dalam perjalanan bangsa, yang namanya gejala kriminalitas remaja, tidak mungkin terhapus tuntas. Kesadaran kita untuk mengikisnya, berkonfrontasi dengan semangat tata nilai peradaban baru. Kita ingin remaja berperilaku terpuji, di tengah pengaruh peradaban mondial yang masuk keluar tanpa mengenal batas wilayah. Kita merindukan remaja yang militan dan ugahari, di tengah etalase kemajuan yang menggoda selera konsumeristis.

Tapi perjalanan masyarakat sampai kapanpun tetap akan membaurkan konfrontasi-konfrontasi tata nilai seperti ini. Kendati demikian, Bismar punya benteng ampuh untuk menyaringnya, yaitu penghayatan terhadap Pancasila yang begitu diagungkannya. ☐

MESIN
PENGUPAS KOPI

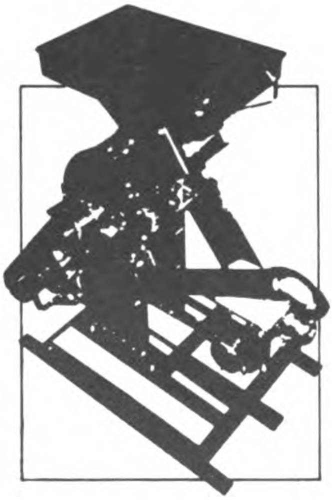

produksi :

PT Citra Lamtoro Gung Persada

- MENGHASILKAN & MENINGKATKAN MUTU KOPI RAKYAT JADI KWALITAS EKSPOR
- MESIN PENGUPAS KOPI INI 100% PRODUKSI DALAM NEGERI
- PENEMUAN HASIL KARYA PUTRA INDONESIA
- BILA ANDA INGIN PESAN HUBUNGILAH :
P.T. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA
BANK BUMI DAYA PLAZA Lt. 23
Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310
Tel. : 330822 - 337101 (5 Saluran) - Telex : CLAP 61304

Sejarah Bukan Soal Hitam-Putih

Gelar Pahlawan Proklamator untuk Soekarno-Hatta

Pada akhirnya 41 tahun lebih setelah Indonesia Merdeka, sebuah gelar Pahlawan Proklamator dianugerahkan kepada Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta. Pemerintah dengan demikian telah menerobos sejumlah masalah psikologis dan mengambil suatu keputusan objektif dari antara dua kutub subjektif yang masih terdapat di masyarakat. Perbedaan pikiran yang subjektif itu terutama amat terasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan figur Ir. Soekarno.

Yang terjadi memang adalah kenyataan bahwa Presiden Soeharto menyerahkan anugerah tersebut kepada kedua proklamator melalui wakil keluarga, Sabtu 8 Nopember 1986 di Istana Merdeka. Ny. Hartini Soekarno tampil mewakili keluarga almarhum Ir. Soekarno Presiden pertama RI — dan Dr. Edi Swasono mewakili keluarga almarhum Dr. Mohammad Hatta. Putera-puteri almarhum Soekarno turut hadir : Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, Guruh dan juga Bayu. Bersamaan dengan penganugerahan gelar Pahlawan Proklamator, juga dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Raden Panji Soeroso dan Radin Inten II.

Berdasarkan bukti sejarah, peranan Soekarno dan Hatta sebagai Proklamator memang adalah peranan sejarah yang tak dapat disangkal. Maka bila di tahun 1986 ini Presiden Soeharto atas nama pemerintah menganugerahkan gelar Pah-

Diwakili Ny. Hartini. Dari tangan Presiden Soeharto.

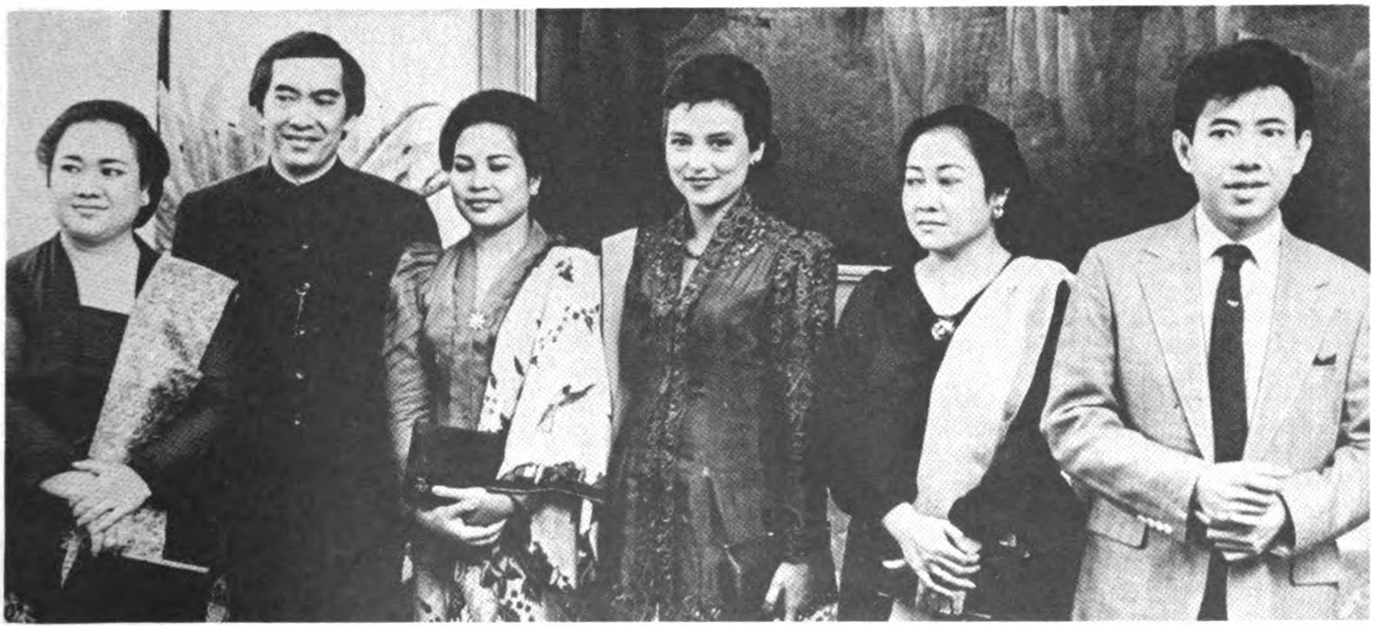

Keluarga almarhum Ir. Soekarno di Istana Merdeka.

lawan Proklamator kepada kedua bapak bangsa itu, jelas suatu hal yang wajar dan pantas.

Tetapi ketika gelar itu diberikan, sebenarnya masih terdapat masalah-masalah psikologis diseputar figur Ir. Soekarno. Peristiwa-peristiwa 20 tahun yang lampau sedikit-dikitnya masih meninggalkan jejak traumatis. Terdapat dalam pemberitaan pers percikan pendapat tentang belum tuntasnya hal-hal mendasar di sekitar diri Ir. Soekarno. Tersirat bahwa di satu pihak ada keinginan pemutihan total atas segala peran dan perilaku Ir. Soekarno dalam sejarah. Dan di lain pihak masih terdapat ketidaksepakatan terhadap rehabilitasi yang terburu-buru. Sementara itu, pemerintah Orde Baru agaknya mencoba bersikap arif dengan langkah yang hati-hati dan satu persatu.

Tercatat bahwa dalam 10 tahun terakhir suara-suara yang bersifat ungkapan kecaman terhadap Ir. Soekarno dan rezim Orde Lama dapat mereda. Sikap hitam putih dalam menilai Ir. Soekarno mulai ditinggalkan. Tindakan keras terakhir yang dikenakan terhadap Soekarno diambil oleh MPRS di tahun 1967 melalui suatu Sidang Istimewa. Mendahului pemberian gelar Pahlawan Proklamator, dalam tahun-tahun terakhir berturut-turut dibangun monumen proklamator di Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur dan pengabdian nama Soekarno-Hatta untuk Bandara Internasional yang baru di Cengkareng.

Bagi Ir. Soekarno, katakanlah sedang berlangsung proses pencerahan. Tapi ini tentunya wajar saja — kecuali bila dilakukan berlebih-lebihan — bila sejarah tidak dipandang sekedar sebagai pencatatan hitam-putih belaka. Sejarah bukan hanya membedakan tokoh (atau peristiwa) yang baik dengan tokoh yang buruk. Bila sudut pandang adalah hitam-putih, akan sukar meletakkan peran dan posisi Ir. Soekarno misalnya — begitu pula nantinya dengan figur sejarah lainnya — dalam sejarah. Sejarah mencatat jasa-jasanya yang tidak terhingga dalam perjuangan menuju Indonesia Merdeka dan dalam mengisi sebagian dari masa kemerdekaan itu. Maka gelar Pahlawan Proklamator — lebih dari sekedar Pahlawan Nasional — telah dan memang pantas diberikan kepadanya. Tetapi pun tak perlu menghapuskan catatan-catatan tentang kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan beliau. Bahkan atas kekeliruan politik yang dilakukannya antara 1960-1965 dan antisipasinya yang tidak tepat di akhir 1965 terhadap Peristiwa G30S, beliau telah menerima risiko pemberhentian sebagai Presiden/Mandataris MPR di tahun 1967 itu. Suatu risiko yang memang membayangi setiap pemimpin. Bahkan Presiden Soeharto pun menyatakan kesiapan menerima risiko semacam itu, tatkala 20 Oktober yang lalu beliau menyatakan dapat dihentikan di tengah jalan bilamana dipandang oleh MPR tak mampu lagi.

Presiden Soeharto dengan Guntur Soekarno. Bukan soal hitam-putih.

Namun karena sejarah juga mengenal dan menerima penafsiran, maka ke masa depan tetap perlu kewaspadaan dalam membangun kesadaran sejarah yang benar dan objektif. Dalam konteks tersebut, untuk tingkat keadaan saat ini, sikap pemerintah yang cukup hati-hati dan setapak demi setapak, dapat difahami dan diterima.□

Rum Aly

Bukan Untuk Pelestarian Kekuasaan

Di bidang politik tak ada lagi batas yang serius

Bahkan bagi sejumlah bekas eksponen perjuangan tahun 1966, nama Laskar Ampera Arief Rahman Hakim mungkin hanyalah bagian dari masa lampau. Tapi sejak tahun lalu bekas aktivis 1966 yang dulu tergabung dalam Laskar menghimpun kembali dirinya dalam suatu Ikatan Keluarga Besar. Dan bulan Oktober lalu mereka menyelenggarakan suatu rapat kerja nasional di Cibubur.

Rakernas dua hari itu sekaligus menjadi semacam reuni bekas aktivis 1966. Sekitar 150 orang hadir untuk itu di Cibubur. ''Barangkali, tanpa dibentuknya Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera ARH ini'', ujar Sumarno Diposastro yang menjadi anggota Dewan Pembina, ''Sulit bagi kita untuk bertemu satu sama lain''. Lalu, Ace Mulyadi anggota Ikatan Keluarga Besar itu - yang kini ikut aktif di Golkar - mengatakan kendati dalam urusan politik bekas anggota Laskar telah tercerai berai tempat dan pilihan kegiatan, namun nama Arief Rahman Hakim masih menjadi semacam perekat. Maka dalam politik ''kita boleh beda pendapat, tapi beda pendapat demi untuk kesatuan dan kerukunan''.

Tapi sebenarnya, lebih dari sekedar untuk wadah reuni, untuk apa sebenarnya

RAPAT KERJA I-IKB LASKAR AMPERA
ARIEF RACHMAN HAKIM
DI CIBUBUR 1-2 NOVEMBER 1986

Semacam reuni.

Laskar di tahun 1966

Laskar Ampera kembali menampilkan diri? Sekjen Ikatan Keluarga Besar ini, Drs Samuel Parantean mencoba menerangkannya. "Laskar Ampera Arief Rahman Hakim merasakan dibutuhkannya kembali konsolidasi seluruh kekuatan Orde Baru yang benar-benar konsekuen dan konsisten pada garis-garis perjuangan. Dimulai dari perjuangan cikal bakal Orde Baru, sampai pada saat Orde Baru itu sendiri memiliki peran utama pembangunan".

Adalah menarik pula bahwa tatkala mereka memutuskan kembali mengkonsolidasi diri lewat suatu pertemuan empat hari, 27 hingga 30 September setahun lalu, dan melahirkan Ikatan Keluarga Besar, mereka sekaligus menentukan pilihan bahwa anggota Ikatan Keluarga Besar itu secara unblok memasuki Golongan Karya. Itu mereka nyatakan langsung dihadapan Ketua Umum Golkar 2 Oktober 1985 dalam suatu acara di Gedung Patra. Tetapi seperti pula diungkapkan oleh Samuel Parantean, sejumlah eks Laskar jauh sebelumnya sebenarnya sudah memilih berpartisipasi dalam Golkar. Dan Samuel menyebut antara lain Ir Akbar Tanjung dan Albert Hasibuan yang kini duduk dalam DPP Golkar. Tercatat pula bahwa ketika Golkar membuka pendaftaran keanggotaan, salah seorang tokoh teras Laskar, Fahmi Idris - yang kini berkecimpung di dunia usaha - merupakan orang yang ikut mendaftarkan diri dan memperoleh KAG bersama sejumlah bekas eksponen Angkatan 1966 lainnya.

Laskar Ampera Arief Rahaman Hakim lahir 26 Oktober 1966 sehari setelah Kogam membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Berbeda dengan KAMI yang dibentuk sebagai semacam federasi oleh kelompok mahasiswa ekstra maupun intra, maka Laskar dibentuk oleh perorangan tanpa batasan seperti itu. Namanya diambil dari seorang aktivis mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim yang gugur oleh peluru Pengawal Istana Presiden Cakrawibawa dalam demonstrasi mahasiswa di depan Istana menghalangi pelantikan Kabinet 100 Menteri oleh Presiden Soekarno, 24 Pebruari 1966. Setelah keluarnya SP 11 Maret, pelan-pelan Laskar melenyap bersamaan dengan perginya satu persatu para anggotanya meninggalkan markas-markas mereka.

Bekas aktivisnya mencari lapangan hidup dan tugas sendiri-sendiri. Sebagian kembali ke kampus, sebagian lainnya terjun keberbagai bidang kehidupan lainnya di masyarakat. Tercatat bahwa beberapa diantaranya menerjuni sektor kehidupan politik. Cukup menonjol bahwa beberapa diantara bekas tokoh Laskar memasuki kehidupan politik melalui partai-partai politik yang ada. Maka ketika tahun lalu eksponen Ikatan Keluarga Besar ini sebagai perorangan memilih ikut serta dalam barisan Golongan Karya, peristiwanya menjadi fenomena yang cukup menarik.

Apakah pilihan politik yang berbeda dalam Laskar akan merumitkan tubuh Ikatan Keluarga Besar itu. Beberapa tokohnya mengatakan "tak perlu sampai demikian". Dalam Rakernas mereka di Cibubur, Drs Zamroni yang saat ini juga dikenal sebagai salah satu Ketua di Pengurus Pusat PPP menyatakan kehadiran eksponen 1966 dalam tiga kekuatan sosial politik - Zamroni di PPP, Suryadi di PDI dan Ace Mulyadi dan lain-lain di Golkar misalnya - tidak perlu menyebabkan perbedaan tajam. Khususnya yang menyangkut Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Zamroni menyatakan sepakat dengan pendapat Sarwono Kusumaatmadja - eks 1966 yang kini menjadi Sekjen DPP Golkar - bahwa adanya 5 UU bidang politik bukan untuk pelestarian kekuasaan. Menurut Zamroni, diantara pelajar dan mahasiswa tak jarang ada kesalahpahaman mengenai penataan kehidupan politik. Dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan memang dituntut adanya kemajuan-kemajuan. "Agar orientasi, operasional dan strategi setiap kelompok masyarakat efektif dan efisien". Di bidang politik, arahnya sudah jelas. Sekarang ini misalnya, bukan lagi masanya untuk mempersoalkan ideologi nasional. "Oleh karena itu di bidang politik tak ada lagi batas yang serius, kecuali bagaimana menjabarkan pelaksanaan UUD 1945 dalam mekanisme 5 tahunan yang didahului dengan pemilihan umum". Untuk itu, kata Zamroni, diharapkan pemilihan umum mendatang ini berlangsung lebih baik, lebih rasional, lebih konsepsional. "Menurut saya, bukan masanya lagi untuk saling mengejek. Misalnya, Beringin tempat setan, yang Bintang minum bir dan sebagainya. Pemilihan umum yang akan datang harus rasional dan mendidik masyarakat, sebab pemilihan umum itu sendiri bukanlah tujuan akhir".☐

BM/RA

HARI DEPAN BATUBARA UNTUK KEMAJUAN BANGSA

PERUM TAMBANG BATUBARA

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10
Kotak Pos 405 Kby.
Telex : BRAJAK IA
Facsimile : (021) 827642
Telepon : 825608

JAKARTA SELATAN

PBB Merupakan Cermin Keadaan Dunia

Relevansi Eksistensi PBB Dipertanyakan

Empat puluh satu tahun yang lalu tepatnya 24 Oktober 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilahirkan, yang ditandai dengan pengesahan Piagam PBB oleh para anggotanya pada hari itu atas prakarsa 5 negara pendiri yakni Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, serta Cina. Indonesia baru masuk pada tahun 1950 dan menjadi anggota PBB yang ke 60.

Memperingati HUT ke 41 PBB tersebut, DPP Golkar dalam hal ini Departemen Hubungan Luar Negeri telah menyelenggarakan sebuah diskusi panel dengan tema: "PBB, Tahun Perdamaian Internasional dan Peranan Indonesia." Diskusi yang juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja itu menampilkan 3 orang pembicara, yaitu Dr. H. Ruslan Abdulgani (pengamat masalah luar negeri dan bekas Menlu), Dr. Hasjim Djalal (Kepala Badan Litbang Deplu), dan Dr. Sudjati Djiwandono (Ketua Departemen Luar Negeri CSIS).

Laporan berikut mengetengahkan beberapa hal pokok yang dibahas dalam forum diskusi yang diselenggarakan tanggal 24 Oktober yang lalu itu.

Efektivitas PBB

Belakangan ini banyak orang mempersoalkan efektivitas lembaga dunia PBB. Banyak kritik dan serangan yang bernada sinis dan pesimis dilontarkan terhadapnya. Entah karena kurang mampunya mengatasi persoalan-persoalan besar di dunia, entah karena pembengkakan birokrasinya, struktur dan mekanisme, dan lain sebagainya. Ruslan Abdulgani dalam ceramahnya menggambarkan keadaan PBB dalam Sidang Umum yang ke 41 tahun ini sebagai suatu hal yang sangat berat jalannya. Tidak kurang dari 130 acara yang dibahas oleh 159 perutusan negara-negara anggota. Kebanyakan agendanya sama dengan tahun-tahun terdahulu seperti masalah perlucutan senjata, pembatasan persenjataan nuklir, jurang pemidah Utara-Selatan, Orde Ekonomi Internasional Baru, masalah Timur Tengah, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Semua agenda itu sudah sering dibicarakan sampai bertahun-tahun dan bertele-tele. "Solusinya jarang ada, walaupun resolusinya menumpuk sampai menggunung", ungkap Ruslan Abdulgani. Membengkaknya birokrasi PBB oleh Ruslan disebutnya sebagai penyakit *elephantiasis* dalam lembaga PBB. Diungkapkan pula bahwa tak kurang dari Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar sendiri menyatakan pesimis akan kemampuan PBB menyelesaikan berbagai pertikaian dunia. Menurut de Cuellar banyak negara besar cenderung menempuh jalan konfrontasi militer daripada jalan musyawarah dalam forum persidangan. Sebagai contoh disebut kasus Libanon, kegentingan di kawasan Timur Tengah dengan segala aspeknya, perang Iran-Irak yang berkepanjangan, masalah Afghanistan, Kampuchea, Afrika Selatan dan lain-lain. Secara khusus Sekjen PBB itu menyerukan agar Dewan Keamanan dijadikan wahana internasional yang lebih aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik. Apabila keadaan seperti sekarang ini dibiarkan berlanjut, menurut de Cuellar akan berakibat timbulnya anarki baru dalam sistem internasional yang lebih lanjut akan membawa bencana global yang tak terkendali lagi.

Mochtar Kusumaatmadja

Dengan cara pengutaraan yang berbeda, baik Ruslan Abdulgani maupun Hasyim Djalal sependapat tentang ketidakefektifan dari Dewan Keamanan PBB adalah akibat kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang serta adanya hak veto dari para anggotanya. Adanya hak veto ini dinilai sangat merugikan negara-negara dunia ketiga, yang dalam badan dunia itu merupakan mayoritas suara (sekitar 100 anggota PBB berasal dari dunia ketiga). Mengenai diperolehnya mayoritas suara dimungkinkan oleh berlakunya sistem *one state one vote* dalam forum Sidang PBB tanpa mempertimbangkan besar kecil negara yang bersangkutan. Sebuah negara 'gurem' yang penduduknya mungkin di bawah 500.000 jiwa mempunyai suara yang sama seperti negara-negara besar yang berpenduduk puluhan bahkan ratusan juta jiwa. Tetapi sebaliknya, hak suara yang sama rata ini dijadikan salah satu alasan keengganan negara-negara besar untuk menggunakan PBB sebagai forum pemecahan masalah. Demikian keadaannya sehingga oleh Ruslan Abdulgani dikatakan bahwa utusan-utusan negara datang ke forum PBB hanya untuk ber *acting* belaka, bukannya untuk ber*act* atau bertindak. Dan lagi, seperti dikatakan oleh Dr. Hasjim Djalal, kemampuan negara dunia ketiga hanya terbatas kepada memperoleh mayoritas suara yang tidak diimbangi dengan kemampuan melaksanakan atau bertindak. Resolusi-resolusi yang diterima lebih banyak bersifat retorik dan merupakan *moral force* belaka.

Mengenai sistem suara dan hak veto ini Menlu Mochtar Kusumaatmadja berkomentar bahwa posisi PBB serba repot. Negara-negara besar yang sudah terlanjur memiliki hak veto, tentu keberatan kehilangan haknya itu; dan sebaliknya, negara-negara berkembang atau dunia ketiga juga tidak rela bila suaranya diperkecil dibanding dengan hak suara negara-negara besar. Menurut Mochtar persamaan hak suara itu memang merupakan kesempatan bagi negara-negara kecil untuk bersuara dan dipandang sejajar dengan negara-negara besar. Sebagai contoh Menlu mengatakan bahwa Indonesia terpaksa mendengarkan pula kecaman keras yang dilancarkan oleh Vanuatu yang berpenduduk hanya 60.000 orang.

Menganggapi suara-suara yang menganggap PBB sudah kurang relevan bagi dunia masa kini, Dr. Hasjim Djalal lebih jauh mengungkapkan bahwa seringkali masalah-masalah besar di dunia dibahas oleh negara-negara besar di luar konteks PBB. Sebagai contoh misalnya pembahasan masalah perlucutan senjata. Dalam soal ini paling banter PBB hanya mampu mengeluarkan *appeal* mendesak negara-negara adikuasa agar mencari jalan keluar. Khusus berkenaan dengan kegagalan PBB dalam mengatasi masalah perlucutan senjata atau *disarmament* itu, Dr. Sudjati Djiwandono yang berbicara tanpa naskah tertulis mengatakan bahwa resolusi-resolusi yang diprakarsai oleh negara-negara dunia ketiga sehubungan dengan masalah ini tidak mencapai hasil disebabkan karena beberapa hal. Pertama, tuntutan yang diajukan selalu merupakan *total, general* dan *completed disarmament,* yang dinilai tidak realistik dan merupakan suatu utopia. Kedua, negara-negara yang mengeluarkan resolusi itu sering tidak melakukan *disarmament* antara mereka sendiri, seakan-akan masalah itu hanya menjadi urusan negara-negara adikuasa. Padahal, di antara negara-negara dunia ketiga atau non blok juga terdapat persaingan persenjataan. Bahkan diduga di antara negara-negara ini juga mengembangkan senjata nuklir sendiri seperti Brazil, Argentina, India, dan Pakistan. Dan yang ketiga menurut Sudjati adalah adanya kesan yang dirasakan oleh negara-negara adikuasa bahwa apa yang dituntut oleh negara-negara non-adikuasa itu hanya merupakan kuliah secara moral belaka. "Mereka tidak mempunyai nuklir dan *technical knowledge* tentang nuklir untuk mampu berpengaruh pada jalannya perundingan tentang pengawasan serta perlucutan senjata," kata Sudjati, dan menurutnya hal inilah yang mendorong negara-negara adikuasa memilih bicara secara langsung antar mereka sendiri mengenai masalah tersebut.

Menyinggung tentang inefisiensi, Dr. Hasjim Djalal menggambarkan pertumbuhan PBB menjadi organisasi raksasa dewasa ini. Dalam masa 40 tahun keanggotaannya membengkak menjadi 3 kali lipat. Anggarannya pun membengkak. Organisasi dunia ini telah beranak pinak dengan badan-badan atau *agencies* PBB yang sampai bulan September 1985 tercatat berjumlah 265 buah. Tak mengherankan ungkapan Ruslan Abdulgani tentang perlunya PBB ikut program 'KB'. Mengenai inefisiensi ini Prof. Mochtar Kusumaatmadja lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya PBB baru saja mengalami ancaman kebangkrutan, apalagi dengan enggannya sementara negara besar membayar iurannya. Untuk membantu mengatasi problema ini Indonesia dengan beberapa negara lainnya yang disebut Komisi 18 telah mengadakan pembahasan-pembahasan. Sekjen PBB juga melakukan penghematan dengan jalan mengurangi jumlah sidang-sidang (memperpendek waktunya dan lain-lain). *Adjustment* dilakukan di sana-sini sehingga PBB masih bisa mengatasi terbatasnya anggaran. Mochtar optimis bahwa masalah budget ini dapat diatasi. "Yang sulit diatasi ialah masalah politisnya," kata Menlu.

Indonesia dan PBB

RI dan PBB kedua-duanya lahir bersamaan dengan usainya Perang Dunia II. Keduanya mempunyai hubungan idealisme. Baik Undang-Undang Dasar RI maupun Piagam PBB bernafaskan cita-cita kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.

Sehubungan dengan hubungan RI dengan PBB, baik Ruslan Abdulgani maupun Hasjim Djalal berpendapat bahwa PBB mempunyai peranan cukup besar dalam membantu tercapainya pengakuan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam periode perjuangan RI tahun 1945—1949.

Di tahun 1945, revolusi fisik khususnya pertempuran Surabaya bulan Nopember telah menggugah salah satu anggota PBB yaitu Ukraina untuk memprmasalahkannya di forum PBB. Dan masalah Indonesia masuk dalam agenda Sidang Dewan Keamanan PBB di London di akhir tahun 1945. Pada tahun 1949 PBB juga mendesak dihentikannya tembak menembak akibat aksi militer pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Putusan PBB ini terjadi atas prakarsa Australia, yang lebih lanjut menelorkan terbentuknya Komisi Tiga Negara (Australia, Belgia, Amerika Serikat), kemudian menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia) sampai akhirnya diakuinya kemerdekaan RI oleh Belanda di tahun 1949.

Kembali PBB berperan penting dalam penyelesaian sengketa RI-Belanda tentang masalah Irian Barat (sekarang Irian Jaya) di tahun 1962—1963. Atas dasar pembahasan di forum PBB yang diusulkan oleh Indonesia sejak tahun 1954 maka di tahun 1962 Belanda menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), dan kemudian di tahun 1963 Irian Barat diserahkan kepada pemerintah RI hingga akhirnya bulat menjadi wilayah RI setelah melalui prosedur *Act of Free Choice* (penentuan pendapat rakyat) yang kita kenal dengan istilah PEPERA di tahun 1969 itu.

Selanjutnya Dr Hasjim Djalal yang juga seorang ahli Hukum Laut mengungkapkan jasa lembaga internasional PBB ini dalam perjuangan memperoleh pengakuan internasional terhadap Wawasan Nusantara, melalui Konferensi PBB yang ke III tentang Hukum Laut (1973—1982). Di samping Indonesia juga telah memanfaatkan jasa-jasa dari badan-badan inter-

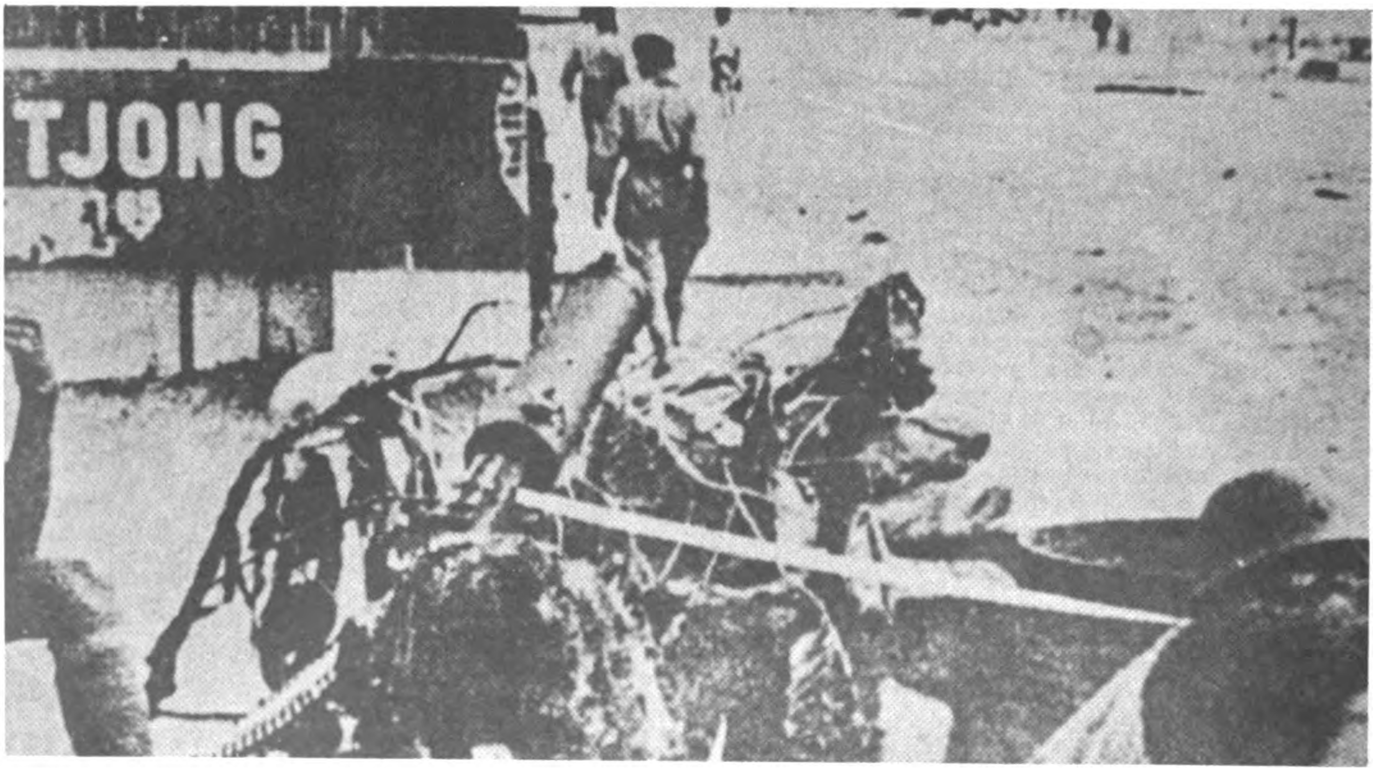

Pertempuran Surabaya Nopember 1945 masuk agenda sidang DK PBB akhir 1945.

PBB tetap diperlukan.

nasional PBB seperti UNICEF, WHO, FAO, UNESCO, UNDP, dan lain sebagainya.

Kendati demikian, patut dicatat masa suram hubungan RI-PBB, yakni di masa konfrontasi RI-Malaysia, di mana Indonesia keluar dari keanggotaan PBB dari tahun 1963 sampai 1966. Menurut Ruslan, Indonesia adalah negara yang pertama berbuat seperti itu. Tindakan Indonesia ini ternyata merupakan bahan studi yang menarik, terbukti dengan bertubi-tubinya permintaan ceramah Ruslan Abdulgani (waktu itu Dubes RI di PBB) kepada universitas atau lembaga-lembaga studi internasional di beberapa negara.

Hasjim Djalal mencatat hubungan yang kurang mesra antara RI-PBB juga dalam penanganan kasus Timor Timur. Indonesia menentang dibicarakannya masalah Timor Timur dalam forum PBB, yang diacarakan dalam agenda forum ini sejak tahun 1977 berturut-turut hingga tahun 1982. Namun sejak tahun 1982 pembahasan kasus itu terus menerus ditunda. Dicatat pula ketidakseriusan hubungan RI-PBB akibat dipermasalahkannya perihal hak-hak asasi manusia di Indonesia yang dikait-kaitkan dengan masalah Timor Timur. Baik mengenai kasus Timor Timur maupun hak-hak asasi manusia, Hasjim Djalal menyatakan optimis bahwa kasus itu akan berangsur-angsur reda bahkan hilang sejalan dengan tertanamnya pengertian dunia terhadap duduk masalah yang sebenarnya.

Sehubungan dengan jalinan RI dan PBB itu Hasjim Djalal mengatakan bahwa RI cukup memainkan peran aktif dalam PBB. Disebutnya antara lain peran dalam proses dekolonisasi; usaha pemeliharaan perdamaian dunia dengan keikutsertaan dalam pasukan PBB di Congo, Suez, Sinai; peran dalam konferensi-konferensi PBB antara lain tentang Hukum Laut, tentang Perlucutan Senjata; peran dalam badan-badan khusus PBB sebagai anggota dari *governing body* dalam ICAO, ILO, WHO, FAO, IMO, IAEA, ITU dan lain sebagainya, termasuk pula peran tokoh-tokoh RI dalam jabatan-jabatan Sekretariat Jenderal PBB.

PBB tetap diperlukan

Semua pembicara dalam diskusi pada dasarnya tetap memandang perlu eksistensi organisasi internasional PBB dewasa ini. Kalau memang terdapat krisis dalam tubuh PBB, maka krisis itu tidak terlepas dari krisis dunia itu sendiri. "PBB sebenarnya sekedar cermin belaka daripada situasi dunia internasional", kata Ruslan Abdulgani. "Orang tidak bisa menggambarkan dunia dewasa ini tanpa adanya PBB; segala macam krisis internasional disalurkan ke PBB sekalipun seringkali tak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan", tambahnya.

Pembicara lain, Dr. Hasjim Djalal, menyoroti masih relevannya lembaga PBB dari sudut kepentingan perjuangan dalam mencapai cita-cita RI tentang ketertiban dan perdamaian dunia. Menurutnya PBB adalah wahana yang penting untuk itu, terlepas dari segala kelemahan yang ada. Ditunjukkan pula bahwa organisasi dunia ini juga bermanfaat mendukung kepentingan nasional Indonesia seperti diterimanya konsep Wawasan Nusantara di dunia internasional, pemanfaatan bantuan-bantuan dari badan-badan internasional bagi pembangunan nasional kita, dan sebagainya.

Dr. Sudjati Djiwandono mengatakan bahwa dalam masalah *disarmament* dan *arms control*, PBB masih bermanfaat setidak-tidaknya merupakan sebagian daripada *moral pressure* yang memiliki pretensi opini dunia terhadap negara-negara adikuasa yang bersangkutan. Sementara Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa selain manfaat-manfaat tersebut, masih ada kegunaan lain yaitu bahwa melalui forum PBB kita sekurang-kurangnya dapat mengetahui apa pendapat orang lain terhadap Indonesia.

Singkat kata, seperti dirumuskan oleh Sekjen DPP Golkar Sarwono Kusumaatmadja dalam menutup diskusi panel itu, terhadap lembaga PBB ini RI bersikap realistik, yakni memanfaatkan sebesar-besarnya forum PBB untuk melaksanakan cita-cita nasional sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. ☐

TA Purnomo

Saatnya Semua Golongan Makin Meningkatkan Persatuan

''Justru Nabi telah memberi contoh menggalang semua golongan''

Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara menjelang pertengahan Nopember ini, Presiden Soeharto menyatakan bahwa sudah saatnya semua golongan di negeri kita meningkatkan lagfi persatuan guna menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini. ''Lebih-lebih karena kita sudah memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara''.

Sebelum Presiden, adalah Prof Dr Emil Salim yang tampil tahun ini untuk memberikan uraian mengenai hikmah Maulid Nabi. Emil berkata bahwa untuk mencapai tujuan akhir pembangunan, kita perlu mengembangkan etika pembangunan sebagai panduan perilaku orang dalam pembangunan. Dan didasarkan kepada prinsip-prinsip moral. Ada lima pokok prinsip yang diajukan Emil Salim. Pertama, pembangunan adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Kedua, pembangunan terdiri dari perjuangan mencapai kemajuan lahiriah dan sekaligus mencapai kepuasan batiniah dan keduanya ada dalam kesselarasan. Ketiga, dalam melaksanakan pembangunan manusia memikul tanggungjawab sehingga tindak langkahnya harus mempertimbangkan pengaruhnya kepada isi alam semessta dan kepada sesama manusia. Yang keempat, pembangunan bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya dengan syarat keselarasan antara manusia dengan Tuhan pencipta, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya. Sedang yang kelima pembangunan adalah upaya pembebasan manusia dari berbagai hambatan buatan manusia sendiri seperti kemiskinan, kebodohan, ketidaktahuan, ketidakadilan, kekufuran, ketimpangan sosial. Pembebasan itu untuk mencapai kualitas manusia dan martabat manusia yang setinggi-tingginya.

Menteri Agama Munawir Syadzali dalam pada itu mengingatkan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kesesakan karena ulah manusia sendiri, jangan mengabaikan faktor pertolongan Tuhan. Namun doa memohon pertolongan Tuhan akan lebih didengar bila para pemimpin kita juga mengembangkan dan memupuk watak-watak luhur. Menteri Agama juga menyebutkan tiga hal yang perlu dikembangkan. Yakni ketabahan dan kesediaan menderita serta berkorban untuk kepentingan masyarakat; kemampuan penguasaan diri dan kekuatan mental untuk tak menyalahgunakan kesempatan; Kejujuran dan semangat untuk berbuat kebajikan terhadap dan untuk orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih.

Perjuangan Dan Pengorbanan

''Hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, bahwa suatu cita-cita luhur tidak mungkin terwujud tanpa perjuangan dan pengorbanan'', demikian Presiden berkata dalam amanatnya. Kehidupan yang penuh salam, rakhmat dan berkah tidaklah terwujud begitu saja tanpa kerja keras yang tak mengenal lelah, tanpa pengabdian yang tidak mengenal pamrih. Nabi dan sahabat-sahabat beliau telah memperlihatkan betapa besar pengorbanan yang harus diberikan untuk mencapai cita-cita beliau. Pelajaran ini mestilah kita resapi dan kita hayati sedalam-dalamnya, sebab kita pun, sebagai bangsa, sedang bergumul menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita.

Kalau kita berpikir singkat, rasanya kita terlalu lemah menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi dalam membangun bangsa kita. Lebih-lebih menghadapi tantangan yang datang di luar perkiraan kita, yang tidak jarang banyak atau sedikit memberi tekanan-tekanan berat terhadap perjalanan pembangunan kita. Namun, dengan belajar dari kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW kita merasa mendapat kekuatan batin, sehingga kita tidak akan kehilangan harapan. Sebab sebagai umat yang beriman kita yakin bahwa cita-cita luhur yang diridoi Tuhan pasti akan terwujud. Bagi umat beriman, keyakinan ini lah

yang merupakan modal utama untuk berjuang. Dengan keyakinan itu kita rela berkorban, dengan keyakinan itu kita rela menderita.

"Memang, agama kita mengajarkan agar kita berjuang untuk mewujudkan kehidupan hari esok lebih baik daripada kehidupan hari ini. Dan memang itulah yang kita laksanakan melalui pembangunan nasional."

Dengan pembangunan kita berusaha mengubah kehidupan bangsa kita yang masih serba terbelakang dan kekurangan menjadi bangsa yang berkehidupan layak di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa di dunia, suatu masyarakat yang maju dan beradab. Kita menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan itu kita laksanakan terutama untuk anak-cucu kita, untuk generasi yang akan datang. Untuk itu kita rela menahan diri dari tindakan-tindakan, yang karena terlalu cepat ingin menikmati kesenangan sekarang, justru mengorbankan masa depan. Ini berarti kita mengorbankan nasib anak-cucu kita demi kesenangan kita sendiri.

Dalam usaha mewariskan kehidupan yang lebih baik pada generasi yang akan datang, kita harus bekerja keras. Kita harus mengolah segala sumber daya yang kita miliki, baik sumbar daya insani maupun sumber daya alami, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa kita. Hal ini, pertama-tama, berarti kita harus bekerja keras untuk membangun Manusia Indonesia agar benar-benar menjadi insan pembangun. Kita harus mengarahkan kegiatan pendidikan bangsa kita untuk melahirkan Manusia Indonesia yang cerdas dan terampil, yang peka terhadap kepentingan masyarakat dan sadar akan masa depan bangsanya.

Usaha untuk membangun Manusia Indonesia agar menjadi insan pembangun itu adalah tugas besar yang menuntut keterlibatan seluruh bangsa kita. Salah satu segi dari tugas besar ini adalah pendidikan. Karena itu segenap lapisan dan golongan masyarakat perlu memberikan sumbangan kreatif dalam kegiatan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Bagi umat Islam hal ini bukanlah hal baru. "Sebab justru Nabi kita sendiri menegaskan perlunya belajar bagi setiap orang laki-laki maupun perempuan, mulai dari buaian sampai ke liang kubur", kata Presiden.

Tentu saja belajar bukan sekedar untuk belajar. Belajar adalah untuk meningkatkan berbagai kemampuan manusiawi kita yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan sesama kita. "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia", demikian disabdakan oleh Nabi kita. Oleh karena itu, kesadaran dan kepekaan sosial harus kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak, remaja-remaja dan pemuda-pemudi kita. Hal ini makin penting sebab, mau tidak mau, di masa-masa yang akan datang persaingan akan lebih mewarnai kehidupan masyarakat kita. Tanpa kesadaran dan kepekaan sosial persaingan dapat melunturkan semangat kekeluargaan yang merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita kemasyarakatan bangsa kita.

Kesadaran Dan Keseimbangan.

"Kita tidak henti-hentinya bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab negeri kita dikaruniai dengan kekayaan alam beraneka ragam. Sumber daya alami ini merupakan modal besar yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Akan tetapi harus kita sadari bahwa pemanfaatan jangan sampai berakibat perusakan. Namun sayang sekali, biasanya kesadaran itu datang terlambat. Akhir-akhir ini kita sering mendengar peringatan akan ancaman terganggunya keseimbangan alam akibat pengurasan dan pencemaran. Al-Qur'an, Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi kita 14 abad yang lalu telah mengingatkan akan timbulnya kerusakan di darat dan di laut akibat oleh tangan manusia."

Pentingnya memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan harus kita sadari sedalam-dalamnya. Firman Tuhan bahwa Ia tidak menciptakan alam ini tanpa guna mestilah dihayati oleh kita semua. Karena itu bagi kita sebagai umat Islam, memelihara keseimbangan dan kelestarian alam mempunyai nilai agamawi.

Sesungguhnya lah, ujar Presiden, agama kita kaya dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bertautan dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sebab agama kita tidak hanya mengajarkan akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan tetapi juga mengajarkan akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan alam. Kalau risalah Nabi kita adalah untuk penyempurnaan akhlak manusia, maka itu berarti nilai keberagamaan kita sangat ditentukan oleh kualitas akhlak kita terhadap Tuhan, sesama manusia dan lingkungan alam.

"Dengan mengemukakan hal-hal tadi saya ingin menghimbau para ulama dan cendekiawan, para pemikir dan pendidik, untuk tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas pendidikan agama agar anak-anak kita benar-benar menjadi insan-insan berakhlak mulia sebagaimana menjadi inti risalah Nabi kita, yakni insan yang bersikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermanfaat kepada sesama dan memanfaatkan seraya tetap memelihara keseimbangan dan kelestarian alam. Tantangan ini tentu saja berlaku bagi semua umat beragama di negeri kita, sebab hal ini menyangkut masa depan kita bersama, masa depan kita semua."

Memang, sudah saatnya bagi semua golongan di negeri kita makin meningkatkan lagi persatuan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa kita. Lebih-lebih karena kita sudah memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kata Presiden.

Karena itu kita harus lebih menonjolkan persamaan dari pada perbedaan di antara berbagai golongan bangsa kita. Perbedaan tentu ada dan akan terus ada, akan tetapi hal itu bukan menjadi alasan untuk berpecah dan berpisah. Bagi umat Islam hal ini bukan hal yang asing.

"Justru Nabi kita sendiri telah memberi contoh untuk menggalang semua golongan yang ada di Madinah ketika beliau memulai membangun masyarakat setelah hijrah. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam suatu masyarakat majemuk seperti halnya masyarakat kita, prinsip-prinsip kebersamaan harus kita tegakkan. Setiap kelompok masyarakat, betapapun kecilnya, harus diperlakukan secara adil dan tidak merasa ditinggalkan dan diremehkan."☐

Perlu Kejelasan Lebih Lanjut

Ampi dan Golkar mempunyai hubungan historis dan psikologis.

Awal November yang lalu, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). Seperti disebutkan dalam ketentuan AD/ART Organisasinya, Rakernas AMPI yang melibatkan pengurus Pusat dan para pengurus daerah tingkat I se-Indonesia itu berfungsi mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program sebelumnya dengan menetapkan arah pelaksanaan program selanjutnya yang sesuai dengan program umum organisasi. Lalu apakah yang menjadi prioritas pembahasan dalam Rakernas AMPI kali ini?

Melihat perkembangan akhir-akhir ini sering dipertanyakan lebih lanjut kejelasan status dan hubungan antara orsosmasinal khususnya AMPI dengan organisasi Golkar. Permasalahan tersebut timbul sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta seperangkat peraturan pelaksanaannya. AMPI menganggap penting segera ada kejelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, terutama dalam jangka waktu dekat ini agar segera dapat mengatur langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan tugas memenangkan Golkar dalam Pemilu 1987 mendatang.

Sejalan dengan itu maka Rakernas AMPI awal November lalu menetapkan acaranya yang meliputi evaluasi program dan penetapan program prioritas, pedoman kaderisasi dan pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1985.

Rakernas yang berlangsung selama 3 hari bertempat di Wisma Karya Jakarta itu dibuka oleh Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH yang sekaligus juga memberikan sambutan pengarahannya. Rakernas juga menampilkan para pengarah yang lain yakni Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam, Pangab Jenderal LB Moerdani, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga dr. Abdul Gafur, Menteri Negara Perumahan Rakyat Drs. Cosmas Batubara, Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ir. Sarwono Kusumaatmadja, dan Sekretaris Dewan Pembina AMPI Sukarton Marmosudjono SH.

Hubungan Tetap Ada

Konteks UU no. 8/1985

Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH dalam pengarahannya yang berjudul "Hubungan Golkar dengan Orsosmasinal dalam Konteks Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan" menyatakan kegembiraannya bahwa dengan diadakannya Rakernas ini AMPI membuktikan kepeloporannya di dalam tugas-tugas nasional, khususnya dalam mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan secara menyeluruh UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Oleh Ketua Dewan Pembina AMPI itu dikatakan bahwa sudah menjadi kewajiban Golkar serta seluruh Orsosmasinal agar seluruh perundang-undangan yang kelahirannya merupakan hasil partisipasi aktif Golkar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Pada awal Orde Baru," tutur Sudharmono, "Keluarga Besar Golkar mempelopori penataan kembali kehidupan politik yang stabil, dinamis, demokratis, memperkuat kehidupan konstitusional dan menegakkan kepastian hukum di dalam sistem politik demokrasi Pancasila." Tekad tersebut telah menghasilkan Ketetapan MPRS No. XXII tahun 1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, yang menuju pada penyederhanaan. Namun demikian, seperti kata Sudharmono, Undang-undang Keormasan sebagai pelaksanaan Ketetapan MPRS tahun 1966 itu baru dapat dihasilkan pada tahun 1985, hampir 20 tahun kemudian. Sedangkan Undang-undang tentang Kepartaian dikeluarkan pada tahun 1975 dan disempurnakan lagi di tahun 1985. Dari kedua Undang-undang itu ditentukan bahwa baik parpol dan Golkar maupun organisasi asas organisasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Sudharmono menambahkan menurut ketentuan Undang-undang, bagi parpol dan Golkar ditetapkan prinsip yakni ke-

Tidak mempunyai anggota Ormas

"DENGAN CIRI KEPELOPORAN DALAM ORIENTASI
ORGANISASI, ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN IND
MASA DEPAN BANGSA"

Penataan fungsi yang seimbang dan proporsional

anggotaan parpol maupun Golkar adalah perorangan dan kader. "Ini berarti bahwa sebagai organisasi sosial politik, parpol dan Golkar tidak diperkenankan lagi mempunyai anggota berbentuk organisasi massa," kata Pak Dhar. Dalam hubungan ini Ketua Umum DPP Golkar menekankan bahwa hubungan kerja antara Golkar dengan ormas-ormas keluarga besar Golkar harus dibina dan dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, termasuk AMPI yang lahirnya bahkan dibentuk oleh Golkar sendiri.

Tetapi, walaupun ormas seperti AMPI bukan lagi anggota atau onderbouw Golkar dan tidak mempunyai hubungan struktural lagi, tidak berarti bahwa antara AMPI dan Golkar tidak ada hubungan sama sekali. Menurut Sudharmono hubungan komunikatif dan fungsional timbal balik dapat terus dijalin; Golkar dapat bekerja sama dengan AMPI dalam melaksanakan pengkaderan di kalangan pemuda yang terhimpun dalam AMPI karena memang anggota AMPI itu juga anggota Golkar. Ketentuan yang ada tidak menghalangi para anggota AMPI untuk menjadi kader Golkar serta berjuang di garis Golkar. "AMPI dalam melaksanakan program-program kepemudaan yang konstruktif dalam rangka memperlancar pembangunan, akan selalu memperoleh dukungan dari Golkar baik moral maupun material dalam batas-batas kemampuannya," tegas Sudharmono.

Sejalan dengan uraian Ketua Umum DPP Golkar, Menteri Dalam Negeri dalam pengarahannya yang disampaikan oleh Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri, Hari Soegiman, mengemukakan bahwa antara AMPI dengan Golkar terdapat kaitan historis. Karena ada kaitan historis ini maka antara AMPI dengan Golkar timbul hubungan informal yang mengandung nilai-nilai psikologis. Disebutkannya pula bahwa AMPI dan Golkar sejak mula sudah memiliki hubungan ideologis karena sama-sama berasaskan Pancasila. Tambahan lagi, baik AMPI maupun Golkar mempunyai lingkup kegiatan kekaryaan di dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga antara keduanya dapat mempunyai kesamaan dalam program-program tertentu.

Penataan Kehidupan Politik

Sementara itu Sekjen DPP Golkar Sarwono Kusumaatmadja dalam pengarahannya menggarisbawahi apa yang sudah diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Golkar yakni bahwa inti daripada dikeluarkannya Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai pelaksanaan penataan kehidupan politik yang sudah dimulai oleh Orde Baru sejak awal keberadaannya. Menurut Sarwono, Orde Baru ingin memilah-milahkan atau membedakan dengan tegas fungsi-fungsi yang diemban oleh masyarakat. Yang ingin dicapai ialah adanya penataan fungsi yang seimbang dan proporsional di antara berbagai fungsi yang ada dan diemban masyarakat. Undang-undang tentang Partai Politik dan Golkar serta Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mengatur pembedaan fungsi antara kehidupan politik serta kehidupan kemasyarakatan. Oleh Sarwono dikatakan bahwa hal tersebut perlu dilakukan, sebab suatu masyarakat yang ingin bergerak maju dan menjadi masyarakat modern harus mengadakan pemilahan berbagai fungsi tadi.

Dalam memberikan penjelasan tentang penataan kehidupan politik itu Sekjen DPP Golkar menggambarkan keadaan di tahun '60-an di mana boleh dikatakan tidak ada organisasi profesi fungsional yang bersifat independen karena rata-rata menjadi lahan perebutan bagi kekuatan sosial politik. Kelahiran Sekber Golkar di tahun 1964, menurutnya, antara lain juga untuk mencegah adanya intrusi atau infiltrasi politik di sektor keormasan. Ormas-ormas yang sudah terkena infiltrasi politik tidak bisa diharapkan berkembang untuk mengurusi hal-hal yang sebetulnya memang menjadi urusan ormas yang berkepentingan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan ungkapan Ketua Umum DPP Golkar, Sarwono mengatakan bahwa usaha penataan kehidupan politik itu bukan hal yang berjalan mudah, terbukti baru setelah 20 tahun mampu dihasilkan pengaturan keormasan melalui Undang-undang. Diakui pula oleh Sarwono bahwa kendati penataan fungsi itu sudah diatur dengan Undang-undang namun masih terdapat hal-hal yang perlu kejelasan lebih lanjut. Dalam hubungan ini Sekjen DPP Golkar mengatakan bahwa berangkat dari penghayatan terhadap fungsionalisasi yang dituntut oleh masyarakat yang makin modern, diharapkan AMPI dapat menyumbangkan pikirannya sehingga semua hal yang belum jelas akan menjadi jelas.

AMPI dan Pemilu

Dalam pengarahannya di depan Rakernas AMPI, Ketua Umum DPP Golkar menegaskan bahwa suksesnya Pemilu yang akan datang berarti tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, serta kepemimpinan nasional tetap berada di tangan Orde Baru dibawah pimpinan Bapak Soeharto. Kepada AMPI diharapkan agar dalam ikut mensukseskan Pemilu yang akan datang turut mengembangkan iklim dan situasi yang aman, tertib dan bergairah yang memungkinkan terselenggaranya pemungutan suara sebaik-baiknya. Diharapkan pula agar AMPI dapat mengajak masyarakat seluas-luasnya khususnya generasi muda untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Dan kepada para anggota AMPI yang juga merupakan kader Golkar yang telah dilengkapi dengan bekal secukupnya, diharapkan melakukan tugas sebaik-baiknya mensukseskan Golkar dalam pemilu mendatang melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Golkar.

Menteri Dalam Negeri dalam pengarahannya yang disampaikan oleh Dirjen Sospol Departemen Dalam Negeri Hari Soegiman, mengenai kaitan AMPI dan Pemilu menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak dapat menjadi peserta pemilu, dan dengan demikian juga tidak dapat melaksanakan kampanye. Namun seorang anggota organisasi kemasyarakatan yang juga menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik pesertapemilu dapat ikut-serta berkampanye. Lebih lanjut dikatakannya bahwa rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye pemilu. Dengan demikian kehadiran anggota AMPI sebagai warga masyarakat dalam kampanye pemilu tidak ada permasalahan. Sebelum mengakhiri pengarahan itu Hari Soegiman mengharapkan agar semua organisasi kemasyarakatan dapat bersikap dewasa dalam melaksanakan Undang-undang, sehingga tidak menempatkan 'wasit' pada posisi yang sulit. "Pelaksanaan Undang-undang tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah, melainkan juga menjadi tugas kewajiban seluruh masyarakat warganegara Republik Indonesia," tegasnya.

Masih dalam kaitan dengan kampanye Pemilu, Menpora dr. Abdul Gafur dalam pengarahannya mengemukakan bahwa AMPI hendaknya juga ikut mengusahakan agar kebringasan-kebringasan seperti yang terjadi dalam Pemilu 1982 yang berasal dari elemen-elemen pemuda itu tidak akan terulang lagi. Sehubungan dengan itu dikatakannya bahwa seorang anggota ormas pemuda yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada salah satu kekuatan sospol boleh hadir mengikuti kampanye pemilu dari kekuatan sospol dimaksud. Hanya saja, menurut dr Abdul Gafur, bila anggota ormas pemuda tadi tampil sebagai juru kampanye salah satu kekuatan sospol, dia tidak dibenarkan memakai atribut-atribut organisasi kepemudaannya. Oleh sebab itu bila seorang anggota AMPI tampil menjadi juru kampanye Golkar, seyogyanya dia mengenakan atribut Golkar saja dan tidak mengenakan atribut AMPI.

Penerus Bangsa

Pemuda sebagai salah satu potensi sosial dalam kehidupan dan struktur masyarakat, bangsa dan negara, yang disamping merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional juga merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa sekaligus sebagai penerus generasi bangsa selanjutnya, mutlak membekali dirinya agar benar-benar dapat menggantikan peranan generasi sebelumnya dalam membangun dan mencapai masa depan serta cita-cita perjuangan bangsa. Demikian antara lain ungkapan dari Asisten Teritorial Pangab Mayjen TNI Sarwono yang atas nama Pangab memberikan pengarahan di depan Rakernas AMPI yang lalu. Lebih lanjut dikatakan oleh Mayjen Sarwono bahwa pemuda adalah salah satu unsur dari mana kader-kader pimpinan bangsa dilahirkan. Khusus bagi bangsa Indonesia posisi pemuda sebagai salah satu sumber pimpinan bangsa tercatat sangat menonjol. Digambarkannya fakta-fakta antara lain bahwa lahirnya pergerakan nasional dari lingkungan pemuda yang mendirikan Budi Utomo tahun 1908. Juga kepeloporan pemuda dalam upaya persatuan dan kesatuan bangsa dengan Sumpah Pemuda 1928, serta bahwa Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi karena desakan para pemuda. Demikian pula pemuda berperan dalam penegakan Orde Baru. Sehubungan dengan itu oleh Pimpinan ABRI diharapkan agar kepemimpinan eksponen-eksponen pemuda yang telah terpilih perlu dimantapkan. Pimpinan Pemuda bertugas membina para pemuda dalam lingkungannya untuk memantapkan patriotisme. Demikian pula para pemuda yang bergerak di lingkungan masyarakat agar membina lingkungan masyarakat yang bersangkutan menjadi masyarakat yang dinamis.

Sementara itu Sekretaris Dewan Pembina AMPI Sukarton Marmosudjono dalam pengarahannya mengemukakan bahwa regenerasi pada dasarnya bukan hanya sekedar pergantian manusia dengan manusia dalam satu kurun waktu tertentu, tetapi juga harus berisikan transformasi nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menurut Sukarton harus ditransformasikan secara wajar kepada generasi penerus, antara lain melalui pendidikan politik. Dalam hubungan dengan nilai-nilai ini Sukarton menekankan bahwa yang paling mendasar dari nilai Pancasila dan UUD 1945 adalah persatuan dan kesatuan. Bertitik-tolak dari hal tersebut diharapkan agar para anggota AMPI yang juga kader Golkar benar-benar mampu melestarikan Pancasila dan secara konsekuen melaksanakan ikrar Panca Bhakti. ☐

Rendy MS/ TA Purnomo

Setiap Anda memerlukan
bahan sandang.....
datanglah ke
P.T. INDUSTRI SANDANG I

PRODUKSI

Tekstil: Shirting (Printed & Dyed) — Suiting (Printed & Dyed) — Bed Sheeting (Printed & Dyed).
Benang Tenun: Cotton 100% — Polyester 100% — Rayon 100% — Polyester/Rayon — Polyester/Cotton — Cotton/Polyester.

ALAMAT

Kantor Pusat: Jalan Patal Senayan I No. 5, Jakarta Selatan; Telepon: 5485383 (4 saluran) — Telex 45210 insan IA.
Unit Produksi: PABRITEKS SENAYAN — Jakarta • PATAL BANJARAN — Bandung • PATAL CIPADUNG — Bandung • PATAL BEKASI — Bekasi • PATAL PALEMBANG — Palembang.

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

"JANGAN MATIKAN USAHA MEREKA"

Menabuh Kukul — kentongan Bali — Presiden meresmikan 175 Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat di Wisata Mandala Samuantiga desa Bedulu Kabupaten Gianyar, Bali, dihari pertama Nopember.

Usaha rumah tangga berpotensi besar dan banyak menyerap tenaga kerja, kata Presiden di sana. Dan ada 17 juta orang tenaga kerja yang hidup dari sektor tersebut. Dengan keluarga, berarti puluhan juta orang. Presiden menghimbau pengusaha besar mengulurkan tangan membantu mereka — dengan memberi peluang-peluang. "Jangan justru mematikan usaha mereka". Namun kepada para pengrajin sendiri, Presiden mengingatkan bahwa mereka akan tetap lemah bila berjalan sendiri-sendiri. "Supaya yang kecil bisa menjadi kuat, berhimpunlah dalam wadah koperasi".

Presiden sempat berdialog dengan akrab dan terbuka dengan para pengrajin. Kepada Presiden, kepala desa minta bantuan berupa mesin untuk peningkatan produksi. Namun Presiden minta agar lebih dulu dipikirkan matang-matang sebelum melakukan modernisasi. Jangan sampai nantinya ada pengaruh tak menguntungkan terhadap masalah tenaga kerja.

Juga ditempat dan kesempatan yang sama, Presiden menyematkan tanda penghargaan Satya Lencana Pembangunan kepada enam orang Gubernur. Mereka adalah Gubernur Bali Prof. Dr Ida Bagus Mantra, Gubernur Sumatera Barat Ir Azwar Anas, Gubernur DKI R. Soeprapto, Gubernur Jawa Timur Wahono, Gubernur Jawa Tengah Ismail dan Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. AA Amiruddin. Mereka dinilai berhasil mengembangkan koperasi di daerah masing-masing.

---

10 NOPEMBER : TABUR BUNGA DAN MANGGALA

Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember tahun ini ditandai berbagai kegiatan yang khidmat. Selain ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, juga ada acara tabur bunga di Teluk Jakarta. Tabur bunga yang dihadiri oleh Ny. Yos Sudarso, dipimpin oleh Inspektur Upacara Ketua MA Ali Said. Sementara itu masyarakat dihimbau bersama-sama mengheningkan cipta dimanapun ia berada tepat pada pukul 8.15. Dan di kantor-kantor pemerintah di ibukota berlangsung upacara-upacara peringatan. Begitu pula di daerah lainnya.

Malam harinya di Istana Merdeka, Presiden dan Ibu Tien Soeharto beramahtamah dengan para warakawuri dan ahli waris Pahlawan Nasional. Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dan ibu Umar beserta para menteri kabinet hadir dalam ramah ramah. Menteri Sosial Ny. Nani Soedarsono SH memberikan kata sambutan atas nama pemerintah.

Presiden Soeharto pada pagi hari 10 Nopember itu juga membuka Penataran calon Manggala BP7 yang diikuti 122 orang. Berbicara dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, Presiden menyatakan tiap zaman mempunyai tantangannya sendiri. Dalam zaman pembangunan ini yang diperlukan adalah pahlawan-pahlawan pembangunan. Tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana membangun masyarakat adil dan makmur. Seraya mengingatkan terjadinya perubahan-perubahan nilai sejalan dengan perubahan zaman, Presiden berkata tak seluruhnya perubahan itu sejalan — bahkan ada yang membahayakan — cita-cita kemerdekaan kita. Dalam kaitan itulah, walau kita yakin akan kebenaran Pancasila, tidak berarti kita tak perlu secara sadar dan terus menerus mengadakan pendalaman dalam penghayatan Pancasila. Itulah perlunya diadakan penataran P4, UUD 1945 dan GBHN.

CATATAN PERISTIWA NASIONAL

PEMERINTAH TAK INGIN RAKYAT KEHILANGAN INISIATIF

Gadis cilik berusia 10 tahun Istiretno Kristina Dewi murid SD Garungan Kulon Progo mengalami pengalaman istimewa. Ia mendapat kecupan di dahinya dari Kepala Negara. Ia baru saja selesai membawakan sajak terima kasih mewakili anak-anak Indonesia dengan dicanangkannya Dasawarsa Anak 1986–1996. Pada hari itu di Sleman Yogyakarta berlangsung peringatan Hari Kesehatan Nasional. Selain kecupan, Presiden menuliskan pula pesan dalam buku harian Isti.

Pemilihan Kabupaten Sleman — tepatnya di Kringinan — sebagai pusat peringatan Harkesnas mempunyai latar belakang sejarah. Karena di dukuh itulah 27 tahun lalu peringatan Harkesnas diawali dengan penyemprotan DDT anti Malaria oleh Presiden Soekarno.

Presiden hari itu mencanangkan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian yang strategis dari pelaksanaan Dasawarsa Anak 1986–1996. "Dengan Dasawarsa Anak itu kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai orangtua untuk memberi kesejahteraan anak, pewaris dan pembangun masa depan". Presiden berkata pula

"Dari dukuh Kringinan ini, pada Hari Kesehatan Nasional sekarang, saya ajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mengembangkan Posyandu di lingkungan masing-masing". Saya serukan agar semua desa mengembangkan Posyandu, karena disinilah kunci penting bagi pemeliharaan kesehatan kita dan demi terwujudnya kesehatan masyarakat kita.

Di Kringinan itu, Presiden juga menyampaikan satu penegasan. Presiden mengatakan bahwa masih terdapat kesan di masyarakat seolah-olah dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, rakyat hanya menerima saja apa yang ditekankan atau diputuskan pemerintah.

Seolah-olah rakyat hanya dicekoki dengan berbagai program sehingga rakyat itu sendiri mati inisiatifnya. Bila masyarakat sudah tidak punya inisiatif, kata Presiden, itu adalah keadaan yang tidak baik, bahkan berbahaya. Kesan demikian tak boleh dibiarkan. Kita terima adanya kesan demikian, tetapi jelas pemerintah tidak bermaksud demikian.

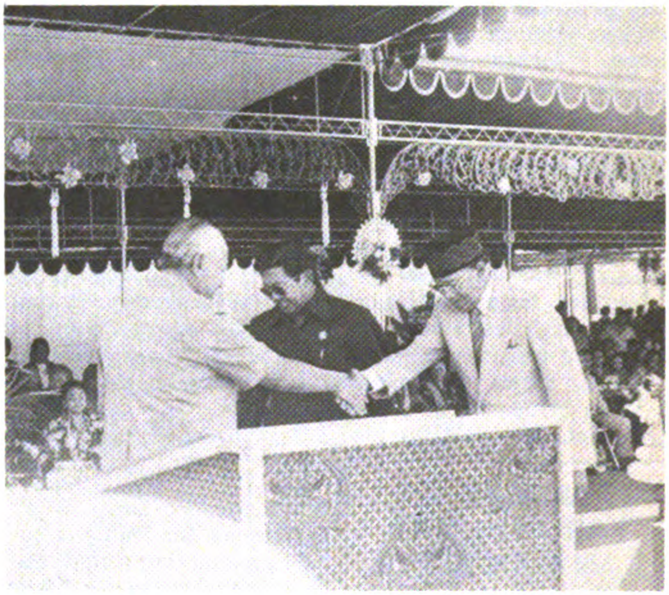

"Pemerintah tidak bermaksud memaksakan kehendak kepada rakyat". Tapi kalaupun ada yang tetap berkesan demikian tidak apa-apa, kita terima. "Bisa menjadi bahan yang baik untuk koreksi".

Presiden juga melakukan dialog dalam temuwicara di tempat itu tak kurang dari satu jam. Duduk diapit ibu Tien Soeharto dan Menteri Kesehatan Suwardjono, Presiden menjawab dan juga bertanya dengan diselingi senyum disana-sini. Dan salah satu pertanyaan Presiden adalah apa betul rakyat di desa merasa pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini dipaksakan. Ternyata diantara yang hadir, tak ada yang merasakan adanya paksaan seperti itu.

Jangan Sakiti Hati Rakyat

Ketika menghadiri HUT 22 Golkar di Dumai, Riau, fungsionaris Golkar Ir Hasyrul Harahap berpesan agar para pemuka dan kader Golkar di Riau menghindari melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati rakyat. Dan adalah kemudian pada kesempatan yang sama, Gubernur Riau Imam Munandar, melontarkan kritik kepada pemuka dan kader Golkar di Riau. Jangan berpikir sempit, ujarnya. Lalu ia meminta para pemuka dan kader Golkar itu untuk agar lebih matang dalam berpikir dan bertindak.

Pesan dari Ir Hasyrul, layak untuk diperhatikan. Makin besar Golkar, makin dituntut kecintaan kepada rakyat yang membuatnya besar. Pesan Ir Hasyrul hendaknya disimak oleh seluruh pemuka dan kader Golkar — dari kader desa hingga kepada Ketua DPD dan Ketua Dewan Pertimbangan.

Begitu pula permintaan untuk tidak berpikiran sempit, tentunya berlaku pula kepada semuanya. Bahkan Ketua Wantim sendiri, dituntut mutlak memiliki kematangan berpikir dan bertindak serta bijak dan berhati terbuka. Bukan apa-apa, karena beliaulah semestinya panutan utama seluruh warga Golkar di daerahnya. Insya Allah dengan contoh dan penteladanan yang cukup, para pemuka dan para kader Golkar lainnya akan memenuhi harapan ....

Mawas Diri Polri

Sungguh suatu peristiwa menarik. Berbicara di depan jajaran pimpinan Polri Jawa Barat berbagai tingkat, awal Nopember ini, Kapolri Letnan Jenderal M. Sanoesi melontarkan sejumlah kritik yang cukup tajam ke tubuh Polri sendiri. Bila di masa-masa yang lalu mengeritik korps sendiri cukup dihindari, maka kini dalam rangka mawas diri hal itu semestinya hal yang wajar dan patut saja.

Tapi terlepas dari itu, kritik yang diutarakan oleh Kapolri, betul-betul mewakili sejumlah hal yang terasakan namun tak mampu terucapkan oleh masyarakat selama ini. Letnan Jenderal Polisi ini antara lain menyebutkan bahwa jarang sekali perwira yang terbuka terhadap kesalahan anggotanya, telah terjadi komersialisasi jabatan, pungli di jalanan, adanya perlakuan terhadap tahanan dan tersangka di luar batas peri kemanusiaan, sistim tembak dalam pengurusan STNK dan sebagainya. Dan kesemuanya itu disimpulkan oleh Kapolri, "menuju kepada suatu keadaan yang memprihatinkan" dan merupakan tanda "kita menjadi jauh dari motto perjuangan kita sendiri, yakni Tribrata".

Bila masyarakat diberi kesempatan untuk bicara terbuka, daftar itu akan lebih panjang. Tapi selama ini masyarakat diliputi keraguan melontarkan kritik, karena pengalaman menunjukkan bahwa benteng 'kesetiaan korps' masih lebih dominan daripada keterbukaan menghadapi kritik. Dan selain itu, berdasarkan pengalamannya sendiri, mengeritik dan memprotes perlakuan tak wajar selain cenderung sia-sia, juga ada risikonya. Mereka, para anggota masyarakat sebagian terbesar memilih untuk pasif: Lakukanlah apa yang mau kau lakukan.

Lalu apa? Agaknya memang masyarakat tak dapat lagi diharapkan sebagai kekuatan kontrol yang terbuka terhadap Polri. Kalaupun ada anggota masyarakat yang ingin melakukannya, ada banyak kendala dan ketidak mudahan dalam mekanisme yang tersedia. Maka hanya figur pimpinan yang teguh dan berkemauan keraslah yang merupakan harapan. Dan Kapolri M. Sanoesi telah menunjukkan niat memulai. Tentu jajaran pimpinan dibawahnya akan sehati dan setujuan.

Masyarakat VS Kriminalitas

Di hari Minggu pertama bulan Nopember ini, tercatat dua kejadian yang tampaknya biasa dan rutin saja, tetapi sesungguhnya menarik. Diatas dua kereta api untuk dua jurusan, pada hari yang sama, masyarakat bersama-sama membekuk pelaku-pelaku penjambretan. Korban pada kedua peristiwa berteriak ketika mengalami tindak kejahatan dan secara spontan masyarakat turun tangan.

Ternyata, bila ada kebersamaan dan solidaritas, masyarakat bisa berbuat dan berperan banyak. Selama ini, kaum kriminal bisa merajalela di tempat-tempat dan kendaraan-kendaraan umum karena masyarakat kurang keberanian dan memilih menonton nasib sesamanya yang mengalami tindak kejahatan. Padahal, dari sudut jumlah, terang anggota masyarakat yang menang. Rupanya, selama ini para kriminal menang gertak dan menang memanfaatkan keraguan dan ketidakbersamaan rasa diantara anggota masyarakat. Sehingga terjadilah 'tirani minoritas'.

Lembaga-lembaga masyarakat agaknya perlu ikut berperan untuk menghidupkan kebersamaan dan rasa saling percaya antara anggota masyarakat. Baik dilingkungan wilayah per wilayah, maupun di tempat-tempat umum. Selain itu, kehadiran petugas secara nyata di mana-mana, akan ikut memperbesar keberanian masyarakat untuk bertindak. Peranan mass media pun besar. Bila ia menghidangkan suatu berita kejahatan dari sudut sensasinya saja, ia akan memperbesar rasa takut dan ketidak beranian bertindak dari masyarakat. Tapi bila sebaliknya menonjolkan keampuhan masyarakat dalam melawan kejahatan, keberanian akan menular ....

Dari Kampus Ke Kampus

Tak terbersit niat meng-Golkar-kan Kampus

Kemeriahan dan suasana gelora ulang tahun ke-22 Golongan Karya agaknya tak hanya dalam lingkungan organisasi keluarga besar Golkar, melainkan juga terdapat di tengah masyarakat. Hal itu tercermin dari makin meluasnya sikap mendukung dan pernyataan keinginan turut serta dalam barisan perjuangan Golkar. Bahkan suasana seperti itu terasa di kampus. Namun untuk yang terakhir ini, Ketua Umum Golkar merasa perlu menegaskan bahwa tak terbersit niat untuk meng-Golkar-kan kampus.

Pernyataan sikap itu, ditandai oleh meriahnya sambutan yang diberikan kepada Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH didalam setiap kunjungan kerjanya meresmikan berbagai proyek, termasuk saat peresmian 3 bangunan megah di Kampus Universitas Muhammadiyah Kebayoran Baru, Universitas Jayabaya Jakarta Timur dan Akademi Teknologi Industri)Akprind) Yogyakarta baru-baru ini.

Mengawali kunjungan kerjanya di Kampus Muhammadiyah, yang kini telah memiliki sebuah Kompleks sekolah dari Tk sampai Perguruan Tinggi, Sudharmono SH, menyatakan turut merasa memiliki adanya lembaga pendidikan tersebut, karena Ia telah menjadi warga Kebayoran sejak tahun 1951, dan mengaku kenal betul dengan watak perjuangan Organisasi Muhammadiyah ini. Oleh karenanya, pada saat itu ia menyatakan diri sedia menjadi 'Soko Guru' Muhammadiyah. Ia menyerahkan sumbangan 3,75 juta selaku pribadi. "Belum lagi sebagai Ketua Umum Golkar," tambahnya.

Dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan, Sudharmono menyatakan rasa simpati terhadap Lembaga Pendidikan Muhammadiyah ini dalam upayanya mencari dana dalam setiap kegiatan guna memajukan dunia pendidikan. Ia tahu pasti bahwa pencarian dana itu bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karenanya, setiap usaha penambahan sarana pendidikan, pasti akan mendapat sambutan masyarakat, Pemerintah dan Golkar.

Bagi Bangsa Indonesia kata Sudharmono, Pembangunan yang dirumuskan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, lahir dan bathin, maka pembangunan sarana pendidikan merupakan sarana yang mutlak diperlukan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan saja dalam GBHN, tetapi juga dalam UUD '45 yang salah satu fasalnya menyatakan, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran, dimana Pemerintah kini sedang mengusahakan suatu sistem pengajaran Nasional yang akan dituangkan didalam Undang-undang.

Muhammadiyah sebagai Organisasi kemasyarakatan mempunyai banyak pengalaman dengan sejumlah Pejuang yang kini usianya telah semakin tua. Sebelum Indonesia Merdeka, organisasi Muhammadiyah bukan saja organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, tetapi juga telah menjadi modal pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Apakah itu dibidang kemasyarakatan, keimanan, ilmu pengetahuan, amal yang diharapkan untuk terus dapat mengembangkan peranannya tanpa kenal henti. Sebagaimana halnya hukum pembangunan yang tidak kenal henti dan akan terus dipacu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, itulah tantangan kita, kata Sudharmono SH.

Sejalan dengan harapan Ketua Umum Golkar, H. Prodjokusumo yang juga bekas Ketua Sekber Golkar itu mengatakan, dalam rangka melaksanakan program pengembangan minat dan bakat anak didik, diterapkan suatu methode pendidikan diluar jam pelajaran. Dengan program ini, diharapkan Perguruan Muhammadiyah akan menjadi Sekolah Pembangunan dalam kata dan makna. Dengan jalan ini kata Prodjo, diharapkan Bangsa Indonesia akan sukses dalam melestarikan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, yang bilamana ditopang oleh sistim pendidikan tepat guna, akan menghasilkan pula manusia Taqwa yang berilmu pengetahuan dan berteknologi tinggi, patriotik dan bersedia berkorban untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kampus Perguruan Muhammadiyah berlantai tiga yang diresmikan oleh Ketua Umum Golkar, selain mendapat bantuan dari Presiden sebesar Rp. 75 juta yang penyerahannya melalui Sudharmono SH, juga memperoleh bantuan dari Gubernur DKI sebesar 100 juta — belum termasuk swadaya masyarakat sebesar 26 juta.

Bukan Politik Praktis

Sementara itu, di Kampus Universitas Jayabaya yang terletak di Jalan Raya Bogor, berdiri megah bangunan diatas tanah seluas 1,25 hektar dengan luas bangunan 6600 meter persegi, kedatangan Ketua Umum Golkar Sudharmono SH mendapat sambutan hangat oleh seluruh Dosen dan Staf Pengajar, Karyawan serta segenap Mahasiswa Universitas Jayabaya.

Acara yang sangat berkesan didalam bangunan bernilai 2 milyar rupiah itu didahului dengan laporan dan sekaligus pernyataan ikrar menjadi anggota Golkar oleh Rektor Jayabaya Dr. Moeslim Taher SH.

Didalam pernyataannya, Moeslim Taher mengatakan bahwa sudah lama para unsur pimpinan dan segenap unsur pelayanan dilingkungan Universitas Jayabaya dan akad emi-akademi Jayabaya menjatuhkan pilihan untuk secara individual masuk menjadi anggota Golkar. Menurut Taher, kemauan itu atas dasar kesadaran masing-masing yang dihubungkan dengan peranan dan tanggung jawab didalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk membangun manusia seutuhnya. Pada hakekatnya, perjuangan itu identik dengan program Tri Sukses Golkar. Bagi masyarakat ilmiah hanyalah dimungkinkan oleh keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan sikap dan perilaku sebagai pengamalan Pancasila. Perpaduan antara kedua hal itu mensyaratkan masyarakat ilmiah menjadi bagian dari suatu civitas budaya politik. Dan hal ini ditemukan dalam hakekat idealisme dan perjuangan Golkar. Itulah yang mendorong para ilmuwan beserta segenap tenaga kerja yang berada di lingkungan Universitas Jayabaya dan Akademi Jayabaya secara pribadi berketetapan hati untuk menjadi anggota Golkar. Tegasnya, kata Taher lebih lanjut, masuk Golkar bukan saja menjadi simpatisan, atau pendukung, melainkan menjadi anggota Golkar dan sekaligus dapat ditingkatkan menjadi Kader Golkar. Ini merupakan manifestasi adanya sambung rasa antara masyarakat ilmiah dengan hakekat dan tingkah laku perjuangan Golkar. Sambung rasa dan sambung ratio itulah yang jatuhnya pilihan politik dan partisipasi politik civitas akademika Universitas Jayabaya masuk dalam Golkar. Jadi landasannya jelas, keyakinan politik atas dasar kesadaran orientasi politik Golkar, yang tiada lain dari sasaran perjuangan nasional dalam mewujudkan Amanat Penderitaan Rakyat.

Apakah ini berarti Universitas Jayabaya dan Akademi Jayabaya turut dalam politik praktis?" Jawabnya jelas dan tegas: "Tidak", kata Taher. Yang masuk menjadi anggota Golkar adalah masing-masing unsur pimpinan, unsur pelayanan dan karyawan perguruan tinggi secara individual.

Dengan dasar jalan pikiran itulah, Dr Moeslim Taher, Rektor Universitas Jayabaya mengajak segenap anggota masyarakat Ilmiah Indonesia untuk secara jelas dan tegas menampakkan sikap sosial politiknya, menganggap sikap politik itu ke permukaan, ialah sikap sosial politik yang pragmatik, rational tetapi dibarengi totalitas idealisme, dengan biduk kepeloporan perjuang Orde Baru yang nyatanyata selama ini dikayuhkan oleh Golkar.

Sikap politik masyarakat ilmiah demikian itu sangat diperlukan, untuk dapat berperan dalam proses pencetakan kaderkader bangsa, sehingga kelangkaan elite sosial politik dapat terisi, khususnya dalam memasuki era kelestarian Pancasila dan UUD 1945.

Menyambut pernyataan sikap pimpinan, korps dosen, karyawan dan mahasiswanya yang menyatakan secara sukarela menjadi anggota Golkar, Ketua Umum Golkar Sudharmono SH dalam kesempatan itu menyatakan bahwa sebagai pimpinan Golkar, "Tidak pernah terbersit maksud untuk meng-Golkar-kan universitas" Apalagi memaksa warganya masuk Golkar. Karena Sudharmono yakin kalau menjadi anggota Golkar dan dipaksa itu malah berat. Menjadi anggota Golkar haruslah atas dasar kesadaran dan kesukarelaan, ini adalah sesuai dengan sistem dan konsepsi Orde Baru. Golkar membuka diri jika warga kampus menjadi anggota Golkar, dengan demikian akan mewujudkan terciptanya pendewasaan demokrasi Pancasila, tegas Sudharmono.

Golkar sampai saat ini masih belum puas terhadap hasil-hasil yang dicapai, karena yang nampak saat ini baru kuantitas dari anggota serta kadernya. Sedang yang diinginkan Golkar tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas, agar program Tri Sukses Golkar semakin mantap dalam pelaksanaannya.

Dalam kesempatan tersebut Sudharmono juga menguraikan tentang ciri-ciri kepribadian Golkar. Menurutnya ada tiga hal kepribadian yaitu karena Golkar adalah merupakan salah satu organisasi yang resmi yang diatur oleh UU maka Golkar mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kekuatan sospol lain. Namun sebagai ciri, kepribadian atau suatu

tanda yang membedakan dengan organisasi sospol yang lain, ialah kelahiran Golkar. Kelahiran ini merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dihayati, Golkar lahir 22 tahun lalu 20 Oktober 1964. Pada saat itu keadaan politik negara kita, sedang diancam gejolak, gejolak yang mengancam ideologi Pancasila, terutama ancaman dari partai politik Partai Komunis Indonesia, Golkar tampil sebagai penyelamat melawan ancaman itu. Pancasila inilah yang merupakan salah satu identitas, merupakan semangat yang tidak boleh padam dari Golkar. Oleh karena itu kePancasilaan Golkar dituangkan sebagai tujuan Golkar dalam anggaran dasarnya. Kepancasilaan inilah yang menjadi ciri pokoknya Golkar. Ciri yang kedua adalah ciri karya dan kekaryaan, ini dituangkan oleh Golkar dalam doktrinnya. Sedang ciri yang ketiga adalah yang tertuang dalam Panca Bhakti Golkar. Oleh karena itu setiap warga negara yang ingin menjadi warga Golkar harus mendaftarkan diri, dan salah satu syaratnya adalah mengikrarkan Panca Bhakti Golkar tersebut.

Usai memberikan sambutan peresmian Kampus C universitas Jayabaya, Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono, menyerahkan secara simbolik kepada rektor Unija Dr. Moeslim Taher Kartu Anggota Golkar (KAG), mewakili segenap sivitas akademika Jayabaya.

Tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat sama

Sementara itu pada kesempatan lain di Akademi Teknologi Industri "Akprind" Yogyakarta, pada hari berikutnya 12 Nopember, yang bertepatan dengan hari kesehatan nasional, Ketua Umum Golkar Sudharmono, SH yang menyertai Bapak Presiden, berkesempatan meresmikan satu lagi kampus universitas yang dipimpin kader-kader Golkar setempat.

Dalam kesempatan itu Ketua Umum Golkar Sudharmono, menyambut baik setiap usaha swasta dalam usahanya menambah sarana pendidikan tinggi. Hal tersebut harus didorong terus mengingat penambahan sarana pendidikan yang memang dibutuhkan masih terbatas. Dewasa ini kita belum sampai kesana. Kita baru sampai secara susah payah pada tingkat menyediakan fasilitas yang merata bagi pendidikan dasar. Kebutuhan Sekolah menengahpun belum bisa dipenuhi seluruhnya, terlebih pendidikan tinggi.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terpokok. Meskipun titik berat pembangunan saat ini masih diletakkan pada bidang ekonomi, namun tidak berarti pembangunan bidang pendidikan diabaikan. Bahkan sebaliknya, kita mengutamakan bidang ekonomi agar kita meningkatkan kemampuan untuk dapat meningkatkan bidang pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, kata Sudharmono. Kita semua menyadari bahwa amanat pembukaan UUD '45, menyatakan bahwa salah satu tujuan kita merdeka, salah satu tugas pemerintahan negara adalah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. UUD kita juga menyebutkan dalam pasal 31 bahwa setiap warganegara berhak memperoleh pengajaran. Pasal 31 ayat 2 menyatakan, bahwa pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional yang harus dituangkan dalam Undang-Undang. Dewasa ini menurut Sudharmono SH yang juga Menteri Sekretaris Negara itu, pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan undang-undang pendidikan. Diharapkan dengan UU pendidikan nasional itu nanti dalam waktu yang setepat-tepatnya arah, isi, kurikulum dan sebagainya akan makin jelas. Demikian juga partisipasi dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya yang menurut GBHN turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan nasional yang sebaik-baiknya ini, juga makin jelas.

Golkar juga menganggap pembangunan pendidikan ini sangat penting. Baik dalam program umumnya yang dituangkan dalam hasil Munas III maupun dalam pernyataan politiknya dari hasil Munasnya tahun 1983, Golkar menggaris bawahi pentingnya pendidikan ini memperoleh perhatian yang seluas-luasnya. Apabila kita ingin memanfaatkan sumberdaya manusia sebagai sumber tenaga yang ampuh dari pembangunan nasional yang terarah dan setepat-tepatnya, sektor pendidikan harus diusahakan. Hal itu juga dikemukakan Sudharmono pada kesempatan terdahulu di Universitas Jayabaya maupun universitas Muhammadiyah.

Sudharmono merasa yakin apabila usaha meningkatkan kualitas pendidikan itu juga menjadi keinginan dari pimpinan akademi, akan memperoleh dukungan dari masyarakat. Hal ini juga harus disadari sedini mungkin, bahwa pemanfaatan mengikuti pendidikan di akademi untuk belajar dan menguji ilmu yang sebaik-baiknya untuk kemudian diabdikan pada masyarakat yang mempunyai manfaat bagi masyarakat luas.

Bangunan induk yang diresmikan oleh Ketua Umum DPP Golkar tersebut telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 360 juta lebih. Sebagian bantuan berasal dari Presiden. Menurut Mensesneg Akprind telah memperoleh bantuan presiden tiga kali. Jarang lembaga pendidikan yang memperoleh bantuan Presiden lebih dari satu kali. Namun ini tidak berarti Akademi ini diistimewakan dibanding dengan yang lain, juga bukan karena Presiden berasal dari Yogya, tetapi semata-mata berdasarkan penilaian urgensinya bagi masyarakat dan kesungguhan pimpinan dalam menggerakkan daya dan dana. Juga jarang suatu lembaga pendidikan yang mendapat plakat Golkar lebih dari satu kali seperti Akprind ini, kata Ketua Umum, namun ini semua hanyalah faktor keberuntungan saja.

Dalam kesempatan tersebut Sudharmono SH juga menyerahkan bantuan Presiden untuk pembangunan Universitas Widya Mataram sebesar 100 juta, Masjid Baitul Salam Bantul 75 juta, Masjid desa Sawah Gunungkidul 6 juta. Dan sebagai Pimpinan Golkar Sudharmono menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kulon Progo yang tertimpa musibah bencana alam sebanyak Rp. 5 juta.

Turut hadir pada peresmian kampus Akprind tersebut antara lain Sukarton SH, Zarlon Zaghlul SH, Ir Akbar Tandjung, Anang Adenansi, Ny. TS Darsoyo, Nh. Tati Sumiarno, Sukarno MPA, Eric Samola SH dan sejumlah fungsionaris Golkar lainnya. □

Suwito

Pasti Tidak Ringan, Tapi Harus Berhasil

Tak ada kekecewaan melebihi kemunduran

Buleleng di belahan utara Bali, adalah kabupaten kemenangan Golkar. Dalam pemilihan umum yang terakhir Golkar meraih angka kemenangan 97%, nyaris menang total. "Ini harus kita pertahankan", ujar Ketua Umum Golkar Sudharmono SH ketika berada di Buleleng Timur 1 Nopember. "Karena tak ada kekecewaan yang lebih besar selain daripada mengalami kemunduran".

Kemenangan yang 97% itu, ujar Ketua Umum lagi sorenya pada hari yang sama - kali ini di Buleleng Barat - adalah "suatu kehormatan, suatu kebanggaan, tetapi sekaligus juga tantangan". Dan tantangan itu adalah "apakah Golkar Buleleng mampu untuk mempertahankan kemenangan". Agaknya, tantangan yang diutarakan Ketua Umum menggelitik dan menggugah ribuan massa yang membentuk lautan manusia di lapangan desa Banjar itu. Dan mereka menjawab "Mampu!".

Tapi sekedar pernyataan, tentu tak dengan sendirinya membawa Golkar kepada kemenangan sekali lagi. Sudharmono menunjukkan perlunya kerja keras. "Dalam suasana kita memperingati HUT Golkar ke-22 ini, marilah kita bermawas diri. Marilah lebih membulatkan tekad dan melaksanakan tekad itu sebaik-baiknya". Setiap

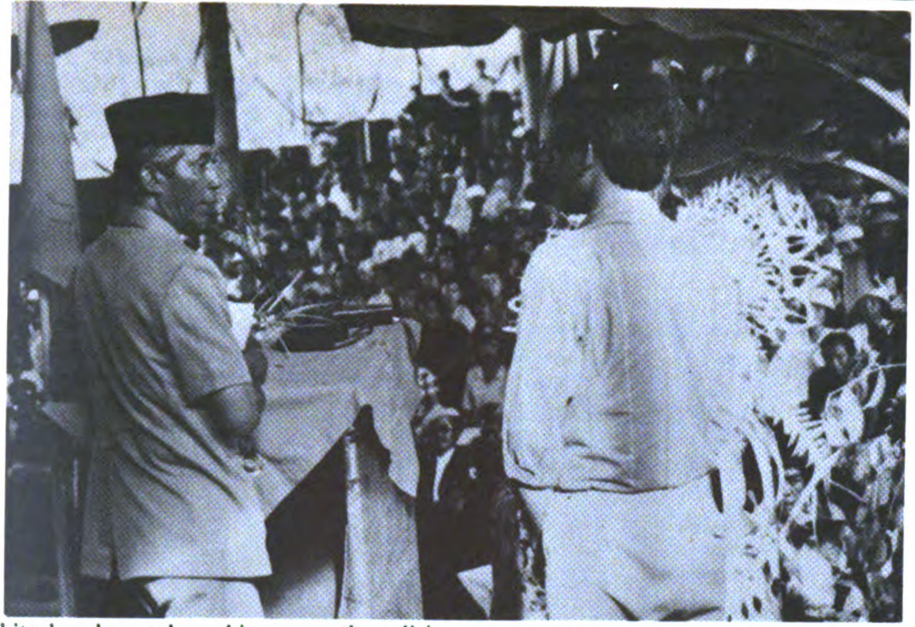

kita berulang tahun, kita sempatkan diri melakukan penilaian kembali perjalanan kita. Yang pertama, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang telah kita sumbangkan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara dan kepada cita-cita Golkar''.

Tingkatkan lagi dan lebih cepat

Sabtu pagi itu, sebelum ke Buleleng, Ketua Umum dan rombongan DPP Golkar ikut menghadiri peresmian Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat di Wisata Mandala Samuantiga desa Bedulu Kabupaten Gianyar oleh Presiden Soeharto. ''Saya mengikuti kunjungan bapak Presiden'', kata Sudharmono di kecamatan Kubutambahan Buleleng Timur. ''Kita tahu bersama, kita ingin mengembangkan kehidupan koperasi sebaik-baiknya sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bersama-sama''. Rakyat kita besar jumlahnya tersebar di berbagai daerah dan mempunyai bidang kehidupan yang berbeda-beda. Karena itu adalah baik sekali untuk mengatur perekonomian kita sebagai usaha bersama dengan semangat gotong royong. Menghimpunnya dalam koperasi. Dengan pengaturan yang baik dan dengan dukungan semua pihak, ''pasti kita dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan dengan lebih cepat lagi''

''Sebagai pimpinan Golkar, dalam hal ini saya menganjurkan agar kader-kader Golkar jangan ketinggalan. Bahkan saya harapkan dapat terus menggerakkan dan menggalakkan upaya peningkatan kehidupan perekonomian kita dalam kerangka usaha koperasi''. Ketua Umum mengungkapkan bahwa banyak pimpinan koperasi yang hadir dalam acara bersama Presiden di Gianyar adalah kader-kader Golkar yang tangguh. ''Untuk Buleleng, saya juga berharap munculnya hasil karya kader-kader kita memajukan koperasi''.

Di Kubutambahan ini, Ketua Umum melakukan peninjauan kegiatan kelompok diskusi tetap Karakterdes. Ada dua kelompok. Ketua umum berbaur mendengarkan jalannya diskusi. Lalu Ketua Umum bertatap muka dengan warga Golkar dari berbagai kecamatan di Buleleng Timur ini disemacam balai desa yang sederhana namun cukup luas untuk menampung ratusan orang. Ketua Umum sempat berdialog dengan beberapa kader ketika tampil memberikan pengarahan.

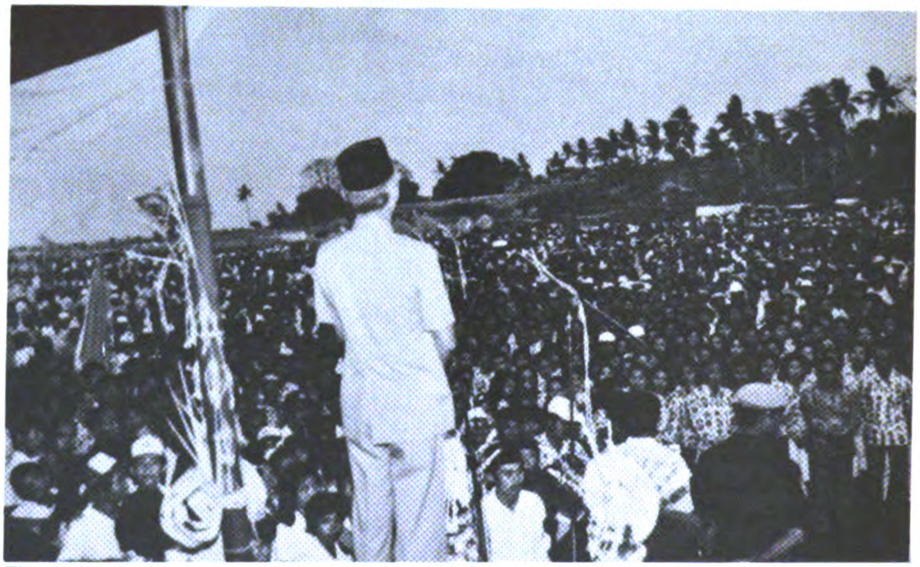

Tingkatkan lagi

Secara spontan, ketika mendengar adanya swadaya masyarakat membangun Pura - sarana peribadatan Hindu Bali - Ketua Umum ikut menyumbangkan Rp. 5 juta.

Pusat kemeriahan ada di desa Banjar Buleleng Barat. Massa yang ribuan jumlahnya telah menanti sejak siang hari. Matahari cukup terik. Tapi bersamaan dengan kedatangan Ketua Umum sore itu, hujan turun sejenak dan merubah udara menjadi sejuk. ''Ini adalah berkah'', kata Ketua Umum.

''Saya dan rombongan datang ke sini untuk melihat kiprah Golkar di daerah ini''. Sudharmono menyatakan kebanggaannya bahwa kabupaten Buleleng selama ini telah membuktikan diri - dengan kemenangan 97% dalam pemilihan umum - sebagai rakyat Golkar, praktis seluruhnya. Ketua DPD II Golkar Buleleng Parma Inggas menyatakan tekad warga Golkar di hadapan Ketua Umum untuk berjuang mempertahankan kemenangan Golkar. Tekad yang disampaikan ini diiringi dengan sorak sorai gegap gempita massa Golkar yang bergelora.

Memberikan pengarahannya, Ketua Umum mengingatkan setiap warga Golkar memegang teguh dan menghayati makna ikrar Golkar Panca Bhakti. ''Ikrar itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus kita hayati dan yang lebih penting lagi kita amalkan bersama''. Kepada massa Golkar di tempat itu, Ketua Umum juga menyinggung kembali masalah pengembangan koperasi. Warga Golkar jangan sampai ketinggalan mensukseskan koperasi. ''Kita mempunyai kesempatan untuk turut serta memajukan koperasi, karena kita yakin dengan kehidupan berkoperasi kita mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin''. Golkar adalah penggerak, pendukung, pelopor pembaharuan dan pembangunan, dan itu dilakukan melalui karya. ''termasuk di bidang koperasi''.

Ketua Umum pada kesempatan itu meneruskan pula sumbangan sejumlah pengusaha warga Golkar Bali anggota asosiasi penyalur Bulog sebesar Rp.10 juta kepada DPD Golkar Bali. Dan untuk lebih mendekatkan lagi warga Golkar Bali dengan para anggota DPP, Ketua Umum memperkenalkan anggota rombongan. Antara lain Ny. EN Sudharmono, Sukarton Marmosoedjono SH, Zarlons Zaghlul SH, Ir Akbar Tanjung, AA Oka Mahendra SH, Ny. TS Darsoyo, Drs Sukarno, Drs Moerdopo, Drs Waskito, Tatto Pradjamanggala, Ir Siswono, Sri Redjeki SH, Sudarsono SH, RH Subono serta sejumlah fungsionaris Golkar lainnya. Bersama rombongan ada bingkisan khusus, rombongan artis lawak - Edy Sud, Ateng, Iskak, Sup Jusup, Teten - yang mendahului memberi hiburan sebelum kedatangan Ketua Umum. ☐

Rum Aly

Ketua FABRI Subiyono SH:

Peran Golkar Dalam Pembangunan Memang Menonjol

Harus diakui, pembangunan di Indonesia bukan hanya milik golongan, bahkan bukan hanya milik pemerintah, tetapi pembangunan milik bangsa Indonesia. Semua unsur yang ada dalam bangsa terlibat baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaannya.

"Kita melihat, upaya pembaruan dan pembangunan itu bersumber pada GBHN. Semua kekuatan dalam masyarakat baik Golkar, ABRI, Partai politik, organisasi kemasyarakatan, rakyat dan pemerintah terlibat dalam pembangunan itu", kata Ketua Fraksi ABRI di DPR, Subiyono SH dalam wawancara dengan Media Karya baru-baru ini.

Namun dalam proses pembangunan Ketua Fraksi ABRI menyatakan, tidak menutup mata bahwa peran Golkar cukup besar, bahkan dominan. Besarnya peranan itu dimungkinkan tidak saja karena jumlah kader besar yang sanggup mewarnai semua lingkungan kehidupan masyarakat, tetapi lebih-lebih karena organisasi ini mempunyai program dan mampu menuangkannya secara konkret.

Titik tolak perjuangan Golkar ini adalah komitmen untuk menggunakan Pancasila sebagai landasan dan UUD 1945 sebagai visi perjuangan. "Landasan maupun cita-cita perjuangan itulah yang membawa keberhasilan Golkar dalam melaksanakan peran dalam pembangunan", katanya. Keberhasilan dalam penyederhanaan dan pembaruan kehidupan politik, lahirnya P4, diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas, serta pembangunan sebagai pengamalan Pancasila adalah rangkaian hasil konkret berkat komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945, yang diperjuangkan sejak Orde Baru.

Secara internal, Golkar tetap menanamkan komitmen itu kepada jajarannya antara lain melalui program organisasi, program kaderisasi, yang merupakan pendidikan politik.

Ia melihat kaderisasi Golkar, antara lain melalui Karakterdes merupakan upaya untuk menyiapkan kader pemimpin bangsa, dan merupakan langkah regenerasi. "Langkah yang ditempuh Golkar itu sangat besar manfaatnya bagi bangsa dan masyarakat", katanya.

Namun ia juga mengingatkan, hendaknya dalam kaderisasi itu Golkar menyeleksi ketat para calon kader. Hendaknya mereka yang terpilih sebagai kader benar-benar orang-orang Pancasilais. "Jangan sampai kemasukan orang-orang profitir politik, yang mencari keuntungan pribadi melalui kegiatan politik," katanya.

Kader Golkar harus mampu mengembangkan nilai sebagaimana telah dipelopori oleh pendiri dan pengelola Golkar selama ini. Nilai cara berpikir, bersikap dan perilaku, tata kerja yang efektif dan efisien, serta sikap disiplin perlu terus dikembangkan di jajaran kader Golkar.

Atas pertanyaan, Subiyono mengemukakan, kemandirian Golkar sering dikaitkan dengan hubungannya dengan ABRI.

Dikatakannya, pada masa awal perjuangan Golkar di tengah situasi politik masa lalu, Golongan Karya memang diterjemahkan sebagai golongan fungsional. Golongan Karya saat ini merupakan wujud sosial politik golongan fungsional, dan didalamnya terdapat unsur buruh, pegawai, tani, pengusaha nasional, ABRI, alim ulama, cendekiawan, dan pendidik.

Golongan fungsional dalam Golkar yang mempunyai komitmen dengan Pancasila dan UUD 1945 kemudian membentuk Sekber Golkar. Banyak tokoh ABRI berperan dalam Sekber Golkar. Bahkan masyarakat luar mengatakan Golkar dilahirkan oleh ABRI.

Pendapat itu tentu tidak tepat, tetapi menunjukkan betapa dekatnya Golkar dan ABRI berkat komitmen yang sama terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Kemandirian Golkar makin mantap setelah lahirnya UU nomor 3/1975 yang kemudian diperbaharui menjadi UU nomor 3/1985 tentang Parpol dan Golkar. Dengan UU itu, Golkar hadir sebagai kekuatan sosial politik.

Tentang hubungan ABRI dengan kekuatan sospol termasuk Golkar, Pak Harto dalam pidatonya di depan peserta Rapim Golkar di Pakanbaru beberapa tahun lalu mengatakan, ABRI sebagai kekuatan hankam adalah alat negara. Sebagai alat negara, ABRI berdiri di atas semua golongan.

Sedangkan ABRI sebagai kekuatan sosial, ABRI menyatakan bergandengan tangan dengan kekuatan sosial yang lain, yang terpercaya dalam mempertahankan dan mengamalkan Pancasila.

Dalam hubungan keluar, ABRI memang lebih dekat dengan Golkar dibandingkan dengan kekuatan sosial politik yang lain. Hal ini dikarenakan kesamaan konsep dalam mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, serta kesamaan dalam perjalanan sejarah, terutama sejak perjuangan menegakkan Orde Baru. Berdasarkan pengamatannya yang didasarkan pada latar belakang perkembangan sejarah, ia melihat Golkar telah mandiri. Unsur-unsur kemandirian terlihat jelas. Golkar telah mandiri dalam pengertian tidak tergantung pada kekuatan luar, mampu menetapkan kebijakan dalam dirinya, bahkan telah mempunyai identitas sendiri. Golkar telah menunjukkan dirinya bebas dalam mengambil keputusan, bebas dalam mengemukakan pernyataan pendapat terhadap isyu-isyu politik yang penting.

Ia juga melihat bahwa Golkar makin hari makin menunjukkan kedewasaan sebagai kekuatan sosial politik. Bahkan kedewasaan itu terlihat cukup menonjol.

Diakuinya, ABRI memang mempunyai hubungan yang dekat dan akrab dengan Golkar. Tetapi kedekatan dan keakraban hubungan, tidak dapat dikaitkan dengan masalah kemandirian. Kerjasama saling membutuhkan sangat diperlukan dalam pembangunan. Golkar bersama ABRI telah berusaha menunjukkan dan mewujudkan kerjasama itu demi suksesnya pembangunan nasional. Kerjasama itu tidak terbatas pada dua kekuatan sosial itu, tetapi juga dengan kekuatan sosial lainnya. ☐

Subandrio

Oleh: Zarlons Zaghlul SH

Sukses Pemilu 1987

Pemilihan Umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistim kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan Perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara UUD 1945. Kekuasaan Negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan Negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistim permusyawaratan perwakilan. Pemilihan Umum di negara kita dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dan Pemilihan Umum tersebut dimaksudkan untuk mengisi lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang akan membawakan suara hati nurani rakyat dalam masa lima tahun kedepan.

ASAS PEMILIHAN

Pemilihan Umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat didasarkan pada asas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia atau yang sudah lebih dikenal dengan singkatan LUBER. Artian dari singkatan LUBER tersebut sungguh sangat mendalam dan merupakan tonggak utama dari Demokrasi Pancasila. Untuk menyegarkan ingatan ada baiknya sejenak kita melihat artian dan misi singkatan tersebut.

UMUM, berarti bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan bagi yang telah berusia 21 tahunan berhak dipilih, sehingga dengan demikian pemilihan berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warganegara.

LANGSUNG, ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

BEBAS, berarti bahwa tiap warganegara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

RAHASIA, ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

SISTIM PEMILIHAN & KESEIMBANGAN

Menurut ketentuan peraturan perundangan dinyatakan bahwa untuk pemilihan anggota DPR, dan DPRD dipakai sistim perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya kekuatan perwakilan Organisasi dalam DPR dan DPRD adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Untuk mencapai tujuan itu suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun dalam suatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), ialah suatu bilangan yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang tersedia.

Sistim daftar, begitu pula sistim pemilihan umum, menggambarkan adanya pengakuan stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan.

Tiap-tiap Daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil yang ditetapkan berdasarkan sistim perwakilan berimbang.

Undang-undang menentukan pula bahwa jumlah anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar Jawa. Untuk menentukan angka, wakil yang dipilih disetiap Daerah Tingkat I, dipakai dasar perhitungan bahwa setiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah Tingkat I memperoleh seorang wakil.

Apabila dalam pemilihan umum semata-mata dipergunakan dasar jumlah penduduk, maka jumlah wakil yang dipilih dari pulau Jawa akan banyak melebihi wakil dari luar Jawa. Akan tetapi mengingat luas wilayah Nusantara di luar Jawa jumlah penduduknya pada umumnya kurang daripada Jawa, maka daerah luar Jawa ditingkatkan kemungkinan jumlah wakilnya dengan jalan mengkombinasikan persyaratan jumlah penduduk dengan jumlah Daerah Tingkat II, sehingga dengan demikian disebutkan bahwa:

Jumlah wakil dalam tiap Daerah Pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Dan tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.

Dengan mengadakan kombinasi antara banyaknya penduduk di Daerah Tingkat I dan jumlah wakil dalam tiap Daerah Pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II yang ada dalam Daerah Pemilihan yang bersangkutan dan tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil, maka sedikit banyak akan tercapai keseimbangan antara wakil-wakil yang berasal dari pulau Jawa dengan luar Jawa.

TARGET PEMILU 1987

Untuk Pemilu 1987 jumlah penduduk warganegara Indonesia hasil Pantarlih mencapai 162.021.971 orang atau bertambah sebanyak 16.569.526 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk warganegara Indonesia yang tercatat pada Pemilu 1982. Dari jumlah tersebut diperkirakan terdapat sebanyak 93.965.953 orang Warganegara Indonesia yang berhak memilih atau bertambah sebanyak 11.890.847 orang bila dibandingkan dengan jumlah yang berhak memilih pada Pemilu 1982. Jumlah pemilih yang diperkirakan akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 1987 yang akan datang sebanyak 89.267.656 orang atau ± 95%.

Pada Perkiraan Keadaan Pemilu 1987 yang telah ditetapkan oleh Golkar ditargetkan secara nasional Golkar harus dapat meraih sedikit-dikitnya 280 kursi atau 70% dari jumlah kursi yang diperebutkan yang kemudian target tersebut menjadi 283 setelah disesuaikan dengan adanya penentuan jumlah pasti dari kursi yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum sebagai hasil dari pendaftaran penduduk.

Untuk dapat meraih 283 kursi tersebut diperlukan suara sebanyak 61.193.998 orang atau 69% dari perkiraan jumlah pemilih yang diperkirakan akan menggunakan hak pilihnya. Jumlah suara yang diperlukan tersebut bukan sedikit dan tidaklah mudah untuk memperolehnya. Perjuangan gigih yang didukung oleh persiapan yang mantap adalah satu-satunya upaya yang dapat diandalkan oleh Golkar lebih-lebih lagi bila kita memperhatikan faktor-faktor yang mungkin akan berpengaruh kepada upaya-upaya Golkar tersebut.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Dalam mengupayakan untuk meraih kemenangan pada Pemilu 1986, Golkar menyadari ada hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi atau setidak-tidaknya perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor psikologis, faktor penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi Parpol Golkar dan Ormas, faktor kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan dihubungkan dengan situasi ekonomi dunia yang kurang menguntungkan dan faktor pertambahan pemilih baru.

Tidak kurang dari Ketua Umum DPP Golkar mengatakan bahwa upaya pemenangan Pemilu pada 1987 tidaklah ringan. Dan itu disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, karena Golkar adalah pemenang tiga Pemilihan Umum yang lalu, tentunya mempertahankan kemenangan itu dengan sendirinya merupakan tugas yang berat.

Kedua, Pemilihan Umum yang akan datang adalah Pemilihan Umum yang pertama setelah tercapai kesepakatan nasional tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebagai organisasi yang sejak awal berdirinya berasaskan Pancasila, serta sebagai kekuatan Orde Baru yang sejak awal berjuang untuk tegaknya Pancasila sebagai satu-satunya asas, fakta ini mengharuskan kita untuk menjadi contoh dan teladan dalam pengamalan Pancasila dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Ketiga, Pemilihan Umum yang akan datang diselenggarakan setelah adanya penataan kembali di bidang politik, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan baru tersebut.

Misalnya, di masa yang akan datang, Golkar harus merebut seluruh kemenangannya dari hasil Pemilihan Umum karena pengangkatan bagi keanggotaan DPR dan DPRD untuk Golkar non ABRI ditiadakan sesuai dengan pembaharuan terhadap Undang-Undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Demikian pula, Undang-undang tentang Partai Politik dan Golkar serta Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan telah mengadakan pembedaan fungsi yang tegas antara organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, sehingga dalam Pemilihan Umum yang akan datang, pembedaan fungsi ini harus pula tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya yang menyangkut pelaksanaan kampanye.

Keempat, Pemilihan Umum yang akan datang diselenggarakan dalam suasana pembangunan nasional yang penuh tantangan dan percobaan sebagai akibat dari resesi dunia yang berlarut-larut.

Adalah tidak mudah untuk melaksanakan kampanye yang bertemakan pembangunan nasional dalam keadaan ini, namun komitmen kita terhadap kesinambungan pembangunan nasional mengharuskan kita untuk bersikap konsekuen melaksanakan kampanye pemilihan umum dengan tema Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Kelima, di dalam Pemilihan Umum yang akan datang, terdapat 12 juta pemilih generasi muda yang pertama kali melaksanakan hak pilih.

Dengan mengingat bahwa mereka adalah sepenuhnya dibesarkan dalam alam Orde Baru dengan taraf pendidikan dan keadaan yang rata-rata lebih baik dari generasi terdahulu, maka diperkirakan mereka bersikap lebih kritis, dan juga menghadapi masalah-masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, seperti kesempatan pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja.

SUKSES PEMILU 1987

Bagi Golkar sukses Pemilu '87 berarti Golkar mendapatkan kepercayaan lagi yang cukup menentukan seperti halnya dalam Pemilu-Pemilu yang lalu, yang akan menjamin hal-hal berikut.

- Makin mantapnya stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik yang didukung oleh persatuan dan kesatuan yang makin kokoh.
- Makin meningkatnya gerak pembangunan disegala bidang menuju arah tercapainya cita-cita kemerdekaan, ialah masyarakat Pancasila yang makin maju, adil dan makmur.
- Kesinambungan kepemimpinan nasional, yang berpuncak pada Presiden/Mandataris MPR tetap ditangan Pimpinan Orde Baru yang sekarang ini kita dan seluruh bangsa Indonesia mempercayakannya kepada Bapak Soeharto, Ketua Dewan Pembina Golkar.

Sukses Pemilu '87 juga harus dicerminkan pula oleh: Pemilu berjalan dengan lancar, aman dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku. Semua rakyat yang telah memiliki hak pilih dan telah terdaftar sebagai pemilih turut melaksanakan hak pilihnya.

Untuk mensukseskan Pemilu '87 dalam pengertian sebagaimana diungkapkan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut ini.

Seluruh Kader Golkar harus betul-betul dapat menggalang lingkungannya sehingga seluruh rakyat pemilih menjatuhkan hak pilihnya untuk Golkar. Dengan dipilihnya Golkar nanti oleh sebagian besar pemilih — sehingga, katakanlah memperoleh kemenangan lebih mutlak dari masa sebelumnya — tidaklah akan menggoyahkan sendi-sendi demokrasi Pancasila karena azas demokrasi itu sendiri terletak pada kebebasan rakyat menjatuhkan hak pilihnya. Disamping itu Perundangan kita memberikan jaminan pula bagi seluruh Organisasi peserta Pemilu bahwa 5 orang wakil tetap akan ada di MPR kendatipun mereka tidak dapat meraih 1 kursipun di daerah-daerah pemilihan.

Disamping itu pengalaman sejarah kita menunjukkan bahwa Golongan Karya yang dalam 3 kali Pemilu selalu memperoleh kemenangan dalam praktek demokrasi Pancasila tidak pernah memperlihatkan meninggalkan azas musyawarah untuk mufakat.

Tanamkanlah dihati rakyat bahwa kemenangan Golkar amatlah perlu untuk melanjutkan pembangunan dan kelanjutan pembangunan memerlukan kemenangan Golkar.

Kumandangkanlah lebih lantang di seluruh pelosok tanah air, Golkar menang, Pancasila — jaya, Pembangunan — terus, Hidup Golkar! □

Orde Baru Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Demokratis, Konstitusional, Dan Hukum

Koreksi total yang dilaksanakan oleh Orde Baru selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat nilai-nilai pokok demokrasi, konstitusi, dan hukum. Karena itu Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dalam koreksi totalnya terhadap Orde Lama, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, konstitusional, dan hukum, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Hal tersebut merupakan bagian dari pengarahan Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono SH di depan peserta Diklat Kader Fungsional Golkar Jalur Beringin Angkatan I di gedung Krida Bhakti Setneg, Jakarta tanggal 7 November yang lalu.

Diuraikan oleh Ketua Umum DPP Golkar bahwa koreksi Orde Baru terhadap Orde Lama melalui mekanisme konstitusi, demokrasi dan hukum itu tidak hanya menyangkut konsepsi politik saja, tetapi juga terhadap personil yang tidak dapat diandalkan lagi. Menggambarkan langkah-langkah Orde Baru dalam melaksanakan koreksi total itu, Ketua Umum DPP Golkar mengemukakan lebih lanjut bahwa koreksi tersebut diawali melalui Sidang Umum MPRS tahun 1966, yang secara jelas memberikan landasan hukum terhadap konsep Orde Baru tentang Politik, Pembangunan, dan sebagainya. "Yang dikoreksi tidak hanya konsepsi politik, tetapi juga Mandataris pelaksananya," tutur Sudharmono. "Ini berarti bahwa Mandataris bisa dikoreksi melalui jalur mekanisme konstitusi." Mengenai hal yang terakhir itu Ketua Umum mengutip penegasan Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa mekanisme kelembagaan presiden sudah cukup lengkap, bukan saja pengangkatannya, tetapi juga koreksinya. Diungkapkan pula bahwa Pak Harto sendiri telah mengulang penegasan serupa itu pada peringatan HUT ke-22 Golkar tanggal 20 Oktober yang lalu, dengan mengatakan bahwa bila pada suatu saat setelah terpilih nanti beliau dinilai tidak mampu melaksanakan tugas-tugas mandataris lagi, maka hendaknya digunakan mekanisme konstitusional itu untuk mengoreksi, tanpa perlu ribut-ribut.

Mewujudkan Cita-cita Orde Baru

Dihadapan sekitar 400 peserta Diklat Kader Fungsional yang terdiri dari unsur-unsur berbagai Departemen, Lembaga Non Departemen, Badan Usaha Milik Negara, dan Perbankan itu, Ketua Umum DPP Golkar mengutarakan bahwa kaderisasi yang kini tengah dilaksanakan oleh Golkar adalah dalam rangka mewujudkan cita-cita Orde Baru di bidang politik. "Kaderisasi yang dilakukan Golkar tidak lain adalah dalam rangka mempersiapkan kader pembangunan dan kader bangsa," tuturnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa motivasi dilaksanakannya kegiatan kaderisasi Golkar selama ini bukan semata-mata hanya ditujukan untuk memenangkan Pemilu 1987 saja. Walaupun demikian, suksesnya Pemilihan Umum tahun 1987 juga membuktikan suksesnya kaderisasi yang dilaksanakan oleh Golkar. Demikian Sudharmono.

Hadir pula pada acara tersebut antara lain Jaksa Agung Hari Soeharto SH, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Aswis Marmo, Ketua DPP Golkar AE Manihuruk, Ketua BPKP Drs. Gandhi, serta beberapa unsur pimpinan dan tokoh Golkar lainnya. Menurut rencana setelah Diklat Kader Fungsional Jalur Beringin Angkatan I ini selesai, segera disusul dengan Angkatan ke II yang akan diikuti sekitar 300 peserta. ☐

Sudah Membuktikan Diri

Walaupun pesawat GARUDA yang ditumpangi Drs. Cosmas Batubara dan rombongan dari Jakarta terlambat datang di Manado selama hampir 3 jam, namun warga Golkar Sulawesi Utara yang berkumpul sejak siang hari di lapangan Sario Manado tetap menunggu kedatangan Fungsionaris Golkar tingkat Pusat tersebut pada acara peringatan HUT ke 22 Golkar Sulawesi Utara akhir Oktober yang lalu. Peringatan HUT Golkar di Manado itu merupakan awal dari rangkaian acara kunjungan Drs. Cosmas Batubara di Sulawesi Utara baik selaku Sekretaris Dewan Pembina Golkar maupun selaku Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Dalam waktu yang singkat karena terbatasnya waktu Drs. Cosmas Batubara sempat memberikan sambutan pengarahannya di depan warga Golkar di Manado sore hari itu. Dikemukakannya bahwa setelah 22 tahun Golkar berkarya telah tampak hasil-hasil yang nyata. Untuk itu diucapkannya terima kasih kepada segenap warga Golkar di propinsi Sulawesi Utara atas segala pengorbanan dan keikutsertaan hingga Golkar mampu mencapai hasil-hasil itu. Selanjutnya Sekretaris Dewan Pembina Golkar itu mengajak seluruh warga Golkar Sulawesi Utara untuk terus melanjutkan perjuangan dan karya-karyanya demi tercapainya cita-cita Proklamasi yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara.

Jembatan Persatuan Kesatuan

Setelah melakukan perjalanan darat pada malam hari dari Manado, pagi harinya tanggal 1 November di Kabupaten Bolaang Mongondow Cosmas Batubara selaku Menteri Negara Perumahan Rakyat meresmikan Jembatan Ayong di Kecamatan Lolak. Jembatan berukuran panjang 120 meter ini dibangun sejak tahun 1984 dan merupakan bagian dari jalur Trans Sulawesi. Dalam sambutan peresmiannya, Mempera menyatakan bahwa pembangunan yang sedang kita laksanakan bersama ini merupakan pelaksanaan usaha mencapai cita-cita bangsa, yakni mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Selain di bidang pertanian dan pangan, dilaksanakan pula pembangunan sarana perhubungan seperti jalan dan jembatan. "Dengan dibangunnya jembatan seperti di desa Ayong ini," kata Cosmas, "rakyat akan lebih mudah berkomunikasi dan dengan demikian akan lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa." Ditekankannya agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap dipelihara karena merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Listrik untuk 53 desa.

Kepada masyarakat kecamatan Lolak yang hadir memadati lokasi peresmian jembatan Ayong, lebih lanjut Mempera menjelaskan bahwa selama 20 tahun yang terakhir bangsa Indonesia telah mampu melaksanakan pembangunan. Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena kita memiliki pemimpin yang selalu memikirkan rakyat, yaitu Pak Harto. Kedua, karena adanya program pembangunan yang konkrit dan dapat dilaksanakan. Ketiga, karena dukungan dan partisipasi masyarakat, dan yang keempat adalah adanya dukungan kekuatan sosial politik yang mantap, yang selalu merupakan pemenang setiap Pemilu sejak tahun 1971.

Pada bagian lain dari sambutannya, Mempera menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat setempat yang telah merelakan sebagian lahan miliknya demi terwujudnya sarana jalan dan jembatan Ayong tersebut, yang konon bisa menghemat dana pembangunan milyaran rupiah. "Kerelaan rakyat Ayong seperti ini merupakan contoh konkrit partisipasi masyarakat dalam pembangunan," tegas Mempera. Selanjutnya rakyat diajaknya untuk terus memelihara jembatan beserta lingkungan alam sekitar, antara lain dengan tidak melakukan penggundulan hutan.

Menanggapi sementara pengunjung yang memampangkan spanduk berbunyi "2000 Ha Dataran Ayong Memerlukan Irigasi", Cosmas menyatakan kegembiraannya bahwa rakyat di desa Ayong sudah mampu merumuskan keinginannya. "Hanya rakyat yang sudah mampu merumuskan kehendaknya akan menjadi rakyat yang maju," tutur Cosmas sambil langsung meneruskan permintaan rakyat tersebut kepada Kakanwil Dep. PU Ir Hendromulyono yang menyertai kunjungan Mempera.

Pilihan yang tepat

Kesempatan bertemu dengan penduduk di Kecamatan Ayong dimanfaatkan oleh Cosmas Batubara untuk menjelaskan tentang Pemilu yang akan datang. Dikatakannya bahwa dengan Pemilu rakyat akan memilih wakil-wakilnya dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil rakyat dalam lembaga MPR akan merumuskan apa yang harus dilaksanakan oleh Presiden RI dalam kurun waktu 5 tahun yang berikut. Dalam hubungan ini Cosmas mengingatkan agar rakyat jangan salah pilih. "Pandai-pandailah memilih dengan mengingat mana yang telah membuktikan dirinya mampu mendukung pembangunan selama kurun waktu 3 kali Pemilu yang lalu," anjur tokoh Angkatan 66 itu.

Anjuran yang senada juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara C.J. Rantung dalam sambutannya. "Pilihan yang tepat akan menjamin kelangsungan pembangunan," ucap Gubernur.

Pernyataan Politik Golkar

Setelah menempuh perjalanan kembali ke ibukota Bolaang Mongondow, siang hari itu Sekretaris Dewan Pembina Golkar Cosmas Batubara menghadiri acara peringatan HUT ke 22 Golkar di Kotamobagu. Dalam pengarahannya di depan warga Golkar yang memadati lapangan ditengah-tengah Kotamobagu, Sekretaris Dewan Pembina Golkar menegaskan bahwa inti pernyataan Politik hasil Rapim Golkar baru-baru ini adalah pernyataan keinginan kita untuk melanjutkan pembangunan dibawah kepemimpinan Pak Harto. Dikatakannya bahwa Pak Harto yang tampil memimpin bangsa segera melaksanakan pembangunan karena beliau menginginkan agar rakyat Indonesia selekasnya dapat menikmati kesejahteraan sebagaimana rumusan cita-cita Proklamasi. Diungkapkannya lebih lanjut bahwa dalam rangka pembangunan itu pula Pak Harto menghendaki ditatanya suatu kehidupan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan-aturan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan oleh Cosmas antara lain bahwa bagi Presiden RI menjalankan pemerintahan berarti melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggotanya ditetapkan melalui Pemilu. Oleh sebab itu bila rakyat tetap ingin pembangunan terus berlanjut, kuncinya adalah memilih wakil-wakil rakyat dalam MPR yang mampu merumuskan keputusan-keputusan bagi pembangunan seperti yang telah kita alami selama periode 3 Pemilu yang sudah. Demikian Cosmas Batubara.

Tantangan Generasi Muda

Kepada kaum muda yang merupakan bagian terbesar pengunjung acara Peringatan HUT Golkar di Kotamobagu siang hari itu, bekas tokoh generasi muda itu lebih lanjut mengatakan tentang tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi dalam mewujudkan masa depan bangsa. Diuraikannya kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Asia yang lain seperti Jepang, Korea dan Taiwan. Dalam hubungan ini Cosmas mengatakan bahwa bangsa yang hanya mengandalkan kekayaan alamnya saja tidak akan mampu bersaing dengan bangsa yang sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu tokoh Angkatan 66 ini mengajak para pemuda di Sulawesi Utara dan pemuda Indonesia pada umumnya untuk terus berusaha menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengatasi tantangan-tantangan ke depan. "Dengan kekayaan alam yang berlimpah serta penguasaan ilmu dan teknologi, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar," tegas Cosmas.

Kepada generasi muda yang telah mempunyai hak pilih dianjurkannya untuk menggunakan hak pilihnya itu sebaik-baiknya dan jangan sampai salah pilih dalam Pemilu nanti. "Karena Pemilu mempunyai arti yang penting bagi kelanjutan pembangunan, maka kemenangan harus tetap kita raih," tandas Cosmas Batubara.

Kunjungan Sekretaris Dewan Pembina Golkar Cosmas Batubara ke Sulawesi Utara itu disertai oleh Anggota DPP Golkar Eric Samola SH, dan dalam acara-acara kunjungan didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Sulawesi Utara C.J. Rantung serta Ketua DPD Golkar tk I Sulawesi Utara Fritz Sumampouw. Ikut memeriahkan acara HUT Golkar di Sulawesi Utara ini adalah para artis Safari Dina Mariana dan Heidy Diana.

Listrik Masuk Desa

Acara maraton kunjungan di Sulawesi Utara diakhiri dengan Peresmian Listrik Masuk Desa yang mencakup 53 desa dari 12 kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Peresmian secara simbolik dilakukan di desa Wredi Agung kecamatan Dumoga, yang merupakan hunian para transmigran asal Bali serta daerah yang cukup menghasilkan bahan pangan beras.

Dalam sambutan peresmian, Menteri Negara Perumahan Rakyat mengatakan antara lain bahwa pembangunan sarana penerangan listrik tidak hanya dilakukan di Sulawesi Utara saja, tetapi juga diseluruh daerah di wilayah tanah air. "Pembangunan adalah untuk seluruh masyarakat yang merupakan satu kesatuan bangsa. Oleh karena itu pembangunan nasional berwawasan kebangsaan." Demikian Menpora.☐

TA PURNOMO

Gunakan hak pilih sebaik-baiknya.

Bakti Sosial Merupakan Bagian Program HWK

PENYANTUNAN
SEKTOR EKONOMI INF
TINGKATKAN

Bulan Oktober setiap tahunnya dalam rangka peringatan HUT Golkar, kesibukan keluarga besar Golkar diwarnai antara lain oleh kegiatan-kegiatan bakti sosial. Tahun ini organisasi wanita Golkar Himpunan Wanita Karya (HWK) tak ketinggalan menyemarakkan HUT Golkar dengan kegiatan bakti sosial.

Pagi hari tanggal 22 Oktober dikumpulkanlah sejumlah 1000 anak asuh dan pedagang sektor ekonomi informal di gedung Krida Bhakti Setneg Jakarta untuk menerima santunan yang disampaikan kepada mereka langsung dari Ketua Umum DPP Himpunan Wanita Karya Ny. Nani Soedarsono, SH.

Memberikan pengarahannya pada acara penyerahan santunan itu Ny. Nani Soedarsono mengemukakan bahwa memberikan santunan kepada anak-anak asuh serta bantuan modal kepada para pedagang sektor ekonomi informal seperti yang dilaksanakan pagi hari itu sudah menjadi tugas dari Himpunan Wanita Karya. Pernyataan Ketua Umum HWK itu memang beralasan karena bakti sosial memang merupakan bagian dari program organisasi HWK.

Selanjutnya Ny. Nani Soedarsono mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian bantuan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kegiatan penyampaian bantuan dan santunan serupa ini merupakan karya-karya HWK untuk meningkatkan kualitas hidup menuju kehidupan masyarakat yang lebih layak," ujar Ibu Nani. Kepada para pedagang yang mendapatkan bantuan, Ketua Umum HWK mengharapkan agar bantuan itu jangan semata-mata dilihat dari besar atau kecil jumlahnya. Yang penting menurut Ibu Nani adalah dapat mendorong usaha lebih maju lagi. Ditekankannya bahwa walaupun jumlahnya kecil, namun bila dimanfaatkan sebaik-baiknya dapat meningkatkan pengembangan usaha sehingga pada suatu saat nanti para pedagang itu dapat berdiri sendiri. "Bila hal ini dapat terlaksana, maka mereka ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang cukup potensial," tutur Ketua Umum HWK.

Bagian dari program.

Kepada seluruh jajaran HWK dipesankannya untuk terus menerus membina para pedagang tersebut, meningkatkan kualitas mereka dengan memberikan bimbingan, penyuluhan cara-cara mengelola usaha. Terhadap para pedagang yang mendapatkan bantuan modal diingatkan untuk mengangsur kembali pinjamannya dengan disiplin. "Ini penting," kata Ibu Nani, "karena angsuran yang diterima dapat digunakan lagi untuk memberikan pinjaman modal kepada orang lain yang juga masih membutuhkan bantuan."

Perlu disebutkan bahwa bantuan yang diberikan kepada para pedagang sektor ekonomi informal itu berjumlah Rp. 25.000,- per orang, dan harus diangsur sebesar Rp 200,- per harinya.

Kepada para anak asuh yang hadir pagi hari itu Ketua Umum HWK berpesan hendaknya mereka lebih giat belajar untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa kelak.

Sementara itu pengurus HWK Ny. Hertasning dalam laporannya mengemukakan bahwa di seluruh wilayah DKI telah tercatat sebanyak 909 pedagang sektor informal yang telah dibantu HWK. Sedangkan anak asuh yang telah disantuni meliputi jumlah 3200 orang anak. Santunan berupa paket bingkisan peralatan sekolah. Dana yang terkumpul untuk kegiatan hari itu adalah hasil patungan antara Departemen Sosial, Artis Safari Golkar, Yayasan Tri Sakti, dan juga dari DPP Golkar.

Suasana pagi hari di Krida Bhakti itu menjadi hangat meriah dengan disajikannya acara hiburan yang menampilkan artis tenar Titiek Puspa dan kawan-kawan dari Artis Safari Golkar dibawah koordinasi Edy Soediardjo yang lebih dikenal dengan nama Edy Sud.☐

Wanita Golkar Sumsel Siap

"Hari esok yang lebih baik"

Sebanyak 16 organisasi wanita se-Sumatera Selatan yang berorientasi karya dan kekaryaan, akhir Oktober lalu mengadakan apel siaga di Palembang. Apel siaga ini bertujuan satu: yaitu tekad wanita Golkar se-Sumatera Selatan memenangkan Golkar pada pemilihan umum tahun depan.

Selain itu, sesuai dengan keputusan RAPIM Golkar II di Jakarta 20 Oktober lalu, maka organisasi wanita Golkar se-Sumatera Selatan, juga menyatakan kebulatan tekad untuk mencalonkan kembali Jenderal (purn) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonsia untuk masa bakti 1988-1993. Naskah kebulatan tekad yang diserahkan kepada Ketua Golkar Ny. AS Murpratomo itu, diminta oleh organisasi wanita di sana agar disampaikan kepada Ketua DPR/MPR serta kepada bapak Soeharto sendiri.

Gedung Wanita Palembang hari itu, dipadati sekitar 500 kader Golkar yang menyatakan kebulatan tekad. Belum lagi para fungsionaris DPD I dan II Golkar Sumatera Selatan yang juga hadir di tempat ini.

Pernyataan kebulatan tekad wanita Golkar se-Sumatera Selatan itu menurut AS Murpratomo adalah kesadaran yang membesarkan hati. Kebulatan tekad memenangkan Golkar, menurutnya, mengandung arti bahwa kaum wanita sadar harus bekerja bahu-membahu dengan pria dalam mensukseskan pembangunan secara umum, dan "khusus bagi Golkar, ialah memenangkan pemilu 1987."

Sedangkan kebulatan tekad untuk mencalonkan kembali bapak Soeharto menjadi Presiden RI periode 1988-1993, menurutnya sesuai dengan keputusan Rapim Golkar baru-baru ini. "Golkar menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan bangsa harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang penuh dengan bobot kenegarawanan yang kaya dengan kearifan dan kebijaksanaan, yang mengayomi dengan sifat kebapakan dan sanggup membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan, serta menghayati gagasan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai hari esok yang lebih baik," ujar Murpratomo.

Simpatik

Golkar mencatat prestasi kepercayaan masyarakat selama 3 pemilu berturut-turut. Dalam pemilu 1987, atau yang keempat dalam era Orde Baru, tantangan dan rintangan akan semakin berat, karena sebagaimana dalam dunia olahraga, "mempertahankan gelar lebih sulit daripada merebutnya."

Sadar akan hal ini, Ny. Murpratomo yang dalam kunjungan kerja kali itu didampingi Nn. Sri Rejeki SH dan Ny. Ratna Fuad menekankan betapa pentingnya semangat kerja keras disertai keteladanan yang simpati, sehingga masyarakat akan tergugah mengikuti jejak kader Golkar, memilih Golkar.

Pendekatan yang penuh semangat kekeluargaan adalah pegangan lain yang menurutnya perlu diperhatikan para kader, terutama wanita Golkar, dalam rangka menjalankan Eka Sapta dari rumah ke rumah misalnya. Juga dalam rangka ini, perlu dibina komunikasi sambung rasa.

Perjuangan memenangkan Golkar 1987 tentu semakin sulit. Karena itu dibutuhkan semangat kepeloporan dan ketauladanan yang bisa ditiru masyarakat banyak.

Bahwa kemenangan dalam sebuah pemilu adalah pekerjaan yang tidak gampang, juga disadari Ketua DPD I Golkar Sumatera Selatan, H Zainal Abidin Ning.

WANITA GOLKAR SUMATERA SELATAN
GOLKAR PADA
1987

Karena sadar bahwa kemenangan dalam sebuah kontes demokrasi bukan hal yang mudah, maka Golkar secara sadar menjalankan konsolidasi organisasi lewat pengkaderan.

Menurutnya, bila pengkaderan bisa dijadikan alat hitung dan analisa, maka optimisme menghadapi pemilu 1987, agaknya bukan hal yang tabu. Pada pemilu 1982, Golkar menang di Sumsel dengan merebut 56 persen suara. "Untuk pemilu 1987 kita boleh berharap 63 persen," katanya disambut tepuk tangan.

Usai menyaksikan apel siaga dan menerima kebulatan tekad organisasi wanita yang berorientasi karya dan kekaryaan Se-Sumatera Selatan, Murpratomo yang juga dalam kunjungan kali itu disertai Ny Gunariah K Mochdie, mengadakan tatap muka dengan pengurus BKOW (Badan Koordinasi Organisasi Wanita) Se-Sumatera Selatan bertempat di Istana Gubernur Sumsel. Acara ini merupakan akhir dari kunjungan sehari Ny. Murpratomo di Sumatera Selatan tersebut. □

Suwito.

Jawa Timur: Bila Lebih Dari Target, Mau Bilang Apa Lagi?

Sangat dianjurkan kader-kader Golkar bergerak dalam bidang pendidikan

Belum genap sepekan Ketua Umum Golkar, Sudharmono, mengunjungi daerah Istimewa, Yogyakarta. Dua hari kemudian, medio Nopember lalu, giliran daerah Jawa bagian timur yang mendapat kunjungan.

Dengan kunjungan Ketua Umum, ke daerah Jawa-Timur ini, berarti sudah lebih dari 200 kabupaten yang dikunjungi, dalam kurun waktu sekitar tiga tahun ini. Kendati kunjungan-kunjungan Ketua Umum Golkar di berbagai daerah di belahan Nusantara ini hanya 1 atau 2 jam saja. Tentu kunjungan Ketua Umum Golkar ini dalam rangka untuk berkonsolidasi dengan warga Golongan Karya di daerah-daerah tersebut.

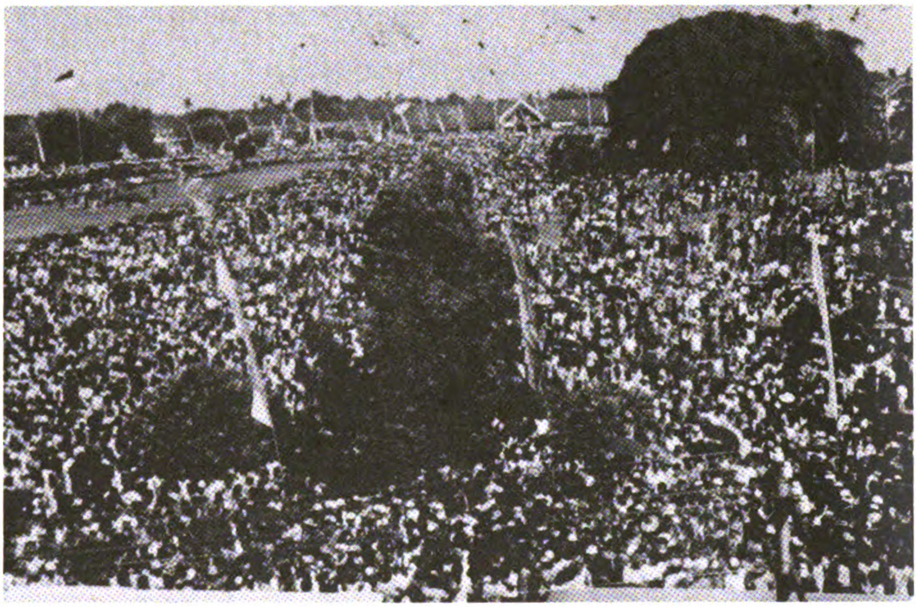

Kunjungan Ketua Umum di daerah Jawa-Timur kali ini diantaranya meliputi; Malang, Lumajang, Tanggul, Jember dan Surabaya. Dimaksudkan untuk melihat dari dekat warga Golkar di daerah-daerah tersebut, mengadakan tatap muka, serta mengadakan dialog, serta untuk melihat secara langsung sejauh mana kader Golkar ikut berpartisipasi di dalam pembangunan.

Dengan KH. As'ad Syamsul Arifin

Dalam kunjungan di 6 daerah di Jawa-Timur Ketua Umum, Sudharmono didampingi oleh Ibu EN Sudharmono, Ketua Dewan Pertimbangan Wahono yang juga Gubernur Jatim, Moh. Said, ketua DPD Tingkat I Jatim dan beberapa fungsionaris Golkar diantaranya; Soekardi, Soekarton Marmosudjono, Zarlon Zaghlul, Akbar Tanjung, Soekarno, Theo Sambuaga, Asdiroen Wirjokoesuma, Hasmoro, RH. Soebono, Sudarsono, HZ. Abidin, dan tidak ketinggalan artis Golkar Jayakarta Group.

Selama kunjungan 2 hari di daerah itu, ketua Umum disambut hangat oleh warga Golkar di daerah tersebut, dan Lumajang khususnya. Hampir disepanjang jalan kota tersebut penuh dengan warga Golkar dengan membawa bendera beringin itu. Dan di alun-alun seratus ribu lebih warga Golkar, menunggu sejak pagi, kedatangan Ketua Umumnya, serta bersiap-siap untuk mendengarkan pengarahan yang akan diberikan.

Kehangatan sambutan tidak kalah meriahnya oleh warga Golkar daerah Blambangan, Banyuwangi, sebuah kota paling timur di Jawa ini. Kendati masa Golkar tidak semeriah di Kabupaten Lumajang. Kedatangan Ketua Umum di daerah itu disambut langsung dengan pengenaan pakaian adat, berupa batik Gajah Oling yang dililitkan di badan serta dikepala. Selain itu juga disuguhkan tarian "Jejer Gandrung" — tarian untuk penghormatan tamu.

Kendati baru pertama kali berkunjung di daerah itu Ketua Umum merasa terkesan. "Saya mempunyai kesan atas penyambutan yang rapi dan ini tidak dapat saya lupakan. Apalagi dengan pengucapan Panca Bhakti," ujar Ketua Umum. Selain itu juga saat ketua umum mengadakan dialog dengan warga Golkar dengan "Lare-Lare Blambangan". Setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dijawab dengan lancar oleh kader-kader Golkar tersebut.

Ketika Ketua Umum menanyakan, ka-

Listrik masuk desa

der Golkar yang berhadapan dengan Ketua Umum itu mengatakan, "Kami mengadakan diskusi satu bulan 4 kali, yaitu pada hari Minggu." Anggauta 30 orang, sedangkan yang aktif hanya 15 orang, kader muda yang berdialog dengan Ketua Umum ini juga aktif sebagai pendidik. Dan Ketua Umum merasa terkesan, karena waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat itu digunakan untuk mengadakan diskusi.

Seperti yang dilaporkan oleh S. Djoko Wasito, Ketua Dewan Penasehat Golkar, yang juga Bupati itu mengatakan, di daerah Banyuwangi saat ini sudah ada 22 ribu anggauta karakterdes, dan didukung oleh 2700 orang kader fungsional, dan sudah dibina 350 orang Jurkam (juru kampanye) dari 175 desa. "Mengenai karakterdes di Banyuwangi ini dilakukan secara simulasi. Dan dalam Pemilu tahun 1987, Kabupaten Banyuwangi, siap untuk kemenangan Golkar, ujar, Djoko.

Mengenai 2 daerah Lumajang dan Banyuwangi, ketika ditanyakan, Moh. Said, Ketua DPD Tingkat I Jawa Timur itu mengatakan, kedua daerah tersebut dalam pemilihan 1987 mendatang dikatakan bisa mencapai sasaran. Bahkan bisa lebih. Seperti diakui oleh Moh. Said, bahwa ada beberapa daerah yang hanya dapat mencapai di bawah 40 persen. Sedangkan di beberapa Kabupaten seperti Madiun, Kediri ditetapkan dapat mencapai 80 sampai 90 persen. Dan ditargetkan secara regional Propinsi Jawa Timur dalam pemilu tahun 1987, nanti dapat mencapai 62 persen. Dan apabila dalam pemilihan Umum nanti lebih dari yang sudah ditargetkan, kita mau bilang apalagi, ujar Moh. Said.

KH. As'ad Syamsul Arifin

Dalam rangkaian kunjungan kerja di beberapa daerah Jawa Timur untuk mengadakan konsolidasi dengan warga Golkar di wilayah tersebut, juga dilakukan serangkaian kegiatan peresmian beberapa mesjid bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Pancasila, yang langsung diketuai oleh Presiden Soeharto, serta bantuan yang diberikan dari DPP Golkar sendiri.

Masjid yang diresmikan oleh Sudharmono — sekretaris Yayasan tersebut diantaranya, Masjid, Raden Patah, di halaman kampus, Universitas Brawijaya, mesjid di desa Sisir, kecamatan, Batu, Malang, serta peresmian kampus Universitas Wijaya Kusuma yang sekaligus juga mesjid yang terletak di dalam kampus tersebut. Dan juga diresmikan 30 rumah anggauta Cacat Veteran bantuan dari Yayasan Dharmais di Jember serta peresmian Listrik masuk desa di 14 desa dari 5 kecamatan.

Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur mendapat bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, untuk pembangunan mesjid. Diantaranya; mesjid As-Syafi'iyah, Ganjaran, mesjid untuk kompleks Yayasan Perguruan Arjuna (Malang), Mesjid Baitussalam, Mesjid untuk Kelurahan Semampir (Probolinggo), dan bantuan mesjid untuk desa Penggantingan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.

Kemudian diserahkan pula bantuan dari Presiden untuk pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukarejo, Kabupaten Situbondo. Bantuan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, bernilai Rp 50 juta, dan diterima langsung oleh KH. As'ad Syamsul Arifin. Selain itu juga diberikan bantuan dari DPP Golkar untuk korban musibah bencana banjir di Lumajang Rp 10 juta serta bantuan Rp 10 juta untuk Universitas Islam Jember.

Tidak Menggolkarkan Kampus

Dalam rangkaian kunjungannya di kampus Universitas Wijaya Kusuma yang juga sekaligus juga merupakan kunjungan terakhir dari rangkaian kunjungannya di Jawa-Timur, Ketua Umum, mengatakan, bahwa kampus itu merupakan lembaga pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kebudayaan serta kepribadian.

Sudharmono tidak merasa keberatan, bahkan mengajurkan agar yang mengisi kampus itu adalah kader-kader Golkar. Karena Golkar mempunyai kepentingan untuk melakukan kader-kader bangsa yang berjiwa pembangunan. "Jika para dosen serta mahasiswa secara pribadi menjadi anggauta Golkar itu adalah hak asasi mereka," ujar Ketua Umum.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Golkar itu mempunyai kaitan dengan dunia pendidikan. Dan seluruh jajaran Golkar sadar bahwa pembangunan itu akan berhasil jika dunia pendidikan memperoleh tempat dan perhatian utama.

Menanggapi Moh. Said, Sudharmono mengatakan, Golkar tidak menggolkarkan kampus, tapi Golkar sangat menganjurkan, agar kader-kader Golkar giat bergerak dalam bidang pendidikan, termasuk juga mendirikan perguruan tinggi. ☐

Badrul Mustofa

Kegiatan HUT Ke 22 Golkar Di Daerah

Tak hanya di Pusat HUT Golkar ke-22 meriah. Warga Golkar di seluruh penjuru tanah air merayakannya. Berikut ini laporan kegiatan HUT ke-22 Golkar di beberapa daerah yang dapat dimonitor oleh Media Karya.

Aceh: Memikul Tanggung Jawab Sejarah

Puncak kegiatan HUT diadakan di kota Langsa, Aceh Timur, dengan acara resepsi Peringatan HUT ke 22 Golkar. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Dr. Ibrahim Hasan dalam sambutannya mengatakan bahwa belum berhasilnya Golkar di daerah Aceh dalam 3 kali Pemilu yang lalu adalah karena warga Golkar belum mampu meyakinkan rakyat tentang perjuangan Golkar. Diingatkannya pula bahwa kelahiran Golkar adalah untuk memikul tanggung jawab sejarah guna membangun masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional. Sementara itu pada acara yang sama Ketua DPD-I Golkar Aceh Achmad Amin mengajak warga Golkar memanfaatkan HUT sebagai momentum untuk mawas diri. Mengenai Pemilu ditekankannya bahwa kegiatan tersebut bukan ajang pertarungan ideologi yang dapat menjurus terobek-robeknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan lain dalam rangka HUT Golkar di Aceh antara lain pertandingan olah raga, lomba pidato, dan cerdas cermat P4.

Jawa Barat: Kader Tidak Overacting

Bakti sosial merupakan kegiatan yang menonjol di Jawa Barat. Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma dibuka selama 10 hari bagi masyarakat bertempat di Ujungberung, Bandung. Ditaksir sekitar 5.000 orang warga masyarakat telah memanfaatkan kesempatan berobat pada 'klinik Golkar' tersebut. Kegiatan lain yang dapat dicatat adalah pemberian bibit tanaman buah-buahan, pohon kelapa, cengkeh dan kopi serta bantuan pupuk dan pestisida bagi para petani di kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Puncak acara berupa resepsi Peringatan HUT pada tanggal 1 November yang lalu bertempat di Bandung. Hadir pada acara ini Ketua DPP Golkar Ny. AS. Moerpratomo. Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Jawa Barat Yogie SM dalam sambutannya pada acara itu menekankan hendaknya kader-kader Golkar tidak bersikap dan bertindak overacting. Hendaknya diadakan pendekatan-pendekatan masyarakat secara manusiawi, demikian Pak Yogie.

Sementara itu dalam rangka HUT ini pula Ketua DPP Golkar Ny. AS Moerpratomo telah mengadakan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Barat. Kunjungannya ke Kabupaten Serang tanggal 28 Oktober dimanfaatkan untuk bertemu muka dengan keluarga Yayasan Pendidikan Bina Insan yang mempunyai 600 anak didik. Di tempat ini oleh Ny. Moerpratomo diserahkan bantuan sejumlah kitab Al Qur'an, kaset dan pena ber-

HUT GOLKAR
KAB. D.T. II SU
20 - 10 - 86

logo Golkar. Ikut dalam rombongan Ketua DPP Golkar itu adalah unsur-unsur generasi muda Golkar antara lain Ny. Gunariah Kartasasmita dan Ny. Ratna Fuad. Seperangkat alat drumband telah disumbangkan oleh Gunariyah kepada generasi muda Kabupaten Serang. Tak ketinggalan Ketua Departemen Seni Budaya DPP Golkar Drs. Waskito dengan armada artis Safarinya yang malam itu juga menyelenggarakan atraksi Safari Show di Serang. Pada kunjungan di Kabupaten Subang, Ny. AS Moerpratomo mengadakan penandatanganan kerja sama antara KOWANI dan LIPI serta sekaligus membuka Penlat pengembangan teknologi tepat-guna bagi keluarga; termasuk dalam teknologi ini ialah alat pemarut kelapa, pembuatan minyak, alat perontok padi, pemipil jagung, penjernih air, pompa hidran, dan lain sebagainya. Berkunjung ke Kabupaten Ciamis Ny. Moerpratomo memberikan pengarahannya di depan sekitar 10.000 warga Golkar di lapangan Cikoneng. Kepada para ulama di Ciamis disampaikannya bantuan berupa kitab-kitab Al Qur'an dan sejumlah Jus Amma; sedangkan bagi para kader setempat diberikannya oleh-oleh berupa bibit buah-buahan. Kembali Ny. Gunariyah menyerahkan sumbangan berupa 1 set alat drumband bagi para kader muda di daerah ini. Siang hari itu juga para Artis Safari menghibur massa setempat dengan menampilkan antara lain artis asal Ciamis Ice Trisnawati dan lawak d'Bodors. Di Pesantren Suralaya yang sempat dikunjunginya, Ny. AS Moerpratomo memberikan bantuan berupa Kitab Suci Al Qur'an dan Jus Amma, serta sejumlah atribut Golkar.

SI PERINGATAN H.U.T. KE 22
LONGAN KARYA
.P.D. TINGKAT I JAWA TENGAH
KUDUS, 2 NOPEMBER 1986

Jawa Tengah: 1987 Tugas Tidak Ringan

Acara puncak Peringatan HUT Golkar dilaksanakan di Kabupaten Kudus tanggal 2 November yang lalu. Dalam sambutan pada acara tersebut Ketua DPD-I Golkar Jawa Tengah Kardiman mengingatkan kepada jajaran Golkar bahwa Pemilu 1987 merupakan tugas yang tidak ringan. Oleh Kardiman hal itu dikaitkannya dengan penyesuaian terhadap perundangan penataan kehidupan politik dewasa ini, termasuk tidak terdapatnya lagi unsur pengangkatan anggota DPR/DPRD-I/DPRD-II dari Golkar non-ABRI. Di samping itu Ketua DPD-I Jateng juga menekankan penanganan secara serius terhadap para pemilih baru yang jumlahnya di Jateng sekitar 2 juta orang. Acara Peringatan HUT di Jateng itu dihadiri pula oleh Ketua DPP Golkar Ny. AS Moerpratomo, yang dalam pengarahannya menegaskan antara lain bahwa Pemilu 1987 dalam suasana Pancasila sebagai satu-satunya asas akan merupakan batu ujian yang jauh sekali jangkauan pengaruhnya bagi perkembangan bangsa di masa mendatang. Kunjungan Ny. Moerpratomo ke Jawa Tengah disertai unsur-unsur generasi muda antara lain DJoko Mursito, Martin Hutabarat, Haris Ali Moertopo, serta anggota DPR Abu Saeri dan Ny. Sumario. Ketua Dep. Seni Budaya DPP Golkar Drs. Waskito dengan para artis Safari mengikuti kunjungan ini untuk mengadakan hiburan kepada warga Golkar Jawa Tengah.

KELUARGA BESAR
MELALUI PASAR MURAH
MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN GOLKAR
SERTA MENSUKSESKAN PEMILU 1987

Kegiatan-kegiatan lain yang dapat dikemukakan di Jateng ini adalah antara lain bakti sosial berupa kunjungan ke panti-panti asuhan, pelayanan kesehatan cuma-cuma, gerakan penanggulangan narkotik, kebersihan lingkungan serta penghijauan massal; juga kegiatan olah raga seperti lomba gerak jalan, tenis, serta atraksi kesenian/hiburan rakyat, dan lain-lain.

Jawa Timur: Ziarah Dan Pasar Murah

Acara Puncak kegiatan HUT Golkar di Jawa Timur dilaksanakan di Malang tanggal 2 November yang lalu berupa apel warga Golkar khususnya mereka yang berada dalam orsosmasinal dan orsinalmas. Sebelum acara puncak ini dapat dilaporkan kegiatan-kegiatan lain seperti ziarah ke makam Pahlawan di Surabaya, pasar murah diberbagai penjuru kota Surabaya, donor darah, serta kerjabakti. Duga kegiatan-kegiatan olah raga antara lain gerak jalan.

Bali: Tak Hanya Di Bibir

Acara Peringatan HUT Golkar diselenggarakan di lapangan Klungkung, Bali, yang dikunjungi oleh sekitar 10.000 warga Golkar setempat. Fungsionaris Golkar tingkat Pusat Ny. Nani Soedarsono SH yang sempat hadir pada acara itu memberikan pengarahan yang berisi antara lain himbauan kepada para kader Golkar hendaknya mereka tidak hanya pandai membicarakan kesejahteraan rakyat di bibir saja, tetapi juga dalam tindak pelaksanaannya. Kepada jajaran Golkar dipesankannya agar menghindarkan konflik antar sesama fungsionaris Golkar. Pada kesempatan lain dalam acara tersebut Ny. Nani Soedarsono berkenan menyerahkan bantuan berupa alat-alat pancing, bibit anggur, vaksin ternak ayam dan babi kepada para petani dan nelayan di Bali.

Safari kesehatan dilakukan oleh Golkar Bali dengan armada medisnya, yang telah melakukan pelayanan kesehatan cuma-cuma di desa-desa di berbagai Kabupaten di Bali. Sementara di beberapa desa yang tersebar di 8 Kabupaten diadakan kegiatan pemugaran perumahan desa.

Nusa Tenggara Barat: Diskusi Peranan Generasi Muda

Dalam kegiatan HUT Golkar tercatat kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh DPD-I AMPI Nusa Tenggara Barat bertema ''Peranan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Untuk Kesinambungan Orde Baru''. Diskusi telah menghadirkan beberapa tokoh Angkatan '45, Angkatan '66, serta tokoh-tokoh generasi muda lainnya.

Nusa Tenggara Timur: Bakti Sosial

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaporkan di Daerah ini antara lain penyelenggaraan diskusi, seminar, lomba cerdas cermat P4, perlombaan olah raga sepak bola, bola basket, dan gerak jalan. Kegiatan bakti sosial dilakukan, antara lain berupa pelayanan kesehatan cuma-cuma, gerakan kebersihan lingkungan, serta hiburan masyarakat berupa pertunjukan musik, film, kesenian tradisional, dan lain sebagainya.

Maluku: Olahraga & Becak Hias

Laporan yang masuk dari Ambon menyebutkan adanya kegiatan-kegiatan olah raga HUT Golkar seperti lomba gerak jalan, bola voli, lomba beca dan sepeda hias.

Kalimantan Tengah: Panji Golkar

Dari Kalimantan Tengah dilaporkan penyelenggaraan pengarakan Panji-panji Golkar dari Palangkaraya menuju Sampit yang menempuh jarak sekitar 250 kilometer. Arakan tak hanya menempuh jalan darat, tetapi juga melintas sungai Mentaya. ☐

WT/TA

oleh : M. Syafa'at Habib

Yang Diperlukan Ialah Terbinanya Masyarakat Indonesia Yang Patriotik

Sebagai kelanjutan tulisan kami beberapa waktu yang lalu, tentang "Perlukah masih mempersoalkan Nasionalisme", yang ternyata sebagai sesuatu yang telah built in dalam kehidupan nasional suatu bangsa yang memiliki Negara Nasional, seperti yang dialami bangsa Indonesia dewasa ini, yang berarti bahwa Nasionalisme telah menyatu dalam proses pertumbuhan bangsa, maka pada tulisan kali ini akan dikemukakan "Perlu terbinanya masyarakat Indonesia yang Patriotik", yang akhirnya mampu memperkokoh bangunan Nasionalisme yang telah menyatu dalam tubuh dan jiwa bangsa Indonesia.

Dalam pengertian "Patriotisme" memang terdapat banyak terkandung makna psikologis dan cita arti yang sangat luas, yang hampir semuanya mengandung sentimen kebangsaan. Hampir semua pengertian yang terkandung di dalamnya akan menyangkut masalah "Cinta seseorang terhadap tanah airnya sendiri". Kalau orang mempersoalkan cinta, maka di sana akan terlintas rasa sentimental tersebut. Sentimen ini akan menyangkut mengenai bagaimana intensitas manusia melayani kepentingan tanah air, pengorbanan-pengorbanan apa yang dilakukan oleh para patriot dan tingkahlaku sosial lainnya yang berpautan dengan penebalan rasa cinta tanah-air.

Patriotisme biasanya juga akan mengkaitkan ingatan manusia terhadap "masa lalu nasional", suatu peristiwa yang menempati ingatan seluruh bangsa untuk masa yang cukup lama, bahkan sering untuk selama-lamanya sebagai legenda turun-temurun. Apa yang dicerminkan dalam masa lalu tersebut sudah barang tentu apa yang memberikan sumbangan nyata terhadap kemajuan Negara dan bangsa. Kata "Patrie" berarti "Tanah Air", ketika patriot-patriot Perancis mengatakan "La patrie en danger", bahwa tanah air yang perlu dibela itu dalam keadaan bahaya. Sehingga orang Inggris menyebut orang yang memiliki kelahiran terhormat atau bangsawan sebagai "Patrician", dan seorang "Patriot" adalah seorang pendekar atau pencinta tanah air yang bersedia mati untuknya.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia pun tidak jarang kita mempergunakan Patriotisme, terutama para pemimpin bangsa ini, apabila pada suatu saat telah terlihat semangat membela tanah air dan kepentingan nasional telah mulai memudar atau melemah. Memang pada saat tanah air memerlukan pembela-pembela, maka patriotisme muncul sebagai cambuk membakar semangat, bahkan tidak jarang patriotisme mendorong berdirinya "kumpulan rahasia" melawan siapa saja yang mengganggu ketegaran eksistensi suatu Negara Merdeka, dan kemudian lenyap, setelah kebebasan Negara diperoleh. Namun di Negara-negara yang telah lama berdiri, dan yang besar-besarpun "Patriotisme" sering masih tetap akan dikumandangkan, sebagai sesuatu yang diperlukan keberadaannya dalam semangat kemajuan dan pembangunan bangsa, untuk selama-lamanya.

Masyarakat Perancis mendirikan "Legion d'Honneur" pada tahun 1802, yakni di waktu revolusi Perancis mulai menampakkan bentuknya. Perkumpulan itu didirikan oleh Napoleon Bonaparte, untuk menghormati pasukan-pasukannya yang gugur, membela kebenaran ajaran kerakyatan dan menegakkan perundangan nasional. Memang revolusi Perancis adalah tonggak awal berdirinya "Negara Nasional" sebagai pengertian modern. Patriotisme yang diperkenalkan Napoleon ini tidak hanya terbatas pada lapisan militer, akan tetapi kemudian pada lapisan sipil, karena ia melihat makin berperannya lapisan sipil dalam menegakkan Negara Nasional baru, menggantikan regim absolutisme monarchie, walaupun nantinya Napoleon sendiri terkena penyakit regim lama ini, yang mengangkatnya sebagai Kaisar. Tetapi terlepas dari perjalanan pribadi Napoleon Bonaparte, jiwa patriotisme yang telah ia kobarkan tersebut telah mampu membakar semangat "Les enfants de la Patrie" atau putera-putera bangsa Perancis, untuk meneruskan keinginan mereka mengetengahkan Perancis sebagai bangsa yang berbahasa dan berkultur besar di tengah-tengah bangsa lain, sehingga pada tahun 1883 terbentuk organisasi yang lebih berpengaruh "Alliance Francaise pour la Propagation dans les Colonies et á l'Etranger", yang kemudian organisasi ini menyebar ke seluruh dunia sebagai penghargaan terhadap cita-cita dan kultur Perancis yang cinta kemerdekaan dan kemajuan.

Hal yang sama, sebagai sentimen bangsa, dapat disaksikan di Inggris, sebagai Negara yang bisa menyelamatkan kepentingan kerajaan, dengan melengkapi kemodernannya dengan konstitusi yang didambakan rakyat. Sehingga patriotisme Inggris sebenarnya suatu kompromi yang jelas, antara kepentingan kerajaan lama yang harus dipertahankan dengan kepentingan demokrasi yang berkonstitusi. "The Royal Society of St. George" adalah organisasi patriotisme yang mencoba mempertahankan cinta tanah air dan kepentingan Inggris, baik di dalam maupun di luar negeri. Organisasi yang mempunyai dukungan masyarakat luas, yang didirikan tahun 1894, kemudian diperluas dengan sejenis organisasi dunia, yang bertemakan patriotisme, pada tahun 1918 berdiri "The English Speaking Union of The Commenwealth". Bahasa Inggris telah menjadi kebanggaan patriot-patriot Inggris, tidak hanya mampu memerintah "seluruh ombak laut dunia", tetapi juga telah mampu menjadi penyuluh budaya dunia. Namun apabila ditelusuri lebih jauh, maka sesungguhnya para Veteran dan Legion Inggris menjadi inti penggeraknya yang tangguh.

Apa yang hendak dicapai dengan perjuangan Patriotik?

Patriotisme dan gerakan patriotik harus diakui sebagai suatu tuntutan atau klaim. Apa yang melatar belakangi mereka para pendukungnya, ialah sistem nilai dan kepribadian yang cukup kuat yang tumbuh dan berkembang dari sejarah bangsa, yang akhirnya mampu menjiwai setiap lubuk hati manusia yang ada dalam bangunan bangsa tersebut. Nilai tersebut tidak hanya bersifat kemasyarakatan akan tetapi juga sampai pada nilai-nilai moral bangsa. Nilai-nilai tersebut telah mampu membina persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai layaknya suatu kumpulan "manusia beradab dan berbudaya mandiri". Kehebatan pembelaan terhadap bangsa, yang menimbulkan komitmen sentimental itu, sering tampak sebagai nafsu yang berlebih-lebihan, bahkan merupakan kegila-gilaan, yang memang pada suatu saat tertentu diperlukan oleh bangsa itu sendiri. Hal ini juga bisa kita lihat sikap-sikap bangsa Indonesia di awal revolusi fisik dulu.

Memang sulit dibayangkan "Suatu bangsa merdeka" tanpa "tanah air", apa ujudnya? Bangsa yang merdeka perlu memiliki secara konkrit tanah air sendiri, dan ini harus dipertahankan secara patriotik, oleh setiap lapisan masyarakat yang ada di dalamnya, baik yang militer maupun sipil, baik yang pandai atau yang bodoh, baik yang taat beragama atau yang masih perlu bimbingan kerohanian, dan seterusnya. Ini memang soal sentimen bangsa. Dengan tanah air itu, manusia akan terikat dengan sendirinya oleh ikatan kesamaan nasib, ketetanggaan, kebersamaan hidup dalam territoire geopolitik negara nasional dan sebagainya. Hal-hal itu telah diperjuangkan oleh patriot-patriot bangsa yang harus dipelihara oleh gerakan-gerakan patriotik yang tak boleh berhenti. Setiap orang harus berani "Hidup bersama orang lain", untuk merasa dalam ketenangan sekuriti nasional dan dalam lingkungan sosial yang aman dan damai, tanpa gangguan luar yang tak berhak. Sehingga akhirnya keberadaannya dalam Negara yang diperjuangkan tadi dapat lestari dan abadi dalam kesejahteraan yang terjamin.

Orang bermasyarakat yang berperadaban tinggi seperti bangsa Indonesia memerlukan patriotisme, sebab mereka — terutama setelah intensifikasi pengisian kemerdekaan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan ideologi Negara, Pancasila — telah menentukan tujuan akhir perjuangan patriotik, ialah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Patriotisme memang perlu digerakkan oleh masyarakat yang berkepentingan. Identitas dan kepribadian bangsa sendiri akan menjadi petunjuk jalannya. Konsep-konsep pembangunan berjangka mereka ciptakan berdasarkan kesetia-kawanan yang bermula dari cinta tanah air, yang menghidupinya, yakni yang mampu mengisi segala bidang kehidupan nasional.

Sentimen masyarakat Indonesia sendiri memang perlu dibangkitkan untuk mengejar cita yang ditentukan bersama itu. Sentimen ini harus ada sebagai komitmen politik mereka, walaupun apabila ditanyakan tidak akan jawabannya secara ilmiah, sebab tolok ukurnya ialah "kepentingan bersama" yang kemudian diberi nama "kepentingan nasional", yang mengikat sentimen masyarakat tersebut bagi menguji kebenaran cita-cita mereka sendiri dan untuk menyukseskan tujuan akhir bersama, yang telah ditentukan ketika mereka bersepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu Negara Merdeka.

Mitologi bangsa dalam sejarah lama membuktikan, hingga terbentuknya komunitas politik nasional yang modern, bahwa tanah air Indonesia adalah "Ibu Pertiwi", tempat bangsa mengadu nasib dan mengharapkan pendidikan serta mengeduk kesejahteraan bersama. Masyarakat pluralistik tidak menjadi penghalang, sekalipun perbedaan suku - agama ras - dan golongan, bahkan mengokohkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh patriotisme berslogan satu "Bhinneka Tunggal Ika". Mitologi yang menjorok hingga sejarah modern tersebut mampu mengikat masyarakat modern Indonesia, untuk timbul dan berkembangnya rasa bahagia dalam hidup kebersamaan yang dijiwai kekeluargaan. Mereka merasa lebih aman dalam lingkungan fisik yang bersahabat, berupa tanah air yang terwujud pada gunung-gunung, sungai, hutan belukar, pantainya yang indah, lembah yang memukau, bunga yang semerbak, bahkan ribuan pulaunya yang memberikan imaginasi tersendiri. Itulah bumi bagian masyarakat Indonesia yang "bernegara", sehingga mampu menimbulkan syair, pantun dan gurindam, bahkan juga lagu-lagu patriotik dan lukisan-lukisan panorama yang menggetarkan hati.

Perang kemerdekaan yang melahirkan deretan nama pahlawan bangsa harus dikenang dan dipuja sepanjang sejarah bangsa. Pemujaan terhadap pahlawan bukanlah suatu yang tidak beralasan, sebab hal itu mampu membentuk kultur tersendiri yang ber cokol kuat dalam kalbu bangsa, bahkan kemudian mampu menampilkan missi kultural tersendiri terhadap bangsa lain.

Dengan demikian jelaslah bahwa perjuangan patriotik memang bertujuannya, yakni terwujudnya cita-cita bersama dalam menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, yang memberikan kelegaan fikir dan kepuasan jasmani serta kebahagiaan rohani, sesuai dengan tatanan demokratik yang diatur bersama di dalam kawasan bumi tanah-air Indonesia.

Patriotisme adalah bagian kehidupan politik dalam negara modern

Karena patriotisme kemudian dipakai secara umum sebagai langkah positif pengorbanan dan perjuangan para patriot terhadap komunitas politik dalam lingkup tanah air sendiri, maka akhirnya patriotisme mencapai karakteristik yang lebih maju dalam masyarakat atau bangsa yang "bernegara" dalam bentuk yang penuh pengembangan diri dan ikatan "kesadaran hidup bernegara secara bersama". Ikatan tersebut kemudian menimbulkan kewajiban-kewajiban, yang secara rela tanpa pamrih lain kecuali "kepentingan bersama nasional" dilakukan penuh tanggung-jawab. Kewajiban ini bahkan menjadi lambang loyalitas "warga Negara" sebagai anggota warga yang "baik".

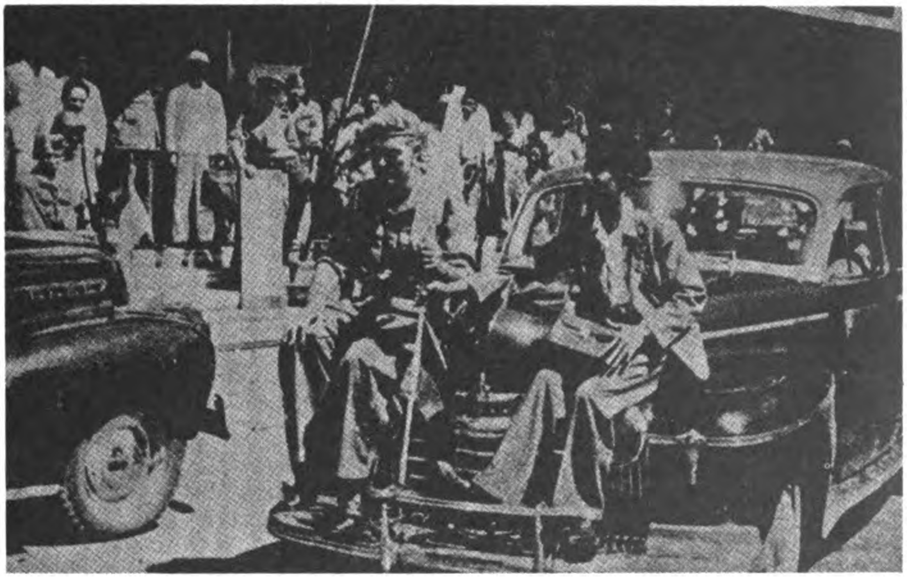

Jenis patriotisme inilah yang mendukung kuatnya bangunan Negara modern di abad modern ini. Loyalitas itu dalam bentuknya yang kuno dulu adalah menyempit pada kelompok sosial, seperti kelompok pimpinan feodal, kelompok pimpinan agama atau kelompok pimpinan cendekiawan tertentu, akan tetapi dalam bangunan masyarakat modern sekarang telah berubah menjadi "lebih luas" yang bertumpu kepada "kepentingan bersama secara nasional", yang diatur dalam permainan "demokratik". Loyalitas berarti loyalitas terhadap Negara dan ideologi serta falsafah hidup bangsa yang telah ditentukan bersama.

Patriotisme politik modern lahir bersamaan dengan lahirnya bentuk-bentuk Negara Modern. Bangsa Indonesia dengan

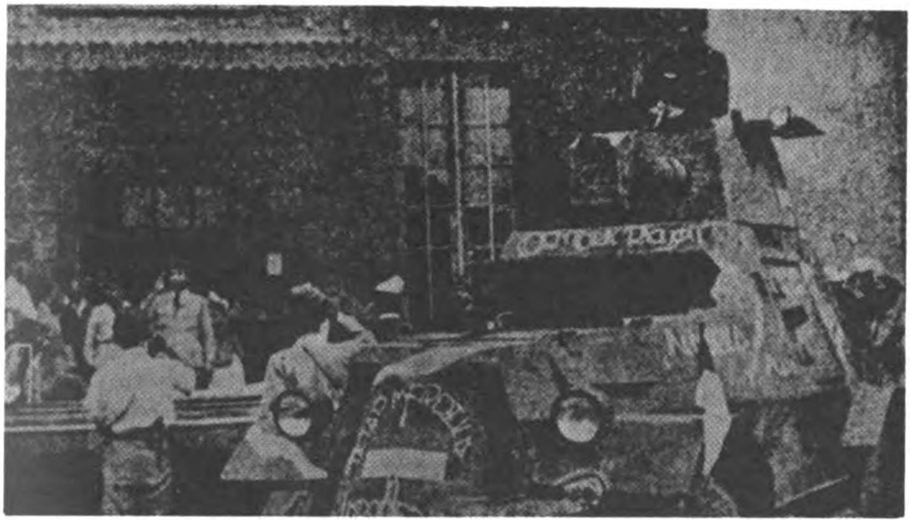

proklamasi 1945 sekaligus melahirkan bangunan Negara modern itu. Oleh sebab itu patriotisme melekat lahir bersama dan mengisi kemerdekaan bangsa hingga saat ini. Negara modern Indonesia adalah sebuah "Negara Nasional" yang memiliki batasan yang konkrit.

Bagi bangsa Indonesia, maka patriotisme adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik nasional mereka. Patriotisme ini oleh sebab itu akan sangat erat hubungannya dengan Nasionalisme, yang juga harus "built-in" dalam kehidupan politik bangsa Indonesia sendiri, sepanjang masa. Lunturnya jiwa patriotik dan Nasionalistik harus menjadi tanggung-jawab bersama seluruh bangsa, bukan hanya tanggung-jawab kelompok kecil masyarakat. Apabila belum seluruh rakyat mengerti, faham dan menjalankan Nasionalisme dan Patriotisme, maka itupun akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk membangkitkan dan menggelorakan kehidupannya.

Patriotisme adalah gerakan konsolidasi rakyat yang menyeluruh, yang harus menjadi program inti dan terpadu pada setiap pembinaan dan kegiatan pendidikan politik bangsa. Hal ini mengingat bahwa bagian terpenting tujuan patriotisme, sebagaimana halnya Nasionalisme, ialah terbinanya jiwa bangsa yang berorientasi tujuan politik nasional bersama, yang dikerjakan dengan semangat serta sentimen loyalitas yang tinggi.

Gugurnya para pahlawan nasional, adalah gambaran jelas sebagai puncak pengorbanan Patriotik, oleh sebab pembelaan mereka terhadap "kepentingan bersama nasional", yang menimbulkan hak serta kewajiban penduduk, juga terwujudnya Pemerintahan Nasional yang disegani Negara lain, yakni suatu Pemerintahan Negara yang "Mardikengrat — mbaudenda, dan hanyakrawati" (= falsafah Jawa, artinya, Pemerintahan Negara yang "Merdeka, berdaulat dan berwibawa"). Hal ini hanya bisa terwujud oleh semangat kebersamaan dan jiwa kekeluargaan yang didorong oleh Patriotisme secara nasional yang dilakukan oleh seluruh putera-putera bangsa.

Patriotisme dengan kebanggaan terhadap negeri sendiri, bukanlah sebagai kebutaan politik

Patriotisme adalah kekuatan rahasia, yang harus terus dibina dalam mengelola semangat perjuangan bangsa untuk terus membangun dan mengembangkan Negeri sendiri. Kekuatan rahasia di sini harus diartikan sebagai kekuatan riil, yang bermotifkan cinta tanah-air. Motif inilah yang kemudian membangkitkan kerelaan berkorban untuk kepentingan Negara dan Bangsa, sebagai nilai tertinggi dalam "kehidupan bernegara", demi kepentingan keamanan dan kesejahteraan bersama secara adil dan beradab.

Memang sering Patriotisme-pun harus dikendalikan secara baik, apabila kemudian tampil sentimen negatifnya, misalnya menjadi Chauvinistik (Nasionalisme sempit yang secara ekstremitas menonjolkan hanya kepentingannya sendiri, sekalipun untuk itu harus mengorbankan bangsa lain) atau menjadi ekspansionis. Oleh sebab itu kebanggaan dan pembelaan terhadap Negeri sendiri, harus memperhatikan tata-krama pergaulan internasional. Patriotisme dengan kebanggaan kepada Negeri sendiri, tidak harus berarti sebagai kebutaan politik atau politik membabi-buta.

Yang penting, patriotisme harus mampu menjaga agar keutuhan dan integritas nasional bangsa tetap terjamin sebagai kesatuan komunitas politik yang "tunggal", tak terbelah oleh kekuatan apapun. Oleh karenanya Patriotisme adalah sokogurunya persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjadi tulang-punggungnya pendidikan politik nasional untuk terwujudnya "Komunitas politik tunggal Nasional".

Dalam kehidupan bangsa perlu ditumbuhkan kegiatan ruhani Patriotik, dengan cara mendorong tersebar luasnya literatur yang bertemakan patriotisme, sejarah perjuangan bangsa ditonjolkan, dan berkembangnya tulisan-tulisan atau informasi-informasi tentang patriotisme, baik bersifat sejarah, syair, lagu, novel ataupun cerita fiksi, yang mendukung ataupun memberikan pengakuan pentingnya Patriotisme. Patriotisme sebagai alat pembinaan politik adalah sangat penting dalam gerakan kaderisasi dan konsolidasi ideologik.

Rangsangan patriotisme itu bukan bertujuan agar rakyat menjadi bangkit sentimennya, sehingga keluar tindakan yang membabi buta, seperti banyak contoh di dunia ini, sehingga suatu bangsa menjadi cinta perang, senang ekspansi dan sikap sombong terhadap ras pendukung. Rangsangan patriotisme harus diarahkan kepada tindakan yang positif bagi pembangunan Negeri dan masyarakat sendiri maupun bagi ketertiban dunia.

Partisan, patriot atau pahlawan bangsa tidak hanya sebagai fakta yang berbicara bagi patriotisme, tetapi telah menjadi Nilai Luhur bangsa yang akan tetapi dibanggakan terus-menerus. Namun pemujaan pahlawan tidak boleh kemudian menjurus kepada militerisme dibangkitkan, tetapi harus bisa menimbulkan semangat positif bagi terciptanya kesejahteraan dan keamanan bersama.

Gembong komunisme seperti Marx dan Engels tidak mengenal Patriotisme, sebab mereka tidak mengenal tanah-air (The Proletariat has no Fatherland). Mereka menganggap Patriotisme sebagai alat Kapitalisme dan Imperialisme. Mereka lebih mengutamakan kelas buruh daripada terpeliharanya kepentingan nasional. Tetapi bukti sejarah menerangkan kepada dunia, bahwa setelah Perang Dunia kedua, ternyata dalam blok sosialis bermunculan Negara-negara Nasional yang lahir dari gerakan Patriotisme nasional masing-masing Negeri tersebut.

Bangsa Indonesia yang telah berusia makin dewasa ini, ternyata telah banyak berhasil dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia sendiri. Inilah penataan politik patriotik yang mengutamakan "kepentingan nasional", kesatuan "ideologi nasional", dan pembinaan "persatuan dan kesatuan" nasional. Ideologi nasional "Pancasila" ternyata telah mampu menciptakan bangsa Indonesia yang satu. Dan mudah-mudahan dengan kemantapan ideologi Nasional yang satu inilah bangsa Indonesia mampu mengarungi masa depannya yang cerah, dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, insya Allah.

Sebagai bangsa yang telah masak berfikir dan menentukan langkah majunya, maka pilihan telah ditentukan, bahwa Patriotisme Indonesia adalah Patriotisme yang berorientasi nilai pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi Nasional dan sekaligus satu-satunya asas nasional berpolitik dan bermasyarakat. Semoga Allah SWT selalu melindungi bangsa Indonesia. ☐

Oleh Dr A. Baramuli SH

Tinjauan Tentang RUU Peradilan Tata Usaha Negara

Professor Kuntjoro Purbopranoto menulis di tahun 1975 — jadi sebelas tahun yang lalu — bahwa peradilan administrasi suatu urgensi yang dewasa ini (tahun 1975) tidak boleh ditunda-tunda lagi terlalu lama. Dan merupakan kenyataan kemudian bahwa tanggal 16 April 1986 telah dikirim amanat Presiden RI kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyertakan satu Rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tentunya prosedur persiapan satu RUU didasarkan kepada Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1970, dan oleh DPR-RI dilakukan pembahasan berdasarkan Keputusan No. 10/DPR-RI/III/82-83, tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI.

Peraturan Tata Tertib DPR-RI, pasal 125 (2) menentukan pembahasan RUU dilakukan empat tingkat yaitu tingkat 1, keterangan pemerintah yang diberikan 29 April 1986 dan sekarang mulai 26 Agustus 1986 — pembahasan RUU Peraturan telah memasuki tingkat 3. Dan direncanakan pembicaraan tingkat 4 pada tanggal 19 Desember 1986.

Oleh Dewan Perwakilan R.I. telah dipilih satu Panitia Khusus (singkatan: PANSUS) pada tanggal 30 Mei 1986 untuk membahas RUU-PERATUN terdiri dari 57 anggota. Saya terpilih sebagai Ketua PANSUS RUU-PERATUN dengan empat Wakil Ketua masing-masing Fraksi.

Mengenai motivasi, tentang perlunya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah dikemukaan juga dalam keterangan pemerintah sebagai tekad dan hasrat untuk mewujudkan Tata Hukum Nasional sekaligus mengisi kerangka landasan hukum yang mendasar dalam Repelita IV. Tentang tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dan Warga Negaranya dalam rangka memberi perlindungan kepada rakyat.

A.V. Dicey bertolak pada pemikiran persamaan hukum buat semua orang termasuk pemerintah untuk memperoleh keputusan dari satu jenis peradilan.

Dalam jawaban Pemerintah tanggal 20 Mei 1986 dijelaskan bahwa RUU-PERATUN termasuk dimensi penciptaan peraturan perundang-undangan yang berarti dimensi dinamika dan kreativitas sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada.

Sudah jelas bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengatur Substansi-materi hukum yang baru artinya belum pernah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang akan bersumber pada Pancasila. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa penyusunan RUU-PERATUN harus bertolak dari konsep Negara Hukum Pancasila untuk memantapkan kewibawaan hukum, meningkatkan citra negara hukum dan kesadaran hukum seluruh rakyat baik pelaksana kekuasaan pemerintah maupun masyarakat, dalam mempertahankan eksistensi harkat dan martabat manusia utuh Indonesia dalam kepentingan seluruh bangsa dan keutuhan negara.

F.J. Stahl menyatakan bahwa Peradilan Administrasi Negara merupakan unsur mutlak negara hukum. Pengertian saya tentunya negara hukum Republik Indonesia berazas Pancasila di mana fungsi PERATUN adalah melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada rakyat pencari keadilan dan mendorong tersusunnya aparatur negara yang bersih.

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus menjamin perlindungan hukum bagi hak-hak warga negara *di dalam keseimbangan* dengan hak masyarakat dan dengan demikian mampu menampung dan menyelesaikan secara tuntas dan adil tuntutan rakyat yang menderita kerugian karena akibat tindakan hukum perangkat pemerintah dalam menjalankan fungsinya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya menyadari situasi dan kondisi tingkat kemajuan suatu negara sehingga Lord Acton menyatakan "Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely".

Dilain pihak dengan adanya Undang-Undang ini maka perangkat pemerintah akan lebih berhati-hati dan selalu waspada terhadap setiap tindakan pemerintah dan dengan demikian diharapkan akan tercipta Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.

Tentang pengertian hukum Administrasi dan hukum Tata Negara maka C. Van Vollenhoven, membedakan dengan tegas bahwa Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur, "Organen" negara (perangkat) dan wewenangnya, jadi Negara dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan hukum yang mengikat "Organen" (perangkat) dalam menjalankan wewenangnya, jadi Negara dalam keadaan bergerak.

Begitupun juga Logeman, mempunyai pendapat yang sama dengan C. Van Vollenhoven, tetapi lebih mengarah kepada ajaran sistimatik hukum.

Saya berpendapat bahwa pengertian tentang hukum administrasi mempengaruhi rumusan RUU-PERATUN 1986, sehingga hukum Administrasi Negara meliputi perbuatan pembangunan (Hukum Tata Pembangunan), perbuatan pemerintah (Hukum Tata Pemerintahan) perbuatan Tata usaha (Hukum Tata Usaha Negara) perbuatan administrasi (Hukum Administrasi) perbuatan menata lingkungan hidup (Hukum Tata Guna Lingkungan) dan seluruh perbuatan perangkat Negara untuk mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur berazaskan Pancasila.

Mengenai Substansi-Materi RUU-PERATUN Perlu pembahasan lebih mendalam antara lain kompetensi pengadilan, peranan Hakim, komposisi Hakim, posisi Penggugat terhadap tergugat, prosedur cepat sederhana dan murah, jaminan tentang eksekusi keputusan, dan saat berlakunya Undang-Undang.

Dalam rangka ini mungkin ada pengaruh dari pemikiran hukum negara-negara Kontinental khususnya Negeri Belanda yang memiliki WET Administratieve Reschtspraak Overheidsbeschikkingen (disingkat AROB).

Oleh karena itu maka sebelum kita memasuki pembahasan "Materi = Substansi", RUU-PERATUN, maka perlu dilihat sejarah pemikiran dan usaha pelbagai pihak untuk menghasilkan Undang-

Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara.

Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia

Meneliti perkembangan lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tercatat beberapa Rancangan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini.

Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksanaan (pasal 6 ayat 1 sub 2, pasal 66 dan 67). Ternyata undang-undang ini tidak sempat diberlakukan, karena keadaan Negara dan Masyarakat yang menghadapi agresi Belanda ke II.

Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 (L.N. 1964 No. 107 TLN No. 2699) tentang: "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" (pasal 7 ayat 1 sub d) menentukan Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang : "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" (LN 1970 No. 14 - TLN No. 2951) pada pasal 10 ayat 1 sub d menentukan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan "Peradilan Tata Usaha Negara".

Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang : "Pokok-Pokok Kepegawaian" (LN 1974 No. 55 - TLN No. 3041) pada pasal 35. Menyebutkan "Peradilan Kepegawaian" sebagai bagian dari "Peradilan Tata Usaha Negara" yang akan dibentuk.

REPELITA II Bab 27 tentang "Hukum", khususnya mengenai langkah-langkah kegiatan dan saran-saran dalam bidang perencanaan hukum dan perundang-undangan, menentukan : "Selanjutnya diusahakan pembentukan peradilan administrasi dalam rangka terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum di bidang administrasi pemerintahan".

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang "Garis-garis Besar Haluan Negara" pada "Pola Umum Pelita Ketiga" dibagian Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers. Hubungan Luar Negeri 3 d menetapkan mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu terdapat pula Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan dengan amanat Presiden Republik Indonesia tanggal 16 April 1986 (terlampir). Bilamana DPR-RI tidak berhasil menyetujui RUU-PERATUN 1986 sesuai dengan UUD 1945, pasal 5 (1) 20 (1) maka tidak berarti pendapat Sunaryati Hartono, 8) menjadi kenyataan yang mengemukakan alasan bahwa Peradilan Administrasi Negara telah gagal di Indonesia karena :

— Akan merupakan manifestasi dari falsafah individualisme sehingga bertentangan dengan Pancasila

— Akan merupakan pengawasan yang terlalu ketat terhadap Lembaga-Lembaga Pemerintah sehingga akan menghambat jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien

— Akan melanjutkan pelaksanaan politik pemerintah, khususnya dalam hal pengambilan keputusan.

Rancangan Undang-Undang Tentang PERATUN

Mengenai judul Rancangan Undang-undang telah menimbulkan pelbagai pengertian dan saya telah mengemukakan pendapat bahwa yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia adalah pengertian Peradilan Administrasi Negara 9) yang dapat menampung perkembangan hukum di masa depan.

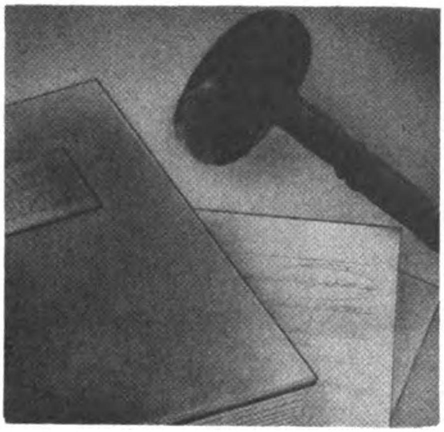

Pemerintah yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang mempergunakan judul RUU-PERATUN dengan alasan bahwa Undang-Undang ini adalah pengaturan lebih lanjut dari ps. 10 (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, ditambah penjelasan dalam RUU-PERATUN Pasal I : "Pengertian Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang ini adalah sama (sinonim) dengan pengertian Administrasi Negara". Mengikuti sistematik Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 pasal 10 (1) maka judul yang tepat adalah "Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", dan kalau disingkat menjadi RUU-PERATUN maka dasarnya keperluan praktis semata-mata. Seperti halnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat antara para ahli yang memakai Peradilan Administrasi Negara dan istilah Peradilan Tata Usaha Negara.

Saya sependapat, sehingga masalah judul perlu memperoleh penegasan yang jelas.

Meneliti keseluruhan konsiderans dan batang tubuh ditambah penjelasan RUU-PERATUN, maka terlihat pengaturan tentang Susunan dan kompetensi Peradilan DISATUKAN dengan prosedur atau hukum acaranya sehingga merupakan kesatuan yang sesungguhnya lebih sistematis dan praktis.

Kekurangan dalam konsiderans ialah istilah yang dipergunakan seharusnya mengikuti istilah hukum konstitusi dan perlu penambahan tentang tujuan peradilan Tata Usaha Negara (singkatan: PERATUN) sesuai konsep negara hukum Pancasila.

Pemikiran integralistik yang dikemukakan oleh Prof. Soepomo dihubungkan dengan pemikiran Kuntjoro Purbopranoto dalam pidato Inaugurasinya tanggal 12 Oktober 1960, tentang Dasar-Dasar Hubungan Warga negara Dengan Pemerintah yang dikemukakan sebagai berikut:

... Untuk menilai tindakan pemerintah terhadap penduduk itu tidak cukup kiranya kita mempergunakan ukuran bersendi norma-norma "Zakelyk Yuridisch" dan hanya mengemukakan hukum saja (rechtamtig), akan tetapi pada hemat kami perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang patut dan selaras dengan pandangan masyarakat ... harus memperhatikan dan mengindahkan juga norma-norma kemasyarakatan termasuk norma-norma kesusilaan dan kebudayaan.

Pemikiran ini perlu dijadikan dasar dalam konsiderans.

Tentang isi RUU-PERATUN yang terdiri dari 6 BAB dan 141 Pasal dapat dibagi atas 28 masalah pokok dan dapat terdiri dari sekitar 400 soal.

Permasalahan pokok adalah sebagai berikut:

1. Peradilan khusus, 2. Urusan Pemerintahan (Pasal 1 sub 1), 3. Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (Pasal 1 sub 2), 4. Tindakan Hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 sub 3 dan 4 jo Pasal 53 (2) sub a), 5. Keputusan TUN adalah penetapan tertulis (Pasal 1 sub 4 jis Pasal 3 dan 56 (37. Perlindungan kepentingan pihak ketiga (Pasal 1 sub 4 jis Pasal 55, 56 dan 83), 6. Sengketa Kepegawaian (Pasal 1 sub 5), 7. Sengketa Tata Usaha Militer (Pasal 1 sub 5). 8. Perbuatan Hukum Keperdataan (Pasal 2 sub a), 9. Pengaturan yang bersifat umum (Pasal 2 sub b), 10. Keputusan Panitia Pemilihan Indonesia (Pasal 2 sub f), 11. Tidak ada keseimbangan antara penggugat/tergugat, 12. Tempat Kedudukan PERATUN, 13. Pembentukan PERATUN (pasal 9), 14. Pembinaan Organisasi, administrasi dan keuangan (Pasal 7 (2), 15. Persyaratan Hakim (Pasal 14 jis Pasal 15, 18, 21, 129, 140 (2)), 16. Sekretaris (Pasal 11 (1) jo 40 dst.), 17. Kepentingan Umum (Pasal 49 jo Pasal 67 (4) dan pasal 130), 18. Upaya Administratif (Pasal 48), 19. Masalah Pasal 49. Yang menjadi masalah adalah terutama keadaan yang bersifat kealitatif (diluar masalah kepentingan umum) : a. Dalam waktu Perang dan keadaan Bahaya, b. Keadaan bencana Alam, c. Keadaan Luar Biasa yang membahayakan, d Keadaan Mendesak, e. Peraturan Perundangan yang berlaku. 20. Hubungan Upaya Administratif dengan Pengadilan Tinggi TUN, 21. Hukum Acara PERATUN, 22. Alasan Gugatan

(Pasal 53 ayat (2), 23. Persyaratan Gugatan (Pasal 53 ayat (1), 54, dst.), 24. Biaya perkara yang besar (Pasal 108 jo Pasal 107), 25. Pembayaran Ganti Rugi (Pasal 116), 26. Putusan Pengadilan tidak dilaksanakan (Pasal 115), 27. Masalah Kasasi, 28. Saat mulai berlakunya Undang-undang (Pasal 141).

Untuk mengikuti sistematik RUU-PERATUN maka setelah mengemukakan sekitar 28 masalah pokok maka perlu ditinjau pasal-pasal secara umum.

Pertama : BAB I KETENTUAN UMUM, Bagian Pertama, Pengeritan.

Pasal 1 butir 1 : Harus dicakup pengertian administrasi yang pada hakekatnya secara tehnis mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. 11)
Saya sependapat dengan Syahran Basah.
Butir 2 dan 3 perlu dipertegas sehingga pengertian Badan dan pengertian Pejabat menjadi lebih jelas.
Butir 4 merupakan kunci dari adanya PERATUN yang mensyaratkan mutlak adanya surat penetapan tertulis atau beschikking untuk dijadikan dasar penuntutan dan ini sejalan dengan pemikiran beberapa ahli Belanda 12).

Pengertian "Penetapan" perlu diperjelas agar tidak membingungkan karena bersifat mengikat umumnya sama dengan keputusan yang bersifat umum.

Adalah jelas maksud pemerintah bahwa penetapan tertulis menggambarkan hubungan keluar, jadi ada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara "Menetapkan" terhadap seseorang atau badan hukum privat. Tentang penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (singkatan : TUN) yang bersifat konkrit individual dan final perlu lebih diperjelas dalam penjelasan pasal.

Butir 5 Sama pengertiannya dengan butir 4 dengan kekhususan terhadap pengertian SENGKETA yang termasuk sengketa kepegawaian dan tata usaha militer. Perlu dipikirkan agar sengketa tata usaha militer diatur tersendiri karena sifat khusus dari organisasi dan struktur militer .
Pasal 2 Butir a mencakup pengertian perbuatan hukum publik misalnya memutuskan pemenang "Tender", sehingga perlu perumusan lebih tajam dalam penjelasan pasal.
Butir b memang memerlukan penjelasan arti pengaturan yang bersifat umum. Pemikiran Sunaryati Hartono 13) menyatakan perbuatan pemerintah dibidang perencanaan tidak patut diadili oleh Pengadilan, akan tetapi tidak berarti cara-cara pelaksanaannya tidak boleh dibawa ke Pengadilan.

Selanjutnya *butir f* sebenarnya boleh dikategorikan ke dalam butir b.

Butir c, d, dan e memerlukan penjelasan lebih lanjut sebab dasarnya dapat dimasukkan dalam butir a dan b.

Pasal 3 ayat 1 berarti penolakan harus didasarkan kepada keputusan yang tertulis dan tidak perlu merupakan surat penetapan formal.

Ada ahli hukum yang mengsyaratkan bentuk formal surat penetapan a.l. Van Der Pot tetapi pengertian demikian mempersempit arti penetapan tertulis. Perlu dipertimbangkan istilah "ketetapan" yang mengandung arti telah rampung = final pertimbangan sebelum mengeluarkan ketetapan.

Saya menyetujui syarat-syarat pasal 1 butir 4 sepenuhnya diberlakukan sehingga nota ataupun pendapat di atas surat yang tertulis oleh yang berwenang merupakan penetapan tertulis.

Ayat 2 tidak mengeluarkan keputusan berarti juga sikap diam padahal permohonan telah diterima, jadi ada keputusan tidak tertulis. Hal ini perlu dihubungkan dengan pasal 56 ayat (3) yang mungkin memerlukan penyempurnaan.

Ayat 3 memerlukan perhatian terhadap jangka waktu empat bulan dibandingkan dengan ketentuan bagi justisiabelen yang diberi waktu enam puluh hari pasal 55. Di sini perlu pertimbangan tentang prinsip "keseimbangan" antara penguasa yang digugat dan rakyat.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4, 5 dilewati.

Bagian Ketiga, Tempat kedudukan.

Pasal 6 Perlu mempertimbangkan Pemikiran dari Herman Sihombing 14) yang mengusulkan PERATUN di Sumatera 3, Jawa 4, Kalimantan 2, Sulawesi 2, Bali dan Nusatenggara 1, Maluku Irian Jaya 1, dan peradilan Banding 1 di Jakarta dan Kasasi oleh Mahkamah Agung.

Begitu pula prinsip PERATUN di setiap KABUPATEN dihubungkan dengan Undang-undang No. 2 1986 tentang Peradilan Umum agar lebih mendekatkan rakyat kepada perlindungan hukum. Perbandingan organisasi Peradilan Administrasi di Perancis dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung 15) perlu diperhatikan peranan Conseil d'Etat.

Pasal 7 Perlu diperhatikan peranan Departemen yang membina PERATUN. Dalam penjelasan pasal perlu diuraikan Hakim bebas dari campur tangan siapapun.

Kedua BAB III, Susunan Pengadilan, Bagian Pertama Umum.

Pasal 8 Perlu diperhatikan hubungannya dengan BAB III dan wewenang Mahkamah Agung UU No. 14/1986 pasal 33. Tentang Fungsi banding Pengadilan Tinggi TUN harus dihubungkan pasal 48 dan pasal 51 (3) di mana Pengadilan Tinggi mengadili pada tingkat pertama sengketa banding administrasi (pasal 48) yang oleh Rochmat sumitro 16) Majelis Pertimbangan Pajak dinyatakan peradilan tingkat pertama administrasi murni.

Pasal 9, 10, 11 perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua, Paragraf 1 dan 2, Ketua, Wakil Ketua Hakim dan Panitera. Pasal 12-26 mengatur persyaratan dan lain-lain di mana paling penting syarat-syarat buat HAKIM PERATURAN seyogianya lebih berat daripada HAKIM Peradilan Umum. Pengertian Sarjana Hukum adalah luas misalnya menempuh pendidikan khusus tambahan pengetahuan tata usaha negara. Syarat-syarat dalam pasal 14 perlu dihubungkan dengan Hakim Ad Hok pasal 129 yang memiliki persyaratan khusus.

Pasal 18 Perlu dihubungkan dengan pasal 129

Pasal 26 Perlu diperhatikan wewenang kepolisian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981.

Pasal 27 - 39 Mengatur panitera Masalah rangkapan jabatan dengan sekretaris perlu dipikirkan dalam rangka perkembangan pembangunan nasional yang makin meningkat jc. pasal 41.

Bagian Ketiga, Sekretaris

Pasal 40 - 46 tentang jabatan rangkap satu arah yaitu Panitera merangkap Sekretaris tetapi Sekretaris tidak bisa merangkap Panitera adalah semata-mata pertimbangan tehnis.

Walaupun demikian maka persyaratan menjadi Panitera harus diperberat misalnya yang telah tingkat akhir S1 atau tingkat D3. Sistem pendidikan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982. Demikianlah pula syarat ijazah untuk sekretaris.

Ketiga, BAB III KEKUASAAN PENGADILAN Pasal 47 - 52.

Mengenai kompetensi pengadilan maka menurut teori dapat dipakai metode enumerasi tertutup dimana Hakim hanya mempunyai kompetensi attributif yang diperinci dengan tegas.

Dilain pihak ada metode enumerasi terbuka jadi ditetapkan bidang-bidangnya ditambah memberi hak pengadilan menambahnya misalnya RUU-PERATUN tahun 1967 pasal 1 (1), 2 (2) bidang-bidang ayat (1) ditentukan oleh Mahkamah Agung setelah mendengar menteri bersangkutan dan oleh Presiden ditetapkan bidang-bidang lainnya.

Metode umum adalah menentukan kompetensi Pengadilan dengan kriteria umum misal RUU-PERATUN 1982.

RUU-PERATUN 1986 menganut metode umum dimana pasal 1 (4) menjadi kriteria menentukan adanya SENGKETA atau PERKARA.

Pasal 137 perlu diperhatikan dimana sengketa TUN dalam arti pasal 1 (4) diatur dengan mengakui bahwa ada sengketa TUN lainnya yang BELUM diatur dalam RUU-PERATUN 1986.

Wewenang Peradilan Umum memeriksa dan memutus perkara perbuatan Badan/ Pejabat atau perangkat Tata Usaha Negara

(= administrasi) seperti melampaui batas kekuasaannya, penyalahgunaan wewenang, (abus de pouvoir) dan penyalah gunaan hak (abus de droit) dan lain-lain masih DIAKUI masuk bidang perdata, terkecuali yang memenuhi unsur pasal 1 (4).

Saya berpendapat bahwa sengketa onrechmatige overheidsdaad seperti dikembangkan oleh yurisprudensi masuk wewenang Pengadilan Perdata sebaiknya dimasa yang akan datang dimasukkan wewenang PERATUN sehingga UU-PERATUN dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan negara kita.

Prajudhi Atmosudirdjo mengemukakan pendapatnya bahwa perbuatan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan yang onjuist (tidak tepat), yang onwetmatig (melanggar Undang-undang) yang ondoelmatig (tidak bijaksana) yang onrechtmatig (melawan hukum 17) yang banyak menimbulkan kerugian atau ketidak senangan pihak warga negara.

Selain daripada itu maka UPAYA ADMINISTRATIF yang hasus ditempuh sebelum memajukan sengketa ke PERATUN menjadi syarat tambahan bagi pasal 1 (4) dan persyaratan ini memberatkan pencari keadilan ataupun prosedur pasal 48 (1) (2) memperpanjang jarak antara rakyat pencari keadilan dengan kekuasaan kehakiman.

Adalah dapat diterima bilamana sengketa adiministrasi murni misalnya pajak kepegawaian, bea cukai, diputuskan oleh pihak administrasi/atasan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila sebagai pelaksanaan konsep Negara hukum Pancasila.

Kenyataan dewasa ini bahwa peraturan perundangan-undangan belum memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga adalah wajar untuk memberikan kesempatan hukum kepada justisiabelen memajukan sengketa administrasi kepada PERATUN sebagai pengadilan tingkat Pertama.

Mengenai Pengawasan pasal 52 maka harus tetap menjunjung tinggi dengan perbuatan nyata kekuasaan kehakiman yang merdeka, UUD 1945 pasal 24 dengan penjelasan dan selalu mengutamakan perlunya realisasi prinsip pengadilan sederhana, cepat dan biaya murah.

Keempat, BAB IV HUKUM ACARA, Pasal 53 - 136.

Harus dapat dijelaskan dalam rumusan pasal perbedaan hukum acara RUU-PERATUN yang memiliki kedudukan khusus sebab pihak yang bersengketa harus sederajat dalam hukum dan karena itu Hakim bisa bebas mempergunakan alat-alat bukti.

Kedudukan Badan/Pejabat TUN Adalah sangat kuat menjalankan trifungsi ditambah tindakan bersifat Vrij bestuur = Freies Ermessen 18) dan karena itu Hukum Acara PERATUN harus berbeda pengaturannya dengan hukum acara untuk Peradilan Umum.

Hukum Acara PERATUN harus menjamin diperolehnya nasehat aktif dari Hakim walaupun kedudukan Hakim adalah bebas tetapi diharapkan dapat bertindak bijaksana sehingga KERUKUNAN antara yang bersengketa dapat dicapai, dan bilamana upaya ini tidak berhasil maka barulah dilakukan persidangan untuk memutuskan sengketa.

Jangka waktu yang seimbang bagi semua pihak harus dijamin dalam RUU-PERATUN.

Tentu kelancaran perbuatan pembangunan nasional tidak boleh terhenti karena adanya perlindungan hukum bagi rakyat tetapi sebaliknya harus juga dijamin dimana kepentingan hukum rakyat tidak boleh dikorbankan karena alasan kepentingan umum, keadaan luar biasa yang membahayakan, gugatan menurut nalar tidak masuk akal dan lain-lain.

Bersengketa dengan cuma-cuma (artinya tanpa membayar ongkos perkara) harus dapat diperluas penggunaannya oleh rakyat.

Keputusan PERATUN harus dapat dilaksanakan dalam waktu yang wajar sehingga kepastian hukum menjadi kenyataan bagi semua pihak.

Pasal 115 memang perlu perhatian dan pasal 53 (1) (2) perlu dipikirkan prinsip asas Umum Pemerintahan yang baik (= algemene beginselen van behoorlijk bestuur = General prinsiples of good administration) seperti dicantumkan dalam Wet Administratieve Rechtspraak overheids beschikkengen pasal 8 (d).

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam pasal 98, 99 dimana secara nyata diadakan hak yang sama bagi penggugat dan Badan/Pejabat TUN yaitu tidak boleh melebihi waktu 14 hari, dan prinsip ini sebaiknya berlaku pula dalam mengatur waktu beracara.

Pasal 83 yang mengatur penggabungan dari pihak ketiga sebaiknya tidak diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebab dapat dibayangkan akibat tertundanya keputusan sengketa karena banyak pihak TUN dapat berkepentingan dalam suatu sengketa.

Hakim PERATUN berdasar pasal 97 ayat 10 jo. pasal 116 dapat memutuskan ganti rugi sehingga pasal 116 (3) harus lebih dahulu diwujudkan dengan peraturan pemerintah atau diserahkan sepenuhnya besar kecilnya ganti rugi kepada Hakim.

Kelima, BAB V, KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 137 - 140.

Diatur tentang pelimpahan perkara, distribusi wewenang pengadilan. Perlu penjelasan mengenai pengertian "Sudah diajukan" dalam pasal 137 ayat 2, agar supaya dicapai kepastian hukum.

Mengenai distribusi wewenang pengadilan, saya lebih menerima prinsip adanya PERATUN disetiap Kabupaten/Kotamadya dan Pengadilan Tinggi PERATUN disetiap ibu kota propinsi..

Dalam masa peralihan dapat ditentukan PERATUN disetiap Kabupaten dan atau Kotamadya dan Pengadilan Tinggi di empat tempat yaitu Jakarta, Ujung Pandang, Medan dan Banjarmasin.

Keenam, BAB VI KETENTUAN PENUTUP, Pasal 141.

Menentukan mulai berlakunya Undang-undang umumnya ditetapkan sendiri oleh Undang-undang.

Adalah lebih tepat bilamana Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara ditentukan mulai berlaku waktu yang wajar (dua atau tiga tahun kemudian).

Pada Bab Pendahuluan telah saya jelaskan metode dan sistimatika untuk meninjau RUU-PERATUN 1986, sehingga kesimpulan yang dapat diberikan adalah:

RUU-PERATUN 1986 harus dapat menjadi kenyataan Undang-undang dalam waktu yang tidak lama lagi.

Memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dengan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara merupakan upaya untuk mewujudkan konsep Negara Hukum Pancasila.

Dalam negara "Hukum Pancasila" maka harus ada pola pikir yang jelas tentang unsur-unsur negara hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi Rakyat dan Bangsa dalam tahap pembangunan nasional sekarang ini untuk ditingkatkan terus menerus secara berkesinambungan dalam Repelita selanjutnya.

Untuk menyusun Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dipegang teguh prinsip Negara Hukum yang berazaskan Pancasila dimana diutamakan musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kekeluargaan, keseimbangan keserasian, kepatutan, bersih dan berwibawa, kebenaran, keadilan dan tertib hukum.

Tujuan membentuk Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk merealisir amanat MPR nomor IV tahun 1978 dimana kepada rakyat diberi kemungkinan untuk meminta "KEADILAN HUKUM" kepada Badan Kehakiman yang BEBAS dan "MERDEKA", dengan tidak menghambat penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran Bangsa.

Perbuatan tata usaha negara adalah tindakan hukum Pejabat/Badan Tata Usaha Negara meliputi semua urusan pemerintahan sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 jct pasal 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan didaerah.

Dengan terwujudnya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Administrasi maka diharapkan upaya membangun aparatur Negara yang bersih dan berwibawa berlanjut secara berkesinambungan dengan pengawasan yang konstruktif dinamis oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lainnnya intern maupun ekstern....

Oleh: H.I. Widyapranata

Budaya Dan Darma Pinisepuh

Dalam buku kamus "Bausastra Jawa - Indonesia," karangan *S. Prawiroatmojo,* - kita baca: *Pinikolot:* pengetua, orang yang dianggap tua untuk memberi nasehat; yang dipertuakan; penasehat. *Pinisepuh:* pengetua, yang dipertua, penasehat. *Pinituwa:* pengetua; orang yang dianggap tua (dapat memberi nasehat); penasehat; pemuka agama Protestan.

Tiga istilah ini searti. Di zaman sekarang orang lebih suka menggunakan kata "pinisepuh", karena halus dan hormat bahasanya. Kata "sepuh" disini tidak menunjukkan tingginya umur tetapi lebih menggambarkan kedewasaan jiwa atau kearifbijakan.

Hal ini kelihatan, kalau kita membaca beberapa buku kuno. Misalnya dalam "Serat Wedatama," ciptaan *Mangkunegara IV,* terdapat keterangan sebagai berikut: *"Sapantuk wahyuning Allah, gya dumilah mangolah ngelmu bangkit, bangkit mikat reh mangukut, kukut aning jiwangga, kang mangkono keno ingaran wong sepuh lire sepuh sepi hawa, awas loroning ngatunggil".*

Bahasa Indonesianya secara bebas: "Siapa yang memperoleh wahyu Tuhan, maka teranglah makna ilmu/filsafah hidup, yang kemudian dilaksanakan dengan mengendalikan hawa nafsu. Itulah yang disebut orang "sepuh". Arti sepuh tiada nafsu serakah dan selalu ingat kepada hakekat hidup, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Kita sering melihat, bahwa pada upacara perkawinan diminta seorang pinisepuh memberi wejangan kepada kedua mempelai tentang prilaku suami dan isteri untuk membangun jejodohan yang rukun dan bahagia sampai kaken - ninen, tentang membangun hidup yang berguna bagi negara dan masyarakat, serta tentang mempunyai anak keturunan yang menghormati orang tua seperti peribahasa: "mendem jero, mikul duwur", (memendam dalam, memikul tinggi) yang berarti: "menyimpan rahasia orang tua serapat-rapatnya dan menjunjung nama orang tua setinggi-tingginya".

Pada setiap Hari Raya Idul Fitri para muda mengunjungi para pinisepuh untuk mengucapkan selamat hari raya, dan meminta maaf lahir batin atas segala kesalahan serta akhirnya memohon doa restu semoga cita-cita mereka tercapai. Sebaliknya pinisepuh memaafkan segala kesalahan para muda dan juga meminta dimaafkan kalau ada nasehat-nsehatnya yang tidak berkenan di hati para muda dan selanjutnya memberi puja pengestu mudah-mudahan keinginan yang luhur para muda terkabul adanya.

Budaya pinisepuh kelihatan juga dipakai di MPR. Dalam pembukaan sidang umum anggota MPR yang paling tua usianya diberi kesempatan untuk memimpin sidang, didampingi oleh anggota yang paling muda umurnya. Di sini orang yang tinggi umurnya dianggap memenuhi syarat-syarat kesepuhan. Hal ini wajar, karena orang yang berusia 75 tahun atau lebih masih dipilih rakyat untuk mewakilinya di Lembaga Tertinggi Negara pasti bukan manusia usia lanjut sembarangan.

Kini Golkar melembagakan pinisepuh dengan peraturan khusus. Pinisepuh Golkar mendapat kehormatan untuk:

Menghadiri rapat-rapat Dewan Pembina Golkar, rapat-rapat Dewan Pimpinan Golkar dan/atau rapat-rapat Golkar lainnya atas undangan;

Memberi pendapat atau sumbangan pikiran baik dengan lisan maupun dengan tertulis kepada Dewan Pembina dan/atau Dewan Pimpinan Golkar untuk kebaikan dan perkembangan Golkar;

Menghadiri upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Golkar dan mendapatkan tempat yang terhormat;

Memperoleh bentuk penghargaan lainnya yang dipandang perlu.

Dengan pelembagaan pinisepuh Golkar tersebut diresmikanlah ikatan lahir batin antara para pinisepuh, para pembina, para pemimpin pelaksana dan para kader Golkar lainnya. Ikatan lahir batin ini merupakan kesatu-paduan dan kesinambungan masa yang lama, masa yang sekarang dan masa yang mendatang. Keharmonisan antara pengalaman para pinisepuh, realisme para pembina, dinamik para pemimpin pelaksana dan militansi para kader muda, menjamin kemantapan dan keberhasilan perjuangan Golkar di masa sekarang dan di masa mendatang.

Lambang Hikmah Pengalaman

Menurut wawasan Golkar, pinisepuh Golkar adalah pejuang Golkar yang telah dengan nyata-nyata dan terus menerus memberikan pengabdian dan darma baktinya demi pertumbuhan, kebesaran dan kejayaan perjuangan Golkar, baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang berkat jasa-jasanya itu ia merupakan tokoh Golkar yang tetap berwibawa dan dihormati.

Lain dengan pandangan umum yang religius — etis, pandangan Golkar yang khusus ini adalah pragmatis, yang memberi arti yang penting kepada pengalaman.

Pinisepuh adalah lambang hikmah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tauladan yang baik diikuti. Contoh yang buruk dihindari. Kesalahan tidak diulangi. Ini namanya hikmah pengalaman.

Ada orang atau organisasi yang mempunyai banyak pengalaman, namun tidak mau atau tidak mampu mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman tersebut. Orang atau organisasi itu selalu membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Jiwanya terus mundur, akhirnya mandeg, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

Golkar lahir dan tumbuh dari hikmah pengalaman pahit sebagai akibat ketidak mampuan kekuatan-kekuatan sosial politik untuk melaksanakan pembangunan buat mewujudkan cita-cita nasional ialah masyarakat yang adil dan makmur berasaskan Pancasila.

ABRI mengambil hikmah pengalaman

dengan tidak mau untuk ketiga kalinya mengalami tusukan dari belakang oleh PKI. Yang pertama kali terjadi pada tahun 1948 ketika menghadapi serbuan tentara Belanda. Yang kedua kali pada tahun 1965 di tengah-tengah ABRI bersiap siaga berhubung dengan Republik kita berkonfrontasi dengan Malaysia. Oleh karena itu ABRI terus menerus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya laten dari PKI dan waktu belakangan ini menggiatkan gerakan "bersih lingkungan".

Sebuah contoh lagi tentang hikmah pengalaman di luar negeri.

Presiden *Harry Truman* dalam menghadapi pembentukan organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa di San Francisco pada tahun 1945 tidak mau mengulangi kesalahan Presiden *Woodrow Wilson*, yang menganggap sepi Konggres dan tidak mengikut sertakan lembaga tersebut dalam kegiatannya membentuk Liga Bangsa Bangsa di Swiss pada tahun 1919. Konggres menolak untuk meratifikasi persetujuan yang telah ditanda tangani oleh Presiden *Wilson*. - Dengan penolakan tersebut Amerika Serikat tidak menjadi anggota Liga Bangsa Bangsa, walaupun Presidennya menjadi salah seorang pemrakarsa Liga tersebut. Presiden *Truman* merangkul Lembaga Perwakilan Rakyatnya dan ratifikasi persetujuan PBB berjalan lancar.

Pengalaman bisa juga menjadi guru yang kejam dan tidak mengenal ampun, terutama bagi mereka yang angkuh yang suka meremehkan pengalaman orang lain.

Adolf Hitler lebih mempercayai impiannya sendiri daripada pengalaman panglima-panglimanya. Akhirnya kepemimpinannya gagal total. Negaranya kalah perang dan ambruk berantakan. *(Walter Goerlitz: "History of the German General Staff," Praeger, New York).*

Napoleon, yang rajin mempelajari pengalaman panglima-panglima perang di masa lalu memberi ajaran sebagai berikut: "Panglima harus dituntun oleh pengalamannya atau jeniusnya sendiri. Siasat, kemajuan dan pengetahuan insinyur dan perwira artileri bisa dipelajari dari buku-buku, tetapi "kesenopatian" (generalship) hanya diperoleh dari pengalaman dan dari mempelajari kampanye semua kapten besar. Gustavus Adolphus, Turenne dan Frederik, juga Alexander, Hannibal dan Caesar, semuanya bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang sama." *(The Military Maxims of Napoleon in "Root of Strategy", edited by Thomas Philips).*

Mengenai hikmah pengalaman Ketua Dewan Pembina Golkar, Jenderal *Soeharto*, pernah berkata: "Pengalaman masa lampau itu harus menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Golkar khususnya dan bangsa kita umumnya, agar di satu pihak kepahitan masa lampau itu tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang dan di lain pihak kita secara positif belajar dari pengalaman masa lampau itu untuk pembangunan masa depan". *(Sambutan pada H.U.T. ke - 20 Golkar).*

Darma Pinisepuh

Seperti ksatria, pinisepuh pun mempunyai darma.

Darma kstaria ialah bertempur untuk menegakkan kebenaran. Darma pinisepuh ialah *pertama* memberi nasehat, yang berisi peringatan atau anjuran dan *kedua*, memberi doa restu, semoga dikabulkan apa yang dicita-citakan para muda.

Darma pinisepuh Golkar ialah memberi sumbangan pikiran untuk kebaikan dan perkembangan Golkar.

Darma ialah kewajiban suci, yang timbul dari hati nurani yang bersih.

Darma dilaksanakan tanpa pamrih, artinya tanpa maksud dan tujuan sampingan, tetapi hanya demi kebenaran atau kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat banyak.

Darma dilaksanakan terus menerus sepanjang tenaga mengizinkan, meskipun prestasinya tidak sebobot lagi dengan jasa-jasa di masa dahulu. Namun bagi pinisepuh yang penting ialah bekerja sebab kerja adalah hidup dan hidup adalah kerja.

Mangkunegara IV menjalankan darma pinisepuhnya dengan antara lain menasehatkan para muda supaya mengikuti jejak Panembahan Senopati, yang selalu berusaha menahan hawa nafsu, dalam pertemuan senantiasa menyenangkan hati orang banyak, dalam kesunyian mengheningkan cipta dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat bimbingan untuk memimpin negara dan masyarakat. *(Serat Wedatama).*

Paku Buwana IV melaksanakan darma pinisepuhnya dengan antara lain mengingatkan para muda supaya senantiasa waspada terhadap bahaya yang disebabkan oleh sifat angkuh. Misalnya: kijang yang *adigang*, yaitu menyombongkan larinya yang cepat. Gajah yang *adigung*, yakni membanggakan tubuhnya yang besar dan kuat serta kuasa. Ular yang *adiguna*, yakni memamerkan bisanya yang beracun dan mematikan barang siapa yang digigit. Tiga binatang tersebut bertempur dan akhirnya mati semuanya. *(Serat Wulangreh).*

Pujangga Ranggawarsito menjalankan darma pinisepuhnya dengan antara lain mengungkapkan ciri-ciri pembesar yang utama, yakni: satu kata satu perbuatan, rendah hati, sederhana dan ramah menyenangkan hati orang banyak *(Serat Witaradya).*

Kresna memperingatkan *Arjuna* akan tanggung jawab seorang pembesar, bahwa "Apa saja yang dilakukan orang besar, pasti orang lain akan mengikutinya; contoh apa saja yang diberikan pasti seluruh dunia akan menirunya." *(Bagawad Gita)*

Nasehat-nasehat pinisepuh dalam abad-abad yang lalu tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang masih tetap berlaku bagi generasi hari ini dan generasi hari besok.

Nah, dalam rangka pelaksanaan darma pinisepuh, sumbangan pikiran apakah yang bisa disampaikan oleh para pinisepuh Golkar sekarang ini?

Pengembangan Kader Kebangsaan

Sumbangan pikiran para pinisepuh Golkar, menurut pendapat saya, seyogyanya bersasaran masalah pengembangan kader kebangsaan. Sebab kunci untuk kebaikan dan kemajuan Golkar ada di tangan kader kebangsaan.

"Cadress decide everything", Kader menentukan segala-galanya.

Mengenai kader kebangsaan ini Ketua Dewan Pembina Golkar pada peringatan hari ulang tahun ke 20 Golkar memberi pengarahan sebagai berikut:

"Kader Golkar tidak cukup hanya menjadi kader politikus yang cakap seperti yang lazim kita kenal. Kader Golkar haruslah berkembang menjadi kader kebangsaan yang mempunyai cakrawala pandangan yang lebih luas dan lebih jauh ke masa depan ...."

Pengarahan ini sangat menarik karena di situ dikemukanan bedanya kader kebangsaan dengan politikus. Perbedaan ini harus dibahas sedalam-dalamnya dan dipahami benar-benar oleh para kader Golkar. Biasanya politikus itu diperlawankan dengan negarawan. Dikatakan bahwa politikus mendahulukan kepentingan golongan daripada kepentingan negara, tetapi negarawan sebaliknya. Lain lagi pendapat sosiolog Jerman terkenal, *Max Weber*, - yang menganggap politikus sebagai amatir politik, sedangkan pegawai-pegawai tinggi negeri yang diikut sertakan dalam menentukan kebijaksanaan politik dinamakan "profesional politik".

Dari pengarahan Ketua Dewan Pembina Golkar di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kader kebangsaan Golkar diharapkan menjadi sumber persediaan:

Negarawan-negarawan ulung yang mampu memecahkan masalah-masalah nasional;

Pegawai-pegawai tinggi negeri yang karena integritasnya menjadi tulang punggung aparatur pemerintah yang bersih, efisien dan efektif.

Wiraswasta-wiraswasta yang menjadi dinamisator ekonomi dan keuangan negara yang sehat dan kuat.

Pemimpin-pemimpin yang menjadi motor organisasi yan bisa menggerakkan rakyat sebanyak mungkin untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Masalahnya ialah bagaimana menggembleng kader kebangsaan yang bermutu tinggi demikian itu secara efisien dan efektif?

Jalannya tidak lain ialah belajar dari pengalaman dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kursus/latihan/penataran kader yang diselenggarakan sampai sekarang.

Pengetahuan tentang jiwa, sikap dan prilaku manusia serta seni dan ketrampilan menganalisa masalah atau kejadian serta latihan berpikir kreatif perlu ditingkatkan sehingga seimbang dengan pengetahuan umum. ☐

J. Soedjati Djiwandono

Gorbachev Dan Kawasan Asia Pasifik

Mungkin tepat untuk menggambarkan pidato Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Gorbachev di Vladivostok tanggal 28 Juli tahun ini, yang telah sering diberi julukan "prakarsa perdamaian" atau "ofensif perdamaian" Gorbachev, sebagai posisi Soviet di kawasan Asia Pasifik. Sekalipun pidato itu mungkin memuat unsur-unsur propaganda, tergantung bagaimana kita mendefinisikan istilah itu, karena pada hakikatnya semua negara melakukan berbagai bentuk propaganda, kiranya tidak banyak manfaatnya untuk begitu saja mengabaikan seluruh pidato itu sematamata sebagai suatu usaha propaganda Soviet. Sesungguhnya jika pembangunan militer Soviet di kawasan Asia Pasifik telah menciptakan ketakutan akan "ancaman Soviet", apakah kekhawatiran itu sungguh-sungguh atau sekedar propaganda, sementara ofensif perdamaian Soviet diterima tidak lebih daripada sekedar propaganda, akan sulitlah menentukan tingkah-laku apa yang diharapkan dari Uni Soviet dalam hubungan internasionalnya.

Di bawah ini adalah komentar singkat mengenai pokok-pokok yang menonjol dari pidato Gorbachev sejauh mungkin tanpa prasangka dan sekaligus mencoba membaca bukan hanya yang tersurat tetapi juga yang tersirat. Perlu diamati sejauh mana tingkah-laku Soviet di masa depan akan sesuai dengan apa yang kedengarannya seperti keinginan-keinginan damai yang terdapat di balik prakarsa atau ofensif perdamaian Gorbachev di kawasan Asia Pasifik.

Sepintas lalu kelihatannya berlebihan bagi Gorbachev untuk mencoba meyakinkan dunia bahwa Uni Soviet adalah juga negara Asia-Pasifik; bahwa bagian terbesar wilayahnya terletak di sebelah Timur Urals di Asia — di Siberia dan Timur Jauh. Ini jelas dan tidak perlu ditekankan lagi. Dan sebagai negara Asia-Pasifik yang besar Uni Soviet memiliki kepentingan-kepentingan sah di kawasan ini.

Meskipun demikian dalam prakarsa-prakarsa utama yang selama ini telah diambil dan diajukan untuk menjalin kerangka kerjasama regional bagi kawasan Asia Pasifik, sengaja atau tidak, dan apa pun alasannya, secara diam-diam atau terang-terangan, Uni Soviet telah dikecualikan dan kurang diperhitungkan. Satu alasan yang sering dikemukakan adalah perbedaan dalam sistem ekonomi. Walaupun benar, perbedaan itu bukan kesulitan yang tidak dapat diatasi. Alasan-alasan lain, kalaupun tidak dinyatakan secara terang-terangan, mungkin bersifat politik dan ideologis.

Dalam bidang ekonomi, terutama mengenai gagasan kerjasama ekonomi Pasifik, Uni Soviet, seperti yang dikatakan oleh Gorbachev sendiri, "mendekati gagasan ini tanpa prasangka dan kami siap untuk ikut serta dalam perundingan mengenai kemungkinan dasar kerjasama itu; tetapi, tentu saja, kalau hal itu tidak dipikirkan dalam pola yang dipaksakan, berorientasi pada blok, dan anti sosialis, melainkan lebih merupakan hasil diskusi bebas tanpa diskriminasi." Bagaimanapun, kerjasama ekonomi antara apa yang disebut ekonomi kapitalis dan sosialis secara bilateral bukan merupakan gejala yang baru. Menjalin kerjasama seperti itu dalam tingkat regional sekurang-kurangnya patut dipertimbangkan secara serius. Tetapi harus disadari bahwa bahkan antara ekonomi kapitalis yang telah mapan di satu pihak dan yang berkembang di lain pihak sekalipun, yang "terbuka" dan bersifat non-sosialis, kerjasama regional menimbulkan kesulitan-kesulitan yang serius. Hal itu tentu akan merupakan salah satu masalah dalam konsep kerjasama ekonomi Pasifik.

Terlepas dari masalah kerjasama regional, kelihatannya wajar bahwa Uni Soviet, seperti dikatakan oleh Gorbachev, "akan mencoba memperkuat hubungan bilateralnya dengan semua negara di kawasan tanpa kecuali." Sebagai kekuatan Asia-Pasifik, Uni Soviet, seperti dikatakan di muka, mempunyai kepentingan sah di kawasan. Di samping itu, jika tekanan yang berlebihan pada kehadiran militernya telah menimbulkan kekhawatiran tentang ancaman Soviet yang berlebihan pula pada negara-negara di kawasan, usaha Soviet untuk mengimbangi kehadirannya di kawasan Asia Pasifik dengan meningkatkan aspek nonmiliter dalam hubungan dengan negara-negara di kawasan perlu disambut baik.

Lagi pula, lingkungan strategis secara umum di kawasan Asia Pasifik lebih menguntungkan Barat dan Amerika Serikat khususnya daripada Uni Soviet, biarpun Amerika Serikat telah menarik mundur dari Vietnam lebih dari satu dasawarsa yang lalu. Dan mengingat sifat hubungan Soviet-Cina yang telah berlangsung selama hampir tiga dasawarsa, konflik Cina-Vietnam, situasi konflik yang terus-menerus di semenanjung komunis Indocina dan posisi Korea yang tidak pasti antara Moskwa dan Peking, penekanan Gorbachev atas pentingnya "sosialisme" di kawasan Asia Pasifik melebih-lebihkan kenyataan:

> *Sosialisme adalah faktor yang tidak dapat diabaikan dalam perubahan yang kompleks dan skala besar yang terjadi di kawasan ini. Ia telah mendapat posisi kuat di Asia sebagai hasil Revolusi Sosialis Oktober yang besar dan kemenangan atas fasisme dan militerisme Jepang, sebagai hasil revolusi besar Cina, sebagai hasil konsolidasi sistem sosial baru di Mongolia, di bumi Korea yang rakyatnya menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memperjuangkan masa depan sosialis negaranya, dan kemudian di Vietnam dan Laos.*

Jelas bahwa bahkan tanpa kualifikasi seperti disebutkan di atas sehubungan dengan hubungan "persaudaraan" di antara negara-negara komunis, kawasan ini selebihnya jauh lebih menguntungkan Amerika Serikat atau Barat pada umumnya. Sebagian besar pengaturan keamanan yang melibatkan komitmen Amerika Serikat terdapat di kawasan ini, sekalipun Selandia Baru keluar dari perjanjian ANZUS. Sebagian besar negara di kawasan beraliansi atau sekurang-kurangnya lebih bersahabat kepada Barat. Yang disebut terakhir termasuk negara-negara nonblok. Dan sementara menghargai negara-negara non-blok, yang sekurang-kurangnya dalam penilaian sepintas, tidak dikaitkan dalam pengertian ideologis sebagai "transisi" ke sosialisme, Gorbachev hanya dapat membanggakan hubungan Soviet dengan India sebagai pemimpin gerakan non-blok tetapi yang sebenarnya terletak di luar lingkup kawasan Asia-Pasifik.

Dalam konteks itulah, dan bukan dalam pengertian "penetrasi" Soviet, mungkin kita harus menilai ofensif perdamaian Gorbachev terhadap kawasan

Gorbachev-Reagan: Sebagian besar negara di kawasan Pasifik beraliansi dengan Barat.

Asia Pasifik, khususnya yang menyangkut hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan. Ini menjelaskan tawarannya kepada Cina secara terinci untuk menormalisasi hubungan, yang secara realistik lebih didasarkan pada "bertetangga baik" daripada "persaudaraan sosialis", yang tidak disinggung sama sekali dalam pidato Gorbachev. Dan mungkin merupakan bagian dari tawaran kepada Cina bahwa ia menunjuk pada apa yang ia sebut "militerisasi segitiga Washington-Tokyo dan Seoul (bukan Cina); tawarannya untuk menarik mundur pasukannya dari Mongolia, penarikan sebagian pasukan dari Afghanistan, dan himbauannya pada normalisasi hubungan Cina-Vietnam sebagai faktor penting bagi penyelesaian konflik Kampuchea. Dalam kerangka hubungan bilateral pula Gorbachev ingin meningkatkan hubungan dengan negara-negara ASEAN dan menegaskan hubungan bilateral dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan, di mana Uni Soviet telah menjamin hubungan diplomatik dan mengembangkan kerjasama ekonomi.

Mungkin yang paling penting adalah gagasan Gorbachev mengenai konperensi untuk Asia Pasifik "dalam bentuk konperensi Helsinki", dan untuk mengintegrasikan kawasan ke dalam suatu "proses yang umum ke arah pembentukan sistem keamanan internasional yang komprehensif." Hal ini bukan seluruhnya gagasan yang baru. Ini mungkin hanya merupakan interpretasi lain dari gagasan mendiang Brezhnev mengenai sistem keamanan kolektif Asia, atau gagasan Gorbachev sendiri sebelumnya mengenai "Forum Asia". Dan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, dialog dan persetujuan untuk kawasan Asia Pasifik model Helsinki sudah sering diajukan oleh pejabat-pejabat dan cendekiawan-cendekiawan Soviet.

Tidak seperti gagasan Brezhnev tentang sistem keamanan kolektif Asia yang sekurang-kurangnya pada tahap awal ditujukan kepada Cina, prakarsa Gorbachev tidak dapat dipandang sebagai prakarsa untuk menghadapi Cina atau Amerika Serikat. Dengan alasan-alasan tertentu, Uni Soviet menginginkan perbaikan hubungan dengan Cina. Analisa hubungan Soviet dengan Cina berada di luar lingkup komentar ini. Cukup dikatakan di sini bahwa himbauan Gorbachev untuk menormalisasi hubungan dengan Cina kiranya sungguh-sungguh dan bukan propaganda semata-mata. Dan terhadap Amerika Serikat, pendekatannya adalah realistis:

Kami mengakui bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan Pasifik yang besar .... Selanjutnya, Amerika Serikat, tidak diragukan lagi, memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang sah dan penting di kawasan ini.

Tidak diragukan lagi, tanpa Amerika Serikat dan partisipasinya, penyelesaian masalah keamanan dan kerjasama di Samudera Pasifik yang memuaskan semua negara di kawasan adalah tidak mungkin.

Akan tetapi usaha untuk menerapkan penyelesaian model Eropa di kawasan Asia Pasifik, yang didasarkan pada pengalaman dan kondisi Eropa yang khas, tampaknya bertentangan dengan pengakuan Gorbachev sendiri atas kompleksitas dan keanekaragaman di kawasan Asia Pasifik:

Setiap negara mempunyai sistem politik dan sosial dengan ciri tersendiri, tradisi, keberhasilan dan kesulitan sendiri, cara hidup dan kepercayaan sendiri, keyakinan dan prasangka, pengertian sendiri tentang nilai materiel dan spirituil. Masing-masing negara memiliki sesuatu yang dibanggakan dan sesuatu untuk di-

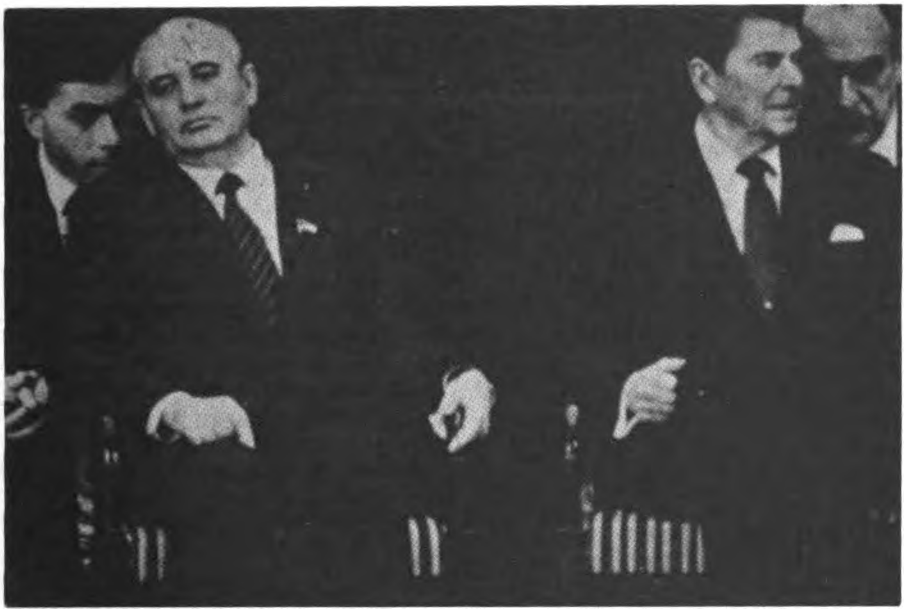

Gorbachev mengajukan sejumlah usul.

pertahankan dalam tempat peradaban manusia.

Keanekaragaman yang mengagumkan ini, kekompakan sosio-politik dan kemanusiaan yang maha besar ini menuntut perhatian, studi dan penghargaan yang serius .... Segala sesuatunya bergerak, jauh dari selesai. Yang baru bercampur dengan yang lama .... Uni Soviet ... sadar sekali akan masalah-masalah yang kompleks yang dihadapi di kawasan yang luas ini ....

Sesungguhnya, lain dengan Eropa, kawasan Asia Pasifik tidak terbagi secara rapi dalam pengertian aliansi, orientasi ideologis, dan sistem ekonomi serta sosial politik. Kontradiksi antara pengakuan Gorbachev sendiri tentang keanekaragaman dan kompleksitas kawasan dalam berbagai bidang di satu pihak dan usul-usulnya yang luas di lain pihak bisa secara mudah membuat orang curiga terhadap intensi dan motivasi yang sebenarnya. Terlepas dari beberapa hal yang pada prinsipnya baik yang diatur oleh paket persetujuan Helsinki, rencana yang muluk-muluk seperti itu bagi kawasan Asia Pasifik akan berarti pembagian daerah pengaruh, kalau tidak dominasi, antara negara adikuasa terhadap kawasan, sekalipun hal itu pasti akan disangkal oleh kedua negara adikuasa. Satu fungsi dari persetujuan model Helsinki adalah untuk menciptakan dan mempertahankan "status quo" yang sebenarnya belum ada di kawasan Asia Pasifik.

Perlu dicatat bahwa berbagai macam konflik di kawasan Asia Pasifik, baik yang nyata maupun potensial, beberapa di antaranya muncul akibat ketidaksepakatan mengenai batas teritorial seperti antara Soviet dan Cina serta antara Uni Soviet dan Jepang, dan konflik lainnya yang menyangkut status kenegaraan seperti konflik Kampuchea dan situasi konflik di Afghanistan, kemungkinan akan menghambat realisasi usul dialog dan persetujuan model Helsinki dan sistem keamanan internasional yang komprehensif. Sebab itu, mungkinkah bahwa justru untuk mengukuhkan perbatasan yang sekarang, dengan demikian mempertahankan "status quo" di kawasan Asia Pasifik, dan membekukan persoalan teritorial yang menguntungkan Uni Soviet, Gorbachev telah mengajukan usul seperti itu? Kita ingat sengketa teritorial antara Uni Soviet dan Jepang mengenai kepulauan Kurile dan kehadiran Soviet di Vietnam, khususnya di Cam Rahn dan Danang. Kedua persoalan itu tidak disinggung dalam pidato Gorbachev. Sehubungan dengan Afghanistan, Gorbachev memperlihatkan suatu isyarat itikad baik. Akan tetapi penarikan mundur sebagian kecil tentara pendudukan Soviet di negara itu tentu saja tidak berarti, sementara posisi dasar Soviet akhirnya akan tetap sama.

Memang dengan konflik yang aktual dan potensial yang melibatkan Uni Soviet terbekukan atau praktis "terselesaikan" dengan cara yang menguntungkannya jika perbatasan atau "status quo" yang ada bisa dipertahankan dan dikukuhkan oleh realisasi persetujuan model Helsinki, pimpinan Soviet akan dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah-masalah dalam negerinya. Bahwa pimpinan Soviet menghadapi masalah-masalah dalam negeri bisa dilihat dari pidato Gorbachev, yang hampir separuhnya dipusatkan pada masalah-masalah dalam negeri, khususnya perkembangan daerah Timur Jauh Uni Soviet. Dan seperti di Eropa, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu, di kawasan Asia Pasifik Uni Soviet akan menjadi satu kekuatan "status quo" daripada "revisionis" seperti yang dimengerti dalam bahasa politik Barat.

Gorbachev juga mengajukan sejumlah usul yang berkaitan dengan pengawasan dan perlucutan senjata, baik nuklir maupun konvensional. Persoalan ini adalah yang paling penting bagi umat manusia sekarang ini, dan gagasan Gorbachev, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Asia Pasifik, patut dikaji. Tetapi sebagai bagian yang hakiki dari hubungan Timur-Barat atau hubungan antar superpower, gagasan itu bisa dikaji terutama dalam konteks ini. Hanya saja pembahasan semacam itu berada di luar lingkup yang dimaksudkan dalam komentar ini.☐

Oleh: Aam Nlu

Dari Demak ke Kalimantan Selatan

Tiang Gurunya, Soko Tatal.
Gambar Bidawang di Pa-Imaman

Berdirinya Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila 17 Pebruari 82, atas prakarsa Pak Soeharto (pribadi), Presiden Republik Indonesia, selama kurang lebih tiga tahun, telah berhasil membangun 61 buah Mesjid, dengan dana sebesar Rp 5,1 milyar. Menarik bahwa mesjid-mesjid yang dibangun yayasan tersebut sudah standart modelnya. Meniru bentuk mesjid tertua di Jawa Tengah, Mesjid Demak.

Sampai akhir tahun 1986 ini jumlah mesjid model Demak tersebut akan mencapai 80 an buah, tersebar diseluruh pelosok tanah air Indonesia.

Keadaan seperti ini, hanya bisa terjadi dibumi Indonesia, dimana seluruh rakyat dan Negaranya, menganut falsafah dasar dan pandangan hidup Pancasila.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan yang akan dicapai oleh Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila, yang diketuai Soeharto (pribadi) dan dibantu oleh beberapa orang Pejabat Tinggi Negara yang kesemuanya secara Pribadi, dibawah ini kita kutipkan sebagian dari Mukaddimah Yayasan tersebut "Pendayagunaan dana dan daya umat Islam perlu diarahkan pada sasaran-sasaran yang tepat dalam rangka meningkatkan usaha-usaha umat Islam dibidang: Pendidikan, Dakwah, Penerbitan, Penelitian, dan Pengembangan pembangunan rumah ibadah, kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Yayasan yang bergerak dengan skala prioritas, untuk pembangunan Mesjid dan perlengkapannya, merupakan suatu usaha besar yang sangat luhur dan mulia, baik terhadap ummat manusia terlebih bagi Allah SWT.

Dana dari masyarakat

Dengan jumlah dana yang dimiliki, Yayasan bisa membangun empat buah Mesjid Setiap tahunnya, dengan dana-biaya ratarata sebesar Rp 75 juta rupiah perbuahnya, disamping dapat memberikan sumbangan puluhan juta rupiah, untuk penyelesaian atau rehabilitasi beberapa buah Mesjid lainnya.

Guna keperluan tersebut, Yayasan mendapat bantuan tetap setiap bulan dari seluruh Pegawai Negeri yang tergabung dalam KORPRI, yaitu sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional, mereka ikhlas menyumbangkan sebagian dari gajinya setiap bulan masing-masing; untuk golongan I sebesar Rp 50, golongan II Rp 100, golongan III sebesar Rp 500, dan golongan IV sebesar Rp 1.000.

Disamping itu, Yayasan juga menerima sumbangan yang berasal dari Zakat, Infaq, dan sumbangan dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat.

Bentuk yang sama: Demak

Pengurus Yayasan sudah menetapkan, semua bantuan diberikan dalam bentuk bangunan Mesjid, yang siap pakai.

Maksudnya, agar tidak ada Mesjid yang terbengkalai pembangunannya, disebabkan pemborongnya tidak bonafide, umpamanya. Pihak Yayasan tidak akan memberikan bantuan berupa uang tunai. Kepada Panitia di Desa terpencil manapun, Mesjid itu akan dibangun.

Masyarakat atau Panitia setempat cukup dengan menyediakan lokasi tanah untuk pembangunannya, yang ideal berukuran: 40 x 50 m, minimal berukuran 30 x 30 m.

Bangunan terdiri dari type: 15, 17 dan 19. Type pertama bangunannya berukuran 15 x 15 m. Type kedua berukuran: 17 x 17 m. Dan type ketiga berukuran: 19 x 19 m. Masing-masing type tersebut ditambah dengan teras berukuran 4 x 4 m. Sehingga bisa menampung jamaah sebanyak 400, 500 dan 600 orang.

Pak Harto, selaku Ketua Yayasan telah menetapkan bentuk (model) yang sama, seperti bentuk Mesjid tertua di Jawa Tengah, dalam hal ini Mesjid di Demak (Semarang).

Hal itu dimaksudkan untuk penghematan biaya pembangunannya. Karena bangunan Mesjid itu, mempergunakan kerangka besi baja, yang sudah dipersiapkan sama, hasil olahan PT Krakatau Steel. Produksi dalam negeri sendiri.

Atapnya terbuat dari sirap asbes. Demikian pula halnya dengan tegel untuk lantai dan lainnya.

Alasan lain, dengan melihat bangunan model itu, orang segera tahu, bahwa dibumi Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, yang sebagian besar rakyatnya beragama Islam, perkembangan sarana dan prasarana keagamaan berjalan pesat sekali.

Islam di Kalsel dari Demak

Khusus bagi masyarakat didaerah Kalimantan Selatan, bangunan yang menyerupai bentuk Mesjid di Demak itu, tidak menjadi permasalahan apa-apa. Sebab, sejak peralihan abad 15 ke 16 dahulu, masyarakat dari kedua daerah ini, Kalimantan Selatan dan Demak, sudah mempunyai hubungan yang erat sekali.

Kalau kita menyimak sejarah masuknya ajaran Agama Islam di Kalimantan Selatan didakwahkan oleh para Ulama yang datang dari Kerajaan Demak, pada pertengahan abad 15 ke 16 dahulu.

Syahdan, cerita itu bermula ketika Pangeran Samudera yang berkuasa dikawasan Banjar Kuala (Banjarmasin sekarang) diserang oleh Prajurit Kerajaan Daha, (Negara Kab. Hulu Sungai Selatan) dipimpin oleh Raden Temenggung, yang tidak lain adalah pamannya sendiri.

Untuk menebus kekalahannya itu, Pangeran Samudera telah meminta bantuan berupa sejumlah alat persenjataan dan prajurit serta armada lainnya dari kerajaan Demak, ketika itu dipimpin oleh Sultan Trenggono.

Permintaan disetujui dengan satu persyaratan, yaitu Pangeran Samudera dan seluruh rakyatnya harus menganut ajaran Agama Islam.

Persyaratan disetujui, Kerajaan Demak mengirimkan armada yang dilengkapi dengan sejumlah persenjataan serta para prajuritnya, dibawah pimpinan Khatib Daiyan, yang sekaligus mulai mengajarkan Agama Islam didaerah Kalimantan Selatan.

Pangeran Samudera yang semula meng-

Model Demak.

anut Agama Hindu, telah memeluk Agama Islam, dan namanyapun dirobah menjadi Pangeran Suriansyah.

Kisah serangan balasan Pangeran Suriansyah ke Kerajaan Daha (Negara, Kab HSS. sekarang) diriwayatkan: setelah banyak prajurit dari kedua belah pihak yang gugur, akhirnya sampai pada perang-tanding antara paman dan keponakan sendiri, Raden Temenggung dengan Pangeran Suriansyah, untuk saling membunuh dengan tombak-saktinya. Tapi..... dalam jarak perahu yang sudah mendekat, Pangeran Suriansyah segera melompat serta merangkul kaki Raden Temenggung, yang tidak lain dari pamannya sendiri.

Keduanya tidak tega untuk saling membunuh. Perang menjadi usai, berganti dengan persatuan yang kokoh dan kuat.

Tahlilan seusai shalat

Untuk menelusuri peristiwa terjalinnya persahabatan yang erat antara kedua daerah Kalimantan Selatan dan Demak, yang merupakan sumber masuknya ajaran Islam didaerah Kalimantan Selatan medio Juli 1970 lalu, Penulis bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Abdulmuthalib (alm), A.G. Ramli serta tiga orang kawan dari Berabai dan Kandangan, berkunjung ke Mesjid Demak yang bersejarah itu.

Selesai shalat Jum'at, sebagian besar Jamaah Mesjid tersebut tidak langsung pulang. Mereka hanya berpindah kesebuah ruangan besar disamping Mesjid tersebut, serta mengadakan Tahlilan, bagi arwah pimpinan kerajaan Demak, termasuk salah seorang Wali Songo (Wali Sembilan).

Sebagai tamu yang datang dari luar daerah, oleh pengasuh mesjid, kami dibawa masuk keruangan dalam, dimana terdapat sejumlah kuburan para Negarawan Kerajaan Demak, antara lain kubur Raden Fatah.

Ditempat ini kami kembali diajak untuk melakukan tahlilan, bagi ahli kubur yang berjumlah lima puluhan buah itu.

Jangan menyembah "Soko Tatal"

Menurut riwayatnya, Mesjid itu dibangun oleh masyarakat bersama salah seorang Wali Songo, yang cukup dikenal dalam sejarah.

Uniknya, salah satu dari empat buah *"Tiang-guru"*, hanya dibangun dari potongan kayu. Bukan tiang yang besar dan panjang seperti yang lainnya.

Potongan kayu atau "babangkihan kayu" dalam bahasa Banjar, yang dalam bahasa Jawa disebut "Soko Tatal".

Kami diajak naik kepuncak *Tiang Guru* tersebut. Dari sela-sela balok sempayannya yang berukuran sekitar 25 x 25 cm, penyandang atap itu, potongan kayu atau Soko Tatal tadi, dapat diambil dan diangkat, dengan tidak berpengaruh apa-apa bagi bangunan mesjid tersebut.

Hal ini membuktikan betapa besarnya kekuasaan Allah yang harus diyakini oleh seluruh ummatNya.

Guna menghindarkan para pengunjung Mesjid dari perbuatan syirik, sudah sejak lama Tiang-tiang Guru tersebut ditutup (dilapisi) dengan kayu jati.

Pada "Tiang guru" yang satu tadi, ditempili tulisan dengan huruf-huruf besar: "Jangan menyembah soko tatal ini".

Mesjid tersebut beratap sirap, terbuat dari kayu (papan) berukuran 60 x 15 cm dengan tebal 1,5 cm.

Baik sempayan, kasau, reng dan lainnya, senantiasa tampak seperti baru. Ini terjadi, karena banyak binatang kecil seperti lalat beterbangan dan mengisap debu-debu yang melekat pada kayu-kayu tersebut.

Gambar Bidawang di-paimaman

Konon, ada riwayat yang mengatakan: bahwa dahulunya tanah di tempat Imam (pa-imaman, bahasa Banjar) itu berbau harum semerbak. Pada dinding beton, muka tempat Imam tersebut, terlukis gambar seekor "Bidawang". (Bulus, bah. Jawa) Menurut pengasuh mesjid, gambar itu melambangkan tahun didirikannya Mesjid tersebut, yaitu tahun Saka (Jawa) 1 4 0 1. Angka 1 pertama, dilukiskan dengan gambar kepalanya. Angka 4 dilambangkan dengan kakinya yang empat buah itu. Angka 0 dilambangkan dengan bundaran badannya. Sementara angka 1 terakhir, dilukiskan dengan ekornya. Seluruhnya, menjadi tahun 1 4 0 1 Saka.

Keunikan lambang tahun berdirinya Mesjid tersebut, menarik perhatian para turis asing maupun domestik.

Kursi Kerajan sebagai Mimbar.

Ditengah Mesjid tersebut terdapat sebuah kamar, berukuran 1,5 x 1,5 m, tinggi 2 m tempat menyimpan baju jubah yang akan dipergunakan pak Khatib berhotbah.

Mimbarnya sendiri, adalah sebuah kursi kerajaan yang biasa dipergunakan oleh raja ketika bertahta. Menurut keterangan kursi itu peninggalan Sultan Raden Fatah. Sekelilingnya diberi tirai kain sutera tipis, warna kekuning-kuningan.

Sesuai dengan keadaan jamaah yang shalat di Mesjid tersebut, pak Khatib berhotbah dalam bahasa Jawa dan Arab, hanya sedikit atau jarang sekali dalam bahasa Indonesia.

Dr.K.H. Idham Chalid yang sering berhotbah dimesjid inipun, mempergunakan bahasa Jawa yang fasih.

Mengingat betapa luhur dan mulianya tujuan yang akan dicapai oleh Yayasan Amalbhati Muslim Pancasila, dalam mengembangkan syiar Agama Islam, kita turut menghimbau seluruh kaum muslimin dan muslimat, untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dijalan Allah, antara lain turut berpartisipasi dengan menunjang usaha Yayasan sesuai dengan kemampuan masing-masing. ☐

Oleh: Maria Sugiharto

Bangsa Indian, Dimanakah Mereka ini?

Cristopher Columbus, yakin bahwa dunia ini bulat sifatnya. Maka ketika berlayar menuju ke daerah Hindia (maksudnya Asia), pelayaran yang seharusnya menuju ke Timur, dia layari menuju ke Barat. Ternyata tanah daratan yang dia temui, dimana diharapkan oleh rombongannya mendapatkan rempah-rempah, bukanlah India seperti yang dimaksudkan. Benua Amerika yang dia temukan. Dan karena menurut pendapatnya tanah luas itu adalah India, maka penduduk asli yang merupakan penghuni tanah tersebut dinamakannya *Indian*. Demikianlah nama Indian menjadi terkenal didalam sejarah manusia. Masih adakah bangsa Indian ini, dan berapa banyak, apakah mereka itu merupakan suatu kelompok bangsa tersendiri?

Karl May dengan Old Shatterhand nya

Kita mengenal bangsa Indian dari cerita buku serial karangan *Karl May*. Dia, yang notabene belum pernah mengunjungi perkampungan Indian, dapat menceritakan banyak hal tentang kehidupan orang-orang Indian dengan sangat menarik, melalui tokoh Old Shatterhand dan sahabatnya Winnetou yang adalah kepala suku Apachee, — suku yang sangat menonjol didalam masyarakat Indian tersebut. Dan buku tersebut menjadi idola banyak anak (bahkan anak-anak di Indonesia) yang gemar buku. Nama seperti Winnetou, pahlawan Indian, menjadi idola anak-anak belasan tahun, yang menyukai membaca buku karangan Karl May tersebut. Benarkah cerita karangan Karl May terjadi sesungguhnya seperti digambarkan didalam bukunya yang serial itu? Karl May telah menggambarkan kehidupan masyarakat Indian dengan tepat, kendati tanpa hadir disekitar mereka, serta menciptakan suatu image sebuah nasionalisme, kendati didalam skala kecil, ialah nasionalisme bangsa Indian, yang tidak mau dijajah oleh bangsa lain.

Kini, ada kira-kira 250.000 orang Indian yang digolongkan sebagai mereka yang mau berdamai, serta kira-kira 200.000 Indian yang tidak setuju berdamai dengan bangsa yang tinggal satu benua (Amerika Utara dan Amerika Serikat). Dan mereka ini tergolong orang-orang Indian yang masih memegang teguh wasiat dari nenek moyangnya. Populasinya kira-kira sama dengan jumlah mereka ketika bangsa Eropa pertama kali datang menjajah benua dimana mereka itu tinggal. Baik yang berdamai maupun yang non-damai, mereka hidup ditempat daerah khusus seperti ditunjuk oleh Pemerintah. Tetapi telah makin banyak yang meninggalkan tempat reservasi dan bergabung dengan masyarakat disekitar dan bahkan lebih jauh dari tempat-tempat penampungan mereka, serta hidup bermasyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat moderen dimana mereka tinggal. Banyak yang telah menjalani pendidikan formal yang tinggi seperti menjadi ahli hukum, dokter, guru, perawat, politikus, ahli geologi, ahli bangunan serta petani. Banyak yang berhasil, tetapi banyak juga yang masih berada dalam strata ekonomi yang rendah. Sesungguhnya mereka sudah tidak bisa lagi mengandalkan kehidupan seperti kehidupan pada masa-masa nenek moyang mereka, tetapi mereka berusaha mempertahankan kehidupan nenek moyang yang mereka sangat cintai dan hormati. Kini, mereka ingin tumbuh menjadi suatu golongan etnis yang beridentitas milik mereka sendiri, serta menempati posisi dalam masyarakat yang multi kultural, ialah di Kanada.

Daerah-daerah Kultur Indian

Bila berada di Kanada, akan kita jumpai banyak kata-kata yang berasal dari kata-kata Indian, diabadikan didalam nama serta identitas dari negeri Kanada, yang merupakan negara Persemakmuran Inggeris. Kanada sendiri, merupakan nama Indian. Toronto, Ottawa, nama kota-kota besar di Kanada, adalah asli kata Indian. Karena pembagian administratif Kanada adalah provinsi, maka salah satu provinsi bernama *Satskhachewan,* asli kata Indian. Quebec (baca: kobek), nama kota besar di Kanada, Missisipi (nama sungai besar di AS), Missouri, dan masih banyak nama-nama tempat di Kanada dan AS, adalah asli kata-kata Indian. Di Kanada, Amerika Utara, lebih banyak terdapat bangsa Indian daripada di AS (secara administratif), karena memang daerah reservasi diadakan di Amerika Utara, serta seperti tujuan hidup banyak orang Indian ingin berintegrasi dengan masyarakat dengan multi kultural, di Kanada.

Ada beberapa daerah kultur di Kanada, yang merupakan daerah kultur Indian. *Daerah Kultur Pasifik Utara.* Daerah ini terbentang dari Kalifornia terus ke Utara sampai Alaska. Daerah yang berfyord serta banyak hujan dengan udara yang lembut, dengan pohon-pohonan yang tinggi serta binatang buruan seperti kijang, beruang, kambing hutan, serigala, yang kesemuanya merupakan binatang-binatang penyandang bulu. Sepanjang pantai terdapat binatang buruan seperti ikan salmon, ikan cod dan halibut. Karena keadaan alam yang demikian, orang-orang Indian di daerah ini berperi kehidupan dari berburu dan menangkap ikan. Mereka, kendati secara etnologis tergolong sebagai bangsa yang primitif, dari sejak dahulu kala telah memiliki *tehnologi* yang cukup tinggi untuk mendukung kehidupan mereka. Tehnologi barang-barang dari kayu, merupakan keahlian mereka. Dari hutan yang bertumbuhan kayu cedar, merupakan bahan utama bagi peralatan dengan tehnologi yang maju, seperti kano, peti, papan-papan untuk rumah mereka, tonggak totem (biasanya totem didirikan didepan rumahnya, satu setengah tingginya dari rumah mereka, bisa mencapai sampai 18 m tinggi), juga barang-barang dari kayu lainnya yang diukir indah. Barang kerajinan dari kayu cedar, dibuat oleh mereka dengan gaya seni yang artistik, seperti pisau, pahatan-pahatan, baji, serta barang-barang kerajinan lainnya seperti tikar dan payung. Mereka bahkan telah bisa menenun (menganyam) selimut yang terdiri dari kulit kambing hutan. Mereka telah mengenal perdagangan (perniagaan) yang dilaksanakan sepanjang sungai dengan mengangkut serta berbarteran dengan suku lain dalam hal barang-barang tersebut, termasuk minyak ikan.

Seperti telah diceritakan oleh Karl May diatas, maka sistim masyarakat yang dibina disana adalah sistim Clan serta pemimpinnya dinamakan chief (kepala suku). Kendati didalam masyarakat yang primitif, mereka mengenal semacam ***kasta*** ialah Bangsawan, Rakyat serta Budak. Bangsawan yang selalu menjadi chief, adalah pemimpin politik serta pimpinan didalam upacara-upacara.

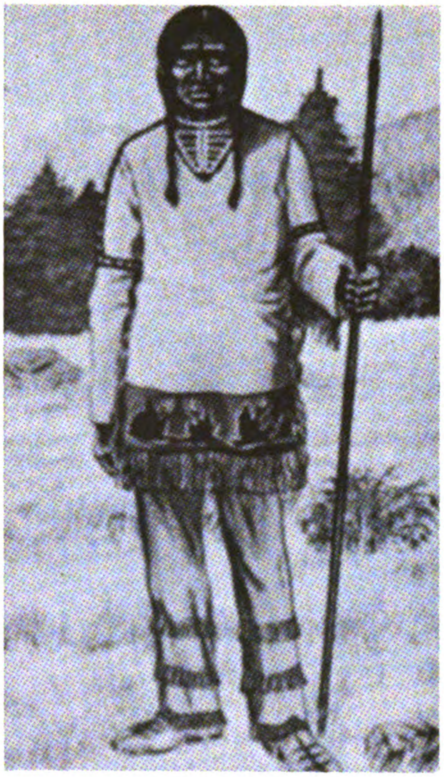

Profil seorang pria Indian dari suku Algonkian.

Daerah Kultur Subartic

Daerahnya meliputi pantai Labrador sepanjang Janada Alaska sampai ke hilir sungai Yukon. Karena di daerah ini musim winter sangat lama, dan musim panas menempati waktu yang sedikit, maka orang-orang Indian dari daerah ini, yang seperti didaerah lainnya memiliki gaya hidup berburu dan mencari ikan. Tetapi ada gaya tersendiri mengingat keadaan alamnya, ialah mengadakan penyimpanan bahan makanan untuk masa winter yang panjang tiba. Binatang buruan seperti karibu (semacam kerbau liar), menjangan raksasa, diburu untuk dijadikan bahan makanan. Dengan tambahan perburuan seperti unggas dan ikan dilaut, adalah selalu diusahakan dengan tujuan membuat keamanan bagi diri mereka bila musim paceklik (winter) tiba. Dalam suku didaerah kultur ini tidak ada pembagian bangsawan dan rakyat, tetapi modelnya adalah *Sesepuh*. Mereka yang dituakan dan dianggap berpengalaman dan bijak, menjadi tumpuan permintaan nasihat, baik didalam strategi mempertahankan hidup, maupun dalam pengobatan bagi anggauta suku, karena biasanya para sesepuh sudah mengerti tata cara pengobatan tradisional dengan rempah-rempah tradisional. Filsafat keagamaan dalam suku ini berkembang baik, meskipun tidak banyak didalam bentuk rite (upacara-upacara), karena waktu lebih banyak dikonsentrasikan untuk survival.

Daerah Kultur Daratan

Daerah ini meliputi daerah propinsi Alberta (Kanada) dan Saskatchewan, keselatan sampai Teluk Mexico, dan ke barat sampai kaki pegunungan Rocky (Rocky Mountains) dan sebelah Timur daerah sungai Missisippi. Di daerah daratan yang diliputi pohon-pohon yang tinggi dan rendah, terdapat buruan seperti antilope (semacam rusa), elk (rusa raksasa) serta kijang. Di sini adalah daerah *coyote* atau anjing prairie (padang rumput). Ikan tidak begitu penting bagi suku yang satu ini. *Bison* (banteng) merupakan yang terpenting bagi kehidupan mereka. Dari Bison dapat dimanfaatkan banyak hal. Ya dagingnya, ya kulitnya ya

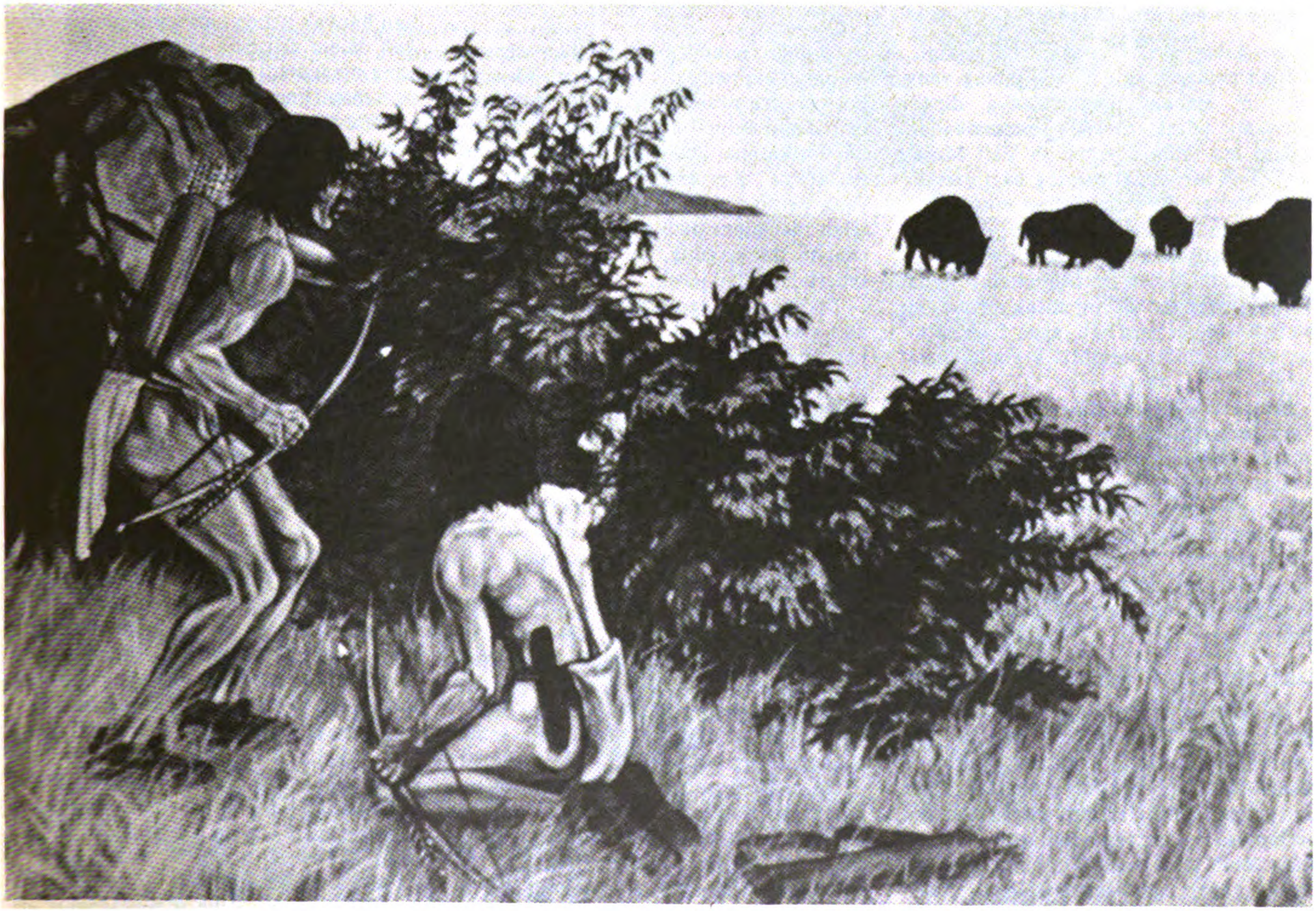

Perburuan.

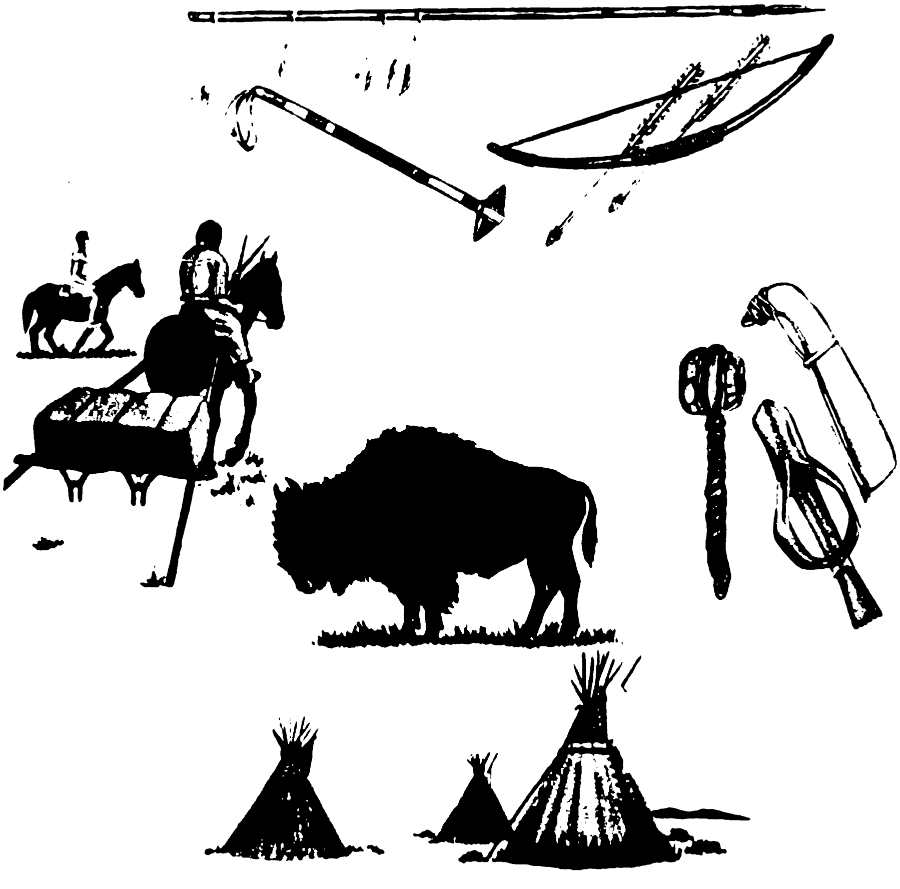

Peralatan orang Indian dan binatang buruan.

tulang-tulangnya. Tameng, baju kulit, adalah pemanfaatan dari binatang yang satu ini. Bahkan tengkoraknya, dipergunakan untuk upacara persembahan dalam tari yang dinamakan Tari Matahari. Tari ini sangat penting bagi masyarakat Indian daratan. Setiap musim panas, tarian ini diselenggarakan, dan bagi mereka yang merasa kurang beruntung, harus mengadakan persembahan kepada Matahari dengan tari ini untuk memohon berkah kepada para roh, agar dia terhindar dari kesulitan-kesulitan serta malapetaka.

Berperang, adalah sangat penting bagi suku Indian didaerah ini. Melalui peperangan, seseorang meraih suatu prestise (kehormatan). Bukan membunuh musuh yang merupakan kehormatan, tetapi dapat mencuri salah satu kudanya dianggap suatu prestasi. Membuat musuh ngacir melarikan diri, adalah juga suatu prestise, sehingga harga dia naik di depan kelompoknya.

Daerah Kultur Woodland Timur

Daerahnya terbentang meliputi dari Barat Danau Besar ketimur sampai Atlantik. Daerah yang bergunung-gunung, disana-sini danau dihubungkan oleh teluk dan sungai. Disini, disamping perburuan-perburuan binatang-binatang berbulu yang lebih kecil seperti kijang, beaver, bajing, rusa, juga terdapat unggas untuk buruan. Pohon-pohon yang hidup disana disamping pohon-pohonan hutan seperti oak, juga pohon buah-buahan seperti maple. (Gambar daun maple adalah simbul bendera nasional Kanada). Suku Indian disini hidup dari berbagai cara kehidupan karena keadaan tanahnya, dan pertanian merupakan perikehidupan yang penting didalam suku ini. Mereka telah menanam padi-padian, kacang-kacangan dan jagung, serta buah-buahan seperti labu dan jeruk.

Teknologi yang mereka miliki, adalah alat-alat perkayuan, pisau serta alat-alat pertanian. Dari kulit bison, mereka telah mengenal merajut untuk membuat pakaian, tas, sabuk, bahkan kerudung. Bagi mereka, sistim *nomaden* (pindah-pindah tempat) terjadi kira-kira limabelas tahun sekali, bila tanah sudah tidak menjadi subur lagi. Di daerah ini, ada dua suku yang menonjol, yalah *Iroquoian* dan *Algonkian*. Pada suku Iroquoian, garis keluarga adalah matrilineal. Para wanita sudah ber"politik". Mereka adalah penentu seorang chief yang laki-laki, dan bila chief ini tidak memuaskan kelompoknya, para wanita berhak menggantinya. Sedangkan pada suku Algonkian, sistim dan struktur administratif sama dengan Iroquoian, hanya garis keluarga di sini adalah patrilineal. Perang adalah komponen yang sangat penting didalam kehidupan mereka. Mereka suka memerangi tetangganya, dan penyergapan-penyergapan dilakukan sampai jauh, sejauh danau Superior. Baik suku Algonkians maupun suku Iroquoian mahir dalam peperangan. Yang terkenal didalam perang yang tercatat sejarah adalah penaklukan bangsa Perancis sebagai penjajah, dibawah pimpinan chiefnya bernama Pontiac, langsung mengusir pasukan Inggeris yang datang. Hampir secara total mereka itu menang perang. Taktik dan strateginya, ternyata menjadi catatan perang bagi orang-orang Barat yang kemudian mengembangkannya dalam strategi perang dengan tehnologi canggih.

Sumbangan orang-orang Indian bagi orang-orang Barat

Banyak sumbangan yang diberikan orang Indian kepada orang-orang Eropa pendatang. Cara-cara menanam jagung, kacang-kacangan, jeruk, ketela, gambas, kentang serta tomat, juga kina dan tembakau, adalah sumbangan suku Indian kepada orang-orang Barat.

Disamping cara tanam menanam, orang-orang India juga memberikan sumbangan dalam hal pembuatan kano, sepatu salju, sandal kayu (moccacin) serta kereta salju (toboggan). Bahkan perbendaharaan kata-kata Indian, dimasukkan didalam perbendaharaan kata-kata Inggeris, seperti istilah moccacin, toboggan, moose (rusa besar) dan lain-lainnya. Orang-orang Indian banyak membantu para eksplorer Eropa dalam eksplorasi orang-orang Barat di daerah Amerika dan Kanada, sehingga dapat diperkenalkan banyak penemuan untuk dunia. *Dukun* dalam arti baik ialah sebagai orang yang mengobati orang sakit, banyak pengetahuan ini didapat dari orang-orang Indian. Mereka itu adalah ahli-ahli dalam cara-cara mempergunakan obat-obatan tradisional, serta didalam hal ilmu berhubungan dengan roh (paranormal).

Pada suatu hari, di Toronto, Kanada, saya mencari barang-barang souvenir di toko-toko Indian, yang khusus memiliki koleksi barang-barang Indian. Toko itu, dijaga oleh orang Barat, memamerkan barang-barang baik asli maupun tidak, dari masyarakat Indian. Tetapi *santai* nya orang Indian, seperti santainya orang-orang dari negara berkembang. Beberapa toko bahkan tutup meskipun bukan hari libur resmi. Mereka buka seenaknya saja, bila mereka mau. Bila tidak ingin buka, ya tutup saja, seakan-akan mereka enggan mengurusi bisnis. Laku syukur, tidak laku tidak apa-apa. Santai. Juga, saya mewawancarai orang Kanada dan yang menyatakan pendapatnya mengenai orang-orang Indian secara blak-blakan. Bahwa yang paling terasa tidak sesuai dengan orang-orang Barat ialah budaya India yang tidak pernah disiplin tentang waktu. "Janjian tentang waktu, jangan harapkan orang Indian tepat. Bahkan terlambat jam-jaman pun mereka tidak merasa bersalah", demikian komentar orang Kanada — yang saya wawancarai, kendati banyak pula kebaikan Indian yang dikemukakan kepada saya. □

BINTARO JAYA

LANGKAH AWAL MENUJU KOTA SATELIT BARU

BINTARO JAYA ...
Dibangun dalam rencana Kota Satelit

Tengoklah Kebayoran Baru 20 tahun yang lampau, Ia merupakan kota satelit dari Jakarta.

Dengan luas 1000 Ha, Bintaro Jaya akan menjadi tempat permukiman paling luas dan paling lengkap dikawasan Ibu Kota Jakarta Raya.
Ia akan menghubungkan Jakarta dengan pusat-pusat industri baru seperti: Serpong dan Tangerang dengan jalan raya dan kereta rel listrik (KRL) yang melintas melalui Bintaro Jaya.

Fasilitas yang akan dibangun pun paling lengkap. Bukan sekedar sebuah Supermarket, Sekolah Dasar atau PUSKESMAS.

SAKSIKAN PEKAN RAYA & PROMOSI BESAR
BINTARO JAYA
16 NOPEMBER – 21 DESEMBER 1986
KET. LENGKAP, HUBUNGI: PT. PARAGON PRIMA CITRA
JL. MUTIARA 5 BENDUNGAN HILIR TELP. 586015

Tetapi seperti Kebayoran Baru sekarang. Bintaro Jaya akan membangun kompleks pusat perbelanjaan, sekolah-sekolah, rumah sakit, hotel-hotel, tempat rekreasi, olahraga dan fasilitas lainnya seperti layaknya sebuah kota besar.

Lebih dari itu, Bintaro Jaya dibangun dalam lingkup rencana tata kota modern, yang memperhatikan segala aspek sosial, budaya dan lingkungan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini.

Bintaro Jaya ... Sebuah lingkungan segar dan nyaman. Tempat permukiman paling ideal, tidak hanya bagi Anda sekarang tapi juga bagi keturunan Anda di masa depan.

BINTARO JAYA ... Langkah awal menuju Kota Satelit Baru

Daftar harga rumah :

TIPE	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	HARGA
Pipit II	90 (6x15) m2	81,5 m2	Rp. 28.510.000,-
Parkit	120 (8x15) m2	87,5 m2	Rp. 34.860.000,-
Punai	135 (9x15) m2	108 m2	Rp. 40.400.000,-
Camar	180 (9x20) m2	109 m2	Rp. 48.360.000,-
Perkutut	180 (9x20) m2	120 m2	Rp. 50.310.000,-
Pelikan I	250 (10x25) m2	122 m2	Rp. 58.875.000,-
Pelikan II	250 (10x25) m2	155 m2	Rp. 65.530.000,-

Dapat diangsur melalui KPR PAPAN SEJAHTERA selama 5-15 tahun
dan melalui KPR BANK DUTA selama 2-7 tahun

hidup nyaman di alam segar
BINTARO JAYA

Developer Anggota REI No. 1

P.T. PEMBANGUNAN JAYA

GEDUNG JAYA Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin 12, Telp. 323203, 323554
KANTOR TAMAN BINTARO JAYA, Gedung A, Lantai 2, Jl. Bintaro Raya
Jakarta 12330, Telp. 736898, 737674 ext. 244, 245, 246

Isi 3 Kondom
DuaLima
Kondom Keluarga Indonesia
Teruji secara elektronis dan super tipis

"Keluarga saya bahagia"

"Saya langsung ber KB dengan Kondom DUALIMA begitu anak pertama lahir."

"Perawatan anak lebih terjamin. Saya pun lebih giat bekerja. Demi masa depan lebih cerah, gunakan Kondom DuaLima."

Kondom DuaLima diciptakan para ahli untuk membantu suami-isteri dalam mengatur jarak kehamilan. Kondom DuaLima mengandung pelumas, super tipis namun anti bocor dan tahan lama. Ukurannya dibuat pas untuk orang Indonesia.

Kondom DuaLima mengutamakan kenikmatan bersama, kemesraan, dan rasa aman dalam hubungan suami-isteri. Karena itu, untuk mengatur jarak kehamilan utamakan Kondom DuaLima.

Gunakan isyarat ✌ dan ✋ untuk memudahkan Anda membeli Kondom DuaLima

DuaLima
Kondom Keluarga Indonesia
Isi 3 Kondom
DuaLima
Kondom Keluarga Indonesia
Teruji secara elektronis dan super tipis
DuaLima
Isi 12 Kondom

Teruji secara elektronis dan super tipis

Gunakan!

DuaLima
Kondom Keluarga Indonesia

Selain Kondom terdapat cara kontrasepsi lain seperti IUD, Pil, Suntik dan Susuk; Kunjungi Dokter, Bidan, Klinik KB Anda. Sponsor DuaLima: BKKBN Pemasaran: PT Mecosin Ind.

PERPUSTAKAAN
GOLKAR